



# PROSIDING

Kongres

Pendidikan Pengajaran  
dan Kebudayaan IV

Tahun 2018

## “Refleksi 20 Tahun Reformasi Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan”

Panitia Pelaksana  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi DIY

ISBN 978-979-562-051-8



9 789795 620518

Senin, 14 Mei 2018

Ruang Sidang Umum Rektorat  
Universitas Negeri Yogyakarta

# ***PROSIDING***

***Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan IV Tahun 2018***

***TEMA:***

***REFLEKSI 20 TAHUN REFORMASI  
PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN***

***Yogyakarta, 14 Mei 2018***

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Negeri Yogyakarta

# **PROSIDING**

***Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan IV Tahun 2018***

## **REFLEKSI 20 TAHUN REFORMASI**

## **PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN**

### **Panitia Pengarah:**

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.  
Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.  
Dr. Suyanta, M.Si.  
Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes., AIFO  
Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.  
Dr. Heri Santoso

### **Panitia Pelaksana:**

Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag. (Ketua)  
Agus Taufik, M.Sc. (Wakil Ketua)  
Iqbal Arpanuddin, M.Pd. (Sekretaris)

### **Reviewer Makalah Penamping:**

Dr. Supardi, M.Pd.  
Dr. Heri Santoso

### **Tim Penyunting:**

Samsuri (Universitas Negeri Yogyakarta)  
Heri Santoso (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)  
Agus Taufik (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

### **Desain Grafis**

Raden Samidi  
Fahdian Rahmandani

### **Cover**

Fahdian Rahmandani

### **Penerbit:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Negeri Yogyakarta

### **Disclaimer**

Tanggung jawab isi naskah makalah terletak kepada tiap-tiap penulis.

**ISBN. 978-979-562-053-8**

## KATA PENGANTAR

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berlandaskan pada kepribadian bangsa dan ditujukan untuk peri kehidupan bangsa yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di dunia. Bangsa Indonesia sudah sejak lama sudah membangun nilai-nilai dan prinsip-prinsip pendidikan yang berdasarkan pada akar budaya bangsa. Sebagaimana definisi Pendidikan yang dirumuskan oleh para pendiri dan perintis pendidikan nasional bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Pengajaran adalah pengetahuan yang bertujuan mendidik pikiran, sebagai bagian dari pendidikan untuk memperoleh derajat penghidupan yang lebih baik.

Kebudayaan adalah buah budi manusia dan oleh karenanya lahir kemampuan batin bersifat baik. Kebudayaan selalu mengandung sifat keluhuran dan kehalusan atau keindahan, etis dan estetis yang ada pada kehidupan manusia. Menurut para Pendiri Bangsa, pendidikan dan pengajaran adalah upaya kebudayaan yaitu upaya untuk membawa manusia dari sifat kondrat alam ke sifat budaya, dari *nature* ke *culture*, jadi pendidikan adalah upaya manusia untuk mencapai keluhuran hidup.

Dua puluh tahun reformasi telah bergulir, masalah pendidikan belum sepenuhnya diatasi. Berbagai permasalahan diantaranya adalah perlunya penataan kembali filosofi, peraturan perundang-undangan dan politik pendidikan dan kebudayaan nasional, evaluasi kelembagaan dan manajemen pendidikan dan kebudayaan, evaluasi kurikulum dan inovasi pendidikan dan kebudayaan, evaluasi pendidik dan sumber daya, penataan lingkungan strategis pendidikan, pembudayaan dan pelembagaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan pada generasi muda.

Kongres ini bermaksud untuk merefleksikan hasil dari dua puluh tahun reformasi di bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan dan memberikan rekomendasi ide-ide dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan pada para pemangku kebijakan.

Tema besar dari kongres ini adalah "Refleksi 20 Tahun Reformasi Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan". Refleksi 20 Tahun Reformasi dalam aspek: Filosofi, Peraturan Perundang-undangan dan Politik Pendidikan dan Kebudayaan Nasional; Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan; Kurikulum dan Inovasi Pendidikan dan Kebudayaan; Pendidik dan Sumber Daya; Lingkungan Strategis Pendidikan; dan Pembudayaan dan Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Generasi Muda.

Tujuan kongres adalah untuk: Menghimpun refleksi kritis perjalanan 20 tahun reformasi bidang pendidikan pengajaran dan kebudayaan nasional; Merekonstruksi gagasan dan pengalaman pelaksanaan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan untuk perwujudan negara dan bangsa Indonesia yang bermartabat dan berkeadaban; Merekomendasikan hasil-hasil kongres kepada pembuat dan pemangku kebijakan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Kegiatan kongres ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti sebanyak 300 peserta yang terdiri dari calon pendidik, pendidik PAUD- Perguruan Tinggi, akademisi, praktisi pendidikan, mahasiswa, seniman, lembaga swadaya masyarakat, dan birokrat.

Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkenan hadir memberikan sambutan pembukaan Kongres. Demikian pula kepada segenap narasumber Kongres dan pemakalah sesi paralel . Terimakasih tak terhingga kami haturkan kepada segenap Pimpinan Perguruan Tinggi mitra penyelenggara Kongres, sehingga dapat terlaksana kongres dengan lancar. Penghargaan tak terkira kepada Bapak Rektor UNY dan segenap panitia Kongres, baik dari dalam UNY maupun perguruan tinggi mitra. Semoga kerja keras pelaksanaan Kongres berbuah manis untuk dunia pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Indonesia.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iii
SAMBUTAN KETUA PELAKSANA KONGRES.....	vi
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.....	viii
SAMBUT GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA .....	x

### MAKALAH UTAMA

Pendidik Dan Sumber Daya, Serta Pembudayaan Dan Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda - Prof. Dr. Buchory M.S, M.Pd. ....	1
Filosofi Pendidikan Indonesia Untuk Membangun Bangsa Dan Karakternya: Indonesia - Prof. Dr. Wuryadi .....	13
Pendidikan Nasional Pasca Era Reformasi - Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. ....	17
Refleksi, Tantangan dan Prospek Kebudayaan yang Selaras dengan Nilai-Nilai Pancasila - Prof. Dr. dr. Sutaryo, Sp. A (K) .....	22

### MAKALAH SESI PARAREL

Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Permainan Tradisional sebagai Upaya Pembentukan Karakter Anak - Ali Imron .....	26
Konsep dan Implementasi Pengajaran Humanistik Pada Akademi Keperawatan - E. Kristanti .....	31
Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pengajaran Budi Pekerti dan Nilai-Nilai Pancasila Sejak Usia Dini - Ir. Lestanta Budiman, M.Hum .....	42
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara dalam Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan - Eka Sari .....	46
Kelas Multikultural SMK Bakti Karya Parigi Solusi Merawat dan Melestarikan Kebhinekaan pada Generasi Muda - Irpan Ilmi .....	51
Strategi Meningkatkan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Karya Parigi - Yana Suryana, Ai Adah Rahmani, dan Rosalina .....	59
Strategi Pendidik dalam Menghadapi Globalisasi Melalui Penguatan Budi Pekerti – Patmisari, S.Pd. & Fitra Endi Fernanda, S.Pd.....	65
Meninjau Politik Pendidikan Indonesia Pasca Reformasi - Hastangka.....	72
Penguatan Karakter <i>Digital Citizenship</i> Melalui Program Kurikuler - Kenlies Era Rosalina Marsudi, S.Pd.....	78
Urgensi Nilai <i>Maja Labo Dahu</i> dalam Pendidikan Karakter: Studi Kasus di MTs Negeri Kota Bima - Mulyadin .....	86
Penguatan Pendidikan Karakter sebagai Upaya Pembudayaan dan Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda - Saputra Tri Kurniawan, M.Pd .....	94

Menjadi Pancasila: Membangun Indonesia sebagai Strategi dalam Pembudayaan dan Pelembagaan Pancasila Pada Generasi Millenial - Galih Nugraha Paripurna .....	100
Menumbuhkan Jiwa <i>Entrepreneurship</i> Generasi Muda: Peran Penting Pendidik dalam Inovasi Pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan - Alif Lukmanul Hakim & Indriyani Ma'rifah.....	106
Paradigma Baru Pendidikan Pancasila: Ikhtiar Pembudayaan dan Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda untuk Mereduksi Radikalisme Agama di Indonesia - Ahmad Asroni & Fariza Halidatsani Azhar .....	112
Pendidikan Multikultural dalam Pemahaman Demokrasi untuk Menumbuhkan Sikap Toleransi - Lena Selvia, S.Pd .....	118
Politik Pendidikan Kewargaan Multikultural Indonesia - Anatoli Kasparov Putu Abdullah, S.Pd. & Arif Wahyudi, S. H. ....	124
Nilai-Nilai Budaya Lokal Rasulan dari Gunung Kidul sebagai Pendidikan Karakter Anak – Wellyana .....	131
Peran Guru dalam Implementasi Pendidikan Sepanjang Hayat di Abad 21 - R. Samidi & Verbena Ayuningsih Purbasari .....	137
AKSIPOB (Antikorupsi <i>Pop Up Book</i> ) sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kearifan Lokal di SD Negeri 1 Keputran Yogyakarta - Achmad Sidiq Asad, Afrian Dwi Yunitasari, Elly Nur Rahmawati .....	143
Keteladanan Guru Dan Peranannya Dalam Penguatan Karakter Bangsa - Ayu Fitriana & Moh. Mul Akbar Eta Parera .....	155
Peningkatan Keterampilan Sosial Siswa Kelas VIII-C dengan Menerapkan Penyuluhan Keliling Berbasis Proyek pada Pembelajaran IPS - Gede Ardiantara, S.Pd. Gr. ....	159
Profesionalisme Guru dan Tantangan Global sebagai Akselerasi Pendidikan Abad 21 - Yeni Agus Tri Puryanti .....	167
Revitalisasi Peran Karang Taruna Sebagai Wahana Pendidikan Kewarganegaraan - Fahdian Rahmandani & Anggoro Eko P .....	172
Kurikulum dan Pembelajaran Kebahagiaan: Menumbuhkan Kebiasaan Anak Bahagia dengan Mendongeng - Dwi Rahmah Hidayati .....	180
Warisan Pendidikan dan Kebudayaan yang Terlupakan: Metode Sariswara KaryaKi Hadjar Dewantara - Ria Putri Palupijati .....	188
<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KONGRES IVPENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN .....</b>	<b>194</b>

## **SAMBUTAN KETUA PELAKSANA KONGRES**

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Buchory M.S, M.Pd., Prof. Dr. Wuryadi, MS., dan Prof. Dr. dr. Sutaryo, sp. A  
(K) selaku nara sumber, serta segenap tamu undangan dan peserta seminar yang  
berbahagia

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

**Salam Sejahtera untuk kita semua.**

Puji syukur atas kehadiran Tuhan YME karena dengan rahmat serta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat dan penuh semangat mengikuti kegiatan Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ke IV pada hari ini.

Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan IV Tahun 2018 merupakan kegiatan Kongres keempat yang telah berlangsung dua tahunan sejak 2012. Tema pada Kongres keempat ini adalah “Refleksi 20 Tahun Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan” di Indonesia. Tema ini diambil karena pada Abad 21 saat ini cukup banyak tantangan dengan lahirnya fenomena global seperti revolusi industri 4.0. yang kini menjadi penanda kemajuan peradaban zaman. Perkembangan industri 4.0 merupakan proyek mengutamakan komputerisasi yang akan menghasilkan pabrik cerdas berstruktur modular dan menciptakan salinan dunia fisik secara virtual sehingga segala keputusan akan lahir secara otonom atau tidak terpusat lagi. Dalam mensiasati perkembangan industri 4.0 ini maka penting bagi kita sebagai bangsa yang memiliki identitas untuk mempersiapkan warga negara yang siap menyongsong industri 4.0 sesuai dengan kepribadian bangsa, atau jika tidak maka kita akan tergilas oleh industri 4.0 itu sendiri. Oleh karena itu, Kongres ini mendiskusikan posisi pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dalam menjawab berbagai tantangan dinamika Abad 21 dalam membekali warga negara Indonesia agar tetap teguh pada kepribadian yang berlandaskan Pancasila dalam setiap tindakannya.

Kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para nara sumber: Prof. Dr. Buchory M.S, M.Pd. dari Universitas PGRI Yogyakarta, Prof. Dr. Wuryadi, MS. dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. dari Universitas Negeri Yogyakarta dan Prof. Dr. dr. Sutaryo, sp. A (K) dari Universitas Gajah Mada yang telah menyisihkan waktunya untuk berpartisipasi menyampaikan pemikirannya tentang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan pada Kongres ke IV ini.

Kegiatan Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan IV Tahun 2018 ini diselenggarakan berkat kerjasama oleh Universitas Negeri Yogyakarta dengan berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kopertis Wilayah V Yogyakarta. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta, kepada Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. selaku Rektor yang bersedia menjadi penyelenggara Kongres ini dan menyediakan

tempat sehingga berlangsungnya Kongres, dan kepada segenap Pimpinan Perguruan Tinggi yang telah membantu terselenggaranya Kongres.

Tak lupa saya ucapkan kepada Bapak Ibu panitia yang turut serta bahu membahu dalam mensukseskan Kongres ini. Kami juga mohon maaf, jika dalam penyelenggaraan Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan IV Tahun 2018 ini terdapat kekurangan dalam layanan, atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, kami mengharapkan bahwa hasil Kongres ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan Pendidikan di Indonesia.

Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yogyakarta, 14 Mei 2018  
Ketua Pelaksana

Dr. Samsuri, M.Ag.



# **SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

**Salam Sejahtera semoga senantiasa tercurah kepada kita sekalian.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah s.w.t, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga kita semua dapat menyelenggarakan Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan IV pada hari ini.

Kami menyambut baik inisiasi penyelenggaraan Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan IV Tahun 2018, yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta. Ikhtiar Kongres yang telah dimulai sejak Tahun 2012 tiap dua tahunan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi penting dalam aspek pendidikan, pengajaran dan kebudayaan itu sendiri.

Pada Kongres keempat kali ini, tema yang diusung ialah “Refleksi 20 Tahun Reformasi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan” di Indonesia. Tema ini memiliki arti strategis. Selain mengkritisi ulang perjalanan gerakan reformasi yang telah berlangsung dua dekade beserta dampak dan implementasinya di segala bidang, termasuk pendidikan dan kebudayaan, juga menyiapkan langkah strategis pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat di dalam negeri maupun di antara bangsa-bangsa di dunia.

Persaingan internasional di Abad 21 selain merupakan peluang dan tantangan bagi segenap elemen Bangsa Indonesia, juga dapat menjadi ancaman terhadap keberadaan Negera Kesatuan Republik Indonesia. Dari sinilah, posisi pendidikan, pengajaran dan kebudayaan perlu diperkuat untuk menghadapi dinamika Abad 21 sekarang ini. Terlebih lagi dengan fenomena global seiring dengan revolusi industri 4.0 yang kini menjadi penanda kemajuan peradaban umat manusia, menuntut revitalisasi filosofi dan kerangka kebijakan yang utuh dari hulu ke hilir. Demikian pula pendidikan dan pengajaran dalam arti luas hendaknya dapat memperkuat kebudayaan nasional berdasarkan Pancasila.

Yogyakarta selama ini dikenal sebagai Kota Pendidikan dan Kebudayaan yang penting di Indonesia. Bersamaan dengan itu, semangat “dari Yogyakarta untuk Indonesia” dapat digelorakan melalui Kongres keempat ini sehingga dapat merekomendasikan aspek-aspek penting yang diusung berdasarkan tema kongres.

Kami mengucapkan terimakasih kepada segenap pimpinan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bahu membahu bekerja sama menyokong terselenggaranya Kongres. Semangat gotong-royong antar perguruan tinggi semacam ini semoga menjadi inspirasi penting bagi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, baik di Yogyakarta maupun tingkat nasional.

Ucapan terimakasih tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili berkenan hadir untuk memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka kegiatan Kongres.

Selamat berkongres.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Yogyakarta, 14 Mei 2018  
Rektor  
Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.

## SAMBUTAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BANGSA Indonesia terkejut, marah dan mengutuk keras terjadinya pembunuhan biadab oleh jaringan terorisme ISIS. Dalam konteks Kongres ini, lalu terbesit pertanyaan: Apakah ini pertanda kesalahan dalam sistem pendidikan kita? Setidaknya apakah ada salah penerapan dalam pola pembelajaran karakter dan keagamaan kita?

Pertanyaan serupa pernah diajukan oleh Senator Kennedy, “*What’s wrong with American classroom?*”, ketika tahun 1957 Amerika Serikat tertinggal dari Uni Soviet dalam teknologi ruang angkasa. Pertanyaan itu melahirkan Reformasi Pendidikan, terutama pendidikan guru, science, dan matematika. Hasilnya kemudian Amerika Serikat mengungguli Uni Soviet.

Sepanjang pengetahuan saya, belum pernah ada Reformasi Pendidikan yang sistemik-fundamental, apalagi jika disanding-kaitkan dengan Pengajaran dan Kebudayaan. Adanya barulah kenyataan terjadinya penggantian kurikulum yang sifatnya tambal-sulam. Jika dihitung sejak Orde Baru berturut-turut dari Kurikulum 1974, Kurikulum 1984 atau Cara Belajar Siswa Aktif, KBK 2004, KTSP 2006, dan Kurikulum 2013 hingga sekarang Kurikulum 2017 sebagai Revisi Kurikulum 13.

Reformasi mestinya sebuah proses perubahan yang berorientasi kebutuhan masa depan. Tidak sekadar perubahan, tetapi adalah “*doing more, better and different*”. Pasca Reformasi memang ada perubahan dalam sistem pendidikan nasional yang mengikuti perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menuju desentralisasi atau otonomi pendidikan. Dalam otonomi pendidikan terdapat manajemen berbasis sekolah (MBS) dan pendidikan berbasis masyarakat. Tetapi, otonomi itu pun dibatasi oleh sentralisasi kebijakan yang akhirnya mengurangi kemerdekaan berkreasi.

Sehebat apa pun isi kurikulum, faktor guru tetap paling menentukan keberhasilan pendidikan. Tetapi dengan kewajiban guru untuk membuat tugas administratif yang cukup banyak, ditambah wajib jam ajar yang berat, peran guru sebagai pendidik menjadi kurang Optimal. Pendidikan adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan sepanjang hayat. Implikasinya, ada pergeseran paradigma dari pengajaran menjadi pembelajaran: interaksi subjek didik dengan guru dan sumber belajar di lingkungan belajar.

Agar optimal, proses pembelajaran harus direncanakan, dilaksanakan secara fleksibel, bervariasi, interaktif, inspiratif, menarik, dan menantang subjek didik agar aktif berkreasi. Bertolak dari sinilah, kita bertanya: Apakah pendidikan kita sudah mencapai taraf ini?

Pembelajaran kini mensyaratkan interaksi untuk negosiasi makna.

Proses belajar tidak lagi menempatkan guru sebagai penceramah-penyampai materi pelajaran. Sementara subjek didik duduk-pasif mendengarkan, atau mencatat, dan menerima materi bagai kemasan bungkusan.

Dengan demikian, memerlukan refleksi kritis atas Pembukaan UUD 1945: mencerdaskan kehidupan bangsa, apakah sudah menjadi *light star* pemandu transformasi budaya bangsa dari tradisional-kolonial menuju budaya maju-modern dan demokratis. Dalam bahasa Bung Kamo disebut revolusi pancamuka, “*telescoped revolution*”, berupa perubahan dalam segenap dimensi bangsa dan negara, termasuk sektor pendidikan. Pasal 31 ayat (3) UUD

1945 Amandemen ke-4 mengamanatkan, bahwa kewajiban Pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu, yang penjabarannya tertuang dalam UU Sisdiknas.

Para Hadirin, Peserta Kongres yang saya hormati,

TAHUN 1922, Ki Hadjar Dewantara sudah mengaitkan pendidikan dengan kebudayaan sebagai buah budi manusia melalui olah-cipta, olah-rasa dan olah karya, yakni: penalaran, penghayatan, dan pengamalan atau knowledge, attitude, and skill. Padahal, Taksonomi Bloom baru ditemukan tahun 1956, dan diperbaharui muridnya, Krathwohl tahun 2001.

Dalam tiga ranah itulah, terkandung totalitas potensi subjek didik yang harus dikembangkan secara terintegrasi untuk mewujudkan misi mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tujuan akhir pendidikan.

Misi ini hanya bisa tercapai jika ada keselarasan yang didukung praktik di tiga level: Menteri sebagai penginspirasi-pengambil kebijakan, Gubernur melalui Dinas Pendidikan sebagai pengarah-penyelaras, dan Guru sebagai pendidik-pembudaya, untuk membangkitkan Subjek Didik sebagai pelaku transformasi-nilai, yang hakikatnya adalah rangkaian Reformasi Pendidikan.

Tetapi, praktik pendidikan menunjukkan hal yang tidak tertuju pada proses transformasi itu. Kita sibuk berdebat tentang betapa pentingnya memerdekakan guru dan subyek didik, tetapi tiada kebijakan yang mengarah kesana. Budaya *top-down* telah membunuh kreativitas sekolah dan guru. Padahal, kalau guru menganut budaya serba ditentukan dari atas, proses pembelajaran akan terkendala dalam suasana kaku yang mematikan kreasi.

Implikasinya, subjek didik juga membudayakan suasana serba diatur, sehingga prakarsa dan rasa tanggung jawabnya tidak berkembang, serta jiwa-jiwa pelopor pun mati suri. Budaya kritis dan mandiri tidak tumbuh, sementara budaya bergantung bertambah subur yang memiskinkan inovasi yang mestinya harus dibangkit- kembangkan atas dasar kuriositas subjek didik.

Padahal, secara filsafati pendidikan hakikatnya adalah proses pemberadaban dengan dua tujuan dasar: membentuk manusia dengan mentalitas human, yang memiliki kecerdasan nalar. Dalam upaya itu, jawabannya mengandaikan dua proses: enkulturasi dan akulturasi.

Para Hadirin, Peserta Kongres yang saya hormati,

Dari uraian tadi kiranya jelas, bahwa saat ini kita sedang dilanda anomali nilai-nilai Pancasila di ranah pendidikan telah terjadi senjang yang tajam antara nilai-nilai ideal dan aktual. Karena itu, perlu aktualisasi nilai-nilainya dengan strategi kembar: aktualisasi objektif pada institusi, dan aktualisasi subjektif bagi individu. Untuk itu, perlu dikuatkan dengan PP, selain Revisi UU Sisdiknas. Dan untuk itu pula, diperlukan Reformasi Pendidikan atas dasar keragaman potensi dan sumber daya lokal sebagai keniscayaan Negara Kepulauan.

Ada dua karakteristik dasar, sistemis dan terprogram. Reformasi sistemik berkaitan dengan kewenangan, distribusi dan alokasi sumberdaya yang mengontrol sistem pendidikan. Hal ini terjadi di luar sekolah dan berada pada political will negara sebagai the great educator, baik di eksekutif maupun legislatif yang menerbitkan UU. Mengingat karakteristiknya, maka sulit diwujudkan karena menyangkut politik pendidikan.

Ada pun reformasi pendidikan yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program institusi pendidikan, berupa inovasi yang membawa pembaharuan proses pendidikan, agar terjadi perbaikan kontras dari sebelumnya. Sesungguhnya UNESCO sejak 1998 telah menetapkan empat pilar utama pendidikan yang mendasari Masyarakat Belajar Abad-21, yakni: Belajar Mengetahui, Belajar Melakukan, Belajar Menjadi Sesuatu, dan Belajar Hidup Bersama. Jujur kita akui, bahwa hal tersebut barulah terhenti pada jargon belaka, tapi miskin aksi.

Kembali pada pertanyaan awal: Adakah mismatch dalam pendidikan agama dan karakter, mengingat kita hidup dalam keanekaragaman yang paling kaya di dunia, sekaligus dilematis sifatnya, maka ajakan “Belajar Hidup Bersama”, menjadi keharusan. Di Abad Teknologi, subyek didik tidak hanya agar memiliki IQ tinggi, tetapi juga penguasaan EQ, agar mereka bisa belajar hidup dengan liyan, selain hidup dengan teknologi.

Bertolak dari uraian di depan, paling tidak ada dua argumen dasar untuk menjawabnya. Pertama, belum adanya “national assessment” untuk memetakan kondisi dan permasalahan pendidikan atas dasar ukuran kemajuan yang akuntabel. Kedua, program-program pendidikan belum diderivasi dari UU Sisdiknas yang mengamanatkan pendidikan berazaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Maka, Reformasi Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus ditunjukan guna meluruskan kembali dasar, fungsi dan tujuan UU Sisdiknas tersebut.

Dengan visi seperti itulah, saya mengapresiasi Kongres ini, dengan harapan, agar rekomendasi Kongres ini digunakan oleh UNY sebagai LPK, untuk perbaikan kurikulum bagi calon pendidik dan tenaga kependidikan, sebelum mereka terjun di dunia pendidikan secara nyata.

Seraya mengucapkan Bismillahirrahmannirahin, maka dengan ini Kongres Refleksi 20 Tahun Reformasi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Ke-4 ini, saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat, bangsa dan negara.

**Sekian, terima kasih.  
Wassalamualaikum wr. wb.**

Yogyakarta, 14 Mei 2018  
Gubernur  
Daerah Istimewa Yogyakarta,

Sri Sultan Hamengku Buwono X

# **MAKALAH UTAMA**

## ***PROSIDING***

***Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan IV Tahun 2018***

***REFLEKSI 20 TAHUN REFORMASI***

***PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN***

# **Pendidik Dan Sumber Daya, Serta Pembudayaan Dan Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda**

Oleh:

**Prof. Dr. Buchory M.S, M.Pd.**

(Dewan Pendidikan DIY Universitas PGRI Yogyakarta)

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan kegiatan menyiapkan masa depan suatu bangsa yang bukan hanya harus bertahan agar tetap eksis, tetapi dalam berbagai dimensi kehidupan pada tataran nasional maupun internasional dapat mengambil peran secara bermartabat. Pada hakikatnya pendidikan merupakan bantuan pendidik terhadap peserta didik dalam bentuk bimbingan, arahan, pembelajaran, pemodelan, latihan, melalui penerapan berbagai strategi pembelajaran yang mendidik. Pendidikan berlangsung dalam ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta psikologis. Pendidikan bukan hanya merupakan pilar terpenting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi pembentukan kepribadian, peningkatan kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat yang berkeadilan.

Hal ini seperti dikemukakan oleh bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Presiden Soekarno pernah juga menyatakan bahwa jika kalian ingin memetik hasil selama tiga bulan, maka tanamlah jagung. Jika kalian ingin memetik buah selama tiga tahun, maka tanamlah kelapa, sedangkan jika kalian ingin memetik hasil selama sepuluh tahun, maka didiklah anak-anakmu. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono keunggulan manusia terletak pada kehebatan berpikir dan kehebatan karakter. Sasaran pendidikan bukan hanya kepintaran, kecerdasan, ilmu pengetahuan, tetapi juga Moral, Budi Pekerti, watak, nilai, perilaku, mental dan kepribadian yang tangguh, yang unggul, dan yang mulia.

Sejak Bangsa Indonesia memasuki Era Reformasi, telah dilakukan berbagai langkah reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali, yaitu (1) Amandemen UUD 1945 I hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999; (2) Amandemen UUD 1945 II hasil Sidang Umum MPR Tahun 2000; (3) Amandemen UUD 1945 III hasil Sidang Umum MPR Tahun 2001; (4) Amandemen UUD 1945 IV hasil Sidang Umum MPR Tahun 2002. Reformasi dalam bidang pendidikan juga dilakukan, seperti diterbitkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diikuti Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan adanya reformasi tersebut, secara konseptual dan empirik memerlukan penyesuaian tingkat kebijakan yang akan dijadikan rujukan dalam menyusun berbagai program, termasuk pendidikan guru.

Guru merupakan jabatan profesional yang memberikan layanan ahli dan menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik dan pedagogik maupun secara profesional dapat diterima oleh pihak di mana guru bertugas, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lain terhadap siapa guru bertanggung jawab. Guru sebagai penyandang jabatan profesional harus disiapkan melalui program pendidikan yang memadai dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru. Oleh sebab itu diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan berbagai kompetensi, yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, maupun strategi menerapkannya secara profesional di sekolah.

## Tinjauan Historis Pendidikan Guru di Indonesia

Perjalanan program pendidikan guru di Indonesia telah mengalami sejarah yang panjang. Tuntutan kualifikasi terus meningkat, sehingga berdampak pada lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru. Misalnya, pada akhir masa penjajahan Belanda, untuk menjadi guru Sekolah Desa 3 tahun adalah lulusan CVO (*Cursus voor Volk Onderwijs*, 2 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru SD Nomor Dua (5 tahun) adalah lulusan Normal School (4 tahun sesudah SD), untuk menjadi guru HIS (Sekolah Dasar Belanda untuk orang Indonesia dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda lamanya 7 tahun) adalah lulusan HIK (6 tahun setelah HIS); dan lulusan *Hoofdt Acte* untuk menjadi guru MULO (SMP).

Setelah kemerdekaan, pemerintah mendirikan Sekolah Guru B (4 tahun sesudah SD) untuk mendidik calon guru SD, selanjutnya mulai tahun 1957 persyaratan tersebut meningkat menjadi minimal lulusan SGA (3 tahun setelah SMP). Pada pertengahan tahun 1960an SGB dilikuidasi dan SGA berubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang mendidik calon guru SD. Bagi guru yang belum memenuhi syarat diwajibkan mengikuti pendidikan yang sederajat, yakni Kursus Pendidikan Guru (KPG). Tahun 1989 persyaratan untuk menjadi guru SD ditingkatkan lagi menjadi minimal lulusan program Diploma II (2 tahun setelah SMA/SPG), sedangkan SPG dilikuidasi dan perangkat sumber dayanya diintegrasikan ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK (IKIP/FKIP Universitas/STKIP). Setelah pendidikan guru di tingkat sekolah lanjutan atas dilikuidasi, dari 273 buah (terdiri dari 213 SPG, 54 SGO, dan 6 SGPLB) yang dialihkan menjadi program D-II di LPTK adalah 64 (35 SPG, 29 SGO), dan 6 SGPLB langsung menjadi S1. Selebihnya dialihfungsikan menjadi 197 SMA dan 6 buah Balai Pendidikan Guru (BPG).

Sebelum tahun 1954 SGA dimaksudkan untuk mendidik calon guru SLP dan kursus B1 (1 tahun sesudah SMA) dan B2 (2 tahun sesudah SMA) untuk mendidik calon guru SLTA. Gunamemenuhi kebutuhan guru SMA juga diangkat lulusan Kandidat 1 (C 1) dan Kandidat 2 (C2) universitas dalam bidang studi yang relevan.

Penyelenggaraan pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi mulai berlangsung sejak tahun 1954 dengan didirikannya Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung, Malang, Batu Sangkar, dan Tondano untuk mendidik calon guru SLTA, walaupun pendidikan guru MIPA telah dilaksanakan tahun 1947 di *Fakulteit van Exacte Wetenschap* (sekarang FMIPA ITB) di Bandung. Pada tahun 1957 PTPG bergabung ke universitas menjadi FKIP. Selanjutnya pada tahun 1963 FKIP tersebut berdiri sendiri menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan kursus B1 dan B2 dilebur masuk IKIP. Jumlah IKIP kemudian bertambah menjadi 10 buah, di luar itu di setiap propinsi yang tidak ada IKIP berkembang FKIP di dalam lingkungan universitas negeri. IKIP/FKIP yang semula dimaksudkan mendidik guru SLTA kemudian juga mendidik guru SLTP dengan menyelenggarakan *crash-program* PGSLP dengan beasiswa pada tahun 1970an di samping juga menyelenggarakan PGSLA. Pada tahun 1989 SPG dilebur ke dalam IKIP/FKIP.

Dalam perkembangan selanjutnya LPTK juga berfungsi mendidik calon guru TK dan SD melalui program PGTK dan PGSD. Selanjutnya PGTK berkembang menjadi PG PAUD yang memiliki konsentrasi studi dengan kompetensi lulusan sebagai pendidik pada Kelompok Bermain atau menjadi guru pada Taman Kanak-kanak. Pada tahun 1999 dan 2000 sepuluh IKIP tersebut berubah bentuk menjadi universitas dengan tetap mengemban tugas sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK). Jumlah tersebut terus bertambah, terutama dengan berkembangnya jumlah LPTK swasta yang jumlahnya lebih dari 300 buah.

## Kesenjangan Supply dan Demand

LPTK yang berbentuk Universitas, Institut, Fakultas, dan Sekolah Tinggi, hanya berperan dalam hal pendidikan calon guru, dan tidak berperan dalam penempatan dan pembinaan guru di lapangan. Sebaliknya masyarakat, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Yayasan sangat



berperan dalam penempatan dan pembinaan dan sangat kurang berperan dalam ikut serta memberi corak dan relevansi kurikulum. Selama ini kelihatan kurang ada kerjasama antara LPTK sebagai produsen guru dengan pemakai lulusan pendidikan guru. LPTK bukan merupakan lembaga pendidikan yang terencana dengan baik seperti pada lembaga pendidikan kedinasan, melainkan merupakan lembaga pendidikan umum yang lulusannya mencari pekerjaan sendiri. Ada kecenderungan LPTK menerima calon mahasiswa sebanyak-banyaknya, kurang memperhatikan kualitas input dan keseimbangan dengan kapasitas layanan sehingga dikhawatirkan kualitas lulusan tidak terjaga. Tidak ada mekanisme untuk mengendalikan “*supply and demand*”.

Paradigma *supply and demand* yang tidak didukung dengan pendataan dan pemetaan yang akurat, otonomi yang tidak memberikan kemudahan untuk terjadinya mobilitas layanan pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain, telah menyebabkan kesulitan dalam merencanakan keluaran suatu lembaga pendidikan guru secara tepat jumlah, tepat keahlian, dan tepat mutu.

Untuk mewujudkan keseimbangan *supply and demand*, dan dalam upaya menyiapkan calon guru yang berkualitas dan profesional, diterbitkan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru menegaskan bahwa Pendidikan Guru dilaksanakan dalam bentuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG. Program PPG di selenggarakan oleh LPTK yang ditetapkan oleh Menteri. Standar Pendidikan Guru berfungsi sebagai acuan bagi program pendidikan Guru untuk menghasilkan Guru profesional melalui:

- a. perumusan sistem penerimaan mahasiswa baru;
- b. capaian pembelajaran, isi, proses, dan penilaian hasil pembelajaran;
- c. pengembangan penelitian ilmu pendidikan dan keguruan;
- d. pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pengembangan fasilitas dan sumber belajar;
- f. pelaksanaan PLP dan PPL;
- g. pengembangan profesionalisme Dosen; dan
- h. penyelenggaraan Sekolah Laboratorium, Sekolah Mitra, dan/atau satuan pendidikan lainnya.

Pendidikan Guru bersifat nasional dan bertujuan untuk menghasilkan Guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan IPTEKS. Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilakukan melalui sistem PMB, meliputi: (a) seleksi kemampuan akademik; dan (b) seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan.

Model pembelajaran Program Sarjana Pendidikan diantaranya berupa praktikum, yaitu Pembelajaran Mikro untuk melatih keterampilan mengajar (minimal 2 sks) dan Praktik Lapangan Persekolahan (PLP) minimal 4 sks, berupa proses observasi dan pemagangan pembelajaran di sekolah. Sedangkan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), yaitu kegiatan mempraktikkan kemampuan dalam pembelajaran baru dilaksanakan pada Program PPG dengan bobot 16 SKS. Penilaian Program PPG meliputi: (a). penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran; (b) b. proses dan produk PPL; (c) c. uji kompetensi; dan (d) penilaian kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.

Program PPG diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh panitia nasional. Uji kompetensi dilakukan melalui uji tulis dan uji kinerja sesuai dengan standar nasional kompetensi guru. Peserta yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional. Sertifikat pendidik diperoleh melalui Program PPG yang diselenggarakan oleh LPTK bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.

### Generasi Indonesia Emas 2045

Pada saat peringatan hari pendidikan nasional (Hardiknas) tanggal 2 Mei 2012, Mendikbud Muhammad Nuh telah mencanangkan Generasi Emas 2045, sebagai proyeksi generasi yang akan menjadi pelaku utama bagi 100 tahun Kemerdekaan Indonesia. 2045 sebagai berikut.

1. Generasi utama yang mampu berprestasi menjulang tinggi dibanding generasi sebelumnya dan bangsa lainnya untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang besar, maju, jaya dan bermartabat.
2. Generasi berkarakter “generasi emas” haruslah memiliki kompetensi, karakter, gaya hidup, nilai religius dan *fighting spirit* unggulan dalam kehidupan. Juga memiliki sikap, pola pikir, konsep dan berperadaban unggul dengan wawasan yang cerdas, luas, mendalam, produktif, kreatif, inovatif, dan futuristik.
3. Memiliki kompetensi, karakter, gaya hidup dan *fighting spirit* unggulan dalam kehidupan. Sehingga menumbuhkan tanggung-jawab dan kontribusi nyata dalam mewujudkan lingkungan dan kehidupan yang sehat, damai, bermartabat dan berkelanjutan seutuhnya.
4. Menurut Badan Pusat Statistik 2011, jumlah anak usia 0-9 tahun mencapai 45,93 juta, sedangkan anak usia 10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Mereka inilah anak-anak kader Generasi Emas 2045, yang harus mendapat pendidikan unggulan secara sungguh-sungguh. Jangan sampai berbalik menjadi bencana demografi membebani Indonesia.

### Pancasila dan Empat Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

Dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila, seringkali muncul pertanyaan dari mahasiswa mengenai kaitan antara Pancasila dengan Empat Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945. Kalau kita kaji secara cermat, pada hakekatnya Empat Pokok Pikiran adalah sila-sila Pancasila. Pertanyaan yang muncul adalah: mengapa ketika berwujud menjadi Pancasila jumlahnya ada lima sila dan urutannya seperti dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, sedangkan ketika berwujud menjadi Pokok Pikiran jumlahnya ada empat dan urutannya seperti dalam Penjelasan UUD 1945 yang asli sebelum diamandemen?

Empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 sebenarnya adalah Pancasila, yaitu Pancasila yang telah tertransformasi menjadi empat asas yang khusus terproyeksi dalam kehidupan bernegara. Transformasi adalah perubahan bentuk atau tampilan luar dari suatu objek tanpa merubah nilai-nilainya sehingga dapat dipakai untuk penggunaan baru. Dalam hal transformasi ideologi Pancasila ke empat Pokok Pikiran, perubahan tampilan luar berwujud perbedaan urutan Pancasila karena adanya kebutuhan mutlak yang melekat pada urutan Pokok Pikiran.

### Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sama dengan sila 3 Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia).
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (sama dengan sila ke 5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).
3. Negara yang berkedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. (sama dengan sila ke empat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan)
4. Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradab (sama dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

Bila dikaji urutan 4 Pokok Pikiran dengan seksama ia menunjukkan dua hal yang esensial yaitu:

1. Aspek Eksistensi Negara.

a. Cita Negara

Ibarat orang akan membangun rumah maka yang pertama ditentukan adalah model rumah/arsitektur yang diidamkan (rumah Joglo arsitek Jawa, rumah gadang arsitek, rumah vila arsitek Barat) masing-masing model memiliki karakteristik tersendiri yang bersumber pada budaya dari kelompok sosial yang bersangkutan. Negara adalah identik dengan rumah besar dari suatu bangsa dan tiap bangsa memiliki budaya khas dan budaya khas itulah yang memelihara suatu bangsa tetap bersatu. Dalam disiplin ilmu negara, arsitektur negara dikenal dengan sebutan cita negara (*Staats idee*)

Dengan analogi pembangunan rumah, maka pembangunan negara yang juga didahului dengan penetapan model/arsitektur yang disebut cita negara dari negara Indonesia yang akan didirikannya. Cita negara secara logika merupakan aspek pertama dari eksistensi negara yang dirumuskan pada pokok Pikiran Pertama.

b. Tujuan Negara

Setelah cita negara persatuan ditetapkan pada Pokok Pikiran I maka tujuan dari didirikannya negara Indonesia merupakan hal yang harus ditetapkan oleh para pendiri negara. Secara logika tujuan negara baru bisa ditentukan setelah diketahui bentuk, struktur, sifat negara yang akan didirikan yang kesemuanya itu tercakup didalam cita negara. Logika ini mengungkapkan pengetahuan bahwa tujuan negara merupakan aspek kedua dari eksistensi negara yang oleh para pendiri negara dikemas pada Pokok Pikiran ke dua.

2. Sistem Negara

Setelah tujuan negara ditetapkan, niscaya diperlukan suatu sistem sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Ada sebuah dalil tentang hubungan antara tujuan dan sarana, yaitu : tujuan menentukan sarana. Dalil ini mengandung makna :

a. Tiap tujuan membutuhkan sarana untuk mencapainya

b. Untuk mewujudkan tujuan negara diperlukan sarana yang berbentuk sistem (sistem Negara)

c. tujuan yang baik hanya dapat dicapai dengan sarana yang baik.

Dari makna tersebut menunjukkan bahwa sistem negara adalah aspek ketiga dari eksistensi negara yang oleh para pendiri negara dituangkan pada Pokok Pikiran ke tiga.

3. Moral negara

Dalam negara demokrasi, penyelenggara negara berasal dari rakyat yang melalui pemilu mewakili rakyat secara sah untuk menjalankan kekuasaan negara. Manusia adalah makhluk berpikir yang mampu mengetahui apa yang benar dan salah, ia juga makhluk yang dapat menjabarkan apa yang baik dan yang jelek. Dalam pengertian dwi-fitrah manusia ini, tiap sistem yang dikelola oleh manusia perlu dilindungi oleh kaidah moral. Tanpa moral, sistem tidak terjamin keberhasilannya dalam mencapai tujuan.

Bila sistem itu terjadi dalam negara, maka kaidah moral itu harus sesuai dengan cita negaranya, tujuan yang hendak dicapai, sifat serta metode kerja (sarana) yang diberlakukan dalam negara. Tanpa kaidah moral yang sesuai, negara tidak terjamin keberhasilannya dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian moral negara merupakan aspek keempat dari eksistensi negara yang oleh pendiri negara dituangkan pada pokok pikiran ke empat.

4. Aspek Sistematis Eksistensi Negara

Bahwa urutan dari 4 pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 mengikuti sistematis dari eksistensi negara. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan urutan dari lima sila dalam transformasinya sebagai 4 pokok pikiran. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa perubahan urutan sila Pancasila dalam 4 pokok pikiran bersifat intern, terjadi karena adanya tuntutan dari sistematis eksistensi negara tetapi tidak merubah urutan sila dari idiologi Pancasila.

**Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila**

Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan materi sosialisasi 4 pilar, yaitu (1) Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan (4) Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. Di samping itu MPR juga telah merumuskan intisari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai berikut :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
  - a. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan menolak paham anti Tuhan (atheisme)
  - b. Pada prinsipnya bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan
  - c. Pada prinsipnya, bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  - d. Pada prinsipnya, bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
  - a. Pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa (*nation state*) yang merdeka, bersatu dan berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia
  - b. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya pergaulan bangsa-bangsa di dunia
  - c. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban
3. Sila Persatuan Indonesia
  - a. Pada prinsipnya menegaskan bahwa kita mendirikan suatu Negara Kebangsaan Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan negara untuk satu kelompok, maupun untuk satu golongan
  - b. Pada prinsipnya menegaskan bahwa Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

- c. Pada prinsipnya menegaskan bahwa Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia
- d. Pada prinsipnya menegaskan kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit dan berlebihan (*chauvinisme*), melainkan kebangsaan yang menghormati eksistensi bangsa-bangsa lain
4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  - a. Pada prinsipnya menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
  - b. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mufakat dalam pengambilan setiap keputusan
  - c. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia meyakini jalan musyawarah untuk mufakat dapat menjaga keselamatan dan keberlangsungan bangsa dan negara
  - d. Pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal sistem diktator mayoritas dan tirani minoritas
  - e. Pada prinsipnya bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan senantiasa dipimpin oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan dalam semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  - a. Pada prinsipnya negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin
  - b. Pada prinsipnya dalam negara Indonesia setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat dan berkeadilan bagi kemanusiaan
  - c. Pada prinsipnya negara Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermartabat dan berkeadilan.

### **Pembudayaan dan Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Generasi Muda.**

1. Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Generasi Muda dapat dilakukan dengan metode berikut.
  - a. Syariat  
Metode ini cocok diberikan kepada peserta didik di tingkat Taman Kanak-kanak dan yang sederajat. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila diberikan dengan membiasakan berperilaku dan berbuat baik maupun melatih tanggung jawab pribadi menurut etika, norma, peraturan umum dalam masyarakat,
  - b. Hakikat  
Metode ini cocok diberikan kepada peserta didik di Sekolah Dasar dan yang sederajat. Pada periode ini peserta didik tetap dibiasakan untuk berperilaku dan berbuat baik menurut ketentuan umum, akan tetapi pada waktu yang bersamaan mulai diberi pengertian makna sederhana pada setiap pembelajaran dan kehidupan.
  - c. Tarikat  
Metode ini cocok diberikan kepada peserta didik di Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat. Pada periode ini peserta didik dibiasakan berperilaku dan berbuat baik menurut ketentuan umum, diberikan pengertian pentingnya hal

tersebut dilakukan dan bersamaan dengan itu diberikan kegiatan yang cocok dengan situasi dan kondisi sekolah.

d. Makrifat

Cocok diberikan kepada peserta didik di Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan yang sederajat. Dalam periode ini peserta didik disentuh pemahaman dan kesadarannya sehingga perilaku dan berbuat baik itu bukan semata-mata kebiasaan, akan tetapi memang telah memiliki kesadaran penuh untuk melakukannya dengan sepenuh hati.

2. Wahana Pembudayaan dan Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Generasi Muda.

a. Pembentukan Keluarga Pancasila

Upaya membudayakan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai perekat keberagaman bangsa Indonesia, perlu dimulai sejak terjadi interaksi dalam skop terkecil kehidupan anak, yaitu keluarga. Secara sosiologis keluarga adalah institusi sosial yang terkecil masyarakat. Oleh karena itu perlu dibangun keluarga Pancasila. Keluarga Pancasila mengandung makna bahwa di dalam keluarga itulah ditanamkan dan disemaikan benih-benih implementasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan Kebangsaan kepada anggotanya.

Pada Keluarga Pancasila, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan baik. Sebagai contoh pembudayaan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dalam keluarga, Sila pertama ini dipersepsi sebagai identitas kebangsaan yang memberikan apresiasi terhadap toleransi dan perbedaan agama. Untuk itu sila pertama ini mengidentifikasi keluarga yang terdiri atas beragam agama. Artinya, bahwa perbedaan agama tidak saja diterima, melainkan mereka juga dapat hidup rukun dalam keberagaman agama tersebut. Dalam keluarga Pancasila, tidak saja tumbuh kembang masalah pengakuan terhadap perbedaan, melainkan juga sekaligus bagaimana hidup rukun dalam keberagaman dan perbedaan tersebut.

Apabila kita telah mampu mewujudkan Keluarga Pancasila sebagaimana contoh di atas, maka sebenarnya kita telah berhasil menerapkan nilai toleransi, anti radikalisme, anti terorisme dalam keluarga. Dalam Keluarga Pancasila dilakukan pembudayaan sikap hidup yang tertib, saling menghormati, saling menasehati, sopan santun, tenggang rasa, dan saling menyayangi. Sikap dan perilaku hidup yang damai dalam Keluarga Pancasila ini merupakan pembelajaran yang sangat besar maknanya untuk menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah bersama yang aman, nyaman, dan damai karena dihuni oleh anggota keluarga besar yang senantiasa diilhami oleh nilai-nilai Pancasila dan nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mem-Pancasila-kan Pendidikan Nasional

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sisdiknas, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apabila dicermati rumusan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut, ternyata fungsi pendidikan nasional tiada lain adalah mengantarkan generasi muda agar berkembang kemampuannya serta terbentuk watak dan peradaban bangsa

yang bermartabat. Dengan pendidikan nasional, semua peserta didik termasuk mahasiswa harus dapat berkembang kemampuannya, wataknya serta peradaban bangsanya yang bermartabat. Anak bangsa yang berwatak dan cerdas, dalam mengarungi bahtera kehidupannya akan senantiasa bersikap arif dan bijaksana, senantiasa mengedepankan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan segala sesuatu serta mampu mengendalikan emosinya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan dalam kehidupannya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadinya.

Dengan demikian pada hakekatnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional tiada lain adalah untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia Pancasila yang indikatornya seperti tertuang di dalam rumusan fungsi dan tujuan tersebut. Oleh karena itu semua jenis mata pelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan harus memberikan kontribusi pada pencapaian fungsi dan tujuan nasional, yaitu agar peserta didik menjadi manusia Pancasila. Sebagai konsekuensinya, seluruh pendidik di semua jenis dan jenjang pendidikan apapun mata pelajaran yang diampunya, harus senantiasa memberikan kontribusi terhadap pencapaian manusia Pancasila bagi peserta didiknya. Bahkan kegiatan ekstra kurikuler juga harus berkontribusi dalam upaya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan nilai kebangsaan Indonesia.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana menyiapkan seluruh pendidik dari mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum di semua jenis dan jenjang pendidikan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan nilai kebangsaan ke dalam mata pelajaran yang diampunya? Untuk mewujudkan hal ini, dalam jangka pendek kiranya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk memberikan pelatihan atau bimbingan teknis dalam memberikan bekal kepada seluruh pendidik di negeri ini.

Sebagai persiapan dalam jangka panjang, maka kurikulum semua program studi di lembaga yang bertugas menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan (LPTK) perlu menyisipkan materi yang dapat membekali para lulusannya agar kelak dalam bertugas dapat berperanserta dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila dan nilai kebangsaan melalui mata pelajaran yang diampunya.

Di samping memberdayakan peran seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan untuk berpartisipasi aktif dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila dan nilai kebangsaan, dipandang sangat perlu juga untuk melibatkan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah, Organisasi Intra dan Ekstra Sekolah, organisasi intra dan ekstra kampus serta organisasi alumni setiap sekolah dan perguruan tinggi.

#### c. Mem-Pancasila-kan masyarakat

Dalam mensukseskan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di Indonesia kepada generasi muda, maka yang perlu dilakukan adalah menumbuhkembangkan sadar Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat. Sadar Pancasila merupakan sebuah konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya suasana kehidupan yang kondusif bagi pelaksanaan pembudayaan tersebut.

Secara kodrati sejatinya karakteristik masyarakat dan bangsa Indonesia adalah masyarakat Pancasila, yaitu masyarakat yang toleransinya sangat tinggi, guyub rukun, kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong, bekerjasama, dan

sebagainya. Pendiri negara sudah mencontohkan bahwa kecintaan terhadap persatuan, kebersamaan, dan tanah airnya melebihi dari pada kecintaan terhadap keluarga, kelompok, dan bahkan agama sekalipun. Sebagai buktinya adalah ketika ada penolakan terhadap rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta saat akan ditetapkan menjadi Pembukaan UUD 1945, maka tokoh Agama Islam meskipun jumlahnya mayoritas tetap merelakan dihapusnya tujuh kata pada sila pertama, demi menjaga kebersamaan, persatuan, dan cinta tanah airnya.

Oleh karena itu untuk mem-Pancasila-kan masyarakat Indonesia sebenarnya hanya memerlukan upaya menegaskan dan membudayakan kembali nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai jati diri dan kepribadian mereka. Banyak sekali contoh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang mencerminkan pengejawantahan dari pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda, seperti :

1) Paguyuban Lansia Dusun Mancingan Desa Parangtritis Bantul

Dalam setahun terakhir ini, masyarakat Dusun Mancingan Desa Parangtritis Bantul merintis terbentuknya Paguyuban Lansia, dengan kegiatan senam lansia, pengajian untuk lansia, penyuluhan pola hidup sehat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembagian makanan yang bergizi secara gratis. Pada saat memulai kegiatan ini, banyak hambatan yang dijumpai seperti banyak warga lansia yang tidak mau bergabung karena sudah lanjut usia sehingga merasa malu bertemu dengan orang banyak dan mengalami kesulitan untuk datang ke balai dusun. Berkat kegigihan dan kerjasama antara tokoh masyarakat dengan ibu-ibu PKK, dan karang taruna, semua kendala dapat diatasi. Para pemuda bergantian menjemput dan ngantar warga lansia dari rumah ke balai dusun dan sebaliknya. Ibu-ibu PKK menyiapkan konsumsi untuk memberikan makanan bergizi bagi lansia. Tokoh masyarakat mencari pelatih senam dan guru yang memberikan siraman rohani serta menghubungi pukesmas dan dinas sosial. Sejumlah 200 lansia saat ini tergabung dalam paguyuban tersebut yang setiap selapan sekali mengadakan kegiatan yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga lansia di dusun tersebut.

2) Kebersamaan Warga Dusun Sumur Desa Giripurwo Gunung Kidul

Setiap musim kemarau tiba, warga Desa Giripurwo Gunung Kidul mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari. Namun muncul keajaiban yang luar biasa, karena di salah satu dusun muncul sumber air yang kalau musimnya makin kemarau maka debit airnya makin besar. Warga dusun ini menamakannya Dusun Sumur dan berupaya bagaimana cara membagi air dari sumber tersebut kepada masyarakat yang sama-sama membutuhkan. Mereka berupaya mengelola sumber tersebut dan menggunakan mesin untuk diangkat ke tempat yang lebih tinggi agar dapat dibagikan kepada masyarakat dalam jangkauan yang lebih luas. Keihlasan berbagi inilah yang merupakan perwujudan dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang perlu dilestarikan oleh generasi muda.

## Wasana Kata

1. Guru merupakan komponen utama atau *Key Component* dalam upaya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda. Guru juga kunci utama dalam proses peningkatan kualitas pendidikan nasional tanpa mengurangi peran penting sumber daya dan komponen lainnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan (a) John F Kennedy, ketika Amerika Serikat merasa kalah dalam



- persaingan bidang IPTEKS dengan Rusia “*What’s wrong in our classroom*’ (b) Ho Chi Minh : *No Teacher, no education. No education, no economic and social development.*(c) Yudith Lloyd Yero “ *The power to change education for better or worse is and always has been in the hands of teacher*”. Calon guru harus disiapkan dengan sebaik-baiknya agar memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebagai guru profesional setelah bertugas.
2. Guru sebagai pendidik profesional dapat diidentikkan dengan personifikasi Pandawa Lima, yaitu : (a) Yudistira. Lambang keimanan dan ketaqwaan, rela berkorban demi kesejahteraan manusia, memberi keteladanan, sikap pasrah, namun arif dan bijaksana, (b) Bima. Lambang berani karena benar. Ia dapat bersikap ‘lemes kena kinaryo tali, kaku kena kinaryo pikulan, sesuai dengan fungsi evaluator, (c) Arjuna. Lambang intelektual yang memiliki kadar intelegensi tinggi. Sifat ini sesuai untuk pembinaan karier akademik melalui studi lanjut, (d) Nakula. Bersifat welas asih, terkandung jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial yang tinggi, (e) Sadewa. Lambang sifat loyal terhadap tugas. Lebih banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melaksanakan tugas.
  3. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan sebangsa dan setanah air. Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Ikrar Bangsa, yaitu (a) Ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) Ikrar untuk membangun sebuah bangsa Indonesia yang bersatu, (c) Ikrar yang mengungkapkan rasa persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman
  4. Pembudayaan dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda dapat dilakukan melalui pembentukan keluarga Pancasila, dengan mempancasilakan pendidikan nasional dengan menuntut peran aktif semua guru mata pelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan, serta melalui upaya mempancasilakan masyarakat. Perlu didukung oleh semua pihak dengan penguatan dan perluasan peran BPIP sampai ke daerah-daerah di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Buchory MS. 2004. Tantangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dalam Era Globalisasi. Pidato Dies Natalis. Yogyakarta : UPY.
- Buchory MS, dkk. 2011. Penyiapan Sarjana Kompetitif dan Berkarakter Indonesia. Yogyakarta : UPY
- Buchory MS, 2012. Guru Kunci Pendidikan Nasional. Yogyakarta : Leutikaprio
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Hamengku Buwono X. 1990. Aspek-Aspek Sosio-kultural Filosofis dalam Masyarakat di Perguruan Tinggi. Makalah pada Seminar Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Perguruan Tinggi Yogyakarta, 20 Maret 1990.
- MPR RI. Bahan Tayang Sosialisasi Empat Pilar. Jakarta. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta : 2006.
- Nurwardani, Paristiyanti, dkk.. 2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemen Ristekdikti

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)  
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)

# **Filosofi Pendidikan Indonesia Untuk Membangun Bangsa Dan Karakternya: Indonesia**

Oleh:

**Prof. Dr. Wuryadi, MS**  
(Pakar Pendidikan)

## **Pendahuluan**

1. Filosofi suatu Obyek umumnya kita tangkap sebagai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Obyek tersebut yang menjawab persoalan Apa (What-Is), Bagaimana (How-to) dan Untuk Apa/ Manfaat (What-for)
2. Namun kalau Obyek adalah suatu proses, kita coba memahami Filosofinya dengan mulai dengan persoalan Untuk Apa (What-for), kemudian dengan Bagaimana (How-to) dan kemudian digunakan untuk memahami Apa (What-is)
3. Membangun Bangsa dan Karakternya dikenal dulu sebagai pernyataan Bung Karno: "*Nation and Character Building*", yang sempat dihentikan pada era Orde Baru dan diganti dengan "*State Building*"
4. Yang dibangun adalah Bangsa dan Karakternya, oleh karena itu perlu dipahami pengertian bangsa dan karakter
5. Pemahaman tentang Indonesia dan Ke-Indonesia-an menjadi sangat esensial untuk dilakukan dalam kerangka *Nation and Character Building*.

## **Bangsa**

6. Bung Karno dalam rangka Pendidikan Rakyat mengenalkan makna bangsa dalam perjuangan melawan penjajah:
  - a. Bangsa menurut Otto Bauer (bangsa Jerman), terbentuk karena persamaan nasib
  - b. Bangsa menurut Ernest Renan (bangsa Perancis) , terbentuk karena adanya satu cita-cita yang sama
  - c. Bung Karno melengkapi makna bangsa yang harus hidup di satu wilayah (tempat hidup) tertentu. Antara bangsa dan tempat hidupnya harus menyatu (teori geopolitik).

## **Karakter Bangsa**

7. Karakter bangsa tidak dapat terlepas dari proses terbangunnya bangsa itu sendiri, oleh karena itu maka dapatlah dimengerti bahwa untuk mengenalinya dan memahaminya, maka kita harus memahami proses hadirnya bangsa yang bersifat sangat dinamis
8. Dinamika karakter bangsa dapat diikuti melalui sejarah bangsa yang tiap-tiap bangsa dapat berbeda dan ditegaskan oleh posisi geopolitiknya
9. Dengan demikian mudah untuk dipahami bahwa membangun bangsa dan karakternya adalah suatu proses yang simultan secara berkelanjutan
10. Satu karakter bangsa Indonesia yang khas dan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia adalah karakter *Bhinneka Tunggal Ika*" beragam akan tetapi menyatu,

karakter yang tepat untuk menggambarkan ratusan suku yang menghuni 17.000-an pulau taopi menyatu dalam cita-cita dan nasib dalam satuan geopolitik yang pasti

### Indonesia dan Ke-Indonesia-An

11. Nama INDONESIA pertama kali diusulkan oleh James Richardson Logan seorang bangsa Scotland redaksi dari *Journal of The Indian Archipelago and East Asia*, pada tahun 1850, dan kemudian dikutip dan disebarakan oleh Adolf Bastian, antropolog bangsa Jerman dalam 5 bukunya di Eropa. Ki Hadjar Dewantara yang di buang oleh pemerintah kolonial Belanda di Belanda pada tahun 1913-1919, membaca buku Bastian dan kemudian menggunakan nama “Indonesia” untuk nama organisasinya yang tadinya “*Indische Pers Bureau*” menjadi “*Indonesische Per Bureau*” pada tahun 1918, dan kemudian diikuti oleh Hatta dan kawan-kawan yang mengubah nama organisasinya “*Indische Vereeniging*” menjadi “*Indonesische Vereeniging*” sejak 1920.
12. Nama INDONESIA yang semula oleh Logan dan Bastian digunakan untuk menyebut wilayah, oleh Ki Hadjar Dewantara dan Hatta digunakan sebagai nama organisasi, kemudian oleh para pejuang digunakan sebagai nama organisasi perjuangan, dan pada puncaknya pada tahun 1928 digunakan sebagai nama bangsa, tanah air, bahasa, dan lagu Indonesia Raya dalam sumpah Pemuda/ Deklarasi Kebangsaan melalui serangkaian proses “membangun kesadaran-kemauan-perbuatan berbangsa” (wawasan kebangsaan). Deklarasi Kebangsaan ini merupakan satu-satunya Deklarasi yang dilakukan oleh bangsa yang masih terjajah. Deklarasi inilah yang kemudian menjadi inspirasi dan kekuatan utama bagi perjuangan bangsa untuk membangun kemerdekaan bangsanya (“Deklarasi Satu Tanah Air, Satu Bangsa, Satu Bahasa, dan Satu Lagu Kebangsaan”).
13. KE-INDONESIA-AN kemudian digunakan untuk menggambarkan watak atau karakter yang berkaitan dengan bangsa, tanah air, bahasa, dan lagu Kebangsaan, dan itulah karakter yang seutuhnya
14. Rangkaian sejarah yang menggambarkan KE-INDONESIA-AN secara utuh dapat digambarkan sebagai rangkaian perjuangan bangsa: deklarasi Kebangsaan (28 Oktober 1928), Lahirnya Pancasila (1 Juni 1945), Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945), deklarasi Kemerdekaan (18 Agustus 1945), deklarasi Djuanda-Deklarasi Indonesia sebagai Negara Kepulauan (13 Desember 1953) yang baru diratifikasi oleh 60 bangsa pada tahun 1994, yang menggambarkan kedaulatan NKRI secara utuh (kesatuan) atas 17.000-an pulau termasuk lautan dan udara di atasnya (sedang diperjuangkan kedaulatan atas kekayaan alam pada laut dan dasar lautnya). Deklarasi Djuanda dianggap sebagai konsekuensi Deklarasi Kebangsaan.

### Tujuan Pendidikan Indonesia

15. Tujuan Pendidikan menjawab persoalan “untuk Apa Pendidikan Indonesia (What-for): adalah untuk Membangun Bangsa dan Karakternya (*Nation and Character*

*Building*) secara simultan dan berkelanjutan. Pembangunan Karakter yang dinamis dan belum pernah selesai

16. Tujuan Pendidikan Indonesia secara mendasar juga tergambar pada Pembukaan UUD 1945, alinea 4” Melindungi segenap bangsa dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, dan untuk Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial”
17. Tujuan Pendidikan Indonesia juga tergambar pada tiga dimensi kedaulatan bangsa, yaitu Kedaulatan Politik, Kedaulatan Ekonomi (Berdikari dalam Ekonomi) dan Kedaulatan Budaya (Berkepribadian dalam Budaya), yang dikenal sebagai Tri Sakti Kemerdekaan (Tri Sakti Revolusi Indonesia)
18. Dari gambaran tentang Tujuan Pendidikan Indonesia tersebut, maka sangat jelas bahwa subyek yang harus dikenai adalah Bangsa secara keseluruhan dan bukan individu sebagaimana dikenal oleh banyak pihak
19. Karena bangsa yang menjadi subyek, maka tidak mungkin proses pendidikan hanya berlaku di Sekolah. Proses Pendidikan secara obyektif hanya dapat berlangsung secara efektif dalam tiga Pusat Pendidikan yang harus harmonis: Keluarga-Sekolah-Masyarakat, dengan segala kelebihan dan kekurangannya dalam kondisi dalam dimensi ruang dan waktu saat ini

#### **Bagaimana Proses Pendidikan Di Indonesia Dapat Berlangsung (Menjawab Persoalan How-T)**

20. Tiga Pusat Pendidikan tersebut di atas memiliki sifat dan konsisi berbeda dalam melaksanakan tugas pendidikan
21. Dari gambaran tentang Tujuan Pendidikan yang diuraikan di atas, tidak mungkin proses pendidikan dapat dilakukan dalam salah satu Pusat Pendidikan. Tidak mungkin Keluarga saja yang dapat mengemban tugas tersebut secara menyeluruh, demikian juga Sekolah maupun Masyarakat. Dibutuhkan cara terintegrasi yang harmonis agar tiga Pusat Pendidikan dapat mengemban tugas untuk mencapai ke tiga Tujuan Pendidikan tersebut di atas
22. Ke tiga Pusat Pendidikan tersebut di atas, tidak mungkin melaksanakan proses Pendidikan untuk mencapai Tujuan Pendidikan dengan cara *Banking Education* (memberi/mengajar), akan tetapi dengan cara *Exploratif Cooperative Collaborative* (dengan basis *Student centered*)
23. Tiga tujuan Pendidikan tersebut di atas tidak mungkin tersentuh tanpa basis Budaya Bangsa Indonesia, dan hal ini masih memerlukan kajian yang mendalam. Sekolah dan Keluarga belum efektif untuk menggunakan basis budaya seperti yang diharapkan, sedang masyarakat dengan ragam organisasi kemasyarakatan yang tersedia, belum tersiapkan untuk berfungsi sebagai pelaku pendidikan secara efektif
24. Sementara kajian-kajian masih banyak yang diperlukan , maka diperlukan Program Aksi yang dapat dilakukan, yaitu:
  - a. PROGRAM AKSI PENDIDIKAN RAKYAT, mencoba menggunakan semua potensi Pusat Pendidikan yang tersedia di lokasi tertentu, untuk diorganisasi dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan secara terintegrasi

bagi kepentingan Rakyat (perlu diidentifikasi secara cermat kebutuhan Rakyat di setiap lokal dan waktu)

- b. PROGRAM AKSI FRONT PERSATUAN, mencoba melakukan pemersatuan semua potensi pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan
- c. PROGRAM AKSI MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL, bermodal pada kekayaan sumberdaya alam yang ada di lautan, hutan, pertanian, dan sumberdaya manusia yang kreatif, produktif, berkesadaran, dan berpengatahuan dan memiliki potensi kecerdasan yang perlu dieksplor secara menyeluruh ( kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan affermatif, kecerdasan assertif, kecerdasan kreatif, kecerdasan kritis, kecerdasan komunikatif, kecerdasan kooperatif, dan kecerdasan kollaboratif yang masih tersimpan dalam diri anak Indonesia

### Memahami Makna Pendidikan Indonesia

25. Makna Pendidikan Indonesia yang dapat kita peroleh dari kajian-kajian tersebut di atas, antara lain:
  - a. Pendidikan Indonesia tidak dimaksud untuk mendidik anak secara individul, tetapi bangsa sebagai satu keseleruhan
  - b. Pendidikan Indonesia menyiapkan (dengan cara pendampingan) anak bangsa untuk siap melakukan tugas bangsa yang memerdekakan hatinya dan memerdekakan pikirannya
  - c. Pendidikan Indonesia tidak dapat berlangsung dalam tiap-tiap Pusat Pendidin secara terpisah dan sendiri-sendiri akan tetapi dalam integrasi yang harmonis
  - d. Pendidikan Indonesia tidak dapat dilakukan secara efektif dengan pola *banking education* akan tetapi dibutuhkan pola *explorative cooperative collaborative*
  - e. Diperlukan pengkajian terhadap potensi Pusat-Pusat Pndidikan di semua wilayah Indonesia dalam dimensi ruang dan waktu

### Refleksi dan Penutup

26. Untuk memahami untuk apa Pendidikan Indonesia dibutuhkan pemahaman tentang Bangsa, Karakter, dan Indonesia dan Ke-Indonesia-an
27. Untuk apa Pendidikan Indonesia dapat membuka khazanah pengertian tentang bagaimana Proses harus dilakukannya Pendidikan Indonesia
28. Dari pemahaman tentang Untuk Apa (Tujuan) dan Bagaimana (Proses), dapat ditangkap secara menyeluruh makna Apa Pendidikan Indonesia
29. Kalau semua ini dapat dipahami dengan baik maka tidak akan terjadi berbagai ketimpangan pendidikan sebagaimana yang kita hadapi saat ini
30. Dibutuhkan kerja bersama dan kajian yang tajam tentang mengapa berbagai penyimpangan Pendidikan Indonesia dapat terjadi, semoga.

# **Pendidikan Nasional Pasca Era Reformasi**

Oleh:

**Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.**  
(Rektor Universitas Negeri Yogyakarta)

## **Pendahuluan**

Tujuan negara Indonesia dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan persamaan dan kemerdekaan.” Mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dimaksudkan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mandiri, serta bertanggung jawab.

Telah disadari bahwa Pendidikan merupakan faktor vital dalam usaha untuk membebaskan dari belenggu penjajahan. Mengingat pada masa kolonial sistem pendidikan bersifat elitis, diskriminatif dan tidak demokratis, sehingga perlu adanya perubahan dalam menjangkau kepentingan rakyat secara luas. Pasca kemerdekaan, Sistem pendidikan nasional yang diatur UU No. 4/1950 jo UU No. 12/1954 masih belum terintegratif dan utuh. Sistem pendidikan pada masa ini belum bisa dilihat dalam mencerminkan adanya kesatuan, karena dalam UU No. 4/1950 jo UU No. 12/1954 hanya mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah, sementara pendidikan tinggi belum diatur. Selanjutnya Sistem pendidikan nasional yang terintegratif dan utuh mulai muncul pada UU NO. 2/1989, namun pada undang-undang ini hakikat pendidikan yang menghargai keragaman belum terakomodasi. Sistem pendidikan nasional menurut UU NO. 2/1989 masih bersifat sentralistik.

Adanya reformasi pendidikan yang tergambar dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan adanya upaya perbaikan pada bidang pendidikan yang sedang ditempuh Indonesia. Sistem pendidikan nasional paling komprehensif dan desentralistik. Undang-undang ini sangat kuat, karena pada tahun yang sama UUD 1945 juga diamandemen dan hasilnya menempatkan pendidikan pada posisi sangat penting, alokasi anggaran pendidikan diamanatkan minimal 20% dari APBN. Namun demikian, pelaksanaannya masih belum sempurna, alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN termasuk gaji guru. Sinkronisasi peraturan pelaksanaan UU No. 20/2003 masih belum sempurna, misalnya kebijakan ujian nasional yang masih berubah-ubah. Pengendalian penyelenggaraan dan mutu pendidikan dilaksanakan dengan indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP), Bab IX pasal 35. Pelaksanaan pengaturan SNP telah dijabarkan dalam sejumlah peraturan.

## **Pendidikan Pada Era Reformasi**

Pendidikan diharapkan dapat memperkuat pembangunan nasional dan pengembangan diri. Reformasi merupakan restu dilakukannya perubahan dengan mempertimbangkan keperluan masa depan. Reformasi juga diartikan sebagai upaya penyetopan terhadap salah urusnya negara dan penyelewengan penggunaan kekuasaan. Reformasi dimaknai sebagai perubahan radikal untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Dengan alasan tersebutlah maka perlu kiranya diadakan suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan bangsa dan negara dalam aspek-aspek politik, ekonomi, hukum, termasuk juga Pendidikan. Reformasi pendidikan perlu dilakukan untuk menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang bersatu dan demokratis serta masyarakat yang berdaya saing. Dalam masyarakat

demokrasi, setiap masyarakat mempunyai keberdayaan untuk mandiri dan bukan tertekan oleh kekuasaan absolut.

Pelaksanaan pendidikan di era reformasi lebih terbuka. Filosofi pendidikannya lebih mengarah pada demokrasi dan desentralisasi. Pendidikan dilaksanakan dengan adanya kontrol dan keikutsertaan masyarakat, sehingga pelaksanaannya tentu dituntut untuk lebih baik dan transparan. Desentralisasi terlihat tidak adanya lagi pemusatan, aturan dan kebijakan sudah ditentukan di daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta tetap mengacu kepada kebutuhan nasional. Proses pembelajaran lebih komunikatif dan melibatkan siswa secara aktif agar kreatifitas dan aktivitas siswa meningkat. Strategi dan model pembelajaran disesuaikan dengan kompetensi dan lebih ke arah pembelajaran kolaboratif.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003, kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan rumusan tersebut dapat diturunkan beberapa ciri kurikulum, antara lain:

1. *Curriculum as a subject matter*, yang menggambarkan kurikulum sebagai kombinasi bahan untuk membentuk kerangka isi materi (*content*) yang akan diajarkan.
2. *Curriculum as experience*, yang menggambarkan kurikulum sebagai seperangkat pengalaman yang direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pendidikan.
3. *Curriculum as intention*, yang menyatakan kurikulum sebagai suatu rencana, mulai dari tujuan, sasaran dan juga evaluasinya.
4. *Curriculum as cultural reproduction*, yang menyiratkan kurikulum sebagai refleksi suatu budaya masyarakat tertentu.
5. *Curriculum as currere*, yang menekankan kapasitas individu untuk berpartisipasi dan mengonsepskan kembali pengalaman hidup seseorang.

Kurikulum pada era reformasi tergambar dalam UU No. 20/2003, dengan diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan Kurikulum 2013. Hanya saja, peningkatan kualitas pendidikan di era reformasi melalui perkembangan pendidikan secara nasional belum mampu memberikan hasil yang signifikan. Suatu inovasi yang dilaksanakan adanya berbagai strategi dalam perubahan kurikulum, mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sampai kepada penyempurnaannya melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Namun fakta di lapangan menimbulkan masalah yang mencerminkan belum tercapainya peningkatan mutu pendidikan kearah yang lebih baik secara global. Kurikulum 2013 terus berubah sesuai dengan kebijakan menteri, dan yang terakhir K 2013 revisi 2017.

### **Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Dalam kasus reformasi Pendidikan Tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, memuat prinsip-prinsip UU Sisdikti yang meliputi perluasan dan Jaminan Akses, pengembangan Tridharma secara utuh, Kesetaraan, Penguatan Pendidikan Vokasi, Keutuhan jenjang pendidikan, Otonomi perguruan tinggi, Sistem penjaminan mutu, Memastikan tanggungjawab negara dan menghindari liberalisasi & komersialisasi PT.

Perlu adanya UU Pendidikan Tinggi ini bertujuan untuk menciptakan suasana pendidikan yang lebih berkualitas dan mampu mencetak manusia terdidik dan terpelajar, serta membekali generasi muda agar memiliki intelegensia dan keterampilan yang mampu menciptakan kemajuan di segala bidang. Hal ini tentunya merujuk pada UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya dalam ayat 3 menjelaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU. Pemerintah harus mampu memajukan ilmu



pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia seperti dalam ayat 5.

Dalam konteks dan prospek pembangunan lokal, regional, nasional, bahkan global, Pendidikan Tinggi memiliki peran krusial dan penting. Mengacu pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas disebutkan jika Pendidikan Tinggi memiliki kontribusi dalam membangun bangsa yang cerdas, sejahtera, dan berbudaya; mengembangkan SDM dan IPTEK yang unggul; memelihara dan menyebarluaskan nilai Tri Dharma Pendidikan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengajaran; Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya; dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, serta menjunjung azas Pendidikan Tinggi.

Tuntutan dalam membangun SDM yang unggul tersebut tentunya harus disesuaikan dengan bentuk kurikulum yang diterapkan. Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tersebut, kurikulum yang menjadi acuan dalam praktik pembelajaran di Pendidikan Tinggi harus berangsur dirubah. Beberapa komponen yang semestinya mengalami perubahan adalah kompetensi atau *learning outcome* kurikulum pendidikan tinggi masih berbasis konten dan belum berorientasi masa depan; Isi (*content*) masih belum memenuhi aspek kecukupan dan kesesuaian dan belum berbasis riset; Proses yang dilakukan belum menggunakan model pembelajaran *blended learning*, belum terintegrasi dengan DUDI (Dunia usaha dan dunia industri), belum berbasis produk, dan minim penggunaan sumber digital; dan Penilaian yang masih tidak otentik (belum mencakup secara komprehensif dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor), belum menggambarkan kompetensi secara komprehensif, dan masih terjadi masalah akuntabilitas, objektivitas, dan *fairness* (keadilan).

Reformasi ditujukan untuk mengkonstruksi kompetensi-bekerja dalam menciptakan bibit unggul menjelang era 2025 keatas. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan mulai dari cara berfikirnya, cara bekerjanya, *tools* bekerjanya, dan tata hidup sebagai warga negara. Pada cara berfikirnya lebih menekankan yang HOTS (higher order thinking skill), kritis, melatih dalam pemecahan masalah, berdaya cipta (invenitif), meta kognitif, dan menghasilkan bentuk pembelajaran yang sepanjang hayat; Pada cara bekerjanya harus komunikatif, kolaboratif, dan berdasarkan paradigma kekinian; Alat (*tools*) bekerjanya dalam menyesuaikan tata hidup sebagai warga negara meliputi literasi (dasar, data, teknologi, dan manusia) dan mampu berkolaborasi membangun sebuah *network* (jaringan); dan Pada akhirnya membentuk warga negara yang bertanggung jawab (pesonal, sosial-ekonomi, politik, dan budaya) berimplikasi pada karir dan reputasinya.

Perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang bisa meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat untuk kemandirian bangsa. Selain sebagai agen pendidikan dan agen pembangunan ekonomi, perguruan tinggi juga harus lebih ditekankan sebagai agen penelitian dan agen pentransfer kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Ekspektasi masyarakat terhadap perguruan tinggi sangat besar sehingga harus segera diwujudkan. Peran perguruan tinggi dalam berinovasi harus lebih dikembangkan untuk pembangunan daya saing lokal maupun nasional dan dari segi *transferring* harus mampu memberikan dampak, baik berupa transfer kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi untuk masyarakat serta industri yang didasarkan pada penelitian agar dapat menyelesaikan permasalahan dasar dan aplikatif.

### **Kompetensi Abad 21**

Semakin berkembangnya zaman tentunya semakin berkembang tuntutan kompetensi setiap warga. Sampai pada abad ke 21, kompetensi warga semakin berkembang terbagi dalam tiga komponen yaitu pembelajaran dan inovasi (*learning and innovation-the 4Cs*), literasi digital (*digital literacy*), serta karir dan kehidupan (*career and life*). Ketiga komponen tersebut dapat dikategorikan seperti pada tabel dibawah ini.

Learning and Innovation (the 4C's)	Digital Literacy	Career and Life
Critical Thinking & Problem Solving	Information Literacy	Flexibility and Adaptability
Creativity and Innovation	Media Literacy	Initiative and Self-direction
Communication	ICT Literacy	Social and Cross-Cultural Interaction
Collaboration		Productivity and Accountability
		Leadership and Responsibility

Tabel 1 Kompetensi Abad 21

### Revolusi Industri 4.0

Pada era industri 4.0, terjadi kolektifitas sehingga mengakibatkan mesin-mesin atau pabrik-pabrik saling terhubung, saling bertukar data, bekerja sama, serta dapat mengambil keputusan secara mandiri. Era industri 4.0 melahirkan disrupsi inovasi sebagai akhir zaman di tangan inovator, maksudnya para inovator mampu menciptakan sesuatu yang baru dengan menjawab kebutuhan zaman melalui mekanisme lebih sederhana, terjangkau, dan mudah diakses. Dimensi kemajuan teknologi pada era industri 4.0 yang sedang dan akan terjadi antara lain *virtual reality*, *artificial intelligence*, *industrial internet*, *industrial cloud computing*, *industrial big data*, *industrial robot*, *industrial network security*, *3D printing*, *knowledge work automation*. Pada pendidikan tinggi disruptif inovasi harus lebih memiliki kepekaan dengan pemanfaatan teknologi. Karena tanda-tanda pada era industri 4.0 yaitu adanya perpaduan teknologi sehingga mengaburkan garis antara bidang fisik, digital, dan teknologi.

Pendidikan tinggi sebagai agen perubahan tentunya memiliki peran dalam membangun literasi baru menghadapi revolusi industri 4.0. Literasi baru tersebut meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Pertama, literasi data bertujuan meningkatkan kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi (big data) di dunia digital. Kedua, literasi teknologi untuk memahami cara kerjanya, aplikasi teknologi (coding, artificial intelligence, & engineering principles). Ketiga, literasi manusia berupa humanities, komunikasi, dan desain.

### Kurikulum di Masa Depan

Mempersiapkan sumber daya manusia di era industri 4.0. tentunya membutuhkan standar dalam menjamin mutu pendidikan tinggi. Fungsi digunakannya standar adalah sebagai dasar untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, mulai dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ruang lingkup standar nasional pendidikan tinggi meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional pengabdian kepada masyarakat, dan standar penelitian. Tujuannya yaitu untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi, menjamin mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan mendorong perguruan tinggi melampaui standar nasional yang ditetapkan DIKTI.

Perubahan paradigma baru ini tentunya menjadikan pendidikan tinggi semakin efektif, dengan proses perkembangan secara cepat dan pengecekan langsung ke bawah. Misalnya dalam

kurikulum pendidikan tinggi di masa depan sebaiknya lebih banyak menawarkan mata kuliah interdisipliner seperti biostatistika, biomolekuler, gizi dan olah raga; menawarkan mata kuliah mengenai lanjut usia dan berbagai aspeknya; menegenai keragaman budaya, pendidikan internasional dan global untuk membangun pemahaman pebelajar akan emosi, sikap, perasaan diri sendiri atau orang lain.; dan memasukan hal-hal seperti pengembangan metakognisi, cara berfikir otak kiri dan otak kanan, dan menejemen emosi dan stres.

Arah kurikulum masa depan di abad 21 dapat ditinjau dengan adanya perubahan yang ekstensif dan cepat, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang tinggi dan membuat masyarakat sangat dinamis. Kondisi ini akan memicu pertanyaan yang akan muncul dari diri manusia abad 21 yaitu mengenai kemungkinan masa depan apa yang terjadi dan masa depan yang diinginkan untuk terjadi.

Dalam mencapai keinginan di masa depan, keterampilan yang dibutuhkan manusia yaitu mengandalkan otak; mampu mencari memilah, dan mengolah informasi untuk mencapai tujuan tertentu; mampu menggunakan komputer; memperhatikan keterampilan yang berhubungan dengan moral, sosial, dan spiritual; memiliki kecerdasan emosi; mampu berkomunikasi efektif baik lisan maupun tulisan, dan berfikir jernih; memiliki keterampilan interpersonal dan intrapersonal; memahami pentingnya lingkungan sehat bagi kehidupan manusia; memahami dinamika individu dan masyarakat; dan memiliki kompetensi pribadi yang tepat untuk bidang yang diminatai dan diketahui.

### **Penutup**

Semangat dalam membangun pendidikan pengajaran dan kebudayaan yang berbasis kekinian menjadi solusi dalam menjawab tantangan era global. Agenda reformasi pendidikan nasional harus tetap melekat pada tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya memperbaiki pendidikan nasional ini harus lebih mendasar dan strategis. Melalui sejarah panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, dapat diwujudkan melalui pembangunan sistem pendidikan nasional yang komprehensif, integratif, dan aplikatif.

Pendidikan tinggi menjadi kunci untuk membentuk keterampilan dan kompetensi SDM di masa mendatang. Sebagai agen pendidikan; agen pembangunan ekonomi; agen penelitian; dan agen transfer kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi, perguruan tinggi memiliki akses strategis menciptakan bangsa yang cerdas, sejahtera, dan berbudaya.

# **Refleksi, Tantangan dan Prospek Kebudayaan yang Selaras dengan Nilai-Nilai Pancasila**

Oleh:

**Prof. Dr. dr. Sutaryo, Sp. A (K)**  
(Universitas Gajah Mada)

## **Pendahuluan**

Menurut Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, kebudayaan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya. Sedangkan budaya berasal dari kata budi. Budi berarti jiwa manusia yang telah masak. Sehingga budaya atau kebudayaan adalah buah budi manusia. Budi terdiri atas tiga kekuatan jiwa manusia yaitu pikiran (cipta), rasa dan kemauan (karsa).

Buah budi pikiran misalnya ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengajaran. Buah rasa misalnya segala macam sifat keindahan keluhuran batin (estetika, etika) dalam bagian mana termasuk juga adanya adat istiadat, hukum, kesosialan, kegamaan, dan lain sebagainya. Buah kemauan ialah semua perbuatan, misalnya usaha-usaha pertanian, industri, perkapalan, bangun-bangunan (arsitektur), dll.

Jadi jelas diatas bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan bagian dari kebudayaan. Masih menurut kosep KHD, Kebudayaan Nasional Indonesia adalah segala puncak dan sari-sari kebudayaan yang bernilai di seluruh kepulauan, baik yang lama maupun ciptaan baru, yang berjiwa nasional. KHD mengingatkan kita jangan segan-segan menghentikan pemeliharaan segala kebudayaan lama yang merintangai kemajuan hidup perikemanusiaan. Kemudian meneruskan pemeliharaan kebudayaan lama yang bernilai dan bermanfaat bagi hidup peri kemanusiaan, dimana perlu dengan perubahan diperbaiki, disesuaikan dengan alam dan zaman baru.

Selanjutnya memasukkan segala bahan kebudayaan dari luar ke dalam alam kebudayaan bangsa kita, asalkan yang dapat memperkembangkan dan/atau memperkaya hidup dan peghidupan. Konsep diatas oleh Ki Hadjar diberi nama konsep **Trikon**, kebudayaan itu kontinyu, konvergen dan konsentris. Artinya kebudayaan hari ini merupakan kelanjutan kebudayaan masa lalu, diteruskan yang baik, dengan mengambil unsur luar yang bermanfaat (konvergen), tetapi unsur dari luar tersebut jangan sampai menghapus kepribadian kita sendiri (konsentris).

## **Sejarah Berulang**

Sekarang kita mengulang sejarah PP dan K. Pada Jaman Belanda PP dan K mengabdikan pada kepentingan ekonomi politik Belanda. Zaman 1912 KHD menjungkir-balikkan filosofi pendidikan, yaitu PP dan K untuk bangsa negara Indonesia. Zaman Jepang ikut memperkuat Jepang. Zaman Kemerdekaan konsep PP dan K dilakukan. Setelah UU Penanaman Modal balik lagi PP dan K untuk kepentingan pangsa pasar dunia. Kesadaran mulai muncul lagi dengan adanya Kongres Nasional 2012, untuk kembali bahwa PP dan K itu untuk negara dan bangsa khususnya, dan dunia umumnya.

## **Dua Periode Sejarah PP dan K Sejak 1945 Sampai Sekarang**

Dalam sejarah Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bisa dibagi menjadi dua periode yaitu periode pertama awal kemerdekaan sampai tahun 1967, dan periode kedua 1967 – sampai sekarang. Refleksi setelah 20 tahun pasca reformasi termasuk periode yang kedua.

Khas untuk Indonesia, kedudukan Menteri PP dan K (dengan pelbagai perubahan nama Kementerian atau Departemen) sangat menentukan kebijakan. Sehingga ada istilah ganti menteri ganti kebijakan. Menteri yang berperan dalam menyusun kebijakan dan pelaksana kebijakan terbagi jelas pada periode pertama dan kedua.

### **Periode Pertama (1945 – 1967)**

Periode pertama masih ideologi PP dan K serta menteri dialiri mazab Ki Hajar Dewantara yang di dominasi orang Taman Siswa. Menteri pertama Ki Hadjar Dewanantara dari Tamansiswa (Kabinet Presidential Pertama 2 September 1945 – 14 Nopember 1945). Menteri terakhir Ki Sarino Mangunpranoto juga dari Tamansiswa (Kabinet Ampera 25 Juli 1966- 17 Oktober 1967).

Tujuan utama adalah: membentuk manusia budaya Indonesia.

Pada periode pertama ini, PP dan K merupakan satu nafas di Departemen atau Kementerian PP dan K. Ilmu - ilmu sosial humaniora mendapat porsi yang sama dengan ilmu eksakta misalnya matematika dan ilmu pengetahuan alam. Hasil pendidikan saat itu membentuk manusia Indonesia dengan kepribadian bangsa yang kuat, dengan kata lain menghasilkan manusia budaya Indonesia.

Tulang punggung PP dan K saat itu adalah guru-guru lulusan SGA dan SGB, lulusan B1 Ilmu Pendidikan dan Sarjana lulusan Fakultas Pedagogik atau yang sejenis. Guru saat itu merupakan penyebar perubahan yang sangat berarti bagi bangsa dan negara. Tanpa harus bicara sila-sila Pancasila, guru dan murid berimbas pada persatuan guru dan murid (POMG), sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Dengan guru/dosen dan fasilitas seadanya proses pembentukan budaya Indonesia seperti yang dimaksud Ki Hadjar Dewantara dilaksanakan dengan murni dan konsekuen.

### **Periode Kedua (1967-sekarang)**

Periode kedua dimulai dengan munculnya UU Penanaman Modal Asing pada 10 Januari 1967 dengan tujuan untuk melancarkan pembangunan di Indonesia. Dengan cepat UU Penanaman modal asing diikuti Pertemuan Amsterdam 23 Februari 1967 yang menghasilkan *International Government Group for Indonesia (IGGI)*. Organisasi ini adalah organisasi negara negara kreditor yang memberi pinjaman kepada Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Selandia Baru, Jerman Barat, Belanda, Inggris, Kanada, Belgia, Swiss dan Italia. Indonesia kelak ada Bank Dunia, WTO, IMF. Perubahan besar terjadi dalam PP dan K.

Sempat ada seorang menteri yaitu Dr. Daud Yusuf (Kabinet pembangunan III, 31 Maret 1978 - 19 Maret 1983) yang masih ada nuansa KHD, tetapi setelah itu habis. Gebrakan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Letnan Jenderal Prof Dr Nugroho Notosusanto (Kabinet Pembangunan IV yang mulai 13 Februari 1983, membuat sejarah Pancasila jungkir balik. Dokumen asli rapat BPUPKI dinyatakan hilang, baru ditemukan sekitar tahun 2000, kemudian ditulis oleh AB Kusuma dan diterbitkan tahun 2004. Program pelemahan ideologi Pancasila dan de-Sukarnoisasi secara masif, karena akan mengganggu pelaksanaan UU Penanaman Modal Asing. Bukti nyata pemerintah tidak mengakui 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila, dan Presiden Suharto tidak lagi melakukan upacara kenegaraan pada 1968.

Tujuan utama PP dan K adalah: membentuk manusia Indonesia yang harus mampu mengembalikan uang dan bunga para kreditor, tetapi dibungkus dengan kata-kata indah iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan imtak (iman dan takwa). Masih ditambah berazas Pancasila dasar negara.

### **Refleksi Setelah Reformasi 1998**

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hanya mereformasi pimpinan di atas, tidak sampai menjangkau ke bawah, juga tidak pada tataran filosofi, nilai dan kebijakan PP dan K. Kebijakan PP dan K masih melanjutkan tahun sebelumnya. Puncak intervensi asing khususnya Amerika Serikat adalah Amandemen UUD 45 pada 2002 dan UU Sisdiknas 2003. Contoh yang paling sederhana sekarang ini adalah hilangnya kemampuan ilmu sejarah dan ilmu bumi

(istilah lama) pada anak didik. Akibatnya pemahaman Pancasila lemah, karena dasar anak didik bisa memahami dengan baik adalah Ilmu Sejarah dan Ilmu Bumi.

### **Refleksi di Bidang Kebudayaan**

Tantangan kebudayaan sekarang ini adalah pemahaman kebudayaan para pengambil kebijakan yang sempit, bukan kebudayaan yang dimaksud KHD. Contoh yang mudah dilihat adalah upaya ada yang menginginkan Kementerian Kebudayaan pisah dari Kementerian Pendidikan. Kebudayaan Indonesia seluruhnya itu sudah selaras dengan nilai Pancasila. Karena sila-sila Pancasila menurut asal muasalnya adalah dari budaya asli Indonesia (baca tentang meja statis dan leitstar dinamis).

Kebudayaan saat ini menjadi dipersempit artinya menjadi kesenian yang kemudian dapat dijadikan komoditas ekonomi, dan mendukung sektor pariwisata. Sehingga esensi atau substansi kebudayaan menjadi sangat superfisial.

### **Prospek Kebudayaan Masa Depan**

Periode pemerintahan sekarang ini mengingatkan tiga pilar utama marwah NKRI yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian Indonesia dalam bidang budaya. Sejarah berulang, sekarang muncul kesadaran bahwa kebudayaan dalam arti luas dipengaruhi intervensi asing.

Banyak peraturan daerah (PERDA) yang berisi pengembangan dan pelestarian budaya lokal. Hal ini sangat bagus dan harus terus diupayakan implementasinya terutama dukungan dana dan regulasi. Kelemahan utama adalah di bidang sumber daya manusia, yaitu guru dan fasilitas. Disini harus menjadi *political will* negara untuk terus meningkatkan sekolah atau perguruan ilmu keguruan dan pendidikan (entah apapun namanya).

Ilmu-ilmu sosial humaniora belum mendapat tempat terhormat seperti pada priode pertama.

Kita lupa tidak belajar sejarah PP dan K negara maju, bahwa dasar utama kemajuan suatu bangsa dan negara itu mempunyai karakter bangsa yang kuat, dan hanya dapat dibentuk melalui ilmu sosial humaniora, dengan guru-guru yang berkarakter kuat, baru kemudian profesionalisme di bidangnya masing masing. Kita terjebak kagum pada dunia intelektualisme barat, yang oleh KHD sudah diperingatkan bahwa hal itu berbahaya, karena tidak semuanya sesuai dengan kodrat bangsa kita.

### **Catatan Akhir**

Melihat uraian refleksi sejarah PP dan K, timbul pertanyaan pokok, akankah kita mengulang sejarah PP dan K untuk kembali ke semangat PP dan K untuk negara dan bangsa khususnya, dan dunia pada umumnya seperti KHD tahun 1912?

Dari Kongres ini dapat diharapkan rekomendasi adanya *grand design*, konsep yang mantap untuk 2 periode alih generasi, sekitar 30 tahun yang akan datang, berdasar azas Pancasila. Bagaimana PP dan K, dan hasil manusia yang dihasilkan, harus mampu dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengambil kebijakan. Asal para konseptor itu mempunyai jiwa Pancasila, konsep yang dihasilkan pasti berjiwa Pancasila, dan intinya kembali PP dan K untuk membentuk manusia budaya Indonesia 30 tahun yang akan datang. Bahwa Konsep KHD tentang PP dan K yang tidak terpisahkan, dengan format kekinian (konsep Tri KON), masih relevan. Negara-negara maju dimanapun juga selaras dengan konsep KHD.

Membentuk Kebudayaan Nasional Indonesia paling baik tetap melalui jalur pendidikan baik di keluarga, masyarakat dan sekolah (Tri Pusat), sehingga Kebudayaan tidak terpisahkan dengan Pendidikan dan Pengajaran.

# MAKALAH SESI PARAREL

## ***PROSIDING***

*Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan IV Tahun 2018*

***REFLEKSI 20 TAHUN REFORMASI***

***PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN***

# **Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Permainan Tradisional sebagai Upaya Pembentukan Karakter Anak**

**Ali Imron**

Universitas Negeri Surabaya  
E-mail: aliimron@unesa.ac.id

## **Abstrak**

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai sumber nilai luhur sekaligus tolak ukur dan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, fenomena saat ini justru terasa masih jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila karena lemahnya moralitas dan karakter anggota masyarakat. Padahal, karakter dan identitas suatu bangsa akan kuat apabila didukung oleh nilai-nilai budaya luhur yang senantiasa dipelihara, dipertahankan dan dikembangkan. Upaya penguatan karakter dan identitas bangsa akan sangat efektif apabila dilakukan sejak usia dini (anak-anak). Salah satu strategi yang bisa dikembangkan adalah melalui permainan tradisional. Tujuan penulisan paper ini untuk mendeskripsikan strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui permainan tradisional sebagai upaya pembentukan karakter anak. Permainan tradisional anak merupakan permainan yang beredar secara lisan diantara anggota tradisi budaya tertentu, berbentuk tradisional, terdapat aturan main yang mengandung nilai-nilai luhur, dilakukan melalui proses interaksi dan diwariskan secara turun-temurun. Permainan tradisional bersifat alamiah, anak mendapat kesempatan mengeksplorasi berbagai media yang tersedia secara alami sebagai dasar berpikir kreatif, merangsang anak untuk berinteraksi dengan orang lain di dalam kelompok. Di dalam interaksi kelompok terjadi proses sosialisasi yang mengajarkan pendidikan nilai-nilai luhur.

**Kata Kunci:** Pembudayaan; Pancasila; Permainan Tradisional; Karakter; Anak

## **Pendahuluan**

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai sumber nilai sekaligus tolak ukur bagi penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga sebagai sistem nilai luhur yang dimiliki Bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Namun, fenomena kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia saat ini justru terasa masih jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Lunturnya nilai-nilai Pancasila disebabkan lemahnya moralitas atau karakter anggota masyarakat. Padahal, karakter dan identitas suatu bangsa akan kuat apabila didukung oleh nilai-nilai budaya luhur yang senantiasa dipelihara, dipertahankan dan dikembangkan. Kuatnya karakter dan identitas juga akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional suatu bangsa.

Kajian Sumardjoko (2013), mengungkapkan bahwa komponen penting pendukung pembudayaan Pancasila berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran, antara lain partisipasi seluruh elemen pemangku kepentingan (sekolah, pemerintah, swasta, dan masyarakat). Peran serta aktif pemangku kepentingan dalam revitalisasi nilai-nilai Pancasila berpengaruh pada penguatan karakter dan jati diri bangsa. Seluruh pemangku kepentingan harus komitmen dan mempunyai kesamaan persepsi dalam mewujudkan tujuan pembelajaran. Sedangkan Shofa (2016), menjelaskan bahwa bangsa Indonesia telah dipersatukan dengan adanya kesepakatan bersama para pendiri bangsa. Sebagai pemersatu ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai solusi dari adanya konflik yang terjadi antargolongan dan antaragama. Pancasila telah mampu menunjukkan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, heterogen, dan



multikultural. Oleh karena itu, domain kebudayaan menjadi amunisi penting dalam konteks pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konteks penguatan karakter.

Pendidikan karakter yakni usaha sadar untuk membantu manusia dalam memahami, peduli, dan melaksanakan nilai-nilai etika. Nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik menurut Thomas Lickona (seperti dikutip Lubis, 2001), ada 7 (tujuh) unsur, yaitu ketulusan hati atau kejujuran, belas kasih, gagah berani, kasih sayang, kontrol diri, kerjasama, dan kerja keras. Upaya penguatan karakter dan identitas bangsa akan sangat efektif apabila dilakukan sejak usia dini (anak-anak). Oleh karena itu, sangat mendesak untuk segera memperkuat karakter dan identitas bangsa melalui media pendidikan dan kebudayaan sejak usia dini. Salah satu strategi yang bisa dikembangkan adalah melalui permainan tradisional.

Permainan tradisional merupakan permainan yang beredar secara lisan diantara anggota masyarakat tertentu, berbentuk tradisional, terdapat aturan main yang mengandung nilai-nilai luhur, dilakukan melalui proses interaksi, serta diwariskan secara turun-temurun (Dananjaya, 1987: 45). Permainan tradisional bersifat alamiah sehingga anak mendapat kesempatan mengeksplorasi berbagai media yang tersedia secara alami sebagai dasar berpikir kreatif, serta merangsang anak untuk berinteraksi dengan orang lain di dalam kelompok. Di dalam interaksi kelompok terjadi proses sosialisasi yang mengajarkan pendidikan nilai-nilai luhur.

Permainan tradisional adalah salah satu wujud atau bentuk kebudayaan. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan, keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, serta pernyataan intelektual dan seni yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Sementara definisi budaya sendiri berasal dari akar kata *buddhaya*, yang diambil dari bahasa Sansekerta, yang berdasarkan kata *bud* yang kita kenal pula sebagai kata budi dalam bahasa Indonesia (Koentjaraningrat, 2000: 10). Jadi, budaya merupakan semua aspek ungkapan ekspresif insane manusia yang diwujudkan pada alam sekitarnya, baik bersifat fisik maupun mental. Permainan tradisional dikategorikan dalam tiga golongan, yaitu permainan untuk bermain (rekreatif), permainan untuk bertanding (kompetitif) dan permainan yang bersifat edukatif. Permainan tradisional yang bersifat rekreatif pada umumnya dilakukan untuk mengisi waktu senggang. Permainan tradisional yang bersifat kompetitif, memiliki ciri-ciri, antara lain, terorganisir; bersifat kompetitif; dimainkan oleh paling sedikit dua orang; mempunyai kriteria yang menentukan siapa yang menang dan yang kalah; serta mempunyai peraturan yang diterima bersama oleh pesertanya. Sedangkan permainan tradisional yang bersifat edukatif, terdapat unsur-unsur pendidikan di dalamnya.

Melalui permainan seperti ini, anak-anak diperkenalkan dengan berbagai macam keterampilan dan kecakapan yang nantinya akan mereka perlukan dalam menghadapi kehidupan sebagai anggota masyarakat. Inilah salah satu bentuk pendidikan yang bersifat nonformal di dalam masyarakat. Permainan tradisional menjadi media sosialisasi agar anak-anak bisa beradaptasi sebagai anggota kelompok sosialnya.

## Metode

Artikel ini merupakan gagasan tertulis yang dibangun dari penelusuran data dan informasi dari kepustakaan. Hasil penelusuran kepustakaan kemudian dideskripsikan melalui dialog dengan kasus-kasus yang relevan. Pembahasan artikel ini akan disajikan dalam beberapa subbab agar diperoleh kedalaman analisis.

## Hasil dan Pembahasan

### Perspektif Edukatif Permainan Tradisional

Apabila ditinjau dari perspektif teori *Experiential Learning*, Bruche (1992: 34-37), mengemukakan bahwa *EL* adalah proses belajar dimana subyek melakukan sesuatu, bukan hanya memikirkan sesuatu, dimana di dalamnya terdapat aktifitas alami, keterampilan untuk menerapkan pemikiran dalam aktifitas dan cara aktivitas itu dijalankan. Permainan tradisional

yang dilakukan anak-anak dan biasa dilakukan di luar ruangan dapat dikategorikan dalam *experiential learning*. *Experiential learning* memaksimalkan fungsi seluruh indera sehingga anak dapat menyingkap seluruh lingkungan yang alami.

Anak-anak yang memainkan permainan tradisional akan memperoleh pengalaman lebih untuk mengembangkan keterampilan diri maupun keterampilan sosial. Sasaran utama permainan yang dimainkan di luar ruangan adalah relasi dengan sumber-sumber alam dan relasi antara manusia dan lingkungan sosialnya. Anak harus memiliki pengalaman pertama yang bersifat nyata terhadap obyek-obyek yang sebenarnya, sebelum mereka membaca tentang obyek-obyek tersebut, anak akan berpikir dengan menggunakan panca inderanya.

### **Pembentukan Nilai, Moral dan Karakter dalam Permainan Tradisional**

Permainan tradisional yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia memiliki nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai landasan filosofisnya. Nilai-nilai kearifan lokal inilah yang juga mengilhami lahirnya Pancasila, artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pandangan hidup yang menjadi acuan berperilaku. Secara garis besar, nilai-nilai kearifan lokal mencakup gotong royong, tenggang rasa, kesetiakawanan, senasib sepenanggungan, cinta persaudaraan, dan perdamaian. Nilai-nilai inilah yang selanjutnya berkembang menjadi acuan moral. Pada hakikatnya, moral menunjuk pada ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas. Bull (1969: 18), menyatakan ada empat tahap perkembangan nilai yang dilalui individu:

1. Tahap anatomi, yaitu tahap nilai baru yang merupakan potensi dan siap dikembangkan. Pada tahap ini, nilai-nilai budaya baru dikenalkan sebagai tahap pengetahuan, dimana anak-anak diajarkan untuk memahami perbedaan. Dengan demikian, anak-anak akan mengenal adanya perbedaan, dimana perbedaan itu dapat dijadikan ajang saling mengenal, bekerja sama, bahkan untuk menyayangi dengan mengembangkan empati sosial. Di lain pihak, ditumbuhkan pada anak-anak kebanggaan akan identitasnya.
2. Tahap heteronomi, yaitu tahap nilai potensial yang dikembangkan melalui aturan dan pendisiplinan. Pada tahap ini, nilai-nilai budaya sudah dikenalkan melalui aturan permainan, dimana anak diarahkan untuk mematuhi aturan permainan apabila ingin terlibat di dalamnya.
3. Tahap sosionomi, yaitu tahap nilai berkembang di tengah-tengah teman sebaya dan masyarakatnya. Pada tahap ini, proses nilai-nilai budaya sudah dilakukan melalui aturan permainan, dimana anak sudah dapat berbagi aturan dengan teman sebaya sebagai *rolemodel* yang mengikuti permainan yang sama. Apabila proses ini terus berulang dan berkesinambungan, maka anak akan terbiasa menghormati aturan main yang akan membantunya kelak untuk beradaptasi dengan aturan masyarakat. Dalam permainan tradisional, penanaman nilai-nilai moral tidak hanya berupa nilai-nilai sebagai slogan hafalan, melainkan secara langsung anak mengembangkan ketaatan serta keterampilan dalam perilaku bermoral melalui aturan bermain.
4. Tahap otonomi, yaitu tahap nilai mengisi dan mengendalikan kata hati dan kemauan bebasnya tanpa tekanan lingkungannya. Pada tahap ini, seiring dengan proses yang berlangsung berkesinambungan dan menetap, maka nilai-nilai moral dalam permainan tradisional akan terinternalisasi sehingga individu sudah terbiasa mengendalikan diri tanpa tertekan oleh aturan otoritas, tetapi kemampuan mengendalikan diri lebih disebabkan karena anak mampu mematuhi aturan berdasarkan pengalaman menyenangkan saat bermain yang telah terekam dalam memori di alam bawah sadarnya.

Selanjutnya untuk pembentukan karakter, bahwa perkembangan karakter individu meliputi empat komponen, yaitu kognitif, afektif, kemauan dan perilaku. Dalam kaitan ini, nilai

masih merupakan orientasi yang berada pada komponen kognitif dan afektif, tetapi belum selalu akan diwujudkan dalam bentuk kemauan atau perilaku. Sedangkan karakter sudah meliputi aplikasi dari pengetahuan, yang sudah meliputi komponen kognitif, afektif, kemauan dan perilaku. Nilai-nilai pada tahap anatomi, heteronomi, dan sosionomi merupakan pondasi dari terbentuknya karakter. Komponen kognitif meliputi pengetahuan mengenai yang baik dan buruk dengan dasar rasional yang akan memproses secara kreatif sebagai bahan keputusan moral. Selanjutnya, pengetahuan yang sudah tersimpan akan mempengaruhi nilai apa yang akan tertanam pada komponen afektif, untuk menghasilkan moral.

Kedua komponen ini selanjutnya akan mempengaruhi komponen kemauan berupa komitmen untuk memunculkan perilaku baik dan buruk. Dasar komitmen ini didasari pengetahuan untuk mengetahui nilai apa yang dipelajari berdasarkan pengetahuan yang telah tersimpan sebelumnya. Artinya, kedua komponen ini mempengaruhi kemauan untuk melakukan komitmen, tujuan, rencana, dan kekuatan untuk mencapainya. Selanjutnya, ketiga komponen ini mempengaruhi komponen terakhir, yaitu perilaku sejalan dengan tahap otonomi di atas. Perilaku memiliki dua aspek, yakni perilaku personal dan perilaku sosial. Perilaku personal meliputi, keberanian, disiplin diri. Sedangkan yang termasuk perilaku sosial adalah sopan santun, dapat dipercaya, dan memiliki perasaan iba pada orang lain.

Pada saat individu berhasil merefleksikan pengetahuan, nilai, kemauan komitmennya ke dalam perilaku aktualnya, maka hal tersebut akan semakin menambah dasar pengetahuannya, memperkuat kemampuannya di dalam menganalisa nilai serta dampak nilai yang diyakininya. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus menerus, maka akan terbentuk kebiasaan yang akan menjadi karakter yang menetap.

Permainan tradisional sangat dekat dengan unsur-unsur alam, baik dalam hal tempat bermain maupun alat-alat permainan yang digunakan. Hal ini berperan penting dalam mendekatkan individu dengan alam (ekologi) yang bukan hanya sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai jiwa dari kehidupan. Dengan demikian, kedekatan dan keterlibatan dengan alam ini mampu menumbuhkan nilai-nilai positif dalam berinteraksi dengan alam itu sendiri. Bisa dikatakan seluruh permainan tradisional yang ada ini menggunakan unsur-unsur alam sebagai media atau alat permainan. Permainan tradisional ada yang menggunakan daun-daunan kering, ranting, batang pisang, menggunakan sarang laba-laba sebagai pengganti benang, menggunakan bunga kelapa sebagai pelampung, jerami sebagai alat musik, atau batu-batuan sebagai benteng. Bahan yang digunakan pada umumnya adalah bagian tanaman yang sudah mengering atau gugur secara alami, sehingga anak-anak ini sama sekali tidak merusak alam. Beberapa permainan tradisional juga ada kalanya menggunakan semacam nyanyian atau kidung atau syair-syair yang berisi pesan-pesan moral berupa do'a untuk pelestarian alam dan penghormatan masyarakat setempat pada penguasa alam.

## Penutup

Perubahan sosial yang begitu cepat berdampak pada perubahan perilaku anggota masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofis kehidupan, serta pedoman hidup ternyata tidak mampu membendung perilaku anggota masyarakat yang sudah meninggalkan nilai-nilai moral yang pada akhirnya berdampak pada mudarnya karakter bangsa. Kondisi ini memunculkan tuntutan untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui strategi kebudayaan. Disadari bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah diimplementasikan sejak usia dini, maka anak-anak menjadi bagian dari strategi kebudayaan nilai-nilai Pancasila. Permainan tradisional dipilih sebagai metode untuk menerapkan strategi ini, karena permainan sangat dekat dengan dunia anak-anak. Belum lagi, di dalam permainan tradisional terkandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan mampu membentuk karakter yang bermoral dan bermartabat.

### Daftar Pustaka

- Danandjaya, James. 1987. *Floklare di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Joyce, Bruce. 1992. *Models of Teaching*. Boston: Elin and Bacon.
- Koentjaraningrat. 2000. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, Mochtar. 2001. *Manusia Indonesi: Sebuah Pertanggungan Jawab*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shofa, Abd. Mu'id Aris. 2016. "Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016.
- Sumardjono, Bambang. 2013. "Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKn Berbasis Kearifan Lokal Untuk Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa", *Varia Pendidikan*, Vo. 25, No. 2, Desember 2013.

## Konsep dan Implementasi Pengajaran Humanistik Pada Akademi Keperawatan

**E. Kristanti**

Universitas Timor Kefamenanu  
E-mail: elsakristanti@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian untuk menemukan fondasi atau landasan pedagogis humanistik, cara untuk mengukur kualitas humanistik, metode pengajaran yang efektif dan efisien, serta aspirasi bagi mahasiswa untuk mencapai sense (makna) yang lebih besar dari tanggungjawab medis. Subjek penelitian adalah mahasiswa-mahasiswi dan para dosen Akademi Keperawatan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, kuesioner preferensi mahasiswa terhadap strategi pengajaran dan preferensi mahasiswa terhadap matakuliah dalam kurikulum Akademi Keperawatan. Reliabilitas alat ukur menggunakan *Cronbach's alpha* dengan bantuan program *SPSS 15.0 for windows*. Analisis faktor digunakan untuk menguji ketepatan alat ukur. Hasil penelitian melalui wawancara mendalam: (1) pendidikan medis yang humanis merupakan suatu konsep mental yang mengakui bahwa manusia itu berharga, kehidupan merupakan suatu yang nyata. Respek yang besar terhadap kehidupan adalah bersifat mendasar atau sangat penting; kita harus memahami apa yang membuat orang merasa berharga; (2) etika medis merupakan sesuatu yang dapat dihidupkan ke dalam masyarakat; (3) pengalaman dosen merupakan sesuatu yang paling berharga. Lima metode pengajaran memperoleh rating tinggi dari para mahasiswa sebagai cara yang paling menarik, diterima dan bermanfaat dalam pembelajaran humanistik, yaitu: (1) Diskusi kelompok; (2) Debat; (3) Belajar individual; (4) Dosen sebagai fasilitator; (5) Sertifikat sebagai motivasi. Sedangkan tiga matakuliah yang mendapat respon yang besar dari para mahasiswa dilihat dari 3 aspek yaitu: (1) Agama; (2) Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah dan (3) Bahasa Indonesia

**Kata kunci: Kompetensi Humanistik, Kurikulum dan Pedagogi**

### Pendahuluan

Menjadi sehat jasmani, rohani, maupun sosial seperti dicita-citakan WHO, tentu idaman semua orang. Tetapi, untuk mendapatkan ketiganya secara bersamaan, jelas bukan urusan mudah. Perlu pendekatan bersifat holistik. Raga dipulihkan, jiwa diputihkan, dan relasi sosial juga perlu ditumbuhkan. Bagaimana caranya? Tentu tak cuma dengan menelan obat atau menusukkan jarum suntik berisi obat. Masih butuh "obat-obat" lain.

Perawat merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit atau klinik-klinik kesehatan. Namun demikian masih banyak keluhan masyarakat (pasien dan atau keluarga pasien) terhadap pemberian pelayanan dari perawat di rumah sakit-rumah sakit ataupun di klinik-klinik kesehatan. Sering terdengar di lingkungan sekitar atau di media massa berbagai keluhan mengenai sikap dan tindakan perawat yang mengecewakan seperti galak, judes, kurang perhatian, kurang tanggap, kurang trampil, cenderung kurang empati. Sikap dan perilaku tersebut sering terjadi selain karena memang kepribadian perawat dan petugas kesehatan tersebut, namun juga tidak jarang karena kebijakan rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan tersebut. Kita bisa melihat contoh dari kasus meninggalnya bayi Deborah yang menjadi viral di

media sosial akibat dari dugaan pelayanan rumah sakit yang buruk (Kompas.com, Minggu 10 September 2017)

Hampir banyak orang mempunyai keluhan yang menakutkan tentang berbagai kunjungan kepada berbagai macam petugas kesehatan. Salah satu topik yang banyak dibahas dalam perawatan kesehatan adalah interaksi antara pasien dengan tenaga kesehatan. Sifat hubungan ini sangat penting karena merupakan faktor utama yang menentukan hasil konsultasi medis, seperti rasa puas pasien, ketaatan aturan medis, dan akhirnya dengan hasilnya kesehatan (Smet, 1994).

Melihat fenomena keperawatan era ini, hubungannya dengan peran perawat dalam melakukan tindakan keperawatan yang tepat dan sesuai, sisi humanisme yang sebenarnya ada dalam diri seorang perawat tampaknya sebagian besar belum terlihat. Padahal, dalam keperawatan, humanisme memiliki wadah cakupan yang sangat spesial. Humanisme merupakan suatu sikap dan pendekatan yang memperlakukan pasien sebagai manusia yang memiliki lebih dari sekedar penyakitnya.

Beberapa penelitian tentang pentingnya profesionalisme perawat menunjukkan bahwa perawat mempunyai peranan penting dalam usaha penyembuhan pasien (Nuralita dan Hadjam, 2001). Empati perawat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap motivasi sembuh pada pasien penderita kanker (Novrita, 2004). Penelitian oleh Rosenstein, 2002 (Rosenstein dan O'Daniel 2005 dalam <http://www.stikescharitas.com>) yang responden adalah pensiunan administrator rumah sakit yang meliputi, dokter, perawat dan tenaga staf administrasi di berbagai negara maju, antara lain di Amerika Serikat menemukan bahwa terjadi persepsi negatif terhadap ketidakpuasan dan hasil perawatan disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik yang dilakukan oleh para dokter dan perawatan kesehatan serta staf devisi penunjang.

Seorang perawat kesehatan adalah petugas kesehatan yang mempunyai peran dominan dalam membantu pasien sembuh dari penyakit yang dideritanya. Seorang perawat sebagai ujung tombak pelayanan di rumah sakit, sebagai aktor yang langsung berhadapan dengan pasien dalam waktu yang lama. Kondisi yang seperti itu menuntut totalitas seorang perawat dalam menjalankan fungsinya. Profesionalitas menjadi tuntutan yang harus selalu ditingkatkan. Profesionalitas akan terus tumbuh dan berkembang bila seorang perawat mempunyai kemauan untuk mengembangkan berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan profesi keperawatan. Profesi keperawatan bersifat multikausal dan multidisiplin. Seorang perawat kesehatan harus mampu membuat konfigurasi berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan dengan fakta real yang pada setiap pasien yang mempunyai kasus, latar belakang berbeda-beda (multi kausal).

Model pendekatan yang harus selalu diingat oleh seorang perawat kesehatan pada saat melakukan intervensi adalah “model pemenuhan harapan pasien”. Pemenuhan harapan pasien akan dapat dipenuhi bila seorang selalu mengacu pada kebutuhan yang hirarkisnya telah dibuat oleh Maslow. Pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pasien tidak dapat dilepaskan dengan *field of experience* (pengalaman masa lampau hidupnya) yang sangat dipengaruhi oleh internalisasi nilai-nilai budaya yang sudah menyatu dalam diri pasien.

Pelayanan perawatan akan masuk dalam katagori berkualitas bila tindakan layanan yang dilakukan oleh seorang tenaga perawatan dilandasi pada standard keperawatan yang mampu memenuhi harapan pasien. Dalam lokakarya keperawatan tahun 1993 (Hadjam, 2001) mendefinisikan keperawatan sebagai suatu bentuk layanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif serta ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup keseluruhan siklus kehidupan manusia.

Kozier Barabara (1983), konsep keperawatan adalah tindakan perawatan yang merupakan konfigurasi dari ilmu kesehatan dan seni merawat yang meliputi pengetahuan ilmu humanistik, filosofi perawatan, praktik klinis keperawatan, komunikasi dan ilmu sosial.

Konsep ini ingin memberikan penegasan bahwa sifat seorang manusia yang menjadi target pelayanan dalam perawatan adalah bersifat bio-psycho-sosi al-spiritual. Oleh karenanya tindakan perawatan harus didasarkan pada tindakan yang komprehensif sekaligus holistik. (<http://www.stikescharitas.com>)

Dari definisi yang dirumuskan di atas, nampak bahwa pelayanan perawat bersifat komprehensif, *bio-psiko-sosiocultural-spiritual*, serta ditujukan baik kepada pasien atau keluarga pasien dan masyarakat baik sakit ataupun sehat yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan tenaga medis/perawat haruslah bersifat holistik.

Sejak tahun 2002, WHO (dalam Lai et.al, 2006) telah mengumandangkan “*quality control*” atau pengawasan mutu sebagai motto bagi pendidikan medis dalam merespon globalisasi. Hal ini memberikan suatu fondasi dan alasan yang kuat bagi pendidikan yang humanistic bagi staf para medis pada masa yang akan datang. Satu ide yang berguna untuk dipraktekkan adalah integrasi studi manusia secara keseluruhan dan pendidikan medis. Oleh karena itu di dalam pendidikan medis, studi yang utuh merupakan sesuatu yang menarik bagi aspek ilmu mendidik yang humanistik.

Memasuki standar budaya dan kemasyarakatan pada tingkatan yang lebih tinggi, masyarakat memiliki harapan-harapan yang lebih tinggi kepada masyarakat medis. Tujuan sesungguhnya dari pengajaran humanistik adalah untuk memperluas perspektif para mahasiswa dan memberikan contoh yang lebih spesifik dari sikap mereka menuju pada kehidupan manusia. Tujuan-tujuan terapeutik dan diagnose harus menempatkan atau memberikan tekanan yang lebih besar pada perawatan pasien daripada penyakit itu sendiri.

Penelitian mempunyai tujuan untuk menemukan fondasi atau landasan pedagogis, cara untuk mengukur kualitas humanistik, metode pengajaran yang efektif dan efisien, dan aspirasi bagi mahasiswa untuk mencapai sense (makna) yang lebih besar dari tanggungjawab medis.

## Metode Penelitian

Pengambilan sampel pada mahasiswa dilakukan dengan teknik *proportionate stratified random sampling*, sedangkan pada staf pengajar dilakukan secara *insidental sampling*. Interviewee adalah para mahasiswa dan staf pengajar pada Akademi Keperawatan Kabupaten Belu.

Pengumpulan data melalui interview mendalam (*In-depth interview*). Fokus utama dari penelitian ini adalah mengumpulkan dan mengakomodasi berbagai isu dan integrasi dari humaniora di dalam pengobatan adalah penting untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan untuk mengidentifikasi hal-hal penting dari humaniora medis. Semua pandangan yang diberikan akan memberikan manfaat yang besar, karena opini yang beraneka ragam akan memperluas perspektif dalam melihat dan memaknai humaniora.

### A. Pertanyaan Yang Dikembangkan Dalam Interview

- 1) Apa yang menjadi dasar atau landasan dalam pengobatan/pelayanan kesehatan yang manusiawi?
- 2) Mata kuliah apa saja yang berkaitan dengan pengobatan/pelayanan kesehatan yang humanis? Mengapa?
- 3) Metode apa saja yang digunakan untuk melaksanakan pengajaran tentang pengobatan/pelayanan kesehatan yang humanis?
- 4) Bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang humanis untuk mencapai potensi (hasil belajar mahasiswa) yang maksimal?

Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif ini dapat memberikan *insight* yang lebih luas ke dalam strategi pengajaran medis yang humanis

## B. Pengembangan Pedoman Assessmen

Sebelum dan sesudah implementasi metode pengajaran yang disarankan, perlu dikembangkan suatu tes assessmen kompetensi humanistik bagi mahasiswa untuk menemukan metode pengajaran yang paling efektif untuk pendidikan medis yang humanis. Isu-isu yang dipertimbangkan untuk assessment adalah : (a) Karakter dan kualitas apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk mendapat label sebagai seorang mahasiswa yang humanis? (b) Dalam kehidupan seseorang, aspek-aspek apa saja yang merefleksikan kompetensi humanistik? (c) Bagaimana cara menemukan dan meminimalisir ketidakjujuran dan ketidakhati-hatian dalam melakukan assessment? Pertanyaan-pertanyaan tersebut didasarkan pada tiga aspek utama untuk mengungkapkan kompetensi humanistik dari para mahasiswa yaitu (1) Etika Humanistik; (2) Psikologi dan (3) Seni dan Budaya. Test assessmen terdiri dari 30 pertanyaan dan masing-masing aspek terdiri dari 10 pertanyaan yang bersifat *favorable* dan *unfavorable*. Aitem-aitem pernyataan di susun berdasarkan *skala Likert* yang telah di modifikasi, responden memilih 5 (lima) alternatif jawaban yang tersedia yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Tahu (TT), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

Tabel 1 : Distribusi Skor Pertanyaan Assessmen

Distribusi Score	Pertanyaan <i>Favorable</i> :	Pertanyaan <i>Unfavorable</i>
	(2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 30)	(1, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29)
	Pilihan SS : 4 point	Pilihan SS : 0 point
	Pilihan S : 3 point	Pilihan S : 1 point
	Pilihan TT : 2 point	Pilihan TT : 2 point
	Pilihan TS : 1 point	Pilihan TS : 3 point
	Pilihan STS : 0 point	Pilihan STS : 4 point
<b>Etika Humanistik</b>	(3, 4, 11, 18, 22)	(7, 10, 17, 24, 27)
<b>Psikologi dan Society</b>	(2, 6, 12, 14, 25)	(1, 5, 13, 20, 23)
<b>Seni dan Budaya</b>	(9, 16, 26, 28, 30)	(8, 15, 19, 29, 21)

## C. Kuesioner Preferensi Pengajaran Humanistik

Preferensi mahasiswa terhadap strategi pengajaran merupakan salah satu faktor yang penting di dalam menetapkan keefektifan dari mata kuliah yang diberikan. Pengumpulan data pada kuesioner preferensi

mahasiswa terhadap strategi pengejaran dengan menggunakan skala Likert dan pertanyaan terbuka. Strategi pengajaran terdiri dari 18 macam, dimana para mahasiswa diminta untuk memberikan respon untuk setiap strategi dengan menggunakan metode skala Likert



dengan 5 (lima) pilihan jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Ragu-ragu (R), Sangat Tidak Setuju (STS). Selain 18 pertanyaan tentang strategi pengajaran, terdapat 1 (satu) pertanyaan terbuka. Strategi pengajaran sebanyak 18 dan 1 pertanyaan terbuka tersebut adalah sebagai berikut: (1) Sharing pengalaman; (2) Praktisi sebagai model pembelajaran; (3) Pembelajaran dari kasus-kasus medis; (4) Diskusi Kelompok; (5) Sistem asistensi pengajaran; (6) Seminar; (7) Debat; (8) Bermain peran; (9) Dosen sebagai fasilitator, aspirator dan katalisator pengajaran; (10) Aktivitas dan gaya mengajar dosen yang berbeda; (11) Pembelajaran video dan mereview ; (12) Program Praktek Pengalaman Lapangan (13) Belajar dari orang yang kurang beruntung; (14) Belajar individual; (15) Model riset lapangan; (16) Belajar mandiri; (17) Sertifikat sebagai motivasi; (18) *Group Investigation*. Sedangkan 1 (satu) pertanyaan terbuka yaitu : Mana yang lebih berarti bagi mahasiswa: pengobatan humanis atau humanita medis? Apa maksud dari kedua istilah tersebut?

#### D. Kuesioner Preferensi Mata Kuliah Humanistik

Kuesioner tentang preferensi mata kuliah humanistik didesain sama dengan kuesioner preferensi (pilihan) pengajaran humanistik. Kuesioner dengan menggunakan skala *Likert* dengan 5 pilihan jawaban dan daftar mata kuliah di dalam kuesioner dikelompokkan atas 3 kategori yaitu sebagai berikut:

Tabel 2 : Kuesioner Preferensi Mata Kuliah

Kategori	Daftar Mata Kuliah
Literature, Sejarah dan Filosofi	1. Agama 2. Kewarganegaraan 3. Pancasila 4. Ilmu Biomedik Dasar 5. Farmakologi 6. Pemeriksaan Fisik dan Studi Diagnostik 7. Patofisiologi 8. Informasi dan Teknologi 9. Konsep Dasar Keperawatan 10. Metodologi Keperawatan 11. Etika Keperawatan Dasar 12. Manajemen Keperawatan
Psikologi dan Masyarakat	1. Psikologi 2. Gizi dan Diet 3. Keperawatan Medikal Bedah 4. Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah 5. Keperawatan Anak 6. Keperawatan Maternitas 7. Keperawatan Jiwa 8. Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana 9. Keperawatan Komunitas 10. Keperawatan Keluarga 11. Keperawatan Gerontik 12. Praktik Komunitas (Puskesmas, PKMD) 13. Keperawatan Profesional
Budaya dan Seni	1. Bahasa Indonesia 2. Dokumentasi Keperawatan 3. Promosi Kesehatan

	4. Keperawatan Perairan 5. Keperawatan Komplementer 6. Kewirausahaan 7. Antrophologi Keperawatan 8. Bahasa Inggris
--	--

Tabel 3 : Hasil Analisis Reliabilitas Test Assessmen Kompetensi Humanistik (Kuesioner Etika Humanistik)

	N of cases	N of Items	Cronbach's Alpha	%
Cases Valid	20	30	,601	100,0
Excluded (a)	0			,0
Total	20	30		100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 4 : Analisis Reliabilitas Test Assessmen Kompetensi Humanistik (Kuesioner Psikologi Sosial)

	N of cases	N of Items	Cronbach's Alpha	%
Cases Valid	20	30	,770	100,0
Excluded (a)	0			,0
Total	20	30		100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 5 : Analisis Reliabilitas Test Assessmen Kompetensi Humanistik (Kuesioner Seni Budaya)

	N of cases	N of Items	Cronbach's Alpha	%
Cases Valid	20	30	,714	100,0
Excluded (a)	0			,0
Total	20	30		100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 6. Analisis Reliabilitas Test Assesmen Kompetensi Humanistik (Seluruh)

	N of cases	N of Items	Cronbach's Alpha	%
Case Valid	20	30	,877	100,0
Excluded (a)	0			,0
Total	20	30		100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Koefisien reliabilitasnya lebih dari 0.6 untuk group kelompok individu dan lebih dari 0.8 secara keseluruhan maka test assessment ini dianggap reliable.

Tabel 7 : KMO and Bartlett's Test (Struktur pertanyaan *favorable*)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,597
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	158,694
	Df	6
	Sig.	,000

Tabel 8 : KMO and Bartlett's Test (Struktur pertanyaan *unfavorable*)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,589
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	164,983
	Df	6
	Sig.	,000

Nilai KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 0.597 dan 0.589 mengindikasikan suatu ketepatan sampling yang mendekati cukup untuk analisis faktor. *Test sphericity dari Bartlett's* untuk menguji apakah matriks korelasinya adalah sebuah matriks identitas adalah signifikan dan hasilnya adalah signifikan ( $\alpha = 0,000$ ) yang berarti bahwa matrik korelasi bukan matrik identitas sehingga analisis faktor dapat digunakan.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari wawancara mendalam, diperoleh pengertian tentang pengajaran medis yang humanis, pelajaran yang humanis dan pengajaran yang humanis.

### 1. Pengajaran Medis Yang Humanis

- Manusia merupakan makhluk yang unik dan individual, berbeda satu sama lain. Manusia sebagai makhluk individual merupakan subjek pelayanan kesehatan yang patut dihargai.
- Kehidupan manusia merupakan sesuatu yang nyata, oleh karenanya respek terhadap kesehatan fisik dan mental manusia adalah sangat penting dan mendasar.
- Pemahaman tentang bagaimana membuat orang merasa berharga adalah sangat penting. Hal ini merupakan perspektif yang cukup luas tentang kehidupan sebagai peradaban manusia, budaya, perhatian, perawatan dan cinta yang semuanya itu saling berhubungan satu sama lain.

### 2. Pengertian Pelajaran Humanis

Dalam setiap pelayanan pada masyarakat, hal utama yang harus diterapkan adalah etika medis. Hal ini senantiasa diupayakan agar dapat diinternalisasikan dalam diri mahasiswa calon tenaga medis agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara humanis. Dengan demikian teori tidak menjadi sesuatu cara yang wajib dalam pendidikan pengajaran.

### 3. Pengertian Pengajaran Humanis

Pengalaman dosen merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sebagai fasilitator, dosen memfokuskan pembelajarannya pada pembangunan kemampuan positif, yang berkaitan erat dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif para mahasiswanya.

### Kuesioner Preferensi Pengajaran Humanistik

Berdasarkan kuesioner preferensi pengajaran humanistik, terdapat lima metode pembelajaran yang memperoleh rating tinggi dari para mahasiswa sebagai cara yang paling menari, dan dapat diterima serta bermanfaat dalam proses pembelajaran humanistik, yaitu : **Diskusi Kelompok (53,4% Sangat Setuju dan 30,8% Setuju); Debat (42,8% Sangat Setuju dan 40,6% Setuju); Belajar Individual (56,7% Sangat Setuju dan 38,4% Setuju); Dosen Sebagai Fasilitator (47,9% Sangat Setuju dan 36,8% Setuju) dan Sertifikat Sebagai Motivasi (51,8% Sangat Setuju dan 32,4% Setuju).**

Dari hasil tersebut masih banyak hal yang harus dilakukan oleh para pengajar untuk keberhasilan integrasi tersebut. Kebanyakan metode yang disukai perlu diteliti lebih lanjut dan dipersiapkan oleh para dosen. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan dari kuesioner tersebut adalah bahwa profesionalisme pengajar, sikap proaktif, pengalaman dan latihan yang bermutu menjadi prasyarat yang diharapkan bagi pengajar. Pengajar harus mampu untuk mengubah sikap positif terhadap proses pengajaran yang diberikan pengajar. Namun sebelumnya, para pengajar harus rela dan mampu untuk mendevasikan atau membaktikan energi mereka untuk mengubah sikap atau ketrampilan mereka sendiri.

Metode pengajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran akan efektif jika mahasiswa tertarik pada mata kuliah yang diberikan. Tiga mata kuliah yang mendapat respon cukup besar dari mahasiswa dilihat dari 3 kategori yaitu : **Agama, Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah dan Bahasa Indonesia.** Dalam kegiatan pembelajaran, mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori-teori psikologi dalam keperawatan yang memang saling berhubungan, komunikasi dan ketrampilan pertolongan di kelas, melainkan juga memberikan kesempatan sepenuhnya untuk pergi ke masyarakat dan mempraktekkan pelajaran pada mata kuliah yang mereka dapatkan.

Karena beragam studi dan lingkungan pembelajaran, para mahasiswa mampu menangkap secara cepat konsep-konsep dan menyerap intisari mata kuliah dengan mudah. Jika metode pengajaran yang diterapkan pengajar cukup bagus dan impresif, maka mereka dapat memahami perasaan dan kebutuhan mahasiswa dan dapat secara fleksibel menyesuaikan gaya

pengajarannya. Nilai dari keberhasilan pengajaran sesungguhnya bersumber dari para pengajar yang proaktif, pemahaman yang komprehensif serta kerja keras.

### Pembahasan

Seiring dengan berkembangnya sistem teknologi dan informasi yang begitu cepat, kemajuan bidang ilmu medis juga berkembang begitu pesat. Hal-hal yang bersifat komersil, bisnis dan politik semakin membuat rumit keseluruhan sistem pendidikan dan berdampak juga pada pendidikan medis menjadi lebih kompleks dan cenderung tidak humanis lagi.

Asuhan keperawatan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan, yang diberikan kepada pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan, berpedoman pada standar asuhan keperawatan dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab keperawatan dalam menjalankan asuhan keperawatan (Hartianah.Z., 1997). Disisi lain peningkatan hubungan antara perawat dengan pasien dapat dilakukan melalui penerapan proses keperawatan (Nursalam, 2001). Dasar hubungan perawat, pengajar dan pasien merupakan *mutual humanity* dan pada hakekatnya hubungan yang saling ketergantungan dalam mewujudkan harapan pasien terhadap keputusan tindakan asuhan keperawatan.

Sejak abad 19, hubungan dan interaksi dokter-pasien telah menjadi proses sentral di dalam praktek keperawatan dan kedokteran. Banyak perspektif yang dapat digunakan untuk memahami dan mendeskripsikannya. Namun demikian, hal paling penting adalah kualitas hubungan dokter dan pasien (Lai, dkk. 2006). Semakin baik hubungan tersebut dalam konteks respek saling menguntungkan, pengetahuan, kepercayaan, bertukar pandangan dan nilai, maka akan semakin baik diagnosis dan dengan demikian akan mempercepat penyembuhan pasien.

Hubungan tersebut kini cenderung tidak dikembangkan lagi, padahal hubungan tersebut dapat membantu dalam membentuk basis interaksi dan komunikasi antar dokter dan para medis dengan pasien. Hubungan tersebut yang telah dipertimbangkan sebagai salah satu prinsip pengobatan, semakin terlupakan ketika memasuki apa yang disebut peradaban masa depan.

Pada dasarnya, pendekatan humanistik terhadap psikologi pendidikan dan penguasaan keperawatan adalah menekankan pada pertumbuhan kemampuan yang positif. Pengajaran medis yang humani sangat membantu untuk membekali mahasiswa dalam berkarya di dalam masyarakat terutama dalam bidang medis dan keperawatan.

Psikologi humanistik menekankan bahwa organisme selalu bertingkahtaku sebagai kesatuan yang utuh, buakn sesuatu rangkaian atau komponen yang terpisah. Jiwa dan tubuh merupakan suatu kesatuan yang utuh, apapun yang terjadi dengan salah satu bagian makan akan mempengaruhi bagian yang lain. Oleh karena itu pendidikan medis yang humanis yang menyangkut manusia tertama pada sisi fisik hendaknya juga tidak mengabaikan sisi psikologis dari seorang pasien. Pendidikan medis yang humani hendaknya berorientasi pada keseluruhan manusia secara holistik.

Pendidikan medis yang humanis dapat membantu mahasiswa yang nantinya berperan sebagai pelaku pelayanan di bidang medis dapat mengintegrasikan pendidikannya pada bisang medis secara manusiawi. Salah satu pertanyaan penting yang harus dijawab oleh para pengajar yang mengajar humanitas di sekolah-sekolah medis adalah, apakah keberadaan mereka adalah untuk mengajar mahasiswa medis atau hanya mengajar studi humanitas? Sesungguhnya pikiran para dosen difokuskan kepada studi humanistik medis dan bukan semata-mata pada studi humanitas. Hal ini tidak akan ada artinya jika para pengajar tidak bekerjasama dalam mendapatkan, mengevaluasi, mengukur, mensintesa dan membuat rencana yang sempurna bagi pengajaran humanita medis. Para pengajar harus dipersiapkan untuk berhadapan dengan para mahasiswa medis yang akan memberikan perhatian terhadap pendidikan humanitas sebagai tambahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi tenaga medis yang humanis.

Keberhasilan pedagogik humanistik medis sebagian besar terletak di tangan para pengajar. Jika mereka bermaksud untuk mengubah sikap mahasiswa, terlebih dahulu mereka harus menggunakan energi mereka untuk mengubah sikap mereka sendiri. Pembelajaran humanitas sama seperti memberikan kail kepada siswanya. Pengajaran alat berfikir adalah seperti mengajar siswa bagaimana cara memancing, yang akan melengkapi siswa dengan kemampuan berpikir dan berefleksi tentang kehadiran subjek manusia di dalam pendidikan dan pengajaran medis.

Dalam pengajaran medis, seni pengobatan tersusun dari 4 kemampuan yang berbeda, tetapi saling berhubungan satu sama lain. Pertama adalah kemampuan menggali dan mengintegrasikan informasi subyektif dan obyektif untuk mengambil keputusan yang paling menyenangkan para pasien. Kedua adalah kemampuan memperkuat dan mendayagunakan hubungan antara dokter/para medis untuk kepentingan terapeutik. Ketiga adalah kemampuan untuk mengetahui bagaimana perilaku orang sakit dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, suatu ketrampilan sentral dimana ketrampilan lainnya sangat tergantung kepadanya (Lai, dkk., 2006).

Perlu dipahami bahwa semua ketrampilan tersebut tidak mudah bagi pembelajaran. Keberadaannya adalah untuk menemukan esensi atau hakikat diri seseorang, mempraktekannya secara penuh dan memperbaikinya jika dibutuhkan. Pengajaran yang diberikan kepada mahasiswa adalah kemampuan berpikir, namun mereka harus dapat mengembangkannya sesuai dengan bekal kompetensi humanistik mereka. Pengajaran dan sarana berpikir akan menjadi langkah berikutnya menuju praktek medis yang lebih humanistik. Itulah landasan yang sesungguhnya bagi semua aspek belajar dan keberhasilan pada pembelajaran yang humanis.

#### **simpulan**

Pada dasarnya hubungan antara perawat dan pasien berdasarkan pada sifat alamiah perawat dan pasien. Dalam interaksi perawat dan pasien, peran yang dimiliki masing-masing membentuk suatu kesepakatan atau persetujuan dimana pasien mempunyai peran dan hak sebagai pasien dan perawat dapat melaksanakan asuhan keperawatan mempunyai peran dan hak sebagai perawat.

Penelitian ini telah memberi gambaran bahwa pendidikan medis yang humanis merupakan strategi yang paling tepat untuk dapat memberikan empati yang tinggi dan pelayanan yang memadai bagi para pasien. Dengan demikian, secara psikologis pasien dapat terbantu dalam proses penyembuhan baik itu menyangkut penyakit yang bersifat fisik maupun non fisik (psikologis), karena baik fisik maupun psikologis saling berhubungan satu sama lain. Artinya, penyakit secara fisik dapat mempengaruhi ketidakstabilan psikologis (emosi) dan sebaliknya, apabila terjadi gangguan psikologis dapat menyebabkan gangguan yang bersifat fisik.

#### **Daftar Pustaka**

- Barnadib, I. 1992. *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*. Andi Offset. Yogyakarta
- Baylor, M.W. 1982. The Needs for Freedom from Pain dalam *Human Needs and The Nursing Process* (Ed : M.B. Walsh). Connecticut: Prentice-Hall. Inc.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Narulita, R., & Hajam M. 2001. Efektivitas Pelayanan Prima Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan di Rumah Sakit. (Perspektif Psikologi). *Jurnal Psikologi*. No. 2. Hal 105 – 115.

- Lai, C.S.; Wen Angela, H.; Shieh, V. 2006. *Integrative Medical Education : Development and Implementation of A Humanistic Pedagogy At Kaohsiung Medical University*.
- Lefrancois, Guy. R. 2000. *Psychology for Teaching*. 10 th. ed. London : Wadsworth Thomson Learning.
- Mulyasa, E. 2008. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Novrita, M. 2000. Peranan Persepsi Pasien Mengenai Empati Perawat dan Aspek Spiritualitas Terhadap Motivasi Sembuh Pasien Rawat Inap. *Skripsi*. Depok. Universitas Gunadarma.
- Purwanto. 2007. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Smet, B. 1994. *Psikologi Kesehatan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Sukmadinata 2004. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Rosdakarya. Bandung
- Teppa, S. 2006. Influnce of a Constructivist Didactic Strategy on Creativity and Learning in Cellular Biology. *Journal of Educational Psychology*. Hal. 1 – 7 (Diakses dari <http://www.1ubs.org/cbe/pot/teppa.pdf> f. tanggal 2 April 2016).
- Wentzel, K., R., 1998. Social Relationship and Motivation in MiddleSchool : The Role of Parents, Teachers and Peers. *Journal of Educational Psychology*. Vol. 90, No. 2, hal 202 – 209.
- Widyarini N, M.M. 2001. *Makna Profesional Perawat dalam Perspektif Pasien*. Proceeding. Seminar Nasional PESAT. Universitas Gunadarma.

## Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pengajaran Budi Pekerti dan Nilai-Nilai Pancasila Sejak Usia Dini

**Ir. Lestanta Budiman, M. Hum**

Kepala Pusat Studi Pancasila  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta  
Email: adilobo@gmail.com

### Abstrak

Pendidikan merupakan hal yang paling fundamental bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah proses dalam pembentukan sumber daya manusia yang memiliki karakter sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Saat ini, bangsa dan negara Indonesia diperhadapkan pada fenomena generasi muda dan masyarakat yang seolah-olah kehilangan karakter kebangsaannya, kehilangan karakter yang sesuai dengan filosofi dan jati diri bangsa yaitu Pancasila. Pendidikan Karakter yang saat ini disuarakan juga belum banyak mendorong pada perubahan *mindset* (cara berpikir), dan mentalitas seseorang untuk membuat perubahan. Temuan awal menunjukkan bahwa pemiskinan dan pereduksian pengajaran budi pekerti yang dulu pernah ditanamkan ke generasi muda telah berdampak pada pengrusakan nilai-nilai dan karakter generasi sekarang ini. generasi muda dianggap dan cenderung apatis, tidak peduli pada lingkungan sekitarnya karena generasi muda dijauhkan dari persoalan-persoalan kehidupan sekitar dengan padatnya aktivitas di dalam kelas dan pergaulan di lingkungan sebaya, bersamaan dengan kemajuan teknologi dan informasi tanpa ada kendali. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan dasar-dasar pendidikan karakter dan kebangsaan untuk ditanamkan kepada generasi muda melalui pengajaran budi pekerti dan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan metode deduktif-induktif, dan analisis-sintesis terhadap kondisi dan situasi yang ada. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki dasar nilai kebangsaan dapat dibangun melalui fondasi pendidikan yang kuat yaitu melalui pendidikan budi pekerti yang dulu pernah ada dan nilai-nilai Pancasila menjadi acuan dasar dalam membentuk anak didik sejak dini terutama ditingkat PAUD atau TK.

**Kata kunci:** pendidikan, karakter, budi pekerti, nilai, Pancasila.

### Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila. Proses pembentukan negara Indonesia sebagai negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Negara Indonesia yang merdeka memiliki kehendak untuk bersatu dan membangun tatanan kebangsaan yang beradab dan berkeadilan untuk kesejahteraan rakyatnya. Proses pembentukan bangsa Indonesia tidak hanya dibentuk dari proses sejarah dan politik paska kemerdekaan. Tetapi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang telah meletakkan sejarah bangsa Indonesia menuju negara yang modern yang berdasar atas cita-cita dan tujuan nasional secara visioner bagi suatu bangsa yang baru merdeka. Pada aspek historis dan sosiologis, bangsa Indonesia telah dengan tegas meletakkan jati dirinya berdasarkan pada kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah sejak ada dalam diri bangsa Indonesia. Dalam hal ini karakter bangsa Indonesia telah terbentuk dalam proses kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bentuk-bentuk karakter bangsa Indonesia yang



memiliki ciri khas dan jati diri secara mapan dapat dilihat dari unsur-unsur dan wujud kebudayaan bangsa Indonesia yaitu artefak peninggalan kebudayaan bangsa Indonesia yang sampai sekarang masih ada dan tersebar di berbagai penjuru pelosok negeri mulai dari situs arkeologis peradaban bangsa yang menarasikan kehidupan bangsa Indonesia yang harmonis, rukun, damai, cinta kebijaksanaan, estetis, penuh dengan toleransi, dan bergotong-royong, memiliki rasa dan cita rasa berkesenian, berkebudayaan. Situs-situs peninggalan ini dapat dilihat dari berbagai peninggalan nusantara melalui Museum, candi Prambanan dan Borobudur yang megah, dan peninggalan dari kerajaan lainnya yang tersebar di seluruh nusantara.

Berbicara tentang karakter bangsa menunjukkan bahwa karakter bangsa Indonesia sejak dulu kala memiliki keluhuran budi pekerti, memegang nilai-nilai kerohanian, gotong-royong, toleran, berjiwa seni dan budaya, serta berjiwa merdeka. Kondisi ini yang telah membentuk karakter bangsa Indonesia dan telah mewarisi keluhuran kebudayaan bangsa Indonesia yang luhur. Oleh karena itu, nenek moyang bangsa ini telah mewarisi akar pendidikan budi pekerti melalui pendidikan di masyarakat dan keluarga yang mengajarkan kepada generasi pada waktu itu tentang nilai kebersamaan, gotong-royong, berkesenian, berkebudayaan, dan toleransi. Tidak ada pertentangan dan perseteruan. Segala bentuk ekspresi masyarakat nusantara pada waktu itu muncul dalam proses perjalanan kehidupan sosial sebagaimana yang tercermin dalam bentuk proses perjalanan kehidupan masyarakat pra Indonesia merdeka. Apabila berbicara mengenai pendidikan karakter tentu yang perlu dilihat terkait dengan fenomena kehidupan sekarang ini yang terpengaruh oleh arus modernisasi. Apa yang dilihat di masyarakat sekarang ini merupakan potret yang melanda masyarakat terutama generasi muda yang dianggap mengalami degradasi moral dan karakter terutama karakter kebangsaan. Generasi muda mulai terjebak arus kehidupan modernitas, lebih bebas tanpa batas, penuh dengan agresivitas yang negatif sehingga terjerumus dalam tindakan kriminal, kekerasan, klitih, dll. Potret yang dilihat dan pandangan masyarakat secara umum ketika melihat generasi muda dan fenomena masyarakat sekarang ini dengan perbandingan generasi sebelumnya nampaknya yang dilihat adalah aspek perilaku dan sikap seseorang dalam meresponse dan bertindak. Sehingga dalam konteks perbandingan tersebut muncul suatu penilaian terkait dengan fenomena masyarakat Indonesia bahwa saat ini masyarakat Indonesia kehilangan budi pekerti yang baik terutama generasi muda yang kehilangan rasa sopan santun, sikap hormat-menghormati kepada orang tua, dan menjaga keharmonisan serta martabat manusia yang satu dengan yang lainnya.

Bahkan fenomena masyarakat secara umum termasuk para elit politik yang menjadi sorotan ialah munculnya berbagai macam tindakan yang tidak terpuji di kalangan elit politik negeri ini 10 tahun terakhir ini seperti persoalan kasus korupsi yang menjerat para pejabat negara mulai dari perangkat desa, Bupati, Gubernur, menteri, anggota Dewan, dan pejabat negara lainnya. Sehingga, isu pendidikan karakter semakin menguat untuk ditanamkan dan dikembangkan agar mendidik generasi bangsa yang memiliki kesadaran dan karakter sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah bangsanya. Isu pendidikan karakter mulai disuarakan ketika pasca reformasi, negara ini dianggap jauh dari cita-cita luhur bangsa Indonesia, kemudian gagasan pentingnya pendidikan karakter dicanangkan di berbagai pelosok mulai tahun 2016an. Muhammad Nuh, pada waktu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pernah menyampaikan orasi ilmiah dengan judul “Pendidikan Karakter dalam Membangun Kemandirian bangsa” dalam rangka Dies Natalis UNY ke-53 (22 Mei 2017) menekankan bahwa pendidikan karakter menjadi penting karena apabila seseorang kehilangan karakternya akan kehilangan sisi keotentikannya sebagai manusia (*genuine*)-nya.<sup>1</sup> Lalu, bagaimana problem mendasar dalam konteks pendidikan karakter dan pembentukan jati diri bangsa bagi

<sup>1</sup> <https://www.uny.ac.id/fokus-kita/prof-dr-ir-kh-mohammad-nuh-dea>, diakses 5 Mei 2018, 15:26.

generasi muda di era sekarang ini? dan bagaimana model atau desain dalam memperkuat kembali pendidikan karakter bagi generasi muda?, bagaimana pendidikan karakter dapat menjawab persoalan degradasi karakter di kalangan generasi muda dan masyarakat secara umum.

### Pembahasan

Kajian tentang penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda atau masyarakat sampai sejauh ini sudah banyak dilakukan. Berbagai pendekatan dalam menerapkan pendidikan karakter mulai dari model, materi, dan strategi dalam menerapkan pendidikan karakter menjadi beragam diungkapkan dalam kajian ilmiah yang ada saat ini. Tulisan Arsih berjudul “Pentingnya Pendidikan Karakter di Indonesia” menjelaskan bahwa pendidikan karakter menjadi penting untuk ditanamkan ke peserta didik karena menjadi kunci keberhasilan dalam kehidupan. pendidikan karakter dalam konteks ini untuk mendidik peserta didik memiliki kecerdasan emosional yang baik, berkepribadian, dan memperkuat perilaku yang positif<sup>2</sup>. Konstruksi pendidikan karakter menjadi penting untuk ditanamkan kepada peserta didik karena untuk melatih dan mengembangkan daya nalar dan kecerdasan emosional yang baik. Sehingga anak tidak hanya sekedar cerdas secara intelektual tetapi memiliki kepribadian yang diperlukan. Pengamat pendidikan menilai bahwa dalam dua dasawarsa ini, Indonesia dianggap mengalami krisis karakter karena terbukti bahwa banyak pemimpin bangsa ini baik anggota legislatif, eksekutif, maupun penegak hukum tersandung kasus korupsi<sup>3</sup>. Mereka yang harusnya menjadi panutan dan teladan di masyarakat justru menjadi contoh buruk di masyarakat. Dalam hal ini aspek penguatan karakter menjadi penting. Pada *siaran pers* Kemendikbud juga *merilis* 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotongroyongan. Menurut Kementerian pendidikan kelima karakter ini tidak berdiri sendiri<sup>4</sup>. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga merumuskan nilai karakter terdapat 18 nilai antara lain: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab<sup>5</sup>.

Berbagai macam tawaran terkait dengan memperkuat pendidikan karakter mulai penguatan kembali tri pusat pendidikan yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pengintegrasian mata pelajaran dalam memperkuat pendidikan karakter seperti IPS, Sejarah, Pancasila, Agama, dan Bahasa Indonesia. Tawaran lain juga ditunjukkan melalui permodelan atau penguatan keteladanan dalam dunia pendidikan. Namun, dalam praktek aplikasi pendidikan karakter lewat budi pekerti sejak pasca reformasi ada institusi pendidikan terkadang masih mengabaikan penguatan dan penanaman nilai-nilai karakter bangsa yang berdasarkan pada budi pekerti yang berakar pada kebudayaan bangsa dan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Untuk itu, mengembalikan pendidikan budi pekerti yang meletakkan basis kebudayaan Indonesia dan Pancasila ke seluruh jenjang pendidikan dasar dan PAUD menjadi penting. Sehingga, generasi muda tidak kehilangan akar kebudayaannya.

<sup>2</sup><https://www.kompasiana.com/dwiyuni/59c1fb6e0e3f0b37eb439343/pentingnya-pendidikan-karakter-di-indonesia>, diakses 5 Mei 2018, 15:42.

<sup>3</sup> <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/102984-indonesia-butuh-pendidikan-karakter>, diakses 5 Mei 2018, 15:48.

<sup>4</sup><https://ristekdikti.go.id/siaran-pers-kemendikbud-penguatan-pendidikan-karakter-pintu-masuk-pembenahan-pendidikan-nasional/>, diakses 5 Mei 2018, 16:09.

<sup>5</sup> <http://www.prestasi-iiief.org/index.php/id/feature/88-pentingnya-pendidikan-karakter-untuk-kemajuan-bangsa>, diakses 5 Mei 2018, 16:29.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pemikiran diatas dapat ditunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter dapat dijalankan dan dikembangkan dengan model pendidikan budi pekerti dan pendidikan Pancasila sebagai dasar nilai dan jati diri bangsa. Saat ini, bangsa Indonesia terpecah-pecah karena aspek nilai dan dasar filosofi bangsa kita yaitu Pancasila mulai ditinggalkan dan dijauhkan dari generasi muda terutama dunia pendidikan yang tidak secara konsisten dan patuh melaksanakannya karena ditemukan banyak dunia pendidikan secara khusus institusi pendidikan dasar tidak mematuhi nilai-nilai bersama dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang bertentangan dengan nilai-nilai karakter hidup bersama berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai hidup bersama perlu dikembalikan dalam tataran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketidakkesepakatan dan kepatuhan dalam memegang teguh nilai-nilai hidup bersama yaitu Pancasila sebagai pegangan dan pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjadikan bangsa ini rapuh dan mengalami degradasi dalam nilai-nilai karakter sebagaimana yang dicontohkan oleh para elit politik dan pemimpin negeri ini kurang memberikan keteladanan dan contoh yang baik dalam mendesain kerangka hidup bernegara. Untuk itu, penanaman nilai budi pekerti dan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sejak dini menjadi penting dan perlu dilaksanakan secara konsisten dan patuh.

## Daftar Pustaka

- Arsih, DwiYuni, Pentingnya Pendidikan Karakter di Indonesia, *Opini Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/dwiYuni/59c1fb6e0e3f0b37eb439343/pentingnya-pendidikan-karakter-di-indonesia>, diakses 5 Mei 2018, 15:39.
- Nuh, Muhammad, 2017, Pendidikan Karakter dalam Membangun Kemandirian Bangsa Menuju Kejayaan Indonesia 2045, Orasi ilmiah, <https://www.uny.ac.id/fokus-kita/prof-dr-ir-kh-mohammad-nuh-dea>, diakses 5 Mei 2018, 15:26.
- <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/102984-indonesia-butuh-pendidikan-karakter>, diakses 5 Mei 2018, 15:48.
- <https://ristekdikti.go.id/siaran-pers-kemendikbud-penguatan-pendidikan-karakter-pintu-masuk-pembenahan-pendidikan-nasional/>, diakses 5 Mei 2018, 16:09.
- <http://www.prestasi-iiief.org/index.php/id/feature/88-pentingnya-pendidikan-karakter-untuk-kemajuan-bangsa>, diakses 5 Mei 2018, 16:29.

## **Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara dalam Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**

**Eka Sari**  
Universitas Pertahanan

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara di sekolah, 2) untuk mengetahui peran Pendidikan Bela Negara dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di sekolah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu: menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela negara merupakan salah satu bentuk implementasi dalam upaya pembelaan negara oleh warga negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 2) Pendidikan Bela Negara menjadi sarana yang tepat dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam lingkup sekolah. Implementasi Pendidikan Bela Negara yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan memiliki 5 (lima) nilai dasar bela negara, yaitu: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Implementasi tersebut dapat dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di sekolah.

**Kata Kunci:** pendidikan kewarganegaraan, bela negara, nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan

### **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu alat untuk memajukan bangsa. Salah satu dampak dari adanya reformasi di Indonesia tahun 1998 adalah reformasi di bidang pendidikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia adalah 20% dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hasil dari reformasi lainnya di bidang pendidikan adalah dibentuknya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Undang-Undang tersebut mengatur bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Kebudayaan nasional di sini merupakan bentuk keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sudah seharusnya dijaga. Modal keberagaman yang tinggi menuntut adanya rasa saling menghargai dan menghormati antar warga negara. Selain itu, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan salah satu faktor pendukung untuk persatuan bangsa. Persatuan bangsa adalah hal yang penting agar Indonesia sebagai negara dan bangsa tetap utuh dan terjaga kedaulatannya. Ini merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa dalam menjaga dan mengokohkan persatuan bangsa Indonesia. Keberagaman yang ada bukan dilihat sebagai potensi ancaman untuk terpecah belah,

namun harus dilihat sebagai suatu kekayaan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu membela negara.

Membela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara. Hal tersebut diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia pada pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30. Membela negara tidak hanya menjadi tugas TNI, namun juga seluruh warga negara Indonesia. Membela negara tidak selalu berkaitan dengan militer, karena membela negara diperlukan agar warga negara memiliki daya tangkal yang baik terhadap ancaman, baik ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida. Membela negara dapat dilakukan melalui bidang pendidikan. Melalui pendidikan, peserta didik dibentuk agar mereka mencintai tanah air mereka. Selama ini, hal itu telah dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Namun, pelaksanaannya masih perlu dievaluasi kembali. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah membuat program Pendidikan Bela Negara yang bertujuan untuk membekali setiap warga negara Indonesia dengan nilai-nilai bela negara dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet, tangguh, berwawasan kebangsaan dan memiliki kesadaran bela negar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara dalam Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## **Metode Penelitian**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Sarwono (2006: 15) menyatakan bahwa “penelitian merupakan cara-cara yang sistematis untuk menjawab masalah yang sedang diteliti”. Sistematis yang dimaksud adalah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Strauss dan Corbin (2013: 4) menyatakan bahwa “istilah penelitian kualitatif kami maksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya”. Penelitian kualitatif pada dasarnya memahami masalah dalam interaksi manusia. Catherine Marshal menyatakan bahwa “kualitatif riset didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia” (Sarwono, 2006: 193).

Bodgan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 21) menyatakan bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata dan gambar-gambar, bukan berupa angka-angka, sehingga diharapkan untuk mudah dipahami oleh pembaca dan bermanfaat bagi banyak orang. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif diharapkan supaya hasil penelitian ini nantinya dapat memecahkan rasa keingintahuan peneliti.

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sutopo (2002: 110) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif merupakan tingkat kedua, yang merupakan pengembangan lanjut dari penelitian eksploratif. Peneliti mulai memprediksi variabel-variabel yang terlibat”. Pada penelitian deskriptif kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan menurut apa adanya di lapangan studinya. Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memaparkan atau mendeskripsikan secara rinci objek penelitian yang ada di lapangan berdasarkan fakta.

### **B. Data dan Sumber Data**

Data tidak dapat diperoleh tanpa adanya sumber data. Strauss dan Corbin (2013: 72) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Penentuan sumber data juga merupakan tahap yang

penting, karena ketepatan pemilihan sumber data akan berdampak pada kelengkapan dan kesahihan data yang akan diperoleh nantinya.

Pendapat lain tentang sumber data dikemukakan oleh Lofland dan Lofland yang menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” (Moeloeng, 2010: 157).

Berdasarkan uraian di atas mengenai sumber data, maka peneliti menggunakan sumber data yang berupa dokumen dan arsip. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari dokumen dan arsip. Sutopo (2002: 54) menyatakan bahwa “dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu”. Dalam mengkaji dokumen, peneliti tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga memahami, menggali, dan menganalisis serta menangkap makna yang tersirat dari dokumen tersebut. Dokumen dan arsip yang digunakan peneliti sebagai sumber data antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Kesadaran Bela Negara

### C. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur disebut juga dengan studi pustaka yaitu cara menelusuri kepustakaan yang berisi tentang teori-teori dari karya ilmiah baik yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan berupa hard copy atau soft copy yang ada pada buku-buku (e-books), makalah, journal online. Teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer dalam menguji benar tidaknya hasil penelitian yang diperoleh tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara.

Pentingnya studi literatur karena datanya bersifat tetap, autentik, mudah ditemukan, dan dapat dipertanggungjawabkan karena data literatur tersebut memiliki keabsahan dan telah melalui prosedur penelitian yang standar. Teknik studi literatur ini bersumber pada buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan catatan lain, berusaha mencari sumber-sumber teori yang relevan sesuai dengan tema dan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan sehingga penelitian yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

## Hasil Penelitian

### A. Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara di Sekolah

Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara merupakan salah satu bentuk implementasi dalam upaya pembelaan negara oleh warga negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pendidikan Bela Negara bertujuan agar peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Bela Negara diimplementasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Pendidikan Bela Negara terintegrasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan, karena Pendidikan Bela Negara merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Salah satu indikatornya adalah mencintai negaranya sendiri. Hal itu diperoleh dan ditingkatkan melalui Pendidikan Bela Negara. Jadi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Bela Negara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pendidikan Bela negara memiliki 3 lingkup, yaitu: Pendidikan, Pemukiman, dan Lingkungan Kerja. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tugas yang besar dalam

mengimplementasikan bela negara dalam lingkup pendidikan. Dua puluh tahun reformasi pendidikan memberikan wajah baru bagi pendidikan sampai sekarang. Berbagai kebijakan yang ada dibuat dengan tujuan mencapai salah satu tujuan nasional “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pendidikan bela negara dari Kementerian Pertahanan selaras dengan program nawa cita Jokowi.

## **B. Peran Pendidikan Bela Negara dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di sekolah.**

Pendidikan Bela Negara menjadi sarana yang tepat dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada peserta didik melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam lingkup sekolah. Implementasi Pendidikan Bela Negara yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan memiliki 5 (lima) nilai dasar bela negara, yaitu: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideology negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara.

Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan hal pokok yang menjadi kajian dalam Pendidikan Bela Negara. Dengan dilaksanakan Pendidikan Bela Negara yang terintegrasi pada Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wujud dan langkah yang dapat ditempuh dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan termuat dalam Pendidikan Bela Negara yang dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan Kewarganegaraan.

Pada tahap perencanaan, guru dapat memuat nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan materi di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Nilai-nilai apa saja yang ingin guru tanamkan pada peserta didik berkaitan dengan materi tertentu. Karena nilai adalah sesuatu yang harus diajarkan dan ditanamkan secara berkelanjutan agar dapat termanifestasi dalam sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, guru dapat mengkaitkan suatu materi dengan sikap bela negara yang diambil dari nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Hal ini sangat penting, proses pendidikan adalah tidak hanya mentransfer ilmu, namun juga mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik. Nilai-nilai bela negara merupakan hal yang penting karena peserta didik merupakan generasi penerus bangsa yang berkewajiban menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia di masa yang akan datang. Pada tahap evaluasi memiliki jenis evaluasi yang berbeda-beda. Salah satu jenisnya adalah evaluasi sikap. Evaluasi yang tepat dilakukan pada Pendidikan Bela Negara adalah penilaian sikap, karena pada proses pembelajaran lebih menekankan pada penanaman dan penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi setelah pembelajaran diberikan, guru dapat memberikan evaluasi berupa penilaian sikap peserta didik.

## **Kesimpulan**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Bela Negara di Sekolah. Pendidikan Bela Negara bertujuan agar peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Bela Negara diimplementasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Pendidikan Bela Negara terintegrasi dengan Pendidikan Kewarganegaraan, karena Pendidikan Bela Negara merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Peran Pendidikan Bela Negara dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di sekolah. Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan hal pokok yang menjadi kajian dalam Pendidikan Bela Negara. Dengan dilaksanakan Pendidikan Bela Negara yang terintegrasi pada Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wujud dan langkah yang dapat ditempuh dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nilai-nilai

Pancasila dan wawasan kebangsaan termuat dalam Pendidikan Bela Negara yang dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan Kewarganegara.

### **Daftar Pustaka**

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moeloeng, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Strauss dan Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Sutopo, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.



## Kelas Multikultural SMK Bakti Karya Parigi Solusi Merawat dan Melestarikan Kebhinekaan pada Generasi Muda

**Irpan Ilmi**

STIT NU Al Farabi Pangandaran

Email: irpanilmi1@gmail.com

### Abstrak

Angka intoleransi meningkat. 57.1% mayoritas muslimin dan muslimah intoleran pada kelompok yang tidak disukai, 59.2% laki-laki cenderung intoleran dari pada perempuan terkait gender, 90.7 % intoleran mengenai mengenai perbedaan kelompok, yang berbeda suku, bangsa, ras dan agama, 13.2% muslimin dan muslimah projiha kekerasan. Angka di atas harus mendapat perhatian khusus, dan SMK Bakti Karya Parigi dengan program Kelas Multikulturalnya menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan program kelas multikultural di SMK Bakti Karya Parigi dalam merawat dan melestarikan kebhinekaan pada generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi merupakan solusi merawat dan melestarikan kebhinekaan pada generasi muda. Konsep perdamaian, toleransi, kelas aktif, terkoneksi, dan eksplorasi budaya dipahami dan diimplementasikan oleh siswa-siswi dalam menyikapi perbedaan agama, suku, ekonomi dan latar belakang kedaerahan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kelas Multikultural, SMK Bakti Karya Parigi, Ke-bhineka-an

### Pendahuluan

Rumusan UUD 1945 dan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa lahir dari pengilhaman akan budaya luhur bangsa ini. Oleh karena itu, bangsa Indonesia sampai saat ini masih berdaulat. Melihat pendapat J. J. Rousseau tentang konsep kedaulatan, bahwa kedaulatan harus bersifat kerakyatan dan didasarkan pada pandangan umum. Demikian, kedaulatan mempunyai 4 sifat, yaitu:

1. Kesatuan (unity)
2. Bulat, tidak terbagi-bagi (indivisibilitate)
3. Tidak boleh diserahkan (inalienabilitate)
4. Tetap tidak berubah-ubah (imprescriptibilitate)<sup>6</sup>

Undang-undang 1945 dan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Indonesia harus mengkristal dalam jiwa dan pemikiran generasi muda, umumnya masyarakat Indonesia. Ia tidak boleh hanya menjadi lembaran-lembaran kertas yang tertumpuk di perpustakaan pemerintah atau sekolah atau buku-buku dongeng yang hanya menjadi pajangan di meja tamu. Ia harus menjadi energi dalam tindak-tanduk perilaku sehari-hari, sehingga Indonesia akan tetap menjadi satu-kesatuan yang utuh.

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Islam Dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) Hal. 14

Berbicara soal fakta intoleransi sebagai akar perpecahan persatuan dan kesatuan Indonesia, Tahun 2013, berdasar survei The Wahid Institute, terdapat 245 kasus intoleransi, 106 peristiwa (43%) melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa (57%) oleh aktor non-negara<sup>7</sup>. Survei tren toleransi sosial-keagamaan di kalangan perempuan muslim Indonesia yang melibatkan 1.500 responden bulan oktober 2017 menghasilkan data sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. 57.1% mayoritas muslimin dan muslimah intoleran pada kelompok yang tidak disukai
2. 59.2% laki-laki cenderung intoleran dari pada perempuan terkait gender
3. 90.7 % intoleran mengenai mengenai perbedaan kelompok, yang berbeda suku, bangsa, ras dan agama.
4. 13.2% muslimin dan muslimah projihad kekerasan.

Angka di atas merupakan suatu keniscayaan, betapa Indonesia masih sangat kental dengan intoleransi. Intoleransi adalah penolakan terhadap perbedaan individu dan budaya<sup>9</sup>. Intoleransi tentu sangat mengancam pada perdamaian bangsa ini dan dunia. Kritisasi pendidikan Pancasila harus dilakukan secara masif disemua kalangan dan terus disosialisasikan dalam setiap momentum.

Indonesia adalah negara dengan keragaman suku, ras, budaya, agama, bahasa. Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari pulau-pulau dengan warisan kekayaan yang melimpah dalam berbagai aspek. Indonesia adalah negara yang multikultur. Maka setiap warga Indonesia meski paham tentang definisi multikultur dan menjalankannya dalam kehidupan berbangsa sebagai warga Indonesia. UUD 1945 dan Pancasila telah menghimpun itu semua sebagai falsafah negara Indonesia dan telah diamaktubkan dalam kitab undang-undang yang harus dijalankan. Karena UUD 1945 dan Pancasila bukan hanya falsafah, melainkan kehidupan itu sendiri.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis mewawancarai siswa-siswi dan pengelola sekolah, mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

### Hasil Penelitian

SMK Bakti Karya Parigi adalah sekolah yang konsisten mengembangkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menurut Tilaar dalam Agustian (2015:9) merupakan sebuah ikhtiar untuk mengurangi gesekan-gesekan atau ketagangan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Begitupun Agustian (2015:10) mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural dalam konteks ke Indonesiaan adalah pendekatan untuk mentransformasi nilai-nilai yang mampu mencerdaskan dan memuliakan manusia dengan identitas dirinya, menghargai suku bangsa, budaya, ras, agama dan kepercayaan, cara pandang serta menggali dan menghargai kearifan local budaya Indonesia.

Kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi juga mengemas falsafah hidupnya dalam Trilogi SMK Bakti Karya Parigi, yaitu:

<sup>7</sup>Paul, *Kelompok Masyarakat Dominasi Tindakan Intoleransi*. Tabloid Reformata, Edisi 172, Tahun X 1-28 Februari 2014, Hal. 15

<sup>8</sup> Dnu/Ams, *Survei: Potensi Intoleran RI Meningkat, Projihad Keras 13%*.(Di Akses, 26 April 2018, Jam 03.06)

<sup>9</sup> Diane Tillman, *Living Value: An Educational Program* (New York: Health Communication.Inc, 2000) Hal. 111.

1. Beryukur
2. Berbudaya
3. Bertanggungjawab

Standar kompetensi lulusan SMK Berdasar pada peraturan menteri pendidikan nasional No. 23 tahun 2006 Poin ke-5 adalah menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global. Standar kompetensi lulusan ini dikembangkan dalam kompetensi inti, kemudian diorganisir ke dalam berbagai mata pelajaran melalui pengembangan kompetensi dasar dan berfungsi sebagai sumber kompetensi<sup>10</sup>. Terdapat empat kompetensi inti, dan kompetensi inti No. 2 adalah Sikap sosial. Guru mata pelajaran menerjemahkan program kelas multikultur ini ke dalam kompetensi dasar No. 2 dari Kompetensi inti No. 2<sup>11</sup>.

Kelas Multikultural SMK Bakti Karya Parigi ini tidak hanya melibatkan warga pelajar dan atau civitas akademika SMK Bakti Karya Parigi, melainkan diperluas jangkauannya dengan dibentuknya Kampung Nusantara. Kampung Nusantara merupakan cara untuk memperluas pembelajaran dan pengajaran serta implemetansikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Secara organik kampung nusantara ini diinisiasi oleh komunitas belajar sabalad dan masyarakat di RT/RW 003/004 Dsn. Cikubang, Ds. Cintakarya, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, JABAR. Kampung nusantara ini terintegrasi dengan SMK Bakti Karya Parigi. Konsep kampung nusantara ini untuk membumikan spirit persatuan, warga terbuka terhadap perbedaan. Siswa SMK Bakti Karya Parigi yang tinggal di kampung nusantara dan pengunjung yang datang ke kampung nusantara dan ke SMK Bakti Karya Parigi di ajak untuk hidup berdampingan dan mengikuti aktifitas warga sehari-hari seperti bertani, berkebun, bergotong-royong, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai kebudayaan Indonesia, berpikir optimis dan berbagi informasi mengenai kebudayaan Indonesia.

Siswa kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi ini terdiri dari berbagai provinsi dan agama di Indonesia, yaitu:

1. Sebaran berdasarkan provinsi

No	Provinsi	Jumlah	No	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	5 Orang	6	Kalimantan Utara	5 Orang
2	Riau	1 Orang	7	Kalimantan Timur	3 Orang
3	Sumatera Utara	2 Orang	9	Folres Timur	9 Orang
4	Lampung	1 Orang	10	Papua Barat	1 Orang
5	Jawa Barat	36 Orang	11	Papua	2 Orang

(Sumber: Dokumen SMK Bakti Karya Parigi)

<sup>10</sup> Asfiati, *Pendekatan Humanis Dalam Pengembangan Kurikulum* (Medan: Perdana Publishing, 2006) Hal. 210

<sup>11</sup> Heri Nurdiansyah, Wakasek Kurikulum, "Wawancara", 26 April 2018 Pukul 17.00 Di SMK Bakti Karya Parigi

## 2. Sebaran Siswa berdasarkan agama

No	Muslim	Katholik	Protestan
1	54	10	3

(Sumber: Dokumen SMK Bakti Karya Parigi)

SMK Bakti Karya parigi dengan program kelas multikultural mempunyai konsep sendiri untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila sebagai wujud ke-bhineka-an. Konsep utama kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi sebagai berikut:

## 1. Toleransi

Siswa yang terlibat dari suku, etnis, agama, daerah dan status sosial yang berbeda terbiasa menghadapi perbedaan. Dengan berbagai perbedaan, siswa mampu beradaptasi dengan siswa lain dan akan melahirkan semangat toleransi. Menurut Zagorin<sup>12</sup> toleransi adalah prinsip-prinsip yang harus dimiliki sebagai modal berbangsa dan bernegara dengan melibatkan unsur-unsur; 1. Kebebasan terbatas, 2. Tidak memaksakan agama dan doktrin, serta ritual-ritual tertentu terhadap orang lain. 3. Konvergensi dan kompromi atas keberagaman dengan cara mengambil jalan tengah keberagaman, sehingga memungkinkan tidak terjadinya konflik. Semangat toleransi ini tidak boleh kendur, Dalam istilah Jawa, toleransi diartikan sebagai *teposeliro*<sup>13</sup>. Hilangnya semangat toleransi akan berdampak kepada hilangnya budaya-budaya lokal karena dianggap tidak eksis dan menjadi olok-olokan. Materi utama dari konsep toleransi ini adalah 1. Memahami perbedaan, 2. Menghormati keberadaan orang lain, 3. Menolak berbagai bentuk kekerasan, 4. Menanamkan karakter pancasilais. Adapun materi turunan dan konsep toleransi ini adalah 1. Fakta multikulturalisme, 2. Sejarah multikultural, 3. Permasalahan dan kontroversi multikultural, 4. Kebebasan dan kesetaraan, 5. Hak dan kewajiban asasi manusia, 6. Memahami identitas, 7. Bahasa bersama/ titik temu masyarakat majemuk, 8. Menolak kekerasan, 9. Menggali Pancasila, 10. Multikultural ideal untuk Indonesia, 11. Pendidikan berkarakter kebudayaan Indonesia, 12. Multikultural dalam diri sendiri

Adapun tanggapan, hasil wawancara mengenai konsep toleransi sebagai berikut:

- Rijal asal Kalimantan berpendapat, “Berantem itu tidak ada gunanya. Berantem hanya menghasilkan kerugian. Tidak ada dampak positif. Mukulin orang dipandang jelek dan merugikan orang lain orang. Sekarang saya tidak ingin berantem lagi seperti dulu. Saya sekarang saya berantem dipikirkan dengan cara berdebat dan berdiskusi. Ada lagi, kebiasaan saya kalau nonton film suka teriak-teriak meskipun ada orang tidur. Sekarang saya membatasi kebebasan saya, keberadaan saya ada dalam kebebasan orang lain. Jadi saya mengontrol kebebasan saya. Tentang kebudayaan, saya orang Kalimantan dan saya tidak lupa terhadap tradisi Kalimantan”.
- Nisa asal Palembang, “Saya jika dimusuhi sama Sofi, saya bertanya kepadanya, apakah saya punya salah?. Jika memang ada, saya mencari solusi, jalan keluar, agar masalah bisa diselesaikan. Saya memang merasa sakit hati ketika dikritik oleh orang lain, tapi saya belajar untuk berpikir positif dan saya terus mencari titik permasalahan. Saya menganalisa diri saya dalam pola pikir, dan analisa itu saya tanyakan kepada

<sup>12</sup> Prisca Kiki Wulandari, Destriana Saraswati, Suyra Desismansyah Eka Putra. *Membangun Indonesia: Pemberdayaan Pemuda Berwawasan Pancasila*, (Malang: UB Press, 2017) Hal 37

<sup>13</sup> Herry Zudianto, *Kekuasaan Sebagai Wakaf Politik, Manajemen Yogyakarta, Kota Multikultural*. (Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 2009) Hal. 70.

orang lain atau orang yang mempunyai masalah, dengan harapan saya bisa berdamai dan berteman lagi dengan dia.”

- c. Hosea asal Papua, “Sebelumnya saya ke sini, di rumah Papua, di setiap rumah, saya tidur di rumah adat (gubuk), semenjak saya disini, saya membiasakan tidur di rumah pakai tembok. Pertama saya tidur di rumah tembok saya merasa dingin, sekarang saya terbiasa”.
- d. Reni asal Pangandaran, “Dilingkungan, ketika saya lewat kedepan orang lain saya beling permisi. Dari situ saya belajar menghargai keberadaan orang lain dan kewajiban saya pada orang lain yaitu berbuat santun”.

## 2. Perdamaian

Perdamaian ditafsirkan sebagai proses penyesuaian diri dan pengarahan yang baik dimana orang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang kondusif dan tidak merugikan<sup>14</sup>. Pendidikan perdamaian ini untuk menghilangkan kegagapan akan perbedaan, apalagi sampai berperang dengan bangsa sendiri. Pendidikan perdamaian ini dimulai dari berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan lingkungan sekitar dan mengupayakan perdamaian melalui cara-cara yang relevan, ketiga hal ini adalah materi utama dari pendidikan perdamaian. Adapun materi turunan dari pendidikan perdamaian adalah 1. Menerima diri, 2. Tidak berprasangka, 3. Menghindari sukuisme, 4. Memahami perbedaan agama, 5. Pemahaman gender, 6. Memahami status ekonomi, 7. Memahami kelompok atau geng, 8. Memahami keragaman, 9. Menangani konflik, 10. Menolak kekerasan, 11. Mengakui kesalahan, 12. Tahu kekuatan diri, 13. Mengakui kesalahan, 14. Memberi maaf.

Adapun tanggapan, hasil wawancara mengenai konsep perdamaian sebagai berikut:

- a. Fandi asal Palembang, “Setelah saya belajar multikultural saya bisa menghargai perbedaan agama. Sebelumnya saya memandang agama lain dari sisi negatif. Saya menganggap agama ini dan itu salah, setelah saya belajar perdamaian saya beranggapan semua agama mengajarkan kebaikan. Saya belajar tentang cara-cara beribadah dan tahu hari-hari besarnya. Itu pun bukan satu alasan saya untuk berpindah agama. Saya dulu minder, karena saya dari keluarga miskin, kadang saya ingin seperti mereka, sejak saya belajar perdamaian saya belajar bersyukur, di bawah saya masih banyak ekonominya yang rendah. Saya tidak membedakan orang dari status ekonomi, semua orang sama saja. Semua orang mempunyai hak yang sama. Saya melihat orang kaya sebagai motivasi untuk lebih baik dalam perekonomian kedepan”.
- b. Riko asal Aceh “Di kampung saya paling takut sama orang yang berbeda agama. Saya punya teman kerja di Galon, saya pernah menampa galon dengan label gereja dan saya beranggapan orang berbeda agama akan memakan saya, terutama orang Papua. Saya beranggapan orang Papua memakan orang. Ketika di Smk Bakti Karya, saya belajar dan menghargai mereka, prasangka tentang orang Papua hilang begitupun dengan Gereja. Saya juga takut sama orang bule. Di rumah saya saya dulu banyak bule, ngelihat mereka saja saya takut, apalagi berbicara. Sekarang saya berani berkomunikasi dengan mereka dan semua menjadi jelas dan baik-baik saja setelah berkomunikasi secara langsung”.

<sup>14</sup> Ridwan Lubi, *Agama Dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, Dan Realitas Kehidupan Beradama Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Tama, 2017) Hal. 333

- c. Rahmat asal Kalimantan Utara “Di Kalimantan Utara, saya dulu sering berprasangka. Saya pikir dulu orang Timur itu jahat dan suka berkelahi. Setelah disini, saya mengerti perbedaan suku tidak semuanya jahat. Saya belajar menghargai agama dan perbedaan suku”.
- d. Ari Kiwan asal Flores “Di kampung saya laki-laki tidak menghargai perempuan. Dikeluarga saya, kadang laki-laki kasar dan tidak sopan sama perempuan, sering memukul. Contoh lagi pacaran, walaupun belum menikah laki-laki sudah berani memukul perempuan. Begitupun sebaliknya. Di saya tidak ada masjid, saya dulu ketika mendengar masjid dan adzan suka cuek saja, saya disini belajar mendengar, jadi saya ketika mendengar adzan maghrib saya berhenti main.

### 3. Terkoneksi

Siswa berkesempatan langsung bertemu dan berelasi dengan berbagai pihak. Pertemanan lintas daerah merupakan modal utama untuk membantu siswa membiasakan diri dalam membuka diri dengan berkomunikasi dengan siswa dari berbagai daerah di Indonesia dan dunia. Materi utama dari Terkoneksi ini adalah 1. Mencari teman baru, 2. Memetakan jaringan pertemanan, 3. Menjaga pertemanan. Adapun materi turunannya adalah 1. Mencari teman, 2. Prinsip berteman, 3. Solidaritas, 4. Pemetaan pertemanan, 5. Menjaga pertemanan, 6. Hidup bersama teman-teman.

Adapun tanggapan, hasil wawancara mengenai konsep terkoneksi sebagai berikut:

- a. Sofia asal Kalimantan, “Ketika saya datang ke SMK Bakti Karya, saya aneh, sebagian orang-orangnya kurang akrab dengan saya, mereka itu ngomong kasar-kasar. Bagaimana cara saya supaya lebih akrab dengan mereka. Saya berdiam untuk mengenali dan memahami karakter dia. Kemudian saya belajar untuk apa yang dia suka dan yang tidak suka, dan saya berteman sesuai apa yang dia sukai dan menerima apa yang tidak dia suka”.
- b. Fandi asal Palembang, “Saya dulu punya teman hanya sekelumit kecamatan, teman sehari-hari adalah lingkungan desa dan kecamatan. Saya menonton tv, ada acara tentang daerah pedalaman, seperti Badui, Papua. Dulu saya tahu itu, saya tahu gambarnya, nyari dan hanya sekedar tahu, itu pun belum relevan. Di smk bakti karya, teman lebih banyak, teman saya sekarang dari ujung sampai ujung Indonesia, nyebrang pulau. Saya sekarang lebih kenal kebudayaannya, sekarang tahu Dayak itu seperti apa, secara tidak langsung saya lebih dekat dan terus menggali, dan itu lebih nyata. Saya pun punya ketertarikan untuk berkunjung ketempat yang belum tahu. Sekarang saya tahu ada pulau Kali Mutu, dll”.
- c. Rahmat asal Kalimantan Utara, “Dulu teman saya se suku, ada pula orang Timur, enggak seberapa rapat, yang saya rapati hanya sesuku saya. Sekarang saya, berteman dengan berbagai suku, saya pun bisa menggambarkan bagaimana pulau Aceh, Flores seperti apa, saya dulu mengira pulau komodo di papua, sekarang saya tahu ternyata pulau komodo itu di NTT”.
- d. Apner asal Papua “Orang tua saya di Papua di hutan dan begitupun saya. Orang tua saya bilang, hati-hati sama orang luar nanti kamu di culik. Saya sekarang di Jawa, om saya bilang, kamu harus pergi ke Jawa dan mengenal mereka. Saya dulu tahu sunami Aceh, sekarang saya berkenalan dengan orang Aceh.
- e. Ari Wayangkau asal Jaya Wijaya “Dulu saya punya teman paling jauh dari NTT, ketika nanya kebudayaan NTT tidak tahu, karena mereka besar Di papua. Dulu saya tahu suku Dayak ada di Sulawesi, setelah saya di SMK Kakti Karya Parigi, ternyata suku Dayak ada di Kalimantan”.

- f. Ilham asal Lampung, “Saya mendengar orang Flores jahat, suka memukul orang, saya nanti mati di pukul orang Flores. Saya di SMK Bakti Karya Parigi, ternyata itu hanya omongan saja. Ternyata orang Flores itu baik. Sekarang saya solider sama mereka, saya sekarang akrab sama mereka, ketika punya makan sedikit saya bagi sama mereka”.

#### 4. Kelas Aktif

Siswa yang majemuk akan melahirkan suasana belajar yang hangat dan aktif. Pengalaman hidup yang berbeda akan melahirkan dinamika baru yang dinamis. Dinamika kelompok dari latar belakang yang berbeda dimanfaatkan untuk melahirkan konflik baru, dijaga dalam suhu medium konflik agar tetap stabil oleh pendamping. Pendamping membantu siswa dalam proses belajar aktif dan menyenangkan. Hal itu dilakukan dengan mengajak siswa untuk membuka diri pada lingkungan belajar, melakukan upaya-upaya aktif dan berakhir pada saling mempengaruhi iklim pembelajaran. Materi dari kelas aktif ini adalah 1. Membuka diri, 2. Memulai dari diri sendiri. Adapun materi turunan dari kelas aktif adalah 1. Semangat kepeloporan, 2. Berlemboba dalam kebaikan, 3. Berani tampil, 4. Memberi kesempatan, 5. Negosiasi, 6. Berdebat, 7. Kritik, 8. Empati, 9. Komunikasi, 10. Gotong royong, 11. Melakukan evaluasi, 12. Keberlanjutan.

Adapun tanggapan hasil wawancara mengenai konsep kelas aktif sebagai berikut:

- a. Ari kiwan asal Flores, “Saya dulu malu-malu, disuruh maju kedepan, ngomong gak bisa dan gak mau. Disini, saya belajar menata, teater, public speaking, saya berani untuk tampil di depan orang lain”.
- b. Reni asal Pangandaran, “Saya setiap hari mengajak orang lain untuk belajar dan percaya diri. Salah satunya memberi kesempatan orang lain untuk mendongeng”.
- c. Ari wayangkau asal Jaya Wijaya, “Saya disini, belajar untuk mengajak orang lain untuk tampil bersama. Salah satunya mengajak orang lain untuk apel pagi”.
- d. Nisa asal Palembang, “Saya dari dulu tidak suka kalau suruh tampil, karena malu. Di SMK Bakti Karya Parigi, saya berani untuk tampil, lebih percaya diri, berbicara di depan orang lain, seperti dalam berteater”.
- e. Adit asal Kalimantan Barat “Saya menggali untuk berbicara di depan umum dan terus meningkat kepercayaan diri depan orang”.

#### 5. Eksplorasi Budaya

Kepribadian seseorang terletak pada kebudayaan. Ragam siswa yang ada di SMK Bakti Karya Parigi diwujudkan melalui upaya menghadirkan siswa-siswa yang majemuk dan berbeda budaya. Upaya ini adalah menciptakan pengalaman baru tentang ragam budaya dan melatih siswa dalam pergaulan yang dilandasi kesetaraan dalam berkebudayaan. Materi utama dari eksplorasi budaya adalah 1. Memahami budaya sendiri, 2. Memahami budaya daerah lain, 3. Merayakan budaya bersama. Adapun materi turunan dari eksplorasi budaya adalah 1. Mengetahui arti budaya dan perbedaan, 2. Budaya local, 3. Budaya Nusantara, 4. Satu Bangsa, 5. Mengapresiasi budaya sendiri, 6. Melibatkan diri dalam produk budaya, 7. Mengapresiasi budaya lain, 8. Kolaborasi budaya, 9. Melestarikan warisan dan kekayaan budaya, 10. Mengamais nilai-nilai budaya, 11. Kampanye budaya, 12. Menampilkan kepribadian.

Adapun tanggapan, hasil wawancara mengenai konsep eksplorasi budaya sebagai berikut:

- a. Arfin asal Folres, “Saya mengapresiasi budaya sunda, tentang gotong royong. Dikampung saya tidak ada gotong royong.”
- b. Riko asal Aceh, “Sunda, kerjasamanya luar biasa, saling membantu. Dikampung saya, Aceh, acuh taka acuh. Papua, kalau pakai seragam bareng, dikampung saya tidak”.

- c. Rijal asal Sebatik, “Kolaborasi budaya. Diasarama saya sering menggabungkan tarian dan bahasa. Bagi saya itu sebuah hiburan dan saling belajar.”
- d. Hosea asal Jaya Wijaya, “Rambut saya kriting, dan itu menjadi identitas saya, orang-orang sini suka pegang-pegang rambut saya, saya tidak marah asalakan jangan dicabut. Saya belajar ronggeng disini dan ikut ikut bermain ronggeng.”
- e. Arfin asal Flores, “Saya mempunyai tari hedung. Filosfi tari hidung adalah perjuangan. Dan saya menampilkan itu dalam semangat berkebundaran sekolah”.

### Kesimpulan

Program kelas multikultural SMK Bakti Karya Parigi menjadi solusi dalam merawat dan melestarikan kebhinekaan pada generasi muda. SMK Bakti Karya Parigi mempunyai konsep sendiri untuk menyelenggarakan kelas multikultural dalam merawat kebhinekaan, yaitu: perdamaian, toleransi, kelas aktif, terkoneksi, dan eksplorasi budaya.

Lima konsep di atas diimplementasikan melalui pemberlajaran yang intens. Siswa berdinamika dalam satu ruang pembelajaran di SMK Bakti Karya Parigi. Guru memfasilitasi dan membantu mereka untuk belajar hidup damai dan toleran, aktif menyuarakan perdamaian, berteman dengan siapa saja dan mampu mengilhami nilai-nilai budaya Indonesia. Mereka tidak memandang lagi perbedaan suku, ras dan agama, yang ada dalam benak mereka hanya Indonesia. Pada akhirnya siswa belajar dan mengimplementasikan prinsip hidup sebagai warga negara Indonesia dengan falsafah UUD 1945 dan Pancasila.

### Daftar Pustaka

- Asfiati. 2006. *Pendekatan humanis dalam pengembangan kurikulum*, Medan: Perdana Publishing
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Islam Dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Detik.com. 29 Januari 2018. Survei: Potensi Intoleran RI Meningkat, Projihad Keras 13%. Diperoleh 26 April 2018, dari <https://news.detik.com/berita/d-3839963/survei-potensi-intoleransi-muslim-ri-meningkat-projihad-keras-13>
- Lubi. Ridwan. 2017. *Agama dan Perdamaian: Landasan, tujuan, dan realitas kehidupan beradama di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Tama
- Paul. 2014. *Kelompok Masyarakat Dominasi Tindakan Intoleransi*, Jakarta: Tabloid Reformata, Edisi 172, Tahun X 1-28 Februari 2014.
- Tillman, Diane. 2000. *Living Value: An Educational Program*, New York: Health Communication.Inc.
- Wulandari, Prisca Kiki, dkk. Suyra Membangun. 2017. *Indonesia: Pemberdayaan pemuda berwawasan Pancasila*, Malang: UB Press.
- Zudianto, Herry. 2009. *Kekuasaan sebagai wakaf politik, Manajemen Yogyakarta, Kota multikultrul*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius.



## Strategi Meningkatkan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Karya Parigi

Yana Suryana, Ai Adah Rahmani, dan Rosalina

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Farabi Pangandaran

Email: [suryanaalfarabi05@gmail.com](mailto:suryanaalfarabi05@gmail.com)

### Abstrak

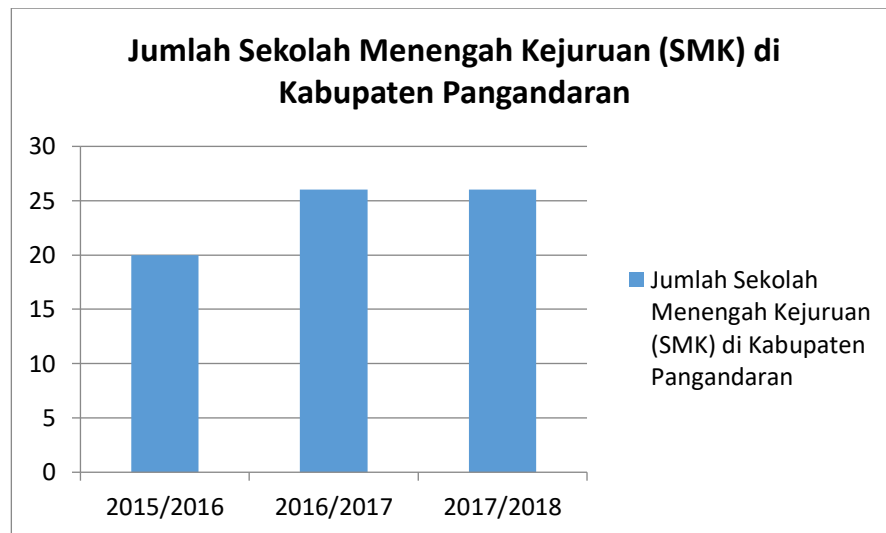
Kesuksesan sebuah lembaga pendidikan dipengaruhi oleh strategi dalam meningkatkan jumlah peserta didik. Banyak strategi yang dapat dilakukan pihak sekolah dalam meningkatkan jumlah peserta didik. Tidak mudah bagi sekolah untuk melakukan upaya tersebut, khususnya sekolah swasta. Diperlukan strategi khusus dalam meningkatkan jumlah peserta didik. Tujuan dari penelitian, yaitu mencari tahu dan mengkaji strategi meningkatkan jumlah peserta didik yang dilakukan oleh Sekolah Bakti Karya. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Sekolah Bakti Karya menggunakan dua strategi dalam meningkatkan jumlah peserta didik. Sekolah Bakti Karya menggunakan strategi internal dengan mengembangkan konsep Sekolah Mutikultural dan Pesantren Ekologi Hidayatul Irfan. Selain itu, Sekolah Bakti Karya memberikan beasiswa Bakti Karya Fellow dan Bakti Karya Live. Strategi eksternal dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai upaya, yaitu informasi melalui sosial media, penyebaran brosur, dan promosi ke sekolah-sekolah menengah pertama. Berdasarkan strategi yang dikembangkan oleh Sekolah Bakti Karya dapat diketahui bahwa strategi yang unik dan bersifat kebaruan membantu meningkatkan jumlah peserta didik di Sekolah Bakti Karya.

**Kata kunci:** strategi, peserta didik, ekologi, dan mutikultur

### Pendahuluan

Keberhasilan serta tercapainya tujuan pendidikan dikarenakan kesuksesan lembaga pendidikan dalam menentukan strategi yang dipakai. Seluruh *stakeholder* yang ada di sekolah harus bersinergi dalam menyukseskan strategi yang diimplementasikan. *Stakeholder* tersebut terdiri dari seluruh masyarakat yang terlibat dalam pendidikan, seperti kepala sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, serta peserta didik.

Perkembangan dunia pendidikan terutama di Kabupaten Pangandaran dirasakan mengalami kemajuan yang sangat pesat, itu semua ditandai dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan. Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Kabupaten Pangandaran terjadi pertambahan pendirian lembaga pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK) terutama pada periode 2015/2016-2016/2017. Data jumlah sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut.



Dari tabel di atas terlihat jumlah SMK pada tahun pelajaran 2015/2016 berjumlah 20 (dua puluh) dan mengalami kenaikan pada tahun pelajaran 2016/2017 menjadi 26 (dua puluh enam) sekolah. Dengan terus bertambahnya SMK di Kabupaten Pangandaran berdampak pada persaingan dalam perekrutan peserta didik. Kudrianto (2011: 1) menyatakan bahwa pendidikan formal apa pun rumusan definisinya, yang jelas ia menunjuk pada sistem persekolahan yang tidak terlepas dari interaksi murid di dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan pendapat Kudrianto, penulis menilai bahwa peserta didik adalah salah satu komponen penting untuk kelancaran proses pembelajaran selain pendidik itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh M Ramli (2015: 61) bahwa pendidik dan peserta didik adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam menggerakkan dimensi pendidikan.

Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat mengatur bahwa ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) pada sekolah menengah kejuruan paling sedikit 15 (lima belas) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam). Kemudian dalam Pasal 26 jumlah rombongan belajar (rombel) pada sekolah menengah kejuruan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua).

Berdasarkan Permendikbud tersebut penulis simpulkan bahwa SMK dapat menyelenggarakan pendidikan jika memiliki peserta didik paling sedikit 45 (empat puluh lima) yakni 3 (tiga rombel). Hal tersebut menuntut setiap SMK khususnya kepala sekolah agar merencanakan dan membuat sebuah strategi dalam proses perekrutan peserta didik.

Menurut Gaffar yang dikutip Kudrianto (2011: 2) pengertian strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan integratif yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang, dan berbuat guna memenangkan kompetensi. Strategi yang dilakukan kepala sekolah sangat berpengaruh besar pada kuantitas peserta didik baru. Sekolah yang memiliki mutu pendidikan dan karakteristik pendidikan yang bagus mempermudah dalam perekrutan peserta didik baru. Syufiama (2004: 139) menjelaskan bahwa sekolah favorit mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk dapat menarik peserta didik (Syufiama, 2004: 139). Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang baru berdiri seharusnya memiliki kelebihan yang bisa ditunjukkan sebagai daya saing dengan sekolah favorit.

Salah satu sekolah yang menarik untuk dilakukan penelitian, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Karya Parigi (Sekolah Bakti Karya). Sekolah ini merupakan salah satu sekolah swasta di Kabupaten Pangandaran. Sekolah Bakti Karya merupakan sekolah yang mengusung

tentang multikulturalisme. Ini merupakan konsep unik karena mayoritas penduduk Kabupaten Pangandaran beragama Islam dan berasal dari suku Sunda. Ini menjadi perhatian bagi masyarakat dan dunia pendidikan terkait konsep pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekolah Bakti Karya.

Secara kelembagaan Sekolah Bakti Karya merupakan sekolah baru yang tentu membutuhkan strategi khusus dalam merekrut calon peserta didik. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti strategi kepala sekolah dalam meningkatkan minat calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Bakti Karya. Penelitian ini penting sebagai bentuk upaya menemukan strategi perekrutan calon peserta didik yang dilakukan oleh sekolah yang mengembangkan basis multikulturalisme.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan oleh para pihak di Sekolah Bakti Karya, yaitu kepala sekolah, karyawan, dan peserta didik. Dokumentasi diperoleh dari laporan perkembangan peserta didik dan jumlah peserta didik setiap tahun pembelajaran.

### Hasil Penelitian

Strategi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah usaha untuk menyiasati. Fatah (2004: 88-89) menyatakan bahwa strategi belajar mengajar adalah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha yang telah ditentukan. Hamel dan Prahalad dalam Umar (2001: 31) mendefinisikan strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang yang diharapkan pelanggan di masa depan.

Sekolah sebagai institusi pendidikan harus memiliki strategi dalam meningkatkan minat calon peserta didik. Strategi ini penting dalam menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Salah satu sekolah yang menarik untuk diteliti, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Karya Parigi. Sekolah Bakti Karya merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Pangandaran yang baru beroperasi selama 6 tahun dimulai pada 2012. Sekolah Bakti Karya memiliki 2 program kejuruan, yaitu teknik komputer jaringan dan multi media. Sekolah Bakti Karya memiliki strategi dalam merekrut calon peserta didik. Strategi yang dikembangkan, yaitu *Hastagg* sekolah SMK Bakti Karya, yaitu Multikultural dan Ekologi. Program sekolah yang mengusung multikultural dan ekologi menjadikan Sekolah Bakti Karya berbeda dengan sekolah lainnya di Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut menjadi keunikan tersendiri yang secara tidak langsung menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mengetahui isi dalam *hastagg* yang diusung Sekolah Bakti Karya.

Sekolah Bakti Karya mengembangkan dua strategi untuk meningkatkan minat calon peserta didik sebagai berikut. *Pertama*, strategi internal yang dibentuk Sekolah Bakti Karya, yaitu pendidikan multikulturalisme dan ekologi. Multikulturalisme adalah “konsep pembudayaan, dan oleh karena proses pendidikan adalah proses pembudayaan, maka masyarakat multikultural dapat diciptakan melalui proses pendidikan” Tilaar dalam Wardhit (2010: 97). Pendidikan dan pembudayaan merupakan suatu proses pembentukan karakter bangsa dan warga negara (Wardhit, 2010: 97). Menurut pemaparan Azra dalam Pageh (2017: 116) sebagai berikut.

Multikulturalisme merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia, atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebhinekaan, pluralitas, sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial-budaya, dan politik yang mereka anut.

SMK Bakti Karya mengusung *hastagg* multikultural karena berupaya merealisasikan kebhinekaan yang ada di Indonesia, bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa melihat ras, agama, dan sosial budaya, serta keadaan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Sekolah Bakti Karya memiliki strategi, yaitu mencari relawan dari penjuru daerah yang bersedia menyingsingkan lengan bajunya untuk pendidikan, relawan tersebut bisa berperan sebagai kakak asuh, relawan media, guru/fasilitator, dan konsultan di Sekolah Bakti Karya. Upaya tersebut terrealisasi dengan adanya peserta didik yang berasal dari sebelas provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Flores Timur, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Jawa Barat. Keberagaman ras, agama, dan sosial budaya tidak menjadikan sebagai penghalang dalam meraih pendidikan selama toleransi masih dijunjung.

Selain multikulturalisme, Sekolah Bakti Karya mengusung konsep Pesantren Ekologi Hidayatul Irpan. Pesantren Ekologi merupakan implementasi dari kecintaan manusia pada Tuhannya, dirinya, dan pada semesta. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari timbal balik antara makhluk hidup dengan alam sekitarnya. Ketika berbicara ekologi maka ekosistem menjadi topik utama. Ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi alam, tumbuhan, hewan, bersama habitatnya, termasuk manusia di dalamnya.

*Kedua*, strategi eksternal melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang Sekolah Bakti Karya melalui konsep Bakti Karya Follow. Strategi intern yang diusung SMK Bakti Karya Parigi dalam bentuk program sekolah tidak akan memiliki daya guna jika masyarakat tidak mengetahui dan memahami makna dari program tersebut. Maka dari itu perlu adanya usaha untuk menyampaikan makna dari program tersebut dengan cara sosialisasi. Sosialisasi bisa dilakukan dengan penyebaran brosur, koordinasi dengan komite sekolah, promosi ke sekolah-sekolah menengah pertama dan promosi via media sosial. Cara-cara tersebut sudah dilakukan oleh Sekolah Bakti Karya Parigi dengan sebuah komunitas yang dinamakan SABALAD. SABALAD merupakan pemuda-pemuda yang memiliki daya kreatif tinggi. Maka dari itu SMK Bakti Karya sangat atraktif dalam melakukan promosi via media sosial. Hal tersebut terbukti dengan adanya strategi Bakti Karya Follow (BKF). BKF adalah program beasiswa penuh untuk membebaskan biaya sekolah, akomodasi asrama, seragam, makan minum siswa selama menempuh pendidikan pada program Kelas Multikultural di SMK Bakti Karya Parigi.

Kedua strategi yang dilakukan oleh Sekolah Bakti Karya memberikan hasil dengan bertambahnya jumlah peserta didik. Berikut data statistik pertumbuhan jumlah peserta didik Sekolah Bakti Karya.

Tabel 1. Jumlah Peserta Didik di SMK Bakti Karya Parigi



Dari tabel di atas terlihat ada kenaikan jumlah peserta didik dari 3 (tiga tahun) ke belakang. Pada tahun 2013/2014 jumlah peserta didik di Sekolah Bakti Karya Parigi adalah 15 (lima belas) peserta didik, kemudian pada tahun pelajaran 2014/2015 mengalami penurunan menjadi 11 (sebelas) peserta didik. Kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun pelajaran 2015/2016 menjadi 45 (empat puluh lima) peserta didik, dan pada tahun 2017/2018 peserta didik mengalami kenaikan lagi menjadi 67 (enam puluh tujuh) peserta didik dengan beragam suku, adat, dan agama.

Tabel 2. Keberagaman Agama Peserta Didik SMK Bakti Karya



Data-data di atas menggambarkan bahwa strategi yang dilakukan Sekolah Bakti Karya dalam meningkatkan minat belajar calon peserta didik berhasil. Sekolah Bakti Karya telah membuktikan bahwa konsep multikultural, ekologi, dan pemanfaatan teknologi (jejaring sosial) mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Selain itu strategi tersebut memberikan pemahaman kepada orang tua tentang arti penting pendidikan dan upaya mengembangkan toleransi dalam masyarakat Indonesia.

### Kesimpulan

Sekolah Bakti Karya merupakan sekolah menengah kejuruan baru di Kabupaten Pangandaran. Terdapat strategi yang dilakukan pihak sekolah untuk meningkatkan jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Strategi yang diusung dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu strategi internal dan eksternal. Strategi internal: berupa program yang memiliki keunikan sehingga membedakan dengan sekolah lain. Program tersebut adalah Multikultural dan Ekologi. Strategi Eksternal: strategi yang digunakan adalah dengan melakukan promosi via media sosial guna menarik masyarakat menjadi donatur atau relawan di Sekolah Bakti Karya Parigi. Strategi meningkatkan jumlah peserta didik dikatakan berhasil, terlihat adanya kenaikan jumlah peserta didik pada 3 (tiga) tahun ke belakang.

### Daftar Pustaka

- Umar, dkk. 2005. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjana, Nana. 2005. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Surabaya: Sinar Baru.
- Fatah, Nanang. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Wardhit, Kuswaya. 2010. Pendidikan Multikultural: Suatu Konsep, Pendekatan dan Solusi dalam Jurnal Pendidikan vol. 11 No.2: hal. 96-105.
- Kudrianto. 2011. Strategi Kepala Sekolah dalam Rekrutmen Siswa di Madrasah Tsanawiyah Pondok Modern Al-Kautsar Pekanbaru. Skripsi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- Pageh, Made, I. 2016. Multikulturalisme dan Tantangannya Di Indonesia dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, vol. 3 No. 2: hal. 115-125.
- Ramli, M. 2015. Hakikat Pendidikan dan Peserta Didik dalam Jurnal Tarbiyah Islamiah, vol. 5 No. 1: hal. 61-73

## Strategi Pendidik dalam Menghadapi Globalisasi Melalui Penguatan Budi Pekerti

**Patmisari, S.Pd<sup>1</sup> dan Fitra Endi Fernanda, S.Pd<sup>2</sup>**

Program Studi PPKn, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

email: patmisari94@gmail.com<sup>1</sup> dan fitrafernanda37@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstrak

Globalisasi membawa pengaruh bergesernya nilai-nilai moral pada peserta didik. Dapat kita lihat perubahan pendidikan zaman dulu dan saat ini yang biasa disebut dengan zaman *milenial*. Pendidik dalam proses pembelajaran zaman dahulu berorientasi pada pembentukan moral dan akhlak yang baik bagi peserta didik melalui kebiasaan dalam sekolah sebagaimana yang dicontohkan oleh guru. Sedangkan saat ini, dalam kurikulum 2013 telah diintegrasikan nilai-nilai akhlak dan karakter, tetapi masih ada proses pembelajaran yang lebih mengarah pada pembentukan peserta didik yang cerdas agar mampu bersaing dalam era global. Nilai budi pekerti mulai hilang, padahal pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan tetapi menanamkan akhlak, budi pekerti, etika dan nilai kehidupan. Untuk menghadapi permasalahan globalisasi, perlu penguatan budi pekerti ke dalam proses pendidikan. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dengan mengumpulkan beberapa referensi yang mendukung kajian budi pekerti di sekolah. Dalam tulisan ini bertujuan untuk memaparkan berbagai strategi pendidik dalam menghadapi globalisasi melalui penguatan budi pekerti. Hasil dari berbagai literatur menunjukkan bahwa perlunya penguatan budi pekerti di sekolah melalui: 1) penguatan budi pekerti oleh pendidik di kelas, 2) penguatan budi pekerti dalam budaya sekolah, 3) penguatan budi pekerti melalui program sekolah.

**Kata kunci:** globalisasi, pendidik, peserta didik, budi pekerti

### Pendahuluan

Globalisasi digambarkan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Namun, globalisasi pada kenyataannya merupakan peyatuan yang bersifat semu, karena nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya didominasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia (Sunarso, 2008 : 222). Globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi seperti jaringan internet, penggunaan gadget yang memudahkan manusia berinteraksi tidak hanya pada tingkat lokal saja tetapi bisa dengan mudah berkomunikasi pada tingkat internasional dengan cepat. Yang menjadi permasalahan dalam era global yakni ketika masyarakat tidak mampu memilah perkembangan yang terjadi di dunia. Masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh sikap, pola pikir atau budaya dari negara lain, yang secara tidak sadar hal tersebut bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia saat ini. Khususnya kaum muda, menganggap bahwa hidup dengan pola hidup seperti masyarakat luar negeri itu adalah hal yang dianggap keren. Dan mereka secara tidak sadar akan mengakibatkan pudarnya identitas bangsa Indonesia dan mulai memudarnya nilai-nilai moral bangsa Indonesia.

Di era global dengan ciri dunia tanpa batas, dunia datar (dunia maya) secara langsung maupun tidak langsung banyak ideologi asing yang gencar menerpa masyarakat Indonesia. Hal ini kadang tidak disadari oleh masyarakat kita, bahkan mereka banyak yang menganggap bahwa nilai-nilai dan ideology asing justru menjadi pandangan hidupnya seperti materialisme,

hedonisme, konsumerisme (Rukiyati, 2008 : 32). Globalisasi akan terus membawa perubahan bagi manusia di bumi ini.

Globalisasi membawa pengaruh bergesernya nilai-nilai moral pada peserta didik. Dapat kita lihat perubahan pendidikan zaman dulu dan saat ini yang biasa disebut dengan zaman milenial. Pendidikan zaman dahulu pendidikan berorientasi pada pembentukan moral dan akhlak yang baik bagi peserta didik melalui kebiasaan dalam sekolah sebagaimana yang dicontohkan oleh guru. Sedangkan saat ini, dalam kurikulum 2013 telah diintegrasikan nilai-nilai akhlak dan karakter, tetapi masih ada proses pembelajaran yang lebih mengarah pada pembentukan peserta didik yang cerdas agar mampu bersaing dalam era global. Hal ini bisa kita lihat ketika guru mengajarkan materi hanya agar siswa mampu lulus KKM (kriteria ketuntasan minimal). Nilai budi pekerti mulai hilang, padahal pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan tetapi menanamkan akhlak, budi pekerti, etika dan nilai kehidupan. Peserta didik zaman dahulu bisa dikatakan memiliki budi pekerti yang baik, sebagai contoh sikap hormat kepada guru begitu tinggi. Ketika guru tiba di sekolah, peserta didik berlomba-lomba untuk bersalaman dan mencium tangan guru bahkan dengan berebut untuk membawakan tas guru. Berbeda dengan saat ini, banyak peserta didik yang kurang sopan terhadap gurunya. Hal ini dipengaruhi karena mudahnya teknologi informasi di era global yang memudahkan anak dengan cepat memperoleh informasi. Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia mudah mempengaruhi peserta didik jika tidak mampu menyaring informasi tersebut. Dapat kita lihat banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh kalangan remaja khususnya pelajar misalnya tindakan pencurian, tawuran, pemerkosaan, aborsi, narkoba. Data menunjukkan adanya peningkatan kenakalan remaja dari tahun ketahun diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pada tahun 2013 angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6325 kasus, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7007 kasus dan pada tahun 2015 mencapai 7762 kasus. Artinya dari tahun 2013 – 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,7%, kasus tersebut terdiri dari berbagai kasus kenakalan remaja di antaranya, pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas dan narkoba (ILMPI Wilayah IV, 2017). Hal ini menandai kemerosotan moral, hilangnya rasa saling menghargai, dan mudarnya suasana budi pekerti yang disebabkan oleh globalisasi.

Sejak reformasi, hak asasi manusia (HAM) lebih dijamin ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal itu mempengaruhi pada suasana pendidikan di sekolah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia untuk menciptakan pendidikan yang lebih humanis dengan menjadikan siswa bukan sebagai objek tetapi sebagai warga negara yang perlu diperlakukan dengan baik. Dengan adanya penerapan nilai-nilai HAM di lingkungan sekolah membatasi wewenang guru dalam mendidik dengan sistem *punishment*. Hal ini bisa kita lihat pada beberapa kasus guru yang memberikan hukuman kepada siswa tetapi berujung pada pelanggaran HAM. Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Jawa Timur sebagai berikut.

*Guru asal Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Samhudi (46) menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kamis (14/7/2016). Ia dibawa ke meja hijau setelah dilaporkan karena mencubit muridnya. Oleh Jaksa Penuntut Umum dia dituntut enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Dalam tuntutan yang dibacakan jaksa Andrianis, guru SMP Raden Rahmad, Kecamatan Balongbendo Sidoarjo itu dinilai bersalah dan melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak.* (Achmad Faizal, 2016, Kompas)

Guru sebagai pendidik yang memiliki wewenang untuk mendidik moral siswa menjadi terbatas dengan profesinya yang tidak terlindungi secara baik, sehingga apabila terjadi kasus tersebut guru yang disalahkan. Hal tersebut mengakibatkan pudarnya sistem *punishment*, membuat siswa menjadi berani kepada guru, hukuman yang diberikan guru dilaporkan dan guru menjadi hati-hati dalam memberikan hukuman kepada siswa. Padahal melalui *punishment* guru



dapat mendidik dan mengajarkan siswa mengenai pentingnya tata tertib dan norma di dalam sekolah. *Punishment* mampu membuat siswa merasa segan dan enggan untuk melakukan pelanggaran baik dalam sopan santun maupun tata tertib sekolah.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, perlu ada strategi untuk mengatasi masalah tersebut melalui penguatan budi pekerti ke dalam proses pendidikan. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki peran dalam menumbuhkan budi pekerti. Meskipun penanaman budi pekerti tidak hanya menjadi kewajiban sekolah, tetapi juga kewajiban lingkungan keluarga dan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan berperan dalam menciptakan suasana budi pekerti, memperkuat persaudaraan dan keakraban di lingkungan sekolah. Budi pekerti tidak hanya diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama, tetapi menjadi tanggungjawab pendidik dalam semua mata pelajaran. Penguatan budi pekerti perlu dilakukan agar nilai moral bangsa Indonesia tidak memudar. Dalam proses pendidikan perlu dipadukan pendidikan budi pekerti ke dalam pendidikan yang mengajarkan kepada siswa:

- a. Sopan santun dalam berbuat maupun berbicara
- b. Sikap hormat dan menghargai antar individu
- c. Sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar
- d. Sikap saling menyayangi, persaudaraan dan keakraban.

Upaya penguatan budi pekerti bisa dilakukan melalui proses pembelajaran guru di sekolah, penciptaan budaya sekolah yang bersuasana budi pekerti, dan melalui berbagai program sekolah.

### Budi Pekerti

Budi pekerti secara epistemologi, budi pekerti terdiri dari dua kata yaitu *budi* dan *pekerti*. Kata *budi* berarti nalar, pikiran, watak. Sedangkan *pekerti* berarti watak, tabiat, dan akhlak. Suwardi (2006: 2) mengemukakan bahwa budi pekerti adalah watak atau perbuatan seseorang sebagai perwujudan hasil pemikiran. Budi pekerti itu merupakan sikap dan perilaku yang dilandasi oleh kegiatan berpikir atau olah batin. Tentu saja yang dimaksud adalah proses berfikir yang sehat sehingga menghasilkan budi pekerti yang baik. Ki Hajar Dewantara (Suwardi, 2006: 2) berpendapat bahwa budi pekerti adalah merupakan perilaku sosial seseorang yang didasarkan pada kematangan jiwanya. Kematangan jiwa akan melahirkan budi pekerti luhur, artinya sikap dan perilaku seseorang yang di samping didasarkan kematangan jiwa (*internal*) juga diselaraskan dengan kaidah sosial yang berlaku di masyarakat sekitarnya (*eksternal*). Tabrani (2009: 2) berpendapat bahwa budi pekerti merupakan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam bergaul, berkomunikasi, maupun berinteraksi antara sesama manusia atau dengan penciptanya. Dalam pergaulan, komunikasi dan berinteraksi tersebut mengandung etika dan tata cara yang sudah menjadi anutan bersama.

Budi pekerti bisa diartikan sebagai moralitas. Moralitas sendiri mengandung beberapa pengertian antara lain adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. Dalam buku Budi Pekerti yang ditulis oleh Tim Balai Pustaka, pada hakikatnya budi pekerti adalah perilaku, sikap yang dicerminkan dalam perilaku yang meliputi empat jangkauan sebagai berikut.

1. Budi pekerti dalam hubungannya dengan Tuhan. Setiap manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila terutama Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya manusia Indonesia harus kenal, ingat, berdoa dan bertawakal kepada Tuhannya.
2. Budi pekerti dalam hubungannya dengan keluarga. Seseorang tidak mungkin hidup tanpa lingkungan sosial yang terdekat dan yang mendukung perkembangannya, yaitu

keluarga. Untuk itu, diperlukan suatu penyesuaian diri (*adjustment*) yang baik dengan keluarga supaya ia dapat bertahan (*survive*).

3. Budi pekerti dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa. Dalam hal ini, sikap penyesuaian diri yang diperlukan terhadap lingkungan lebih luas dari pada sekadar di dalam keluarga.
4. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar. Aturan dan norma harus dipatuhi demi menjaga kelestarian dan keserasian antar manusia dan alam sekitar.

Munjin dalam tulisannya internalisasi nilai-nilai budi pekerti pada anak, budi pekerti sebagai alat batin untuk menalar perbuatan baik dan buruk. Menurut Zuchdi (2008: 141) lembaga pendidikan memiliki tugas mempersiapkan terbentuknya individu-individu yang cerdas dan berakhlak mulia. Diharapkan lembaga pendidikan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki budi pekerti yang baik. Untuk menghasilkan peserta didik yang berbudi luhur atau manusia yang bermoral, Rochmadi (2002: 6) berpendapat bahwa pendidikan budi pekerti harus dilakukan secara holistic dan konsisten oleh semua pihak yang terlibat, memerlukan waktu panjang dan proses berkelanjutan. Sehingga dalam memberikan pendidikan budi pekerti perlu dibiasakan sejak dini dan selalu dibiasakan dimanapun dan kapanpun. Pada hakikatnya di sekolah perlu ditanamkan budi pekerti karena pendidikan budi pekerti bertujuan untuk mengembangkan nilai, sikap dan perilaku siswa yang memancarkan akhlak mulia/budi pekerti luhur (Haidar, 2004). Dalam upaya menanggulangi merosotnya budi pekerti, kegiatan pendidikan budi pekerti merupakan kegiatan prefentif murni yang cepat dan tepat dalam menanamkan wawasan pengetahuan kepada generasi penerus tentang berbudi pekerti yang baik (Tabrani, 2009:2).

### **Strategi Pendidik dalam Penguatan Budi Pekerti**

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme guna memperjuangkan semangat nasionalisme dan patriotisme guna memperjuangkan kepentingan-kepentingan bangsa di atas kepentingan-kepentingan politik yang kerdil dan sempit, yang kemudian hanya mengorbankan kepentingan bangsanya. Pendidikan itu berupaya sekuat tenaga menanamkan rasa persaudaraan, persamaan, kesetiakawanan, dan kebersamaan hidup senasib sepenanggungan, membela bangsa dalam segala bentuk penindasan baik secara fisik maupun psikis, tidak peduli apakah penindasan tersebut berasal dari luar negeri maupun dalam negeri sendiri. Pendidikan pun bermuara guna melahirkan rasa mencintai segala asset bangsa dan dijaga dengan segala cara, agar dapat dimanfaatkan bagi kebesaran dan kemakmuran bangsa (Amas Mahmud, 2011: 86).

Pendidikan budi pekerti sudah diimplementasikan ke dalam kurikulum Indonesia. Dalam kurikulum 2013 sudah ada, ada juga mata pelajaran agama dan budi pekerti. Dalam revisi kurikulum 2013 (Syarifuddin, 2018: 12) yang dilakukan pada tahun 2016 melakukan perbaikan terhadap perumusan dan penataan kembali kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. Kompetensi spiritual dan sikap secara eksplisit hanya diperuntukan untuk mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti dan mata pelajaran Kewarganegaraan, sedangkan mata pelajaran lain, kompetensi spiritual dan sikap terkandung sebagai *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi). Melalui penataan ini, tidak lagi terdapat kompetensi dasar untuk penjabaran kompetensi inti spiritual dan sikap.

### 1. Penguatan Budi Pekerti di kelas dalam proses pembelajaran,

Guru sebagai pendidik berperan bukan hanya dalam mengajar, tetapi harus mampu mendidik. Guru seharusnya tidak hanya mengajar (transfer ilmu) tetapi juga perlu mendidik (transfer nilai). Di dalam proses pembelajaran di kelas, siswa bukanlah objek yang harus diberikan pengetahuan untuk mencapai kecerdasan kognitif agar mampu bersaing dalam era global. Pendidik memiliki peran tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik, tidak hanya mentransfer pengetahuan dan ketrampilan agar cerdas, tetapi mentransfer nilai-nilai budi pekerti untuk membentuk karakter yang baik bagi peserta didik. Dalam proses pembelajaran di kelas, guru adalah *digugu* dan *ditiru* harus mampu memberikan teladan yang baik bagi peserta didik.

Ketika guru mengajarkan tentang kedisiplinan di kelas, maka guru tersebut harus menunjukkan keteladanan terlebih dahulu misalnya dengan masuk tepat waktu dan memakai seragam lengkap dan rapi. Jika guru mengajarkan tentang sabar kepada peserta didik, guru harus bisa menunjukkan kesabaran dalam menghadapi peserta didik. Sehingga ketika guru mengajarkan semua itu, bukan hanya sekadar materi yang perlu diketahui saja tetapi harus mampu diterapkan kepada peserta didik. Jika guru tidak memberikan teladan sebelum mengajarkan, maka peserta didik hanya menganggap nilai-nilai yang disampaikan oleh guru hanya materi pengetahuan saja tanpa makna.

### 2. Penguatan Budi Pekerti dalam budaya sekolah

Menurut Deal dan Peterson dalam Supardi (2015; 221) budaya sekolah adalah sekumpulan nilai - nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa dan masyarakat sekitar sekolah. Menurut Zamroni (2011:111) menyatakan bahwa budaya sekolah adalah sebuah pola nilai – nilai, prinsi – prinsip, tradisi – tradisi dan kebiasaan – kebiasaan, yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah, dikembangkan oleh sekolah dalam jangka waktu yang lama dan menjadi pegangan serta diyakini oleh seluruh warga sekolah sehingga mendorong munculnya sikap dan perilaku warga sekolah, untuk menaati dan patuh terhadap budaya sekolah. Budaya sekolah menjadi ciri khas dan karakteristik dari sebuah sekolah yang mencirikan karakter dan citra sekolah.

Budaya sekolah menjadi sebuah iklim positif di lingkungan sekolah untuk membentuk dan mengajarkan budi pekerti kepada peserta didik. Dalam proses pembentukan karakter budaya sekolah memiliki peran penting sebagai salah satu strategi dalam pengajaran budi pekerti, hal ini dapat dilakukan melalui pembiasaan dalam aktifitas di sekolah. Sebagai contoh setiap siswa wajib berjabat tangan kepada guru, membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran, memakai seragam dengan rapi, tepat waktu, menghormati teman dan warga sekolah lainnya serta tidak melanggar aturan – aturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

Budaya sekolah menjadi sebuah wadah yang sangat efektif dalam pengajaran budi pekerti. Dalam proses pembiasaan dan pengajaran budi pekerti melalui budaya sekolah dapat diperkuat dengan sistem reward dan punishment, melalui strategi ini dapat memberikan peserta didik semangat untuk menjadi yang terbaik dan memberika rasa jera untuk melakukan pelanggaran di sekolah.

### 3. Penguatan Budi Pekerti melalui program sekolah

Program sekolah merupakan suatu rencana kegiatan yang disusun oleh sekolah untuk mencapai tujuan serta visi – misi sekolah. Program sekolah menjadi salah satu strategi dalam penguatan budi pekerti, melalui program sekolah pendidikan budi pekerti dapat tersusun secara sistematis agar tujuan dari pendidikan budi pekerti dapat tercapai. Peran

program sekolah adalah untuk membuat berbagai rencana kegiatan yang berkontribusi untuk penanaman budi pekerti.

Kegiatan – kegiatan tersebut disusun dengan tujuan untuk menanamkan pendidikan budi pekerti kepada peserta didik, sebagai contohnya mengadakan bakti sosial untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitar dan menumbuhkan rasa peduli terhadap orang yang membutuhkan, mengadakan bersih desa sebagai upaya untuk memupuk cinta lingkungan kepada peserta didik. Berbagai kegiatan yang tersusun dalam program sekolah menjadi sangat efektif untuk penanaman budi pekerti jika dilakukan secara berkala dan terus menerus yang akan menjadi kebiasaan dan dapat menjadi budaya sekolah yang terus dijaga eksistensinya.

## Kesimpulan

Globalisasi membawa dampak yang berujung pada merosotnya moral di kalangan anak muda. Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang timbul akibat dari globalisasi, perlu strategi dalam mendidik anak. Suasana pendidikan dengan budi pekerti yang baik perlu diperkuat kembali agar nilai moral anak tidak memudar. Dalam hal ini, sekolah memiliki peran dalam mendidik anak agar menciptakan manusia yang berbudi luhur. Strategi yang bisa dilakukan antara lain pertama dalam proses pembelajaran, seorang pendidik perlu memberikan teadan dalam mengajarkan materi. Yang ke-dua, menciptakan budaya sekolah yang disiplin melalui pemberian *punishment* yang mendidik agar mampu membentuk peserta didik yang sadar akan norma-norma yang berlaku di sekitar. Yang ke-tiga adalah dengan mengadakan program-program sekolah yang mampu menciptakan kesadaran akan lingkungan, peduli terhadap lingkungan sekitar.

## Daftar Pustaka

- AchmadFaizal.(2016).<https://regional.kompas.com/read/2016/07/14/19152391/guru.yang.cubi.t.murid.dituntut.hukuman.6.bulan.penjara> diakses pada tanggal 6 Mei 2018 pukul 17.00 WIB.
- Amas Mahmud. (2011). *Narasi Demokrasi (Refleksi atas Kebudayaan dan Polemik Lokal)*. Yogyakarta : Litera Buku
- ILMPI. (2017). <http://wilayah4.ilmipi.org/2017/10/> diakses pada tanggal 7 Mei 2018 pukul 11.40 WIB.
- Munjin. (2008). “Internalisasi Nilai-nilai Budi Pekerti Pada Anak”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, pp 219-232.
- Rochmadi, Nurwahyu. (2002). *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*. Malang: Wineka Media.
- Rukiyati, dkk. (2008). *Pendidikan Pancasila Buku Pegangan Kuliah*. Yogyakarta : UNY Press.
- Sunarso, dkk. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan PKN untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : UNY Press.
- Supardi. (2015). *Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Praktiknya*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Suwardi. (2006). *Budi Pekerti Jawa: Tuntunan Luhur Budaya Adiluhung*. Yogyakarta: Buana Pustaka
- Syarifuddin K. (2018). Inovasi Baru Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Yogyakarta: CV Budi Utama) halaman 12)
- Tabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti*, Jakarta: PT. Cuti Media Cipta Nusantara, 2009
- Tim Balai Pustaka. (2012). *Budi Pekerti*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero)

- Zamroni.(2011). Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- Zuchdi, Darmiyati. (2008). *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang Manusiawi*. Jakarta: BumiAksara.

## Meninjau Politik Pendidikan Indonesia Pasca Reformasi

**Hastangka**

Fakultas Filsafat UGM

Email: hastangka@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini akan memfokuskan terkait dengan isu politik pendidikan Indonesia sejak pasca reformasi. Fokus perhatian dari tulisan ini meninjau tentang dinamika dan perubahan politik pendidikan Indonesia pasca reformasi melalui tiga aspek yaitu: pertama, kebijakan negara terkait pendidikan nasional. Kedua, pelembagaan pendidikan. Ketiga, orientasi dan visi pendidikan nasional. Fenomena politik pendidikan menjadi menarik pasca reformasi karena pendidikan semakin erat dan berhubungan dengan politik. Relasi antara politik dan pendidikan menjadi fokus perhatian dalam tulisan melihat perkembangan pendidikan di Indonesia memiliki fase krisis jati diri dan identitas ke-Indonesia-an. Konsepsi pendidikan nasional yang hendak dicapai sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia mengalami pergeseran dimana jati diri dan identitas pendidikan nasional lebih pada orientasi pragmatis. Tulisan ini merupakan hasil kajian melalui studi eksplorasi dan analisis tentang perubahan dan perkembangan politik pendidikan yang berkembang di Indonesia. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa pengaruh dan implikasi dari politik pendidikan yang tidak sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional bernegara akan berpengaruh pada capaian, tujuan, dan hasil, terutama kualitas pendidikan di Indonesia yang ada.

**Kata kunci:** politik pendidikan, paska reformasi, kebijakan, perubahan.

### Pendahuluan

Studi dan kajian tentang politik pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan. Sebagaimana dalam tulisan Sarnoto (2012) berjudul “Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia” menjelaskan konsepsi politik Pendidikan di Indonesia dari beberapa fase mulai sejak pra kemerdekaan hingga pasca reformasi mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Pada fase pra kemerdekaan, politik pendidikan yang dikembangkan berhaluan kolonial, dimana praktek kebijakan pendidikan mengarah pada deskriminasi terhadap rakyat jajahannya. Pada fase masa orde lama, kebijakan politik pendidikan mengarah pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Pada fase orde baru, politik pendidikan Indonesia ditekankan pada orientasi administrasi dan birokrasi, sehingga intervensi kekuasaan cukup berpengaruh dalam kebijakan politik pendidikan untuk menghasilkan *ABS (Asal Bapak Senang)*. Sedangkan pada fase orde reformasi semakin terbuka dan bebas, telah terjadi otonomi pendidikan dan desentralisasi pendidikan, implikasinya berbagai kebijakan pendidikan cepat berubah, semakin bebas, dan lebih demokratis dan liberal. Demikian juga, kajian Slamet (2014) berjudul “Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21”, menyoroti arah dan orientasi kebijakan pendidikan Indonesia yang belum meng-Indonesia. Kebijakan pendidikan nasional yang cenderung berubah-ubah telah menyebabkan pendidikan nasional kehilangan arah dan tujuan. Tulisan Mukodi (2016) berjudul “Refleksi Dinamika Kebijakan Pendidikan di Indonesia”, menunjukkan berbagai dinamika dan perkembangan politik pendidikan sejak masa orde lama hingga orde reformasi. Dalam tulisan ini Mukodi menekankan tentang kebijakan pendidikan dan peningkatan kualitas

sumber daya manusia melalui kebijakan yang tepat menjadi penting, sehingga tawaran dari Mukodi terkait persoalan pendidikan perlu dilakukan melalui tiga aspek yaitu: perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan kualitas struktur pendidikan, dan perbaikan kualitas kultur pendidikan. Mukodi mengangkat isu pendidikan bertitik tolak dari persoalan kebangsaan yaitu radikalisme, intoleransi, separatisme, narkoba, kerusakan lingkungan dan tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Pendidikan memegang peran penting dalam proses pembentukan jati diri dan karakter bangsa. Pendidikan tidak hanya berupaya untuk menjadikan bangsa atau warga negara pintar dan cerdas. Tetapi bagaimana filosofi, tujuan, dan metode pendidikan sejalan dengan cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan manusia yang berkualitas, berdaya saing, nasionalis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tulisan ini secara khusus akan menyoroti tentang politik pendidikan Indonesia pasca reformasi dari tiga aspek yaitu: pertama, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, politik kelembagaan pendidikan. Ketiga aspek politik anggaran pendidikan. Politik Pendidikan Indonesia pasca reformasi menarik untuk disoroti karena konteks ini perubahan dan perkembangan pendidikan Indonesia sangat cepat dan terkadang dramatis. Pada aspek peraturan perundang-undangan muncul berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan hal ini berbeda dengan masa sebelumnya tidak banyak produk peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur pendidikan. Pada era pasca reformasi ini, politik pendidikan Indonesia banyak memproduksi peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. Pada aspek yang kedua juga terjadi sangat masif dan mendasar dengan perubahan berbagai bentuk, penamaan, dan esensi lembaga pendidikan terutama di tingkat Perguruan Tinggi. Ketiga, pada aspek politik anggaran pendidikan mengalami perubahan dan “peningkatan” tetapi masih menimbulkan berbagai persoalan yang berakibat pada liberalisasi dan komersialisasi pendidikan di arus bawah.

### **Metode**

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan. Data pustaka utama diperoleh dari jurnal, buku, dan berita terkait dengan isu yang dibahas antara lain kebijakan pendidikan, dan politik pendidikan. Cara analisis yang dilakukan dalam kajian ini dengan: 1). Interpretasi, yaitu melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh dengan mencari perbedaan, esensi dari tulisan, dan merumuskan maksud dan tujuan dari tulisan tersebut. 2). Analisis-sintesis, yaitu menganalisis fenomena politik pendidikan di Indonesia dari aspek peraturan, kelembagaan, dan kebijakan yang ada dan berkembang selama ini.

### **Hasil Pembahasan**

#### **Konsepsi Dasar Politik Pendidikan**

Pendidikan memiliki peran kunci dalam perubahan sosial dan politik di suatu negara. Pendidikan menjadi potret maju, berkembang, atau mundurnya suatu negara. Pendidikan juga menjadi ukuran yang dapat menentukan kualitas sumber daya manusia yang bisa berdaya saing, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara atau sebaliknya. Untuk itu, pendidikan dan politik memiliki hubungan yang erat karena membahas pendidikan dan politik sebagaimana dalam ulasan dan tinjauan terkait politik pendidikan yaitu memfokuskan pada bagaimana hubungan politik dan pendidikan berpengaruh pada bagaimana seorang individu yang didik berpengaruh dan mengalami perubahan di masyarakat. Pendidikan secara khusus membentuk identitas individu dan warga masyarakat akan menjadi seperti apa. Dalam konteks ini politik pendidikan diarahkan bagaimana institusi pendidikan diatur dan menata dirinya untuk memberikan bentuk pelayanan pendidikan yang seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat.

## Politik Pendidikan di Indonesia

Politik pendidikan di Indonesia tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 dan 32. Pada pasal 31 dan 32 menyatakan bahwa:

### Pasal 31

Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan\*\*\*\*)

Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.\*\*\*\*)

Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.\*\*\*\*)

Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.\*\*\*\*)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.\*\*\*\*)

### Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.\*\*\*\*)

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.\*\*\*\*)

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelmaan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat yang menyatakan bahwa "...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". konstruksi politik pendidikan di Indonesia ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya ialah memiliki garis politik yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik pendidikan di Indonesia ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya praktek dan kebijakan pendidikan secara ideal diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Esensi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ialah untuk membangun generasi muda atau seluruh masyarakat dapat terdidik dengan baik, mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkeadilan, serta semakin banyak partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan. demikian nalar yang dibangun oleh para pendiri bangsa yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh termasuk dalam konteks UUD 1945 amandemen menunjukkan bahwa politik pendidikan di Indonesia dapat dimaknai sebagai bentuk komitmen negara terhadap warga negara dalam bidang pendidikan yaitu:

- a. Pendidikan adalah hak warga negara, pasal 31 ayat 1 UUD 1945 telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya pendidikan bersifat umum dan universal. Pendidikan dibangun untuk memberikan hak bagi warga negara mendapatkan layanan dan akses pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab membiayainya, pasal 31 ayat 2 UUD 1945 menunjukkan dengan jelas bahwa pendidikan dasar adalah wajib bagi warga negara untuk dapat mengikuti dan pemerintah bertanggung jawab atas beban biaya pendidikan ditingkat dasar tersebut.
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan satu sistem pendidikan nasional, pasal 31 ayat 3 UUD 1945 memberikan penegasan bahwa sistem pendidikan



- nasional diletakkan dan dirumuskan dalam kerangka untuk menjamin dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan nasional sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan pendidikan nasional, pasal 31 ayat 4 UUD 1945, menekankan pada aspek politik anggaran pendidikan untuk dapat menjamin bagaimana penyelenggaraan pendidikan nasional dijamin oleh pemerintah pusat dan daerah.
  - e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, pasal 31 ayat 5 UUD 1945, menjadi titik pijak bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Politik pendidikan di Indonesia secara yuridis-konstitusional diarahkan untuk membangun dan mencerdaskan masyarakat. Namun, pada arus produk peraturan perundang-undangan paska reformasi ditemukan bahwa politik pendidikan di Indonesia kurang memahami amanat Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945. Berikut ini berbagai produk peraturan perundang-undangan paska reformasi yang ditemukan terkait pendidikan:

- a. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri No.58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 ttg Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan.

Produk peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagaimana tercantum di atas justru sebagian masih menimbulkan persoalan problematis. Misalnya, UU No.20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan UU No.14/2005 tentang guru dan dosen terkait pasal 48 ayat 3 berbunyi “persyaratan untuk menduduki jabatan akademik professor harus berkualifikasi akademik doktor”, esensi dari UU yang dirumuskan hampir sebagian besar mengatur institusi pendidikan yang bersifat administratif dan birokratik mulai dari otonomi pendidikan tinggi, kebebasan menentukan biaya pendidikan di tingkat internal terutama jenjang S2, S3, mengatur jabatan akademik, dan jabatan struktur, mengatur profesi guru dan dosen. Sehingga UU yang dibuat dan peraturan turunan sibuk dengan problem tata kelola administrasi pendidikan bukan pada konteks esensi pendidikan Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Pendekatan legal formal atas tata cara penyelenggaraan pendidikan menjadi praktek pendidikan semakin jauh dari nilai-nilai dan tujuan bersama. Sejak pasca reformasi tercatat berbagai bentuk perubahan yang mendasar di dunia pendidikan Indonesia: perubahan yang mendasar ialah “swastanisasi perguruan tinggi negeri dan berkualitas” mengatasnamakan otonomi kampus. Bentuk dan model swastanisasi ialah tata kelola perguruan tinggi, tata kelola anggaran, dan intervensi dan peran negara diminimalkan.

Implikasinya perguruan tinggi negeri yang sejak awal berdirinya dibangun untuk mencerdaskan bangsa justru sibuk untuk mengurus rapor kenaikan tingkat yang dirilis oleh lembaga-lembaga ranking asing yang secara dampak tidak memiliki dampak langsung bagi mencerdaskan kehidupan bangsa karena kriteria yang disusun dan dibangun menggunakan logika “asing” bukan kepentingan nasional bagaimana komitmen dan kepentingan nasional dijalankan dan dikembangkan dan direalisasikan tidak pernah menjadi kriteria dari lembaga survey terkait ranking perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi menjadi sibuk mengejar ranking dan berkompetisi saling mengalahkan satu dengan yang lainnya untuk dapat dilihat oleh lembaga survey tersebut masuk nomor urut teratas. Komersialisasi dan privatisasi Perguruan Tinggi Negeri semakin menguat sejak paska reformasi ini karena pendekatan otonomi perguruan tinggi dan kebebasan membuat aturan di ranah pendidikan menjadi semakin longgar dan terbuka. Pada aspek kelembagaan juga berkembang fenomena perubahan penamaan perguruan tinggi yaitu dari IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan) menjadi Universitas, IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi Universitas Islam Negeri, dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan menjadi Universitas (Misal. STIKES Surya Global menjadi Universitas Surya Global, STIKES Achmad Yani menjadi Universitas Achmad Yani, dan Stikes Aisyiyah menjadi Universitas Aisyiyah, STIMIK AMIKOM berubah menjadi Universitas Amikom, Universitas swasta berubah menjadi negeri-UPN veteran, dll). Perubahan penamaan institusi pendidikan semacam ini tentu telah berdampak pada arah dan orientasi pendidikan lebih ke komersial dan liberal. Pendidikan menjadi industri perdagangan jasa bukan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semakin banyaknya perguruan tinggi yang sejak awal didirikan dan dikembangkan agar peserta didik memiliki spesialisasi tertentu kemudian berubah untuk menjadi universitas telah menggeser fungsi dan hakekat perguruan tinggi tersebut. Belum lagi dilevel sekolah menengah dan pendidikan dasar terkait berbagai bentuk perubahan dan evaluasi atas kurikulum yang tidak pernah tuntas telah menimbulkan berbagai persoalan dalam praktek penyelenggaraan pendidikan ditingkat bawah. Masalah klasik pendidikan yang juga belum tuntas teruraikan ialah menyangkut aspek pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan meskipun ada sertifikat guru dan dosen belum nampak implikasi pada kualitas pendidikan di Indonesia, problem anggaran pendidikan, dan kebijakan pendidikan yang selalu berubah-ubah dan tidak konsisten.

### **Kesimpulan**

Politik Pendidikan di Indonesia jauh dari cita-cita dan tujuan bernegara dan berbangsa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945. Persoalan pendidikan yang terjadi di negeri ini sibuk membahas administrasi pendidikan bukan pada suatu politik pendidikan yang bertujuan pada cita-cita dan tujuan bernegara dan berbangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik Pendidikan Indonesia pasca reformasi menunjukan arus dan orientasi pada politik pendidikan Indonesia yang mengarahkan pendidikan Indonesia kepada upaya praktek komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan dari segala aspek bukan pada bagaimana memikirkan membangun warga negara yang dapat berkontribusi pada bangsa dan negara dan bagaimana mendidik warga negara untuk dapat bermanfaat dan berdaya saing global.

### **Daftar Pustaka**

Undang-Undang Dasar 1945.  
Putusan MK Nomor 87/PUU-XV/2017 tentang pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

- Sarnoto, Ahmad Zain. (2012). “Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia”, *EDUCHILD*, Vol.01 No.01 Tahun 2012.
- Slamet PH.(2014). “Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21”, *Cakrawala Pendidikan* Oktober 2014, TH.XXXIII, No.3. hal.324-337.
- Mukodi. (2016). “ Refleksi Dinamika Kebijakan Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Profesi Pendidik* Volume 3 Nomor 2, November 2016. Hal.141-152.

## Penguatan Karakter *Digital Citizenship* Melalui Program Kurikuler

**Kenlies Era Rosalina Marsudi, S.Pd.**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Email: kenliesenka@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengidentifikasi peran pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler di sekolah dalam membentuk karakter kewarganegaraan digital atau *digital citizenship*. Penulis juga berusaha untuk menyajikan konsep dan strategi pendidikan *digital citizenship* melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang tepat dalam membentuk karakter kewarganegaraan yang bermoral dan bertanggungjawab sebagai elemen dari era digital saat ini. Konten karya ilmiah ini disajikan secara teoretik berdasarkan data hasil studi literatur. Karya ilmiah hasil penelitian ini dibuat sebagai refleksi atas isu kewarganegaraan digital yang berkembang pesat dewasa ini, khususnya tentang permasalahan *cyberbullying* dan informasi *hoax* di masyarakat dalam berbagai kegiatan warganet di dunia maya melalui situs-situs internet dan juga media sosial. Tantangan abad 21 yang paling besar salah satunya ialah pembangunan jati diri bangsa. Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dan nyata dalam mempertahankan karakter dan kebudayaan khas bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran utama yang memuat konten nilai-nilai luhur Pancasila dengan salah satu tujuannya adalah menjadikan generasi bangsa menjadi warga negara yang baik dengan tetap berpegang teguh pada jati diri bangsa. Sebagai digital natif, siswa harus dipersiapkan menjadi warga negara digital yang berkarakter dengan komponen penguatan karakter *digital citizenship* melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

**Kata kunci:** *digital citizenship*, karakter, pendidikan kewarganegaraan.

### Pendahuluan

Dewasa ini gelombang besar perkembangan digital tak dapat terbantahkan lagi, perkembangan ini menuntun siapapun dapat menikmatinya dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, namun tak jarang pula dengan adanya perkembangan ini justru menghancurkan martabat dan jiwa seseorang. Kenyataan saat ini menunjukkan, banyaknya jumlah pengguna digital di Indonesia, serta tingginya frekuensi mengakses konten informasi dan media sosial, tidak menjamin kedewasaan manusia Indonesia dalam menggunakannya. Berbagai kasus penyalahgunaan perkembangan digital marak terjadi mulai dari meluasnya *hoax*, kasus-kasus *cyberbullying*, konten porno dan prostitusi online serta masih banyak lagi penyalahgunaan lainnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *digital citizenship* ditengarai membuat berbagai penyalahgunaan digital terjadi dalam berbagai lini kehidupan baik di tingkat individu, kelompok masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa atau pers dan organisasi-organisasi lain bahkan tak jarang pula organisasi pemerintah maupun oknum-oknum didalamnya yang menyalahgunakan pesatnya kemajuan digital. Tentu kita

masih ingat bagaimana panasnya pertarungan dua calon presiden yang terjadi pada pemilihan presiden tahun 2014 antara pasangan Jokowi-JK dengan Prabowo-Hatta. Baik kedua calon dan pendukungnya menggunakan berbagai bentuk media digital seperti website dan media sosial untuk melakukan kampanye. Pendukung kedua calon yang turut melakukan kampanye membagikan berbagai informasi, baik yang secara fakta maupun opini berupa berita, gambar dari portal resmi, portal berita hingga akun pribadi. Kampanye-kampanye yang disebut *black kampanye* atau kampanye hitam marak terjadi pada saat itu, dimana kedua kubu pendukung kandidat calon presiden dan wakilnya membuat berbagai gambar-gambar parodi dan karikatur berisi fitnah serta berbagai informasi dan berita *hoax* dalam berbagai lini masa situs berita dan informasi, media massa baik yang cetak maupun elektronik serta media sosial seperti facebook, twitter, Instagram dan masih banyak media yang lain. Tidak jarang masyarakat menganggap bahwa informasi atau berita bohong yang diberikan dalam berbagai bidang tersebut merupakan suatu kebenaran. Para pengguna internet turut larut mengolok-olok kandidat pemimpin mereka seolah tanpa konsekuensi. Terjadi situasi saling menjatuhkan dan akhirnya menyebabkan konflik pecah dalam masyarakat, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal.

Kasus lain yang sedang marak saat ini adalah mengenai pencemaran nama baik, tak sedikit orang-orang yang dituntut ke meja hijau lantaran dianggap mencemarkan nama baik melalui media digital baik web internet maupun media sosial. Suatu bentuk penghinaan dan fitnah disebarluaskan sehingga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) serta beberapa perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selanjutnya kasus prostitusi online yang mengemuka ketika pelakunya bukan saja berasal dari kalangan masyarakat awam, tetapi para tokoh publik seperti aktris dan penyanyi terkenal juga ikut menjajakan dirinya dalam situs-situs prostitusi online. Kasus ini membuat semua mata terperangah menyaksikan lapak-lapak seks online digelar bebas dan mudah diakses oleh siapapun, yang lebih tragis lagi bahwa tak saja orang dewasa, anak-anak dan remaja dapat bebas menyaksikan gambar, pembicaraan dan video porno di akun-akun prostitusi tersebut. Selanjutnya fenomena game online yang memiliki konten porno juga menimbulkan suatu keprihatinan tersendiri dimana rata-rata pengaksesnya justru adalah anak-anak dibawah umur.

Terakhir ialah permasalahan *cyberbullying*, banyak dampak negatif yang fatal dimunculkan oleh *cyberbullying* ini. Seperti beberapa kasus yang ada, tak sedikit orang-orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tak kuasa lagi menanggung beban dan efek dari *cyberbullying* yang dialami. Hal ini tak hanya marak terjadi pada remaja, tapi tak sedikit pula orang dewasa yang menjadi korban dari salah satu bentuk penyalahgunaan digital ini. Beberapa fenomena diatas membuktikan bahwa pengguna internet di Indonesia sejatinya masih gagap menghadapi media digital dan minim sekali karakter digital citizenship yang dimiliki. Di satu sisi mereka dapat mengakses jaringan, mengoperasikan piranti keras dan mengaplikasikan piranti lunak media digital dengan mudahnya namun para pengguna belum memahami sepenuhnya bagaimana penggunaan media digital yang bermoral dan bertanggungjawab. Terlebih lagi, banyak pengguna internet yang belum memanfaatkan media digital secara produktif untuk mendapatkan, menyebarluaskan dan memasok informasi yang benar dan bermanfaat bagi kehidupan bersama dan justru mudah terprovokasi oleh adanya berita bohong atau *hoax* dan hal negatif lain seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Jika ditelisik, sejumlah kasus tersebut bermuara pada satu hal, yaitu rendahnya karakter *digital citizenship* masyarakat Indonesia. Belum adanya kesadaran penggunaan media digital secara bermoral dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama penguatan *digital citizenship* di Indonesia. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, sejumlah pihak melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan *digital citizenship* di tengah

masyarakat. Upaya yang sebenarnya telah dimulai bertahun-tahun silam itu dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan guna menuntaskan berbagai isu terkait dengan permasalahan penyalahgunaan digital yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada pula pihak yang menggunakan pendekatan general, yaitu memberikan pembekalan mengenai pentingnya *digital citizenship* secara umum. Ada pula yang menggunakan pendekatan tematik, entah itu membidik konten tertentu seperti “*anti-hoax*”, “*internet security*”, atau berfokus pada masyarakat tertentu seperti “remaja” dan “anak-anak”, atau tertuju pada segmen tertentu seperti “mahasiswa” dan “ibu rumah tangga”.

Meningkatkan level pengembangan *digital citizenship*, atau membuat masyarakat menjadi pengguna digital yang bermoral dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila memang bukan tugas yang mudah dan bisa diwujudkan melalui satu dua pendekatan saja mengingat semakin berkembang pesatnya masalah-masalah digital baru maupun modifikasi. Hal ini menunjukkan penguatan *digital citizenship* harus dilakukan melalui berbagai sisi. Selama ini gerakan penguatan karakter *digital citizenship* dianggap sporadis dan terkesan ‘tanpa’ agenda yang jelas. Semua kegiatan terkesan reaktif, dalam arti dilakukan sebagai respons sesaat terhadap situasi-situasi tertentu. Akibatnya, sulit menilai sudah sampai di mana gerakan penguatan *digital citizenship* di Indonesia telah berproses. Kemudian sama sulitnya menilai apakah gerakan penguatan *digital citizenship* memang betul-betul efektif mengatasi persoalan. Untuk itu, kita perlu bergerak lebih jauh mencari resep, model atau pendekatan yang tepat sasaran sesuai dengan situasi yang dihadapi, perlu sebuah program yang benar-benar terstruktur untuk melakukan penguatan *digital citizenship*. Program yang terstruktur ini dilakukan melalui program kurikuler di sekolah yang termuat dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini akan efektif menciptakan manusia Indonesia yang melek digital, berkecimpung dalam dunia digital dan bisa menggunakannya secara bermoral dan bertanggungjawab sesuai dengan jati diri bangsa yang termuat dalam nilai-nilai Pancasila.

Selain itu dengan penguatan *digital citizenship* melalui program kurikuler di sekolah ini lebih efektif karena diberikan kepada masyarakat sedini mungkin lewat Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan pendidikan yang wajib ditempuh oleh semua masyarakat dalam berbagai jenjang pendidikan. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana menciptakan penguatan *digital citizenship* melalui program kurikuler di sekolah secara efektif dan efisien? Di akhir penelitian, penguatan *digital citizenship* di Indonesia melalui program kurikuler di sekolah ini akan mampu menjawab *positioning* Indonesia dalam aktivitas penguatan *digital citizenship* yang tengah dan telah berlangsung sekarang, sekaligus memberikan rekomendasi bagi gerakan-gerakan penguatan *digital citizenship* berikutnya, sehingga dapat memperbaiki agenda yang belum terisi atau belum intensif dilakukan dalam peta besar penguatan *digital citizenship* Indonesia. Rekomendasi tersebut juga bermanfaat untuk menyusun modul pendidikan pancasila dan kewarganegaraan berbasis *digital citizenship* sesuai dengan konteks Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## Metode

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu riset kepustakaan (*library research*) dengan model analisis induktif. Disebut penelitian kepustakaan karena data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Harahap, 2014: 68). Melalui analisis induktif akan memunculkan berbagai macam tema, kategori dan pola hubungan di antara kategori tersebut. Riset pustaka dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, artinya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed,

2008: 1-2). Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai tulisan dan hasil penelitian yang terkait dengan *digital citizenship* atau kewargaan digital dan pembelajaran PPKn di sekolah. Setelah dianalisis, maka tersusunlah gagasan pikiran tentang strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru PPKn untuk menguatkan karakter *digital citizenship* yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

## Pembahasan

### Konsep Digital Citizenship dengan Konteks Keindonesiaan

Konsep *digital citizenship* atau kewarganegaraan digital merupakan sebuah istilah baru yang muncul dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, terutama internet yang ditopang dengan kehadiran berbagai website dan media sosial sebagai ajang untuk saling interaksi antara satu individu dengan individu lainnya secara digital atau melalui dunia maya. Setiap pelaku digital bergabung dan membentuk komunitas-komunitas tertentu untuk saling berbagi informasi dan memanfaatkan berbagai konten melalui media digital yang biasanya dalam bentuk foto atau gambar, video, dokumen dan lain sebagainya.

Pelaku atau pengguna digital sesuai dengan konteks kewarganegaraan digital ini disebut dengan warga digital. Warga digital atau *digital citizen* menurut Norris dan Bimber dalam Mossberger (2008:1) yaitu “*Digital citizens as those who use the Internet regularly and effectively that is, on daily basis*”. Kemudian, mengenai warga digital ini juga didefinisikan oleh Mossberger dkk (2008:2), bahwa “*Digital citizens are those who use technology frequently, who use technology for politic information to fulfill their civic duty, and who use technology at work for economic gain*”. Pendapat Norris, Bimber dan Mossberger tersebut pada intinya menyatakan bahwa warga digital adalah seorang warga yang dapat menggunakan teknologi internet secara teratur dan efektif, untuk mendapatkan informasi politik agar dapat memenuhi kewajiban sipil mereka, ataupun digunakan dalam bidang ekonomi untuk mencari keuntungan.

Warga digital ini perlu untuk selalu dilatih dan diajarkan sebagai bekal peserta didik menjadi penerus bangsa masa depan yang semakin pesat perkembangan teknologinya. Pendidikan kewarganegaraan untuk membangun warga negara muda menjadi warga digital yang sesuai dengan konteks keIndonesiaan merupakan suatu urgensi di era seperti ini. Generasi muda akan menghadapi tantangan dunia baru pada masa yang akan datang. Interaksi sehari-hari yang berhadapan dengan individu dari beragam etnis, jenis kelamin, bahasa, ras, dan latar belakang sosial ekonomi di seluruh dunia. Mereka akan mengalami berbagai masalah berkaitan dengan hal ini seperti kesehatan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, ledakan penduduk, migrasi transnasional, nasionalisme etnis, dan penurunan negara-bangsa (Murdiono, 2014:351).

Kemudian Isman. Dkk (2014: 73) mengemukakan yang dimaksud dengan kewarganegaraan digital adalah kemampuan warganegara untuk menggunakan teknologi dengan kompeten, memahami konten digital dan dapat menilai kredibilitasnya, membuat, meneliti dan berkomunikasi dengan alat yang tepat, serta berpikir kritis tentang peluang etis dan tantangan dunia digital, membuat pilihan yang aman, bertanggung jawab, dan memiliki etika dalam penggunaannya. Ada beberapa karaktersitik warga negara digital, yaitu meliputi: 1) Warga negara digital harus memahami masalah manusia, budaya, dan masyarakat yang terkait dengan teknologi dan praktik perilaku hukum dan etika yang berkaitan dengan penggunaan media digital; 2) Warganegara harus mengadvokasi dan mempraktekkan penggunaan informasi dan teknologi yang aman, legal dan bertanggung jawab; 3) Warganegara digital harus menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan teknologi dan memiliki tanggung jawab pribadi; 4) Memiliki etiket, memahami peraturan hukum dan memiliki tanggung jawab, serta menjaga keamanan diri (*self protection*).

Perilaku warga negara digital yang cerdas dan baik menjadi kunci utama agar seorang warga negara dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan digital. Ketika warga negara digital tidak cerdas dan tidak baik dalam beraktifitas maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan baik dalam tingkat individu maupun kelompok dalam masyarakat. Pendidikan nasional Indonesia lahir tidak hanya untuk membentuk peserta didik yang cerdas dan terampil, tetapi juga menjadi warga negara yang dapat menjunjung nilai-nilai positif yang sejalan dengan budaya dan karakter bangsa. Dua tujuan utama ini, sesungguhnya menyiratkan tindakan preventif seluruh komponen bangsa dalam menghadapi proses globalisasi yang tidak dapat dibendung lagi.

Tentu saja, harapan utamanya adalah agar proses globalisasi tidak menyebabkan warga negara tercerabut dari akar budaya dan karakter bangsanya. Secara rinci, ketentuan tentang tujuan pendidikan nasional tersebut dapat dibaca pada Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Seorang warga negara yang efektif dalam kehidupan globalisasi pada dasarnya dikehendaki memiliki kompetensi dalam tatanan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang siap memiliki hubungan dan koneksi melintasi perbedaan namun sekaligus menjaga dan memperdalam rasa identitas dan integritas dirinya sebagai bagian dari warga negara suatu negara. Kewarganegaraan digital yang sesuai dengan konteks Keindonesiaan tentunya ialah kewarganegaraan digital yang berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasarnya. Hal ini mutlak mengingat Pancasila merupakan pedoman hidup bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dalam menghadapi kehidupan global dan era digital pada abad ke-21 ini.

### **Penguatan *Digital Citizenship* Melalui Pembelajaran PPPKn**

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan dengan baik akan menumbuhkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab pada peserta didik dengan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Menurut Samsuri (2011:18) pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya pedagogis pembentukan watak warga negara yang baik, yakni memiliki penalaran moral untuk bertindak atau tidak bertindak dalam urusan publik maupun privat secara bertanggungjawab. Perlu dijelaskan bahwa dalam pembelajaran PPKn yang menjadi target yaitu terintegrasinya ketiga aspek pendidikan yaitu aspek pemahaman (kognitif), sikap (afektif) serta keterampilan (psikomotorik). Atas pemahaman yang benar diharapkan suatu materi pembelajaran (nilai-nilai) diwujudkan dalam sikap dan perilaku sesuai warga negara yang baik atau berbudi pekerti yang baik.

Menghadapi gencarnya perkembangan digital saat ini, masyarakat dituntut untuk mampu mempertahankan karakternya sesuai jati diri bangsa dan nilai-nilai yang dianut oleh tiap masing-masing negara. Dalam konteks keIndonesiaan, nilai-nilai dan jati diri bangsa yang harus dijaga ialah Pancasila yang merupakan perwujudan dari karakter moral yang hidup dalam diri masyarakat sejak dahulu kala. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penguatan karakter manusia yang bermoral dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini harus menjadi prioritas pendidikan, khususnya dalam pendidikan kewarganegaraan mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin mengglobal di era digital ini sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif yang berpotensi mengancam disintegrasi



bangsa dan memunculkan berbagai konflik dalam berbagai lini kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut peneliti, model pembelajaran yang tepat digunakan untuk menguatkan karakter *digital citizenship* ialah model klarifikasi nilai atau lebih dikenal dengan *values clarification technique* (VCT). VCT adalah metode klarifikasi nilai, di mana peserta didik tidak menghafal dan tidak “disuapi” dengan nilai-nilai yang sudah dipilihkan pihak lain, melainkan dibantu untuk menemukan, menganalisis, mempertanggungjawabkan, mengembangkan, memilih, mengambil sikap dan mengamalkan nilai-nilai hidupnya sendiri. Klarifikasi nilai merupakan salah satu metode yang berupaya menumbuhkan kecerdasan intelektual anak didik agar mampu melahirkan suatu keputusan moral yang terbaik dan penuh rasa tanggung jawab. Metode ini, mengajarkan siswa untuk mengatasi masalah, sekalipun dalam situasi nilai moral yang sangat dilematis. Toyibin dan Kosasih (1992:31) menegaskan bahwa keefektifan pembelajaran VCT dapat dilihat dari proses kegiatan belajar yang terjadi yaitu (1) proses kegiatan belajar siswa yang bersifat klarifikasi, dimana peserta didik melalui berbagai potensi dirinya mencari dan mengkaji kejelasan nilai moral dalam bahan ajar yang disampaikan atau tersirat dalam media yang digunakan. (2) Proses kegiatan belajar siswa yang bersifat spiritualisasi dan penilaian melalui kata hati (*valuing*), dan (3) bersamaan dengan proses *valuing* juga terjadi proses pelakonan diri.

Kemudian langkah-langkah pembelajaran VCT menurut John Jarolimek (1974) sebagaimana dikutip Sanjaya (2007:282-283) menjelaskan langkah pembelajaran dengan VCT dalam 7 tahap yang dibagi ke dalam 3 tingkat. Setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut: (1) Kebebasan memilih, pada tingkat ini terdapat 3 tahap, yaitu memilih secara bebas, artinya kesempatan untuk menentukan pilihan yang menurutnya baik. Nilai yang dipaksakan tidak akan menjadi miliknya secara penuh. Kedua, memilih dari beberapa alternatif, artinya untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif pilihan secara bebas. Ketiga, memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat pilihannya. (2) Menghargai, terdiri atas 2 tahap pembelajaran yakni adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya, sehingga nilai tersebut akan menjadi bagian integral dari dirinya dan menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Artinya, bila kita menganggap nilai itu suatu pilihan, maka kita akan berani dengan penuh kesadaran untuk menunjuk-kannya di depan orang lain. (3) Berbuat, yang terdiri atas kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya dan mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Artinya, nilai yang menjadi pilihan itu harus tercermin dalam kehidupannya sehari-hari.

Jadi, kesimpulannya adalah *values clarification technique* dapat melatih siswa untuk berproses melakukan penilaian terhadap nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat di era digital ini dan dapat menetapkan nilai-nilai yang menjadi acuan hidup yang penuh dengan moral dan tanggungjawab dalam melakukan perannya sebagai warga digital. Pendidikan kewarganegaraan dan pengembangannya tidak dapat lepas dari tantangan penguatan *digital citizenship*. Sesuai dengan tujuannya, maka PPKn wajib menciptakan manusia yang memahami, bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma- norma, bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi, menanggapi isu-isu di era digital, serta etika menjadi digital natif. Menurut peneliti, dalam mengimplementasikan VCT dalam pembelajaran PPKn untuk menguatkan karakter *digital citizenship* dapat dilakukan dengan memperhatikan elemen-elemen dalam kewargan digital sebagai berikut. Ribble & Bailey (2007: 11) mengidentifikasi sembilan elemen kewargan digital, yaitu *Digital Access*, *Digital Commerce*, *Digital Communication*, *Digital Literacy*, *Digital Etiquette*, *Digital Law*, *Digital Rights and Responsibility*, *Digital Health and Wellness*, dan *Digital Security*. Dalam proses pembelajaran PPKn, pertama, *digital access* atau akses digital dimana peserta didik dalam pembelajaran PPKn diajak untuk menghargai hak setiap individu untuk memiliki akses teknologi. Namun

mereka juga perlu memahami bahwa setiap warga digital juga perlu menyadari kekangan kepada capaian teknologi, seperti faktor infrastruktur hingga faktor adat dan budaya masing-masing. *Kedua, digital commerce* yang membahas mengenai permasalahan ekonomi atau niaga melalui dunia digital. Selain mengenai pemanfaatannya tetapi juga dari segi risiko seperti penipuan.

Peserta didik dalam pembelajaran PPKn perlu mengetahui bagaimana untuk menjadi pembeli maupun penjual online yang baik. Secara umum peserta didik harus mampu melakukan hubungan baik dengan orang lain. *Ketiga, komunikasi digital* memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, pembelajaran PPKn harus mampu mengarahkan peserta didik untuk siap menggunakan komunikasi digital secara bermoral. Selalu menggunakan komunikasi digital dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai dan norma yang sesuai dengan budaya bangsa. *Keempat, digital literacy* dimana melalui pembelajaran PPKn diharapkan tiap individu memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital dan mengetahui kapan dan bagaimana menggunakannya dengan tepat.

Menyalahgunakan penggunaan media digital adalah suatu hal yang tidak baik dan harus dihindari demi terwujudnya integrasi nasional. *Kelima, etiket digital* membentuk warga negara memahami perilaku yang sesuai dengan standar nilai-nilai kehidupan masyarakat. Etika digital dibuat untuk menjaga perasaan dan keselarasan dengan pengguna lain dan menjadikan masyarakat sebagai warganegara digital yang bertanggungjawab. Karakter seperti ini sangat penting ditanamkan secara dini melalui PPKn di sekolah. Hal ini mengingat dalam teori psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa karakter dalam diri seseorang akan lebih mudah dibentuk sejak dini. *Keenam, hukum digital* memberikan pedoman kepada warga digital untuk memahami bagaimana penggunaan media digital yang baik, karena jika melakukan kesalahan dapat terkena sanksi moral dan hukum seperti halnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan beberapa perubahannya dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016. Bagian ini mengajarkan bagaimana peserta didik dapat melaksanakan hukum karena kesadaran sebagai warga digital. *Ketujuh, ialah hak dan tanggung jawab di dunia digital.* Sebagai warga digital atau individu memiliki hak yang harus dihargai oleh individu lain serta menghargai hak orang lain.

Disamping itu sebelum menuntut haknya, seorang individu harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Hal ini mengajarkan sikap tenggang rasa dan toleransi. *Kedelapan, kesehatan dan kebugaran tubuh digital*, dibalik berbagai manfaat teknologi digital terdapat beberapa ancaman kesehatan yang dapat ditimbulkan karena penggunaan tidak tepat atau berlebihan. Dampak negatif yang ditimbulkan bukan hanya secara fisik namun dapat juga secara mental. Untuk itu dalam pembelajaran PPKn peserta didik selalu diajarkan untuk dapat menempatkan penggunaan teknologi secara tepat dan tidak berlebihan. *Kesembilan, adalah Keselamatan digital (Digital Security).* Diantara begitu banyak warga digital yang ada di dunia ini, tak jarang terjadi kasus penyalahgunaan digital kemudian kecurangan-kecurangan seperti merusak karya orang lain, plagiasi dan sebagainya. Meskipun kita tidak boleh berburuk sangka terhadap pengguna digital yang lain, tetapi pada dasarnya kewaspadaan harus tetap ada dalam diri setiap warga digital, hal ini untuk menjaga keselamatan pada masing-masing individu sebagai digital natif. PPKn membantu peserta didik menjadi seseorang yang kritis dan bermoral sesuai koridor Pancasila sehingga tidak melakukan ataupun menjadi korban dalam penyalahgunaan teknologi digital. Pengembangan sembilan elemen kewargaan digital melalui pembelajaran PPKn dapat disesuaikan dengan tingkat psikologi perkembangan peserta didik serta situasi dan kondisi dalam pembelajaran seperti fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur diatas maka diperoleh simpulan bahwa dalam penguatan karakter *digital citizenship* yang dianggap krusial pada abad ke-21 ini, peran yang paling strategis terdapat dalam pembelajaran PPKn dengan menggunakan model pembelajaran *values clarification values* (VCT) dengan mempertimbangkan sembilan elemen kewargaan digital yakni *Digital Access, Digital Commerce, Digital Communication, Digital Literacy, Digital Etiquette, Digital Law, Digital Rights and Responsibility, Digital Health and Wellness, dan Digital Security*. Dengan begitu, diharapkan penguatan karakter *digital citizenship* melalui program kurikuler yakni PPKn ini dapat menjadi suatu program yang terstruktur dan berkelanjutan serta efektif dan efisien untuk pembentukan warga digital yang bermoral dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam perannya sebagai pengguna teknologi digital pada abad ke-21 ini.

## Daftar Pustaka

- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra*. Vol. 08, No. 01, Hal 68-74.
- Isman, Aytakin. (2014). Digital Citizenship. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*. Vol. 13, No.1.
- Mossberger, Karen et all. (2008). Digital Citizenship. London, England: The MIT Press Cambridge, Massachusetts.
- Murdiono, Mukhamad. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda. *Cakrawala Pendidikan*. Vol. XXXIII, No.3, Hal. 349-357.
- Ribble, M. & Bailey, G. (2007). Digital Citizenship In School. Washington DC: International Society for Teehnology in Education.
- Samsuri. (2011). Model Pembelajaran PKN untuk Membangun Kompetensi Warga Negara. Makalah disajikan pada kajian Mandiri Kewarganegaraan di Program Studi PIPS Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Semester Genap 2008/2009
- Sanjaya, Wina. (2007). Model Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan. Jakarta: Kecana.
- Toyibin, M Aziz dan Djahiri, Kosasih. (1992). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Pusat Perbukuan Depdikbud.
- Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## Urgensi Nilai *Maja Labo Dahu* dalam Pendidikan Karakter: Studi Kasus di MTs Negeri Kota Bima

Mulyadin

Universitas Negeri Yogyakarta

Email: mulyadin0656pasca2016@student.uny.ac.id;mulyadin179@gmail.com

### Abstrak

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan urgensinya nilai-nilai budaya *maja labo dahu* dalam dalam pendidikan karakter, dan aktualisasi nilai-nilai budaya *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian yang dilakukan dengan teknik *purposive* terdiri dari siswa dan warga sekolah MTs Negeri 1 Kota Bima. Sumber data penelitian: sumber lisan, artefak, dokumen, dan catatan tertulis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan *triangulasi*. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif dengan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Nilai-nilai *maja labo dahu* sesuai dengan nilai-nilai dalam pendidikan karakter, yaitu: nilai religius, jujur, disiplin, mandiri, cinta tanah air, dan peduli lingkungan. Selain itu, aktualisasi nilai-nilai *maja labo dahu* telah efektif memberikan pengetahuan moral (*moral knowing*) terhadap peserta didik. Kendala yang dialami sekolah dalam implementasi nilai-nilai *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter adalah kurang konsistensinya orang tua peserta didik atau lingkungan sekitar dalam mendukung dan mengembangkan nilai-nilai budaya *maja labo dahu*.

**Kata kunci:** nilai-nilai *maja labo dahu*, pendidikan karakter

### Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik. Tujuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 disebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk tumbuh kembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki rasa tanggung jawab.”

Pendidikan menjadi salah satu sektor penting yang seharusnya untuk membentuk potensi manusia, ketika lahir, ia dibekali dengan berbagai potensi yang harus diaktualisasikan. Proses ini berlangsung sampai seorang anak mencapai kedewasaan (Rukiyati, 19: 2012). Kedewasaan diri dapat ditunjukkan juga dengan kepribadian yang matang, yaitu kepribadian yang menunjukkan karakter diri sebagai manusia yang baik, manusia yang mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam hidupnya. Ki Hajar Dewantara (1977: 20) mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembangnya anak-anak, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai kebahagiaan

dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga dapat menghasilkan pendidikan Indonesia yang berkualitas.

Pendidikan dikatakan berkualitas jika mampu membantu peserta didik dalam mengembangkan dirinya, yaitu mengembangkan semua potensi yang ada, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan atau nilai-nilai atau melatih keterampilan. Pendidikan berfungsi mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik untuk dapat berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi ketimpangan dalam penyampaian dan arah tujuan pendidikan nasional, sehingga tujuan pendidikan nasional yang puncaknya adalah membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter belum terwujud.

Belum terwujudnya manusia Indonesia yang berkarakter, bisa ditelusuri dari sebab musababnya, salah satunya ialah terlalu asik dengan dunia intelektual. Keasikan dengan dunia intelektual ini sehingga kurang menekankan pada pendidikan karakter/moral, sehingga *output* sekolah tidak mempunyai jiwa berani, mandiri, dan bertanggung jawab (Syamsul Ma'arif, 2008:14). Output pendidikan masih belum mencerminkan cita-cita pendidikan yang diharapkan (Jalal, 2001:14).

Hasil survei terakhir yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Badan Narkotika Nasional (BNN), 63% remaja di Indonesia usia SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seks di luar nikah dan 22% pengguna narkoba di Indonesia dari kalangan pelajar dan mahasiswa (Harian Jurnal Asia diakses 3 Juni 2017) survey lain yang dilakukan LSM *Plan International and International Center for Research on Women (ICRW)* yang dirilis awal Maret 2016 menunjukkan fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah. Terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70% (Liputan 6.com, diakses 1 Juni 2017). Sebenarnya, masalah-masalah tersebut bukan hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, penting kiranya bahwa sekolah harus memiliki kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengimplementasikan pendidikan karakter yang berdasarkan nilai-nilai falsafah yang didasarkan pada budaya-budaya yang menjadi pedoman di lingkungan sekitar.

Pemerintah Republik Indonesia (2010:5) mengatakan pengembangan karakter melalui satuan pendidikan yang merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter dimulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi, terdapat beberapa tahap yang dapat dilakukan dalam membangun pendidikan karakter, yaitu: 1) pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran; 2) pengembangan budaya satuan pendidikan; 3) pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler; serta 4) pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan.

Berkaitan dengan pengembangan nilai muatan materi dalam pendidikan karakter, Lickona (1992) mempercayai keberadaan *moral absolute* (nilai moral agama), yang ditanamkan "*the golden rule*," seperti berbuat jujur, adil, bertanggung jawab, bersikap hormat, bersahaja, dan suka menolong orang. Tetapi ungkapan tersebut masih dalam ungkapan dan ngambang, sehingga membutuhkan praktik nyata dan keteladanan. Artinya dibutuhkan bukti nyata dan keteladanan nyata bahwa seseorang atau masyarakat telah berhasil mempraktikkan *moral absolut* atau "*the golden rule*" tersebut.

Pendidikan karakter cukup urgen untuk mengimplementasikan nilai-nilai falsafah lokal yang sudah menjadi pedoman hidup masyarakat, dan disinkronisasi dengan *core values* yakni tanggung jawab, kejujuran, keadilan, kepedulian, serta sikap menghormati dan menghargai dirinya sendiri maupun orang lain. Sekolah semestinya memiliki komitmen dalam pengembangan karakter anak didik berdasar berbagai nilai tersebut, menjabarkan menjadi bentuk-bentuk tingkah laku teramati dalam situasi keseharian di sekolah, menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai *role model*, melakukan kajian dan diskusi, dan menjadikannya sebagai dasar

perilaku dalam hubungan antarmanusia, manusia dengan Tuhannya, dan memberikan memberikan apresiasi terhadap perwujudan nilai-nilai tersebut pada situasi apapun, kapanpun, dan dimanapun.

Pada hakikatnya setiap sekolah memiliki *school culture*. Menurut Waller (dalam Peterson Deal, 2009:8), tiap sekolah memiliki budaya masing-masing (*school culture*), terdiri dari sejumlah nilai, kaidah moral, norma, dan kebiasaan, yang membentuk perilaku dan hubungan-hubungan di dalamnya. Tiap sekolah kebiasaan dan cara pembentukan karakter sendiri-sendiri. Para pendidik dapat memberikan contoh keteladanan tentang karakter yang akan dibentuk. Pendidikan juga tidak harus melalui kurikulum baku, melainkan dapat melalui *hidden curriculum* yang tersirat dalam berbagai kegiatan sekolah. Selain itu, pendidikan karakter tidak memerlukan sarana-sarana khusus, karena yang diutamakan yaitu proses penyadaran dan pembiasaan (Kemendiknas, 2010).

Idealnya, sejak diberlakukan sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada tahun 2004, semestinya setiap sekolah memiliki keleluasaan untuk mengeksplor dan mengembangkan pengelolaan sekolah sesuai dengan budaya sekolah dan pendidikan karakter. Menurut Wibowo (2013: 137), pendidikan karakter menjadi lebih efektif apabila diintegrasikan dengan manajemen berbasis sekolah (MBS). Namun menurut Dharma (Mustiningsih, 2015: 503) menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan MBS masih memiliki sejumlah hambatan, antara lain sulitnya menerapkan model baru dan pihak-pihak yang harus berprestasi masih terpaku pada konsep lama yaitu menunggu kebijakan yang berasal dari atas. MTs Negeri 1 Kota Bima, merupakan salah satu sekolah yang mengembangkan budaya sekolah dalam pendidikan karakter. Sekolah ini menekankan kepada nilai-nilai budaya *maja labo dahu*. Falsafah *maja labo dahu* dipandang sebagai falsafah hidup yang sudah membudaya dan tertanam dalam benak setiap anggota warga masyarakat Bima.

Secara etimologis *maja labo dahu* diartikan sebagai ***rasa malu dan takut***. Secara terminologis, semboyan *maja labo dahu* diartikan sebagai rasa malu dan takut kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Tuhan sebagai pencipta ketika melakukan suatu kesalahan dan penyelewengan dalam bertindak. Dengan pengertian tersebut, *maja labo dahu* menjadi alat kontrol bagi setiap individu dalam bertindak, baik secara horizontal pada sesama manusia, maupun secara vertikal pada Tuhan Yang Maha Esa. (Jurdi, 2008:215).

Urgensi diimplemntasikan nilai *maja labo dahu* akan melahirkan peserta didik yang memiliki rasa malu dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap hormat kepada guru, atau karyawan, dan bersikap penyayang pada sesama teman. Sekolah ini menekankan pada nilai-nilai religius, jujur, disiplin, mandiri, cinta tanah air, dan peduli lingkungan. Sesuai dengan visinya, yaitu membentuk anak-anak sholeh yang beriman, bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berakhlakul karimah. Ismail (2001b) menyatakan bahwa *maja labo dahu* adalah sebuah konsep kultural dan bersifat abstrak, dalam masyarakat Bima, yang fungsinya lebih bersifat preventif, menjauhkan seseorang dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang memalukan diri sendiri dan keluarga. *Maja labo dahu* menjadi pedoman hidup masyarakat Bima dalam kehidupan sehari-hari seperti aktifitas sosial, ekonomi, pendidikan yang tidak boleh bertentangan dengan norma dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam agama Islam.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Persiapan untuk pendekatan ini dilakukan dengan menyiapkan kerangka penelitian yang berisikan fokus kajian, metode pengumpulan data yang digunakan, dan partisipan yang terlibat. Kerangka penelitian dirinci ke kisi-kisi instrumen sesuai aspek yang akan diteliti. selanjutnya kisi-kisi

instrumen dibentuk dalam bentuk panduan untuk semua metode pengumpulan data. Masing-masing terdapat panduan untuk wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Proses pengumpulan data, pengolahan, dan *display* hasil pendekatan kualitatif dilakukan lebih kurang selama tujuh bulan. Rangkaian tahap ini dimaksudkan untuk meneliti urgensi nilai-nilai *maja labo dahu* di MTs Negeri 1 Kota Bima. Data lengkap tentang urgensi nilai-nilai *maja labo dahu* dianalisis sebagai dasar untuk mengetahui urgensi nilai-nilai *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter.

Observasi dilakukan untuk mengetahui aktifitas rutin untuk mengetahui aktivitas/kegiatan warga sekolah, kondisi sekolah, dan program-program yang mendukung urgensi nilai-nilai *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada kisi-kisi instrumen wawancara semiterstruktur berupa pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban terbuka. Wawancara dilakukan langsung dengan informan yang dituhkan. Selain itu, juga dilakukan wawancara tidak terstruktur atau informal dengan teknik “*conversational*” atau perbincangan harian. Partisipan yang terlibat pada wawancara dipilih melalui *snowball method*. Partisipan ditentukan sebagai *key informants*, konteks penelitian ini terkait dengan urgensi nilai-nilai semboyan *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter yang biasanya dibangun awal oleh para pendiri sekolah. Selanjutnya sehubungan dengan konteks tersebut, dipilih *key informant* adalah kepala sekolah dan guru-guru senior. Partisipan lain yang terlibat adalah pengampu ekstrakurikuler, karyawan sekolah, peserta didik. Masing-masing terlibat sesuai perannya dalam penyelenggaraan sekolah. Pemilihan dengan metode ini diharapkan dapat menjadi sampel yang cukup untuk menghasilkan ukuran sampel yang cukup dalam mendeskripsikan urgensi nilai-nilai *maja labo dahu* dalam berbagai perspektif. Peneliti merupakan instrumen utama (*key instrument*).

Studi dokumentasi sekolah dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen sekolah yang relevan dengan konteks penelitian. Dokumen-dokumen tersebut berupa dokumen pembelajaran (perencanaan pengajaran, agenda pelaksanaan, serta rencana hasil dan penilaian) seperti standar isi, seperti program tahunan, program semester, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan standar ketuntasan, dan sebagainya. Studi artefak dilakukan dengan dokumentasi dalam bentuk gambar. Pengumpulannya dimaksudkan untuk mengetahui urgensi nilai-nilai *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter. seluruh proses pengumpulan data dilakukan dengan cara yang berpedoman pada prosedur pengambilan data kualitatif.

Data hasil penelitian diuji keabsahannya dengan derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Berdasarkan pengumpulan data, didapatkan kondisi rasional tersebut merupakan hasil *credibility* (validitas internal) dengan teknik *member checking* yang merupakan hasil interpretasi dan simpulan data peneliti yang disampaikan pada partisipan untuk dimintai persetujuan. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber (hasil wawancara dari berbagai informan) juga metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui urgensi nilai-nilai *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter di MTs Negeri 1 Kota Bima.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan urgensi nilai *maja labodahu* dalam pendidikan karakter di MTs Negeri 1 Kota Bima, dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut.

### Kebijakan Implementasi nilai-nilai *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter

MTs Negeri 1 Kota Bima merupakan sekolah yang dalam kegiatan sehari-harinya banyak diwarnai dengan pembiasaan untuk menanamkan nilai-nilai *maja labo dahu* pada

peserta didiknya. Kegiatan ini dilakukan sepanjang hari, mulai dari awal masuk sekolah, pembelajaran, ekstrakurikuler, maupun siswa yang ikut sekolah pondok (*boarding school*). Program sekolah pondok (*boarding school*) merupakan satu-satunya MTs yang ada di Kota/Kabupaten Bima yang menerapkan sekolah pondok bagi peserta didiknya.

Data yang berkaitan dengan pembiasaan untuk mengimplementasikan nilai-nilai *maja labo dahu* peserta didik diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, diperoleh data bahwa untuk mewujudkan peserta didik yang sholeh, beriman, bertaqwa, serta berakhlakul karimah, peserta didik dibiasakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai *falsafah maja labo dahu* dalam kesehariannya. Implementasi nilai-nilai *maja labo dahu* diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran, kultur sekolah, dan ekstrakurikuler.

Data hasil penelitian yang berkaitan dengan kebijakan sekolah dalam urgensi implementasi nilai-nilai *maja labo dahu* yang terintegrasi dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran diperoleh penjelasan bahwa Strategi guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter melalui kegiatan: 1) memberikan pemahaman kepada siswa agar tidak menyontek ketika ujian/ulangan, walaupun guru tidak melihat, tetapi Tuhan Yang Maha Esa selalu melihatnya, 2) penugasan yang menuntut siswa untuk memanfaatkan berbagai sumber belajaryaitu perpustakaan dan internet, 3) membuat proyek/tugas besar yang diaktualisasikan ke dalam nilai-nilai lokal, 4) pembuatan kontrak masing-masing kelas yang disepakati bersama oleh guru dan siswa.

Terkait dengan proyek/tugas yang diaktualisasikan ke dalam nilai-nilai lokal, berdasarkan wawancara dengan guru diperoleh data bahwa upaya untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya *maja labo dahu* juga melalui proyek atau tugas kepada peserta didiknya. Data hasil wawancara tersebut diperkuat dengan data hasil observasi yang menunjukkan bahwa banyak dari proyek hasil pembelajaran diaktualisasikan ke dalam nilai-nilai budaya lokal. Misalnya guru menugaskan kepada peserta didiknya untuk membuat *umalengge* yang merupakan salah satu bentuk bangunan warisan budaya Bima.

Nurhafni (583: 2017) mengemukakan bahwa *uma lengge* adalah rumah peninggalan nenek moyang suku Mbojo/Bima yang berada di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang pada awalnya digunakan sebagai tempat tinggal, tetapi Seiring dengan kemajuan zaman, *uma Lengge* tidak lagi dipakai untuk tempat tinggal, tetapi hanya digunakan untuk menyimpan hasil perkebunan. Pada saat sekarang *uma Lengge* telah menjadi salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat. Selain membuat proyek kerajinan yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan, peserta didik diajak berkunjung ke ASI Mbojo (Museum Kesultanan Bima), dengan harapan, pemahaman peserta didik menjadi utuh. Hal ini seperti yang dikemukakan Kolb (1984:41) bahwa *Experiential learning* merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung (*experience*) di mana peserta didik belajar, tumbuh dan berkembang, sehingga dapat mengeksplor, bertanya, membuat keputusan, dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari.

Kegiatan lain dari bentuk implementasi nilai-nilai *maja labo dahu* adalah pembiasaan sholat berjamaah bagi seluruh warga sekolah. Selain itu, yang menjadi unggulan MTs Negeri 1 Kota Bima adalah sekolah pondok (*boarding school*). Peserta didik yang masuk dalam sekolah pondok (*boarding school*) ditambah dengan program hifzul qur'an, penguasaan bahasa arab, bahasa inggris, qira'atul qur'an, serta pembinaan akhlakul karimah. Selain itu, bagi peserta didik yang mengikuti kelas reguler diharuskan menghafal juz 30 Al-Qur'an. Data tersebut diperkuat dengan hasil observasi bahwa setiap peserta didik yang mengikuti sekolah pondok (*boarding school*) ditekankan untuk menghafal minimal tiga juz selama ikut pondok sekolah.

Selain terintegrasi kegiatan pembelajaran, aktualisasi nilai-nilai *maja labo dahu* juga terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pengampu ekstrakurikuler, beberapa ekstrakurikuler di MTs Negeri 1 Kota Bima, yaitu:



1) Keterampilan/Kerajinan tangan, 2) Olahraga prestasi, 3) Imtaq/Da'wah dan MTQ, 4) Kesenian dan Drum Band, 5) Mipatek: LKIR, Olimpiade dan Teknologi Tepat Guna (TTG), 6) IT Club, dan 7) Karya Tulis Ilmiah. Sedangkan pramuka, merupakan ekstrakurikuler wajib bagi peserta didik. Selain itu, program pembiasaan lainnya, yaitu penghijauan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya ekstrakurikuler tetap menjunjung tinggi nilai-nilai *maja labo dahu*, selain itu, tema-tema lomba dari ekstrakurikuler tersebut, banyak yang mengambil tema yang berkaitan dengan budaya setempat. Hal itu diperkuat dari data dokumentasi, bahwa kebanyakan tema lomba-lomba khususnya yang berkaitan dengan seni lebih banyak bertemakan kebudayaan. Misalnya tujuan salah satu tujuan pelaksanaan FLS2N 2017 adalah menanamkan dan membina kecintaan siswa terhadap karya budaya bangsa melalui potensi diri para siswa (Petunjuk Pelaksanaan FLS2N 2017, 47: 2016).

Pengembangan diri dilaksanakan di luar jam kelas, dengan alokasi waktu 2x40 menit selama sepekan. Waktu tatap muka dapat bertambah apabila sudah mendekati dengan waktu lomba. Menurut hasil observasi, MTs Negeri 1 Kota Bima merupakan MTs yang sangat unggul dalam prestasi, baik ekskul yang berkaitan dengan akademik (olimpiade mata pelajaran) maupun lomba-lomba yang berkaitan dengan non akademik. Misalnya Juara 1 Biologi pada Olimpiade KSM (Kompetisi Sains Madrasah) tingkat Provinsi NTB pada tahun 2015 dan menjadi sekolah terbanyak yang mengirimkan wakilnya pada Jambore Nasional pada tahun 2016.

Data penelitian yang berkaitan dengan implementasikan nilai-nilai budaya *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter di MTs Negeri 1 Kota Bima yang berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi adalah nilai religius, jujur, disiplin, mandiri, cinta tanah air, dan peduli lingkungan. Data tersebut diperkuat oleh data wawancara dari kepala sekolah, bahwa MTs Negeri 1 Kota Bima, yang sesuai dengan visi adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah yang didasarkan pada nilai-nilai ketaqwaan, dan memiliki kemampuan dalam ilmu dan teknologi. Gunawan (2012:33) mengatakan bahwa nilai-nilai Ketuhanan atau ajaran agama menjadi dasar bagi seseorang baik dalam pikiran, perkataan, maupun tindakan.

### **Kendala dalam Implementasi Nilai *Maja Labo Dahu* dalam Pendidikan Karakter**

Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang dihadapi dalam implemtasi nilai-nilai *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter di MTs Negeri 1 Kota Bima yaitu kurang konsistennya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar dalam mendukung dan mengembangkan nilai-nilai *maja labo dahu*. Seperti yang dijelaskan oleh Gunawan (2012), bahawa pendidikan karakter tidak cukup hanya dilaksanakan di sekolah atau pun di tinggi saja, bahkan dalam langkah selanjutnya pendidikan karakter perlu dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintah, ormas, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan kelompok lainnya. Juga dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter tidak dihafal seperti halnya materi ujian. Pendidikan karakter memerlukan pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik, pebiasaan untuk berlaku jujur, tolong menolong, toleransi, malu berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan lingkungannya kotor (Gunawan, 2012).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa urgensi nilai-nilai *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter di MTs Negeri 1 Kota Bima, adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai *maja labo dahu* di MTs Negeri 1 Kota Bima belum dirumuskan secara eksplisit atau dibukukan sebagai materi pengajaran. Di dalam visi dan panca prestasi MTs Negeri 1 Kota Bima terdapat aspek budaya yang mengarah pada nilai-nilai *maja labo dahu* yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu: Nilai religius, jujur, disiplin, mandiri, cinta tanah air, dan peduli lingkungan. Karena nilai-nilai *maja labo dahu* belum disebutkan secara eksplisit di MTs Negeri 1 Kota Bima, maka nilai-

nilai *maja labo dahu* tersebut sangat bergantung kepada wawasan dan kemampuan guru ataupun pengampu ekskul dalam menghadirkan nilai-nilai tersebut dalam pengajaran, lingkungan sekolah, maupun ekstrakurikuler.

2. Aktualisasi nilai-nilai budaya *maja labo dahu* dalam pendidikan karakter di MTs Negeri 1 Kota Bima dilaksanakan dalam bentuk proyek, pembiasaan, dan program-program yang selaras sehingga berjalan efektif memberikan pengetahuan moral (*moral knowing*) terhadap peserta didik. Kemudian, nilai-nilai *maja labo dahu* tersebut mereka aktualisasikan kesehariannya.
3. Dalam pelaksanaan implementasi nilai-nilai *maja labo dahu*, masih menghadapi kendala, yaitu yaitu kurang konsistennya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar dalam mendukung dan mengembangkan nilai-nilai *maja labo dahu*.

### Daftar Pustaka

- Akhmad, Muhaimin Azzet. (2011). *Urgensi Pendidikan Karakter Di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Greenwood, Dannis & Lowenthal, Deal. (2005). *Case Study As a Means of Researching Social Work and Improving Practitioner Education*. Journal of Social Work Practice Vol. 19, No. 2, July 2005, pp. 181–193.
- Dwiningrum, S. I. A & Rukiyati. (2013). *Pengembangan Modal Sosial Bagi Pendidikan Karakter Bangsa*. Artikel Penelitian Unggulan PT. LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gunawan, H. (2012). *Pendidikan karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah. B. Uno. (2011). *Teori motivasi dan pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudjiman, Haris. (2008). *Belajar Mandiri*. Surakarta: UNS Press.
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Islam masyarakat Madani dan Demokrasi di Bima: Membangun Demokrasi Yang Kulural Berbasis Religius*, Cet. I; Yogyakarta: Center Of Nation Building Studies.
- (2011). *Islamisasi Dalam Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Katodirjo, S. (1999). *Multidimensi Pembangunan bangsa atos nasionalisme negara kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kemendiknas (2010). *Pengembangan Pendidikan budaya dan karakter Bangsa (Pedoman Sekolah)*. Jakarta: Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendiknas.
- Kolb, D. (1984). *Experiential learning as the science of learning and development*.
- Lickona, T. (1991). *Education for character. How our School can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Book.
- Mustiningsih. (2015). *Masalah Implementasi Manjemen Berbasis Sekolah di sekolah Dasar. Manajemen Pendidikan*. Volume 24, Nomor 6 pp. 498-505.
- Muslich, M. (2011). *Pendidikan karakter: menjawab tantangan krisis multidimensional*. Bumi Aksara.
- Mustari, Mohamad. (2011). *Nilai Karakter*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Nurhafni. ( 2017). *Eksistensi Rumah Tradisional “Uma Lengge” Sebagai Destinasi Wisata Budaya Di Nusa Tenggara. The 1st Education and Language International Conference Proceedings Center for International Language Development of Unissula*.
- (2014). *Nilai karakter refleksi untuk pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Petunjuk Pelaksanaan Festival & Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017. (2016). Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Peterson, K.D. & Deal, T.D. (2009). *The Shaping School Culture: Pitfall, Paradoxes, and Promises*. San Francisco: Joses Bass.
- Rukiyati. (2012). *Pendidikan Nilai Holistik untuk Membangun Karakter anak di SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta: Suatu Kajian konseptual-Filsafat dan Praktik*. Disertasi Doktor, tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Savage T.V.& Armstrong D.G. (1996). *Efective teaching in elementary social studies. Third edition*. Englewood Cliffs: Merril, Prentice Hall.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diakses dari <http://www.unpad.ac.id/wp-konten/uploads/2012/10/UU20-2003-Sisdiknas.pdf>.
- Wibowo, Agus, (2012). *Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*, Yogyakarta: Pustak

## Penguatan Pendidikan Karakter sebagai Upaya Pembudayaan dan Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda

**Saputra Tri Kurniawan, M.Pd**  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Saputratrikurniawan.1990@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penguatan pendidikan karakter berbasis konsep PP No. 87 Tahun 2017, faktor pendukung dan penghambat, dan hasil dari pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Subyek penelitian ini adalah SMP dan SMA di Kota Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan teori Harvard. Sedangkan metode keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) PPK di Kota Malang dilaksanakan melalui integrasi materi pembelajaran, melalui pilihan metode pembelajaran, melalui manajemen kelas, melalui bimbingan konseling, pembiasaan keteladanan, budaya sekolah, evaluasi peraturan sekolah, pengembangan tradisi sekolah, dan ekstrakurikuler; 2) PPK terlihat dalam interaksi peserta didik dengan pendidik, dan interaksi antarpeserta didik di kelas, melalui empat aspek analisis, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat; 3) Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya penguatan pendidikan karakter diantaranya adalah: a) komitmen kuat pendidik, b) kompetensi pendidik yang mumpuni, c) biro konseling yang terbuka dan aktif, d) sinergi yang baik antarsubjek pendidik, e) peserta didik berasal dari keluarga berpendidikan, f) struktur kurikulum karakter yang baik, g) pembiasaan karakter, h) *reward* dan *punishment* yang tegas dan konsisten, dan i) sarana prasarana yang sangat menunjang. Adapun faktor penghambatnya adalah: a) masih adanya kurangpedulian peserta didik, b) terbatasnya akses transportasi, c) kondisi suasana hati peserta didik yang tidak stabil, d) keterbatasan SDM, e) sarana prasarana yang belum 100% ramah dan aman, f) orang tua pendidik memiliki pandangan yang berbeda dengan lembaga pendidikan, dan g) minimnya waktu interaksi peserta didik di Sekolah.

**Kata kunci:** PPK, Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

### Pendahuluan

Seiring dengan arus globalisasi yang telah masuk dalam seluruh relung kehidupan, banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pembangunan karakter. Perlunya penguatan pendidikan karakter mendesak untuk dilaksanakan adalah adanya gejala-gejala yang menandakan tergerusnya karakter bangsa (Mukhadis, 2013: 118-119; Rukiyati, 2013: 196).

Di era seperti sekarang ini, ancaman hilangnya karakter semakin nyata. Nilai-nilai karakter yang luhur tergerus oleh arus globalisasi, utamanya kesalahan dalam memahami makna kebebasan sebagai anak kandung demokrasi (*free will*), kebebasan berkehendak tanpa aturan yang baku, iklim kebebasan tidak jarang diartikan dengan kebebasan bertindak. Tawuran antarpelajar, antarkampung, main hakim sendiri, dan sebagaimana berlangsung di berbagai tempat, sekaligus menjauhkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkarakter, dan berakhlak mulia (Asmani, 2012: 26).

Menilik beberapa fakta terkait dengan krisis moralitas sebagaimana diuraikan di atas, bila kita sadar bangsa ini sedang berada pada sisi jurang kehancuran. Hal ini sebagaimana diindikasikan oleh Lickona (1991:12-22), sebuah bangsa yang sedang menuju jurang kehancuran adalah negara yang memiliki sepuluh tanda-tanda berikut. 1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; 2)

membudayanya ketidakjujuran; 3) sikap fanatik terhadap kelompok/*peer group*; 4) rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; 5) semakin kaburnya moral baik dan buruk; 6) penggunaan bahasa yang memburuk; 7) meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas; 8) rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara; 9) menurunnya etos kerja, dan 10) adanya rasa saling curiga dan kurangnya kepedulian di antara sesama. Dampak dari merosotnya karakter, secara individu jelas, seseorang yang melakukan salah satu tindakan yang diuraikan Lickona berpotensi bermasalah dengan hukum, terlibat dalam kekerasan, hilangnya percaya diri, dan menjadi individu yang tidak memiliki karakter.

Dalam kajian pendidikan dikenal sejumlah ranah pendidikan, seperti pendidikan intelek, pendidikan keterampilan, pendidikan sikap, dan pendidikan karakter (watak). Jika ditilik dari pengalaman sejarah bangsa, pendidikan karakter sesungguhnya bukan hal baru dalam tradisi pendidikan di Indonesia. Beberapa pendidik Indonesia modern seperti R. A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, kemandirian nasional (*National and character building*) Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Natsir dan lain sebagainya, telah mencoba menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa sesuai dengan konteks dan situasi yang mereka alami. Akan tetapi, seiring dengan perubahan zaman, agaknya menuntut adanya penanaman kembali nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah wadah kegiatan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, misalnya, pada masa Orde Lama, untuk membantu pembentukan karakter bangsa Pendidikan Budi Pekerti masuk menjadi salah satu pelajaran dalam kurikulum SD 1947, Pendidikan Budi Pekerti lantas bergabung dengan Pendidikan Agama dalam Kurikulum 1964 dengan nama Agama/Budi Pekerti, juga ada mata pelajaran khusus tentang kewarganegaraan yang sering disebut *civics*.

Pada masa Orde Baru, bahkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dibudayakan dengan lebih sistematis lagi dengan cara mewajibkan untuk mengikuti Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan diadakan sebuah mata pelajaran khusus, yaitu kewarganegaraan Negara Indonesia, Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dari uraian di atas mengindikasikan bahwa pemikiran tentang pendidikan karakter itu tetap bergulir dalam sejarah pendidikan bangsa.

Inkonsistensi dewasa ini yang terjadi pada hampir seluruh aktivitas kehidupan kebangsaan, merupakan wujud tidak konsistennya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pola kebudayaan dan pelembagaan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan generasi muda Indonesia. Maraknya kekacauan yang bersifat vertikal dan horizontal, KKN di mana-mana dari tingkat pusat hingga daerah. Mengapa proses dan kondisi yang diciptakan oleh kepemimpinan hingga kini, tidak mampu mencapai suasana yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera. Hal ini merupakan indikasi bahwa kehidupan kebangsaan kita tidak terimplementasi didalamnya inti sari ajaran moral yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Kealpaan ini keluar dari prinsip dan substansi dasar Konsepsi kebangsaan modern yang menekankan pada keutuhan “kebersamaan”.

Sebab itulah, mengapa aspek pendidikan menjadi aspek terpenting dalam membentuk karakter bangsa. Dengan mengukur kualitas pendidikan, maka kita dapat melihat potret bangsa yang sebenarnya, karena aspek pendidikanlah yang menentukan masa depan seseorang, apakah dia dapat memberikan suatu yang membanggakan bagi bangsa dan dapat mengembalikan jati diri bangsa atau sebaliknya.

Karakter bangsa tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk, dilatih, dan dikelola secara bertahap. Pembentukan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama, guru, tutor dan seluruh komponen bangsa untuk berkomitmen membentuk, membangun dan mempertahankannya. Pendidikan karakter merupakan upaya yang melibatkan semua pihak baik keluarga (informal), sekolah dan lingkungan sekolah, serta masyarakat luas. Pembentukan dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tersebut tidak ada kesinambungan dan keharmonisan. Sekolah sebagai ujung tombak pendidikan karakter tidak semata-mata menjalankan proses pembelajaran pengetahuan semata, tetapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti yang luhur dan lain sebagainya (Armstrong, 2006: 39; Jaenudin, 2010: 3).

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dengan judul “Penguatan Pendidikan Karakter sebagai Upaya Pembudayaan dan Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda”

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitis, yaitu peneliti bertujuan membuat pencandraan (paparan) secara sistematis, faktual dan akurat kritis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat subjek penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Malang. Subjek penelitian ini dilakukan dengan menelaah penguatan pendidikan karakter di SMP dan SMA Kota Malang. Penentuan subjek penelitian ini dilakukan secara selektif berdasarkan hasil observasi. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, *interview* (termasuk dengan *key informant*) dan dokumentasi. Triangulasi merupakan teknik yang dianggap relevan untuk menguji keabsahan data penelitian. Jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik.

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif mengacu pada teknik analisis Harvard, untuk menjawab pertanyaan: 1) pelaksanaan penguatan pendidikan karakter berbasis konsep PP No. 87 Tahun 2017, 2) faktor pendukung dan penghambat, dan 3) hasil dari pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di Kota Malang. Kemudian hasil analisis disajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan model Miles dan Huberman.

### Hasil Penelitian

Penguatan Pendidikan Karakter di Kota Malang dilaksanakan melalui integrasi materi pembelajaran, pilihan metode pembelajaran, manajemen kelas, bimbingan konseling, pembiasaan keteladanan, budaya sekolah, evaluasi peraturan sekolah, pengembangan tradisi sekolah, dan ekstrakurikuler. Dengan jabaran sebagai berikut.

1. Penguatan Pendidikan Karakter di Kota Malang terintegrasi dalam kurikulum yang dilakukan melalui pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Di sini guru harus pandai memilih agar metode pembelajaran yang digunakan secara tidak langsung menanamkan pembentukan karakter peserta didik. Metode pembelajaran yang dipilih harus dapat membantu guru dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Melalui metode tersebut diharapkan siswa memiliki keterampilan yang dibutuhkan, seperti kecakapan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creativethinking*), kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (*collaborative learning*).
2. Pengintegrasian PPK dalam kurikulum mengandung arti bahwa pendidik mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK ke dalam proses pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai utama karakter dimaksudkan untuk menumbuhkan dan menguatkan pengetahuan, menanamkan kesadaran, dan mempraktikkan nilai-nilai utama PPK. Pendidik dapat memanfaatkan secara optimal materi yang sudah tersedia di dalam kurikulum secara kontekstual dengan penguatan nilai-nilai utama PPK.
3. Manajemen kelas (pengelolaan kelas) adalah momen pendidikan yang menempatkan para guru sebagai individu yang berwenang dan memiliki otonomi dalam proses pembelajaran untuk mengarahkan, membangun kultur pembelajaran, mengevaluasi dan mengajak seluruh komunitas kelas membuat komitmen bersama agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berhasil. Pendidik memiliki kewenangan dalam mempersiapkan (sebelum masuk kelas), mengajar, dan setelah pengajaran, dengan mempersiapkan skenario pembelajaran yang berfokus pada nilai-nilai utama karakter. Manajemen kelas yang baik akan membantu peserta didik belajar dengan lebih baik dan dapat meningkatkan prestasi belajar.
4. PPK bisa dilakukan secara terintegrasi melalui pendampingan siswa dalam melalui bimbingan dan konseling. Peranan guru BK tidak terfokus hanya membantu peserta didik yang bermasalah, melainkan membantu semua peserta didik dalam pengembangan ragam potensi, meliputi pengembangan aspek belajar/ akademik, karier, pribadi, dan sosial. Bimbingan dan

konseling di sekolah dilaksanakan secara kolaboratif dengan para guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, maupun orang tua dan pemangku kepentingan lainnya. Keutuhan layanan bimbingan dan konseling diwujudkan dalam landasan, filosofis bimbingan dan konseling yang memandirikan, berorientasi perkembangan, dengan komponen-komponen program yang mencakup (1) layanan dasar, (2) layanan responsif, (3) perencanaan individual dan peminatan, dan (4) dukungan sistem (sesuai Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah). Lima nilai utama PPK yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas sangat sejalan dengan filosofi bimbingan dan konseling yang memandirikan. Peran dan tanggung jawab bimbingan dan konseling dalam PPK adalah pengembangan perilaku jangka panjang yang menyangkut lima nilai utama tersebut sebagai kekuatan nilai pada pribadi individu di dalam mengembangkan potensi di bidang belajar, karier, pribadi, dan sosial.

5. Sejatinya perbuatan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh keteladanan disekitarnya. Sebagaimana pendapat Shein & Chiou (2011: 1097), yakni: *“human behavior is transmitted largely through exposure to role models, that is, modeling phenomena”*. Pendapat tersebut memperjelas bahwa perilaku manusia sebagian besar dipengaruhi oleh pengaruh teladan, fenomena, dan permodelan.
6. Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan sekolah yang mendukung praksis PPK mengatasi ruang-ruang kelas dan melibatkan seluruh sistem, struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah. Pengembangan PPK berbasis budaya sekolah termasuk di dalamnya keseluruhan tata kelola sekolah, desain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), serta pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah.
7. Budaya sekolah yang baik terlihat dalam konsep pengelolaan sekolah yang mengarah pada pembentukan dan penguatan karakter. Sebagai sebuah gerakan nasional, setiap lembaga pendidikan wajib melakukan koreksi dan evaluasi atas berbagai peraturan yang mereka miliki dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai revolusi mental yang ingin diarahkan pada penguatan pendidikan karakter. Salah satu contoh peraturan yang wajib dievaluasi adalah peraturan kedisiplinan tentang sakit, izin, dan alpa, penerapan kebijakan kriteria ketuntasan minimal (KKM), dan peraturan terkait kegiatan mencontek.
8. Satuan pendidikan dapat mengembangkan PPK berbasis budaya sekolah dengan memperkuat tradisi yang sudah dimiliki oleh sekolah. Selain mengembangkan yang sudah baik, satuan pendidikan tetap perlu mengevaluasi dan merefleksi diri, apakah tradisi yang diwariskan dalam satuan pendidikan tersebut masih relevan dengan kebutuhan dan kondisi sekarang atau perlu direvisi kembali, agar dapat menjawab tantangan yang berkembang, serta selaras dengan upaya penguatan karakter di satuan pendidikan tersebut.
9. Penguatan nilai-nilai utama PPK sangat dimungkinkan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler (ekskul). Kegiatan ekstrakurikuler tersebut bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan bakat peserta didik, sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler ada dua jenis, yaitu ekstrakurikuler wajib (pendidikan kepramukaan) dan ekstrakurikuler pilihan (sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan).

PPK terlihat dalam interaksi peserta didik dengan pendidik, dan interaksi antarpeserta didik di kelas. Di dalam kelas terlihat interaksi peserta didik dengan pendidik, dan interaksi antarpeserta didik setara dan seimbang. Hal ini dapat dilihat melalui 4 aspek indikator analisis, yaitu partisipasi, akses, kontrol dan manfaat. Jabaran dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Indikator Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Aspek	Deskripsi	Indikator
Partisipasi	Keikutsertaan atau partisipasi seseorang/ kelompok dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peserta didik mampu mengutarakan pendapat dan argumentasinya di dalam kelas</li> <li>• peserta didik terlibat dalam semua jenis kegiatan pembelajaran</li> </ul>

	suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peserta didik mengerjakan tugas yang telah ditentukan pendidik</li> <li>• peserta didik mengerjakan baik secara individual maupun kelompok tanpa saling membedakan</li> </ul>
Akses	Peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peserta didik mampu memimpin kelas, seperti berdoa, mengerjakan tugas piket harian dan lainnya</li> <li>• peserta didik menggunakan fasilitas atau sarana prasana tanpa membedakan</li> <li>• peserta didik dapat memecahkan masalah secara bersama-sama</li> </ul>
Kontrol	Penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta didik dapat terlibat dalam penyusunan materi proses belajar-mengajar</li> <li>• Peserta didik dapat terlibat dalam mengevaluasi proses belajar mengajar</li> <li>• Peserta didik bersama-sama menentukan aturan dan kesepakatan di dalam proses belajar mengajar</li> </ul>
Manfaat	Kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal	<p>Peserta didik laki-laki maupun perempuan dapat mengikuti</p> <p>proses belajar mengajar yang dilakukan sesuai dengan tahap perkembangannya</p>

Pengembangan karakter merupakan proses seumur hidup, dengan demikian pengembangan karakter seorang peserta didik merupakan upaya seumur hidup yang perlu melibatkan pusat-pusat pendidikan karakter, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat (Zubaedi, 2011: 143; Salim & Kurniawan, 2012: 268; Wibowo, 2012: 152). Proses penguatan pendidikan karakter tidaklah selalu berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses pendidikan karakter peserta didik, seperti faktor pendukung maupun penghambat seperti berikut. Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya penguatan pendidikan karakter diantaranya adalah: a) komitmen kuat pendidik, b) kompetensi pendidik yang mumpuni, c) biro konseling yang terbuka dan aktif, d) sinergi yang baik antarsubjek pendidik, e) peserta didik berasal dari keluarga berpendidikan, f) struktur kurikulum karakter yang baik, g) pembiasaan karakter, h) *reward* dan *punishment* yang tegas dan konsisten, dan i) sarana prasarana yang sangat menunjang. Adapun faktor penghambatnya adalah: a) masih adanya kurangpedulian peserta didik, b) terbatasnya akses transportasi, c) kondisi suasana hati peserta didik yang tidak stabil, d) keterbatasan SDM, e) sarana prasarana yang belum 100% ramah dan aman, f) orang tua pendidik memiliki pandangan yang berbeda dengan lembaga pendidikan, dan g) minimnya waktu interaksi peserta didik di Sekolah.



## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan:

1. PPK di Kota Malang dilaksanakan melalui integrasi materi pembelajaran, melalui pilihan metode pembelajaran, melalui manajemen kelas, melalui bimbingan konseling, pembiasaan keteladanan, budaya sekolah, evaluasi peraturan sekolah, pengembangan tradisi sekolah, dan ekstrakurikuler;
2. PPK terlihat dalam interaksi peserta didik dengan pendidik, dan interaksi antarpeserta didik di kelas, melalui empat aspek analisis, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat;
3. Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya penguatan pendidikan karakter adalah: a) komitmen kuat pendidik, b) kompetensi pendidik yang mumpuni, c) biro konseling yang terbuka dan aktif, d) sinergi yang baik antarsubjek pendidik, e) peserta didik berasal dari keluarga berpendidikan, f) struktur kurikulum karakter yang baik, g) pembiasaan karakter, h) *reward* dan *punishment* yang tegas dan konsisten, dan i) sarana prasarana yang sangat menunjang. Adapun faktor penghambatnya adalah: a) masih adanya kekurangpedulian peserta didik, b) terbatasnya akses transportasi, c) kondisi suasana hati peserta didik yang tidak stabil, d) keterbatasan SDM, e) sarana prasarana yang belum 100% ramah dan aman, f) orang tua pendidik memiliki pandangan yang berbeda dengan lembaga pendidikan, dan g) minimnya waktu interaksi peserta didik di Sekolah.

## Daftar Pustaka

- Armstrong, T. (2006). *The best school: how human development research should inform educational practice*. Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Asmani, J. M. (2012). *Buku panduan internalisasi pendidikan karakter di sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Jaenudin, R. (2010). *Pentingnya membangun karakter dan jati diri peserta didik dalam mewujudkan keberhasilan proses pembelajaran*. Makalah disajikan dalam Seminar Pendidikan, di Lahat September 2010.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: how our school can teach respect and responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.
- Mukhadis, A. (2013). Sosok manusia Indonesia unggul dan berkarakter dalam bidang teknologi sebagai tuntutan hidup di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Karakter*. Vol. III (2), hal. 115-136.
- Rukiyati. (2013). Urgensi pendidikan karakter holistik komprehensif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*. III (2), hal. 196-203.
- Salim, M. H. (2013). *Pendidikan karakter: Konsepsi & implementasi secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi & masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Shein, P. P., & Chiou, W. B. (2011). Teachers as role models for students learnfor students' learning style. *Social Behavior Personality*. 39 (8), pp. 1097-1104.
- Wibowo, A. (2012). *Pendidikan karakter: Strategi membangun karakter bangsa berperadaban*.yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Kencana

## **Menjadi Pancasila: Membangun Indonesia sebagai Strategi dalam Pembudayaan dan Pelembagaan Pancasila Pada Generasi Millennial**

**Galih Nugraha Paripurna**  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
galih.nugraha@student.uny.ac.id

### **Abstrak**

“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung semeru dari akarnya dan berikan aku 1 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia” (Bung Karno). Berbicara membangun Negara, kita akan terbawa arus bernama Visi dan Misi, Kampanye, Kontrak Politik dan Rencana Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang Pembangunan Negara. Kenyataan itu membawa kita kepada paradigma politik pragmatis (kepentingan), bukan pada politik konstruktif (membangun). Ketidakmampuan Indonesia menjadi Negara Maju dan Besar adalah kegagalan Negara dan Pemerintah mengimplementasikan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara maksimal dan aktual. Membangun Bangsa dan Negara Indonesia tidak selalu dari sudut pandang Pertumbuhan Ekonomi, Pembukaan Investasi, Tenaga Kerja Asing dan Hutang Luar Negeri. Tapi bagaimana Negara Indonesia itu menjalankan Pancasila dan UUD NRI 1945 secara benar.

Melalui Strategi Pembudayaan dan Pelembagaan Pancasila Generasi Millennial dalam “Menjadi Indonesia: Membangun Indonesia” ini dengan pertama pendalaman dan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang lebih intensif di seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan pemuda (millennial) dan pemimpin bangsa. kedua Menjadikan Pancasila berperan sebagai faktor utama dalam pembangunan Manusia Indonesia dan Masyarakat dan Bangsa Indonesia (Nation and Character Building). ketiga Menjadikan Pancasila sebagai Tujuan Pembangunan Bangsa dan Negara melalui Resurgensi Pancasila dalam mencegah penggerusan Ideologi, Revitalisasi dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, Pembudayaan Pancasila melalui Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan dan Pelembagaan Pancasila melalui Penguatan Strategi Pendidikan Pancasila dan Lembaga Pembinaan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara.

**Kata kunci:** Menjadi Pancasila, Membangun Indonesia.

### **Pendahuluan**

Pancasila dan nilai-nilainya telah membumi di dalam kehidupan masyarakat seperti pada adat-istiadat, kebiasaan dan agama-agama di Indonesia. Nilai-nilai itulah yang menjelaskan bentuk pandangan hidup bangsa. Menjadikan Pancasila senantiasa berada dalam kesatuan dengan manusia Indonesia, diterima dan dijadikan pedoman dalam kehidupan antar individu, antar kelompok dan individu dengan Tuhan. Oleh karena itu, Pancasila yang demikian itu sering disebut pula sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, konsensus dasar, sumber hukum, cita-cita bangsa, pemersatu bangsa dan falsafah bangsa. Pancasila hari ini menemukan berbagai ujian. Berbagai macam harapan, peluang dan tantangan sampai penolakan tentang Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Bangsa. Ditengah aruh dinamika dan penggerusan ideologi, selama ini Pancasila dan Negara Indonesia masih bertahan dari segala macam ujian tersebut.

Disamping ujian terhadap esensi dan eksistensi Pancasila, hal yang menjadi penting adalah bagaimana Pemahaman, Internalisasi dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir ini ada kegelisahan tentang Pancasila terhadap realitas negatif yang terus berkembang dan dianggap kurang penting. Pancasila tidak diajarkan di sekolah-sekolah secara utuh dasar keilmuannya, Pancasila tidak dijadikan rujukan penyusunan peraturan perundang-undangan, Pancasila tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan Pancasila, hanya ada sebatas formalitas untuk irah-irah vonis hakim, atau undang-undang, selebihnya tidak menjadi sumber inspirasi, motivasi maupun nilai-nilai keteladanan bagi pemangku jabatan pemerintahan.

Pada akhirnya kita ber-Pancasila masih pada tataran bentuk (formal) tetapi belum sampai pada isi (substansi) dan implementasi (aktualisasi). Kita ber-Pancasila hari ini masih sekedar memenuhi legalitas tetapi belum peduli terhadap legitimasi. Artinya, Pancasila hadir dalam bentuk simbol-simbol tetapi maknanya belum menyentuh dan mewarnai sikap, perilaku bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi pembangunan bangsa juga perlu diwujudkan kembali oleh pemangku jabatan pemerintahan. Jangan sampai Pancasila dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan atau bahkan proyek politik-birokratis karena dalam realitasnya selama ini ruang tersebut lebih banyak diisi oleh para politisi di DPR, DPD dan MPR yang lebih banyak berorientasi pada proyek dengan basis ideologis yang implikasinya masih sangat lemah untuk pembangunan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga dengan terbitnya Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Politik di Tingkat Provinsi, yang di dalamnya memuat materi wajib tentang Pancasila, terdapat ikatan normatif yuridis pada para penyelenggara pemerintahan untuk menyosialisasikan Pancasila.

Kenyataan dilapangan ini secara jelas memperlihatkan tidak ada persamaan Garis Ideologi dan Dasar Negara antar lembaga penyelenggara negara terkait dengan urgensi nilai-nilai Pancasila ditanamkan kepada warga negara sebagai dasar pembangunan karakter bangsa, di samping masih terbukanya perdebatan tentang pendekatan, metode, dan sarana yang tepat untuk pembudayaan Pancasila. Seketika muncul sebuah pertanyaan: Apakah pembudayaan Pancasila cukup pada tataran teoritis dan wacana saja? atau akan diimplementasikan dalam pelebagaan Pancasila di masyarakat? Itu tugas kita bersama mengawal Pancasila. Peran pemuda atau istilah kekinianya *generasi millennial* adalah mempunyai tugas bersama dalam meneguhkan Pancasila sebagai Jiwa Bangsa dan Semangat Nasionalisme dalam diri pemuda sesuai dalam nilai Kepancasilaan. Pemuda hari ini dihadapan dinamika perkembangan zaman yang begitu cepat, kita harus sadar akan pentingnya Negara dan Kebangsaan terutama dalam membangun nasionalisme dan mengawal setiap kebijakan Negara. Itulah pemuda atau generasi millennial yang menjadi harapan dalam membangun Negara Indonesia melalui kesadaran, komitmen dan tanggung jawab menjadi Pancasila melalui Pembudayaan dan Pelebagaan nilai-nilai Pancasila dan jiwa dan kehidupan Generasi millennial.

Oleh karena itu, tepat apabila Materi Makalah dengan judul "*Menjadi Pancasila: Membangun Indonesia*" sebagai Strategi dalam Pembudayaan dan Pelebagaan Pancasila pada Generasi Millennial di Kongres Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Ke IV Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018 untuk lebih mengarah pada gagasan pembudayaan dan pelebagaan nilai-nilai Pancasila dan yang bersumber dari pengalaman empiris berbagai kalangan akademisi dan serta mahasiswa dan komponen bangsa lainnya.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus dari berita media baik media cetak maupun elektronik serta kepustakaan, Tahapan penelitian awal pembuatan desain judul, paradigma yang dibangun, pengumpulan data/informasi dan

analisis. Metode ini menekankan pada bagaimana bentuk pembudayaan nilai-nilai dan pelebagaan Pancasila untuk semua lapisan masyarakat. Sebagai upaya resurgensi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diawali dari pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara dan warga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu semua komponen bangsa dan negara baik itu Pemerintah dan lembaga negara berkewajiban untuk menghidupkan lagi pancasila dalam pembudayaan dan pelebagaan serta membendung pengaruh, tantangan dan ancaman globalisasi, liberalisasi, post- modernisme dan radikalisasi demi masa depan bangsa dan Negara Indonesia yang lebih baik.

### **Inti Pemikiran**

Penulis mencoba menggunakan pendekatan sosial melalui Generasi *Millennial* dalam peran sertanya mengawal, membudayakan dan melebagaikan Pancasila dalam aspek kehidupan. Kami percaya bahwa Pemuda mempunyai kekuatan dan potensi besar dalam memberikan gagasan dan pembaharuan, hal ini tercatat pemuda yang banyak berperan dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial politik, dan IPTEK. Misalnya di China, seorang pemuda bernama Joshua Wong yang masih berumur 17 tahun, dia berhasil memobilisasi 120.000 orang yang menentang kurikulum berbau komunis. Dalam dunia sosial politik, kericuhan di Timur Tengah yang dikenal dengan arab spirin, misalnya, berasal dari mobilitas melalui facebook oleh para pemuda belia.

Di Amerika, keberhasilan Barrack Obama dalam Pemilu presiden memperoleh 66% suara dan John Mc Cain hanya memperoleh 23% suara yang langsung dipilih oleh generasi muda di bawah usia 30 tahun. Begitu dahsyatnya peran pemuda atau generasi *millennial* dalam mengawal Negara dan Kebangsaan, hal itulah yang menarik dan menjadi motivasi Generasi Millennial Indonesia harus menjadikan Pancasila dan Negara Indonesia semakin kuat dan tidak ditelan perkembangan zaman. Generasi Millennial Indonesia harus paham dalam usahanya membangun Pancasila dan Indonesia tentunya tidak terlepas dari konsep atau gagasan membentuk dan menjalankan Pancasila sebaik mungkin. Melalui gagasan pemikiran ini penulis akan menyampaikan konsep pikirannya dalam Pembudayaan dan Pelebagaan Pancasila untuk pedoman masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Resurgensi Pancasila**

Resurgensi Pancasila menjadi isu penting di tengah menguatnya ancaman terhadap sendi ideologis dan kebangsaan hari ini. Menjadi wacana publik yang sentral dan krusial dengan berusaha merespons sosio-politik aktual yang mengkhawatirkan dengan pelebagaan Pancasila melalui pembentukan salah satunya pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di ranah eksekutif pemerintahan dan Pusat Studi Pancasila di ranah akademis perkuliahan. Pancasila harus menjadi suatu sistem cita-cita (*ideological system*) dan sistem keyakinan (*belief system*) yang berlandaskan pada spiritualitas teistik sebagai kausa prima dan berorientasi pada keadilan sosial sebagai tujuan ultima. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi ideologi yang memandukan perilaku komunal warga dalam arena negara dan negara itu sendiri dalam menyejahterakan warganya. Hal inilah yang belakangan mengalami kendala berat dan tantangan besar, terutama berupa penguatan gejala radikalisme keagamaan dan kosmopolitanisme ekonomi-politik global.

### **Revitalisasi Pancasila**

Revitalisasi Pancasila menjawab persoalan dan masalah tentang kebangsaan dan salah satunya disintergrasi. Indonesia sekarang ini tengah menghadapi berbagai ancaman baik fisik dan nonfisik yang berupa masuknya ideologi asing, seperti radikalisme atas nama agama, komunisme, liberalisme, dan sosialisme. Terkait hal itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila

menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah disintegrasi bangsa akibat ancaman ideologi asing tersebut. Jadi upaya revitalisasi Pancasila bisa dilakukan dengan Pancasila sebagai paradigma ideologis pembangunan bangsa, Pancasila sebagai gaya hidup, media dan millennial, Pancasila sebagai paradigma konstitusional ketatanegaraan dan stabilitas politik serta Pancasila mencegah ancaman radikalisme dan intoleransi. Revitalisasi gerakan kebudayaan berkelanjutan dan berbasis sektoral untuk generasi millennial dengan mengutamakan untuk kalangan pelajar/mahasiswa dan menginisiasi gerakan-gerakan bertemakan kebangsaan, momentum sejarah untuk membangun sentimen kebangsaan. Jadi bisa dibayangkan jika Generasi Millennial ini mempunyai semangat dan passion dalam membudayakan Pancasila sebagai Jatidiri dan Jiwa Bangsa Indonesia, maka terwujudkan Indonesia yang berpancasila dimasa depan.

### Pembudayaan Pancasila

Pembudayaan mempunyai pengertian lebih tinggi dari pemasyarakatan hal ini dapat diartikan bahwa pemeliharaan dan menjaga nilai-nilai tetap dipertahankan serta dilaksanakan sebagai mana mestinya. Pemasyarakatan adalah mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat tentang nilai-nilai yang perlu diketahui, sekaligus berbagai masalah yang mungkin muncul dalam melaksanakan nilai-nilai yang demikian fundamental bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu Pembudayaan sebagaimana diajarkan dalam psikologi pendidikan lebih maju lagi karena adanya dorongan memberikan motivasi. Dilihat dari segi motoriknya nuansa pada pembudayaan lebih tinggi dari pemasyarakatan yang lebih banyak pada tingkat kognitif dan affektif. Dalam pemasyarakatan juga mengandung tuntutan bagaimana membudayakannya, namun dapat dirasakan bahwa orientasi pada pembudayaan ini sekaligus juga menyangkut pelembagaannya di masyarakat. Pembudayaan nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila diantaranya.

**pertama** dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter, melahirkan bangsa dengan etos kerja yang positif dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. **Kedua**, dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung visi kebangsaan yang humanism. Dalam membumikan prinsip tersebut, para pendiri bangsa telah mewarsikan gagasan dengan mengaitkan antara visi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusiaan yang universal juga bagaimana kemanusiaan ini menjawab persoalan hak-hak asasi manusia (HAM) yang menjadi tantangan komitmen kemanusiaan bangsa Indonesia. Komitmen penegakan HAM tidak terbatas pada pemuliaan hak politik saja, melainkan juga pemenuhan hak ekonomi, dan budaya. **ketiga** Persatuan Indonesia secara konseptual memiliki prinsip dan kebangsaan yang kuat dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Suatu prinsip kebangsaan untuk menghargai perbedaan, mengusahakan persatuan dalam negara, konstitusi negara, bentuk, lambang dan bahasa negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai konsensus dasar bersama. Semangat nasionalisme Indonesia merupakan perwujudan rasa syukur atas karunia Tanah Air yang luas, rasa cinta, rasa persatuan, rasa kekeluargaan yang hanya bisa diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. **keempat** adalah Kerakyatan dalam demokrasi pada hakikatnya merupakan cara mencintai sesama manusia dengan menghormati setiap warga sebagai subjek yang berdaulat.

Dalam demokrasi permusyawaratan, kecintaan terhadap sesama warga diekspresikan dengan mengembangkan *negara kekeluargaan* yang mengatasi paham perseorangan dan golongan; serta mengembangkan *negara kesejahteraan* yang dapat menyelenggarakan keadilan sosial. **kelima** adalah keadilan sosial. menyelenggarakan masyarakat yang adil dan

makmur adalah tujuan Negara Indonesia sesuai amanat konstitusi. Untuk terwujudnya keadilan dan kesejahteraan merupakan bukti paling nyata dari idealitas Pancasila melalui jalan untuk mencapai keadilan sosial menghendaki perwujudan negara kesejahteraan melalui peran negara secara luas dan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan. Perwujudan negara kesejahteraan juga sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara Negara, disertai dukungan rasa tanggung jawab, rasa kemanusiaan dan keadilan yang terpancar pada setiap warga. Dalam visi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip: "*Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*". Mewujudkan keadilan sosial adalah dengan bergotong-royong memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan jaminan pelayanan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaya saing dunia dimasa depan.

### **Pelebagaan Pancasila**

Pelebagaan Pancasila menjadi penting karena itu menjadi titik sentral bagaimana menumbuhkan pemahaman dan aktualisasi Pancasila. Saat ini, Pelebagaan Pancasila pada masa Pasca Refromasi cukup mengundang perhatian banyak orang dan memprihatinkan. Salah satu diantara karena lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya, kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan Masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Coba kita melihat kembali pada pelembagaan Pancasila sebelumnya seperti pada yang *pertama* yaitu Pelebagaan Pancasila era Orde Lama dimana Pancasila dilembagakan melalui Manipol/USDEK (Manifestasi Politik/UUD 1945, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi dan Kepribadian), itulah yang menjadi dasar haluan Negara yang harus dijunjung tinggi, dipupuk dan dijalankan oleh semua warga Negara. Manifesto Politik inilah yang masuk sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara pada masa itu. *Kedua* mengenai Pelebagaan Pancasila era Orde Baru. Kita pasti banyak mengenal strategi pelembagaan pancasila melalui TAP MPR meneruskan GBHN/II/MPR/1978 tentang Pedoman dan Pengalaman Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) yang ditugaskan oleh BP-7 (Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila). Sebagai puncaknya pada masa sekarang dimana Pelebagaan Pancasila pasca Refromasi sampai sekarang adalah Penegasan Pancasila sebagai dasar tetap, tetapi belum ada pedoman pelembagaan pancasila yang jelas. Itulah yang menjadi dasar bagaimana penerjemahan Pancasila menurut versi masing-masing institusi dan entensinya masing-masing. Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI, Sosialisasi Pancasila dan Pendidikan Politik serta wawasan kebangsaan. Muncul sebuah Badan setingkat kementerian bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diharapkan menjadi Badan Pelebagaan Pancasila pasca reformasi tapi sampai hari ini belum teruji efektivitasnya.

### **Kesimpulan**

Sebuah bangsa dikatakan maju dan kuat apabila bangsa itu mempunyai nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dan benar-benar terimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Apabaila dasar dan pedoman kehidupan bangsanya kuat, niscaya tidak ada lagi perilaku penyimpangan, penyelewengan, penjjajaan, diskriminasi dan penggerusan ideologi bangsa ditengah perkembangan zaman yang cepat ini. Berbicara membangun Negara, kita akan terbawa arus bernama Visi dan Misi, Kampanye, Kontrak Politik dan Rencana Jangka Pendek, Menengah dan Jangka Panjang Pembangunan Negara. Ketidakkampuan Indonesia menjadi Negara Maju dan Besar adalah kegagalan Negara dan Pemerintah mengimplementasikan

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara maksimal dan aktual. Membangun Bangsa dan Negara Indonesia tidak selalu dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pembukaan Investasi dan Hutang Luar Negeri. Itu adalah suatu kekeliruan dalam membangun Negara.

Indonesia sudah mempunyai Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Bangsa, UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, jika itu semua dijalankan dengan maksimal dan aktual, cita-cita membangun Indonesia akan terwujud. Melalui *Strategi Pembudayaan dan Pelembagaan Pancasila Generasi Millennial dalam “Menjadi Indonesia : Membangun Indonesia”* ini dengan *pertama* pendalaman dan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang jauh lebih intensif di seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan terpelajar dan kalangan pimpinan bangsa dan daerah. *kedua* Menjadikan Pancasila berperan sebagai faktor utama dalam pembangunan Manusia Indonesia dan Masyarakat dan Bangsa Indonesia (Nation and Character Building). *ketiga* Menjadikan Pancasila pedoman utama untuk memperkaya kebudayaan Indonesia ketika hendak mengadopsi nilai-nilai dari luar. Pancasila adalah paham terbuka, maka tidak mustahil bangsa Indonesia merasa perlu mengadopsi hasil kebudayaan bangsa lain untuk peningkatan kehidupan sendiri. Melalui Resurgensi Pancasila dalam mencegah penggerusan Ideologi, Revitalisasi dalam mempersatukan bangsa, Pembudayaan Pancasila melalui Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan dan Pelembagaan Pancasila melalui Penguatan Strategi Pendidikan dan Lembaga Pembinaan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara.

### Daftar Pustaka

- Halili. 2017. *Politik Resurgensi Pancasila* dalam Opini Kompas. 24 Februari.
- Halili. 2018. *Dari UKP-PIP Ke BPIP* dalam Analisis KR. 22 Maret.
- Latif Yudi. 2008. *Pancasila , Falsafah Gotong-royong* dalam Suara Pembaharuan. 2 Juni
- Latif Yudi. 2011. *Revitalisasi Pancasila Ditengah Dua Fundamentalisme Dalam Dignitas*, Vol VII, No.2 .
- Latif Yudi. 2011. *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila)*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Latif Yudi. 2015. *Revolusi Pancasila*. Mizan Media Utama. Jakarta.
- Latif Yudi. 2017. *Mata Air Keteladanan (Pancasila dalam Perbuatan)*. Mizan Media Utama. Jakarta.
- M. Syaiful Bahri Anshori. 2015. *Reaktualisasi Pancasila Membumikan Kembali Nilai-nilai Pancasila Dalam Berbangsa dan Bernegara*. Ombak. Yogyakarta.
- TIM MPR RI. 2015. *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI*. Penerbit Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta.

## Menumbuhkan Jiwa *Entrepreneurship* Generasi Muda: Peran Penting Pendidik dalam Inovasi Pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan

Alif Lukmanul Hakim & Indriyani Ma'rifah

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

### Abstrak

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Data statistik tersebut selain menunjukkan angka pengangguran di Indonesia masih relatif tinggi, juga menggambarkan bahwa minat kewirausahaan masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Menyimak data statistik tentang rendahnya minat kewirausahaan masyarakat Indonesia sebagaimana di-*release* BPS di atas memang cukup memprihatinkan. Pasalnya, sektor kewirausahaan yang sejatinya dapat diharapkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat mengurangi pengangguran, justru tidak banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mempromosikan dan menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship education*) di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Harus diakui, pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian yang cukup memadai. Banyak pendidik (baca: guru dan dosen) yang kurang memperhatikan pengembangan jiwa wirausaha peserta didiknya. Padahal, pendidik sesungguhnya memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam mempromosikan dan mendiseminasikan pendidikan kewirausahaan. Artikel ini secara komprehensif akan memaparkan makna dan peran penting pendidik dalam inovasi pembelajaran pendidikan kewirausahaan.

**Kata kunci:** Pendidikan Kewirausahaan, jiwa *entrepreneurship*, pendidik, peserta didik

### Pendahuluan

“Seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia,  
niscaya aku akan membunuhnya”  
(Ali bin Abi Thalib)

Perkataan Ali bin Abi Thalib di atas menyiratkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang menakutkan. Kendatipun kehadirannya telah setua peradaban manusia, namun tidak banyak negara yang mampu mengatasinya. Demikian pula kemiskinan di Indonesia yang sulit teratasi. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen). Data statistik tersebut selain menunjukkan angka pengangguran di Indonesia masih relatif cukup besar, juga menggambarkan bahwa minat kewirausahaan masyarakat Indonesia masih relatif rendah.



Menyimak data statistik tentang rendahnya minat kewirausahaan masyarakat Indonesia sebagaimana di-*release* BPS di atas memang cukup memprihatinkan. Pasalnya, sektor kewirausahaan yang sejatinya dapat diharapkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat mengurangi pengangguran, justru tidak banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mempromosikan dan menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan (*entrepreneurship education*) di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Harus diakui, pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian yang cukup memadai. Banyak pendidik (baca: guru dan dosen) yang kurang memperhatikan pengembangan jiwa wirausaha peserta didiknya. Padahal, pendidik sesungguhnya memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam mempromosikan dan mendiseminasikan pendidikan kewirausahaan.

Berangkat dari keprihatinan inilah tulisan ini hadir. Tulisan ini secara khusus dan komprehensif akan memaparkan peran pendidik dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui pendidikan kewirausahaan. Sebelum penulis memaparkan lebih jauh peran pendidik dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, penulis terlebih dahulu akan mendiskusikan konsep pendidikan kewirausahaan.

### **Memaknai Pendidikan Kewirausahaan**

Terminologi pendidikan kewirausahaan terdiri atas dua kata, yakni pendidikan dan kewirausahaan. Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ki Hajar Dewantara (1977: 14-15) mengemukakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Redja Mudyahardjo (2002: 3-10) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat; suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.

Sementara itu, kewirausahaan merupakan suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif berdaya, bercipta, berkarya serta bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Dalam konteks ini, wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya (Mulyadi, dkk, 2010:15).

Sony Heru Priyanto (2009: 61) mengartikan kewirausahaan sebagai suatu jiwa yang yang memiliki semangat, mimpi, berani mencoba, keinginan besar, kreatif, memiliki keinginan untuk maju dan visi hidup, serta independen. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan sesuatu yang ada didalam jiwa seseorang, masyarakat dan organisasi yang karenanya akan dihasilkan berbagai macam aktivitas, usaha dan bisnis. Suryana (2003) menuliskan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan

adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbedamelalui berfikir kreatif dan inovatif. Lebih lanjut menurutnya, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda melalui: (1) pengembangan teknologi baru; (2) penemuan pengetahuan ilmiah baru; (3) perbaikan produk barang dan jasa yang ada; (4) penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyakdengan sumber daya lebih efisien

Dari sejumlah definisi tentang pendidikan dan kewirausahaan di atas, menurut hemat penulis, pendidikan kewirausahaan merupakan pendidikan yang mendorong seseorang untuk kreatif dan inovatif, sehingga mampu memanfaatkan setiap peluang usaha menjadi kesuksesan. Ir. Ciputra (2009: 85-86), salah satu pengusaha sukses dan terkaya di Indonesia, mengatakan bahwa pendidikan kewirausahaan adalah proses mendidik seseorang untuk tahu tentang teori kewirausahaan (*toknow*) atau memiliki kecakapan-kecakapan yang dimiliki seperti yangdilakukan para pengusaha (*to do*) dan harus bisa mendorong seseorangberjiwa *entrepreneur* dengan penuh keyakinan memilih profesientrepreneur.

### **Signifikansi Pendidikan Kewirausahaan dalam Pengentasan Kemiskinan**

Pengajaran pendidikan kewirausahaan di institusi pendidikan penting untuk segera dilakukan. Pasalnya, pendidikan kewirausahaan dapat mengasah potensi kreativitas anak didik. Pendidikan kewirausahaan akan memberikan bekal kepada peserta didik berupa sikap kewirausahaan yang bermanfaat bagi peserta dalam mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk menghadapi masa depannya dengan segala permasalahan yang dihadapinya (Mulyadi, dkk., 2010: 23). Tujuan pendidikan kewirausahaan adalah membangun jiwa, sikap, dan perilaku wirausaha peserta didik. Karena itu, pendidikan kewirausahaan harus memuat keseluruhan aspek, yaitu teori, praktek, dan implementasi (Citra, 2008: 7).

Pendidikan kewirausahaan di institusi pendidikan akan bermanfaat bagi anak didik guna mendapatkan berbagai ketrampilan yang kelak dapat dijadikan bekal selulusnya dari sekolah. Dengan bekal ketrampilan yang dimilikinya, mereka tidak perlu cemas dalam menatap masa depan. Mereka dapat mengaktualisasikan ilmu yang didapatnya di bangku sekolah untuk membuka usaha sendiri. Mereka misalnya dapat membuka usaha bengkel, servis barang-barang elektronik, tailor, kuliner, dan usaha-usaha lainnya yang prospektif lainnya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Dengan jiwa *entrepreneuer*ang dimilikinya, mereka tidak akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakatnya. Sebaliknya, keberadaan mereka akan mengangkat perekonomian keluarga dan masyarakatnya. Contoh ini dapat dilihat pada siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Mereka terbukti lebih siap dan mampu berkompetisi di dunia kerja. Mereka tidak sekedar mencari pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan. Bahkan, banyak di antara mereka yang memiliki prestasi bagus dan membanggakan bangsa di kancah internasional.

Jika pendidikan kewirausahaan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, bangsa ini akan banyak melahirkan generasi *entrepreneur*, generasi yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif untuk menggapai sukses atau meningkatkan pendapatan (Mulyadi, dkk., 2010: 15). Generasi *entrepreuner* adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide,dan meramu sumber daya untuk menemukan peluangdan perbaikanhidup (Prawirokusumo, 1997).

Apabila bangsa ini mampu melahirkan banyak *entrepreneur*, maka lapangan pekerjaan pun akan tercipta banyak. Bila lapangan kerja bisa tercipta banyak, maka secara otomatis akan menyerap tenaga kerja yang banyak pula. Semua ini tentunya dapat mengurangi pengangguran. Bila pengangguran dapat dikurangi atau ditekan, maka dengan sendirinya kemiskinan dapat

dikurangi. Dengan kata lain, kemiskinan sangat terkait dengan ketiadaan kewirausahaan. Keberadaan kewirausahaan sangat terkait erat dengan miskin atau tidaknya masyarakat. Jika kewirausahaan masyarakat tinggi, maka kemiskinan akan rendah (Priyanto, 2009: 59). Aktivitas kewirausahaan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Aktivitas kewirausahaan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena keberadaan *entrepreneur* banyak menciptakan pekerjaan baru, memfasilitasi mobilitas sosial, dan memunculkan berbagai kemungkinan positif. Kewirausahaan mempengaruhi secara positif tingkat produktivitas. Produktivitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Chairy, 2008: 136-137).

### **Peran Pendidik dalam Pendidikan Kewirausahaan**

Pendidikan kewirausahaan dapat diajarkan kapanpun dan di manapun semisal dalam keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Namun supaya dapat menyebar dan berjalan dengan efektif, pendidikan kewirausahaan sebaiknya diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Hal ini karena lembaga pendidikan merupakan media yang tepat yang sengaja didesain untuk mengasah kemampuan intelektual, moral, dan ketrampilan manusia. Melalui lembaga pendidikan, jiwa kewirausahaan dapat ditanamkan secara dini kepada peserta didik.

Pendidikan kewirausahaan dapat diajarkan di setiap lembaga pendidikan, baik formal, informal, dan non-formal. Ia juga dapat diajarkan di setiap jenjang pendidikan, dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan di lembaga pendidikan tidak harus menjadi mata pelajaran/kuliah tersendiri, namun ia dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran/kuliah yang telah ada. Langkah pengintegrasian ini dapat dilakukan ketika pendidik menyampaikan materi, melalui metode pembelajaran maupun melalui sistem penilaian. Dalam pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan ada banyak nilai kewirausahaan yang dapat ditanamkan pada peserta didik. Bila semua nilai kewirausahaan tersebut ditanamkan dengan intensitas yang sama pada semua mata pelajaran, maka upaya penanaman nilai-nilai tersebut akan sangat berat. Karenanya, penanaman nilai-nilai kewirausahaan harus dilakukan secara bertahap dengan cara memilih sejumlah nilai pokok sebagai pangkal tolak bagi penanaman nilai-nilai lainnya. Kemudian, nilai-nilai pokok tersebut diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Dengan begitu, setiap mata pelajaran memfokuskan diri pada penanaman nilai-nilai pokok tertentu yang paling dekat dengan karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan. Nilai-nilai pokok kewirausahaan yang diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran mencakup 6 (enam) nilai pokok yaitu: mandiri, kreatif pengambil resiko, kepemimpinan, orientasi pada tindakan dan kerja keras (Sudrajat, 2011).

Integrasi pendidikan kewirausahaan ke dalam mata pelajaran dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Pada tahap perencanaan, silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dirancang supaya muatan maupun kegiatan pembelajarannya memfasilitasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan. Cara menyusun silabus yang terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan dilakukan dengan mengadaptasi silabus yang telah ada dengan menambahkan satu kolom dalam silabus untuk mawadahi nilai-nilai kewirausahaan yang akan diintegrasikan. Sementara penyusunan RPP yang terintegrasi dengan nilai-nilai kewirausahaan dilakukan dengan cara mengadaptasi RPP yang sudah ada dengan menambahkan materi, langkah-langkah pembelajaran atau penilaian dengan nilai-nilai kewirausahaan (Sudrajat, 2011).

Karena pendidikan kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang bersifat aplikatif, maka materi yang diajarkan pun harus memuat hal-hal yang praktis dan aplikatif. Penekanan pada ketrampilan (*skill*) merupakan hal mutlak dan harus diprioritaskan dalam pendidikan kewirausahaan. Oleh karena itu, porsi pembelajarannya pun harus lebih banyak praktek daripada teori. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami pengetahuan seputar

pendidikan kewirausahaan semata, namun lebih dari itu, mereka akan memiliki berbagai ketrampilan yang dapat membekali mereka ketika kelak mereka menekuni dunia usaha.

Menurut hemat penulis, upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan peserta didik melalui pendidikan kewirausahaan di lembaga pendidikan bukanlah pekerjaan yang sulit. Semua itu tergantung pada kemauan pendidik, sekolah/ perguruan tinggi, dan pihak-pihak lain yang terkait. Di level pendidikan terendah (baca: TK), seorang guru TK misalnya dapat memperkenalkan kepada anak didiknya tentang sejumlah profesi kewirausahaan. Di samping itu, seorang guru dapat mengajak anak didiknya berkunjung ke pusat-pusat industri kecil. Bahkan, mengenalkan berbagai pusat perdagangan atau pusat perbelanjaan (Karnita, 2008: 67).

Selain diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran/kuliah, pembelajaran pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Menurut penulis, ada banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan kampus yang dapat dimanfaatkan untuk mengasah jiwa kewirausahaan peserta didik. Dalam konteks ini, peserta didik yang tergabung dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler dapat diajari tentang materi dan pelatihan kewirausahaan. Di sini pendidik dapat membimbing mereka. Pihak sekolah dan kampus juga dapat mengundang para praktisi atau profesional untuk memberikan materi dan pelatihan kewirausahaan. Kalau perlu, mereka dapat membentuk kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan.

Langkah lain yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam rangka memperkenalkan pendidikan anti korupsi kepada peserta didik adalah mendorong pihak sekolah/kampus di mana ia mengajar untuk menjalin kerjasama dengan pengusaha/ kelompok usaha dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perdagangan (Disperindagkop). Kerjasama pihak sekolah dengan pengusaha/kelompok usaha dan para *stakeholders* dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, *training*, lomba karya tulis kewirausahaan, lomba inovasi bisnis, dan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menggugah jiwa dan karakter *entrepreneur* peserta didik.

Dalam konteks kerjasama dengan pengusaha atau kelompok usaha, penulis yakin banyak pengusaha atau kelompok usaha yang tidak keberatan untuk membagi pengalamannya kepada peserta didik tentang dunia usaha. Bahkan, tidak sedikit pengusaha yang menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendorong masyarakat, khususnya kaum muda untuk berkecimpung dalam dunia usaha. Sebut saja misalnya Ir. Ciputra yang memiliki program *Ciputra Creating Entrepreneurs* yang pernah ditayangkan di Metro TV. Sesuai dengan namanya, program yang di-*support* dan disponsori oleh salah satu orang terkaya di Indonesia tersebut bertujuan mencetak pengusaha-pengusaha (muda).

Tidak itu saja, kepedulian Ir. Ciputra untuk membumikan dan memasyarakatkan pendidikan kewirausahaan juga diwujudkan melalui pendidikan formal. Melalui SMP Citra Kasih Jakarta Barat, sekolah milik Grup Ciputra tersebut menyelenggarakan *Entrepreneurship Days* (Hari Kewirausahaan). Dalam *event* tersebut, para siswa diharuskan menyiapkan rencana bisnis secara detail, mulai dari penganggaran, produksi, hingga pemasaran. Mereka mendapatkan pendampingan dan pengarahan dari para guru mereka. *Business plan* (rencana bisnis) tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan para guru. Kegiatan kewirausahaan di SMP Citra Kasih tersebut menitikberatkan pada kecakapan hidup dan pembinaan karakter *entrepreneur* seperti gemar mencari peluang, berani mengambil risiko yang terukur, kreatif, inovatif, berintegritas, dan jujur. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ir. Ciputra perlu diapresiasi dan sudah semestinya ditiru oleh pengusaha-pengusaha lainnya (Karnita, 2008: 66).

*Akhirul kalam*, gagasan pendidikan kewirausahaan yang penulis yang tawarkan di atas akan berhasil dan efektif jika didukung oleh semua pihak, tidak hanya pendidik semata. Bila pendidikan kewirausahaan dapat diselenggarakan dengan baik di institusi-institusi pendidikan, penulis yakin angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dapat ditekan atau dikurangi!

### Daftar Pustaka

- Chairy, 2008, “*Entrepreneuership* dan Perannya sebagai Penggerak Roda Perekonomian”, *Jurnal Ekonomi* Tahun XIII, No. 02, Juli 2008.
- Ciputra, *Ciputra Quantum Leap*, Jakarta: PT elex mediacomputindo, 2009.
- Citra, Mery, “Mendorong Pilihan Karir Berwirausaha pada Mahasiswa guna Mengentaskan Pengangguran Terdidik di Indonesia”. [http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/06/mendorong\\_pilihan\\_karir\\_berwirausaha.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/06/mendorong_pilihan_karir_berwirausaha.pdf). Diakses pada 23 Desember 2017.
- Dewantara, Ki Hajar, *Pendidikan*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1977.
- Mudyahardjo, Redja, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awaltentang Dasar-Dasar Pendidikan padaUmumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Mulyadi, Endang, dkk., *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Priyanto, Sony Heru, “Mengembangkan Pendidikan Kewirausahaan di Masyarakat”, *Andragogia* Volume 1 / No 1 - Nopember 2009.
- Sudjana, D. , *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Non Formal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Falah Production, 2004.

## **Paradigma Baru Pendidikan Pancasila: Ikhtiar Pembudayaan dan Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Muda untuk Mereduksi Radikalisme Agama di Indonesia**

**Ahmad Asroni**

Dosen Universitas Islam Indonesia

E-mail: ahmad.asroni@uii.ac.id

**Fariza Halidatsani Azhar**

Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia

### **Abstrak**

Radikalisme agama kerap terjadi di bumi Indonesia. Ironismya, pelaku radikalisme agama tidak sedikit yang berusia muda (generasi muda). Maraknya radikalisme agama menandakan bahwasannya nilai-nilai kebhinnekaan di negeri ini mulai memudar. Padahal, kebhinnekaan merupakan modal sosial yang paling berharga bagi terbentuknya bangsa ini. Di atas kebhinnekaan, pilar-pilar kebangsaan Indonesia dibangun. Merebaknya radikalisme terorisme di Indonesia juga mengindikasikan bahwasannya nilai-nilai Pancasila mulai luntur. Karena itu, dibutuhkan berbagai upaya strategis untuk membudayakan dan melembagakan (institusionalisasi) nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama kepada generasi muda. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menghadirkan kembali mata pelajaran/kuliah Pendidikan Pancasila dengan paradigma baru. Sebab, pengajaran Pendidikan Pancasila di institusi-institusi pendidikan selama ini lebih dominan bercorak dogmatis, kaku, dan statis, sehingga sebagian peserta didik menganggapnya hanya sebagai mata pelajaran/kuliah pelengkap yang tidak penting dan menjemukan. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila yang adiluhung tidak pernah dapat terinternalisasi dengan baik dalam diri peserta didik. Paradigma baru yang dimaksud adalah dengan merekonstruksi kurikulum, sumber/materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, institusionalisasi nilai-nilai Pancasila melalui jalur pendidikan dapat diwujudkan, sehingga internalisasi nilai-nilai Pancasila –termasuk di dalamnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme beragama— dapat dengan mudah dilakukan ke dalam diri setiap peserta didik. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila ke depannya mampu berkontribusi dalam mencegah dan mereduksi radikalisme agama di Indonesia.

**Kata kunci:** Pendidikan Pancasila, radikalisme agama, rekonstruksi

### **Pendahuluan**

Radikalisme agama sepertinya telah menjadi pemandangan yang biasa di Indonesia. Hal ini dapat disimak dari banyaknya kasus radikalisme agama di tanah air belakangan ini. Meningkatnya radikalisme agama menandakan bahwasannya nilai-nilai kebhinnekaan di negeri ini mulai memudar. Padahal, kebhinnekaan merupakan modal sosial yang paling berharga bagi terbentuknya bangsa ini. Kebhinnekaan merupakan *sunnātullāh* (kehendak Tuhan), realitas yang tak terelakkan. Di atas kebhinnekaan, pilar-pilar kebangsaan Indonesia dibangun. Tanpa adanya kebhinnekaan, Indonesia barangkali tidak akan pernah ada. Maraknya radikalisme (dan juga terorisme) di Indonesia juga mengindikasikan bahwasannya nilai-nilai Pancasila mulai

luntur. Melunturnya nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Indonesia bukanlah isapan jempol belaka. Salah satu indikatornya dapat ditilik dari hasil riset Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta yang menyebutkan bahwa 25,8% pelajar (SMP dan SMA) Jabodetabek menganggap Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara (*Media Indonesia*, 14 Maret 2011).

Meski survei itu telah lama dilakukan, namun survei ini menggambarkan betapa Pancasila tidak lagi dianggap sebagai entitas yang penting. Hal ini tentu saja akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ancaman tersebut berasal dari anak-anak muda (baca: pelajar) yang *notabene* merupakan generasi penerus bangsa. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus bukan tidak mungkin suatu saat Pancasila akan diganti dengan ideologi radikalisme yang tidak menghendaki adanya kebhinnekaan.

Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya strategis untuk menginternalisasi, melembagakan, dan membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menghadirkan kembali mata pelajaran/kuliah Pendidikan Pancasila dengan paradigma baru. Dalam konteks ini, model pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Pancasila di institusi-institusi pendidikan di Indonesia perlu direkonstruksi. Sebelum penulis mendiskusikan lebih jauh tentang pentingnya rekonstruksi Pendidikan Pancasila, penulis terlebih dahulu akan memaparkan praktik Pendidikan Pancasila yang berlangsung selama ini.

## Pembahasan

### Praktik Pendidikan Pancasila

Praktik Pendidikan Pancasila di Indonesia mengalami pasang surut. Sejak tahun 1962 hingga sekarang Pendidikan Pancasila sering berganti nama. Pada tahun 1962, praktik Pendidikan Pancasila tercakup dalam Pelajaran Civics. Pada tahun 1968, berganti menjadi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Negara. Kemudian pada tahun 1975 berganti menjadi Pendidikan Moral Pancasila. Selanjutnya, pada tahun 1994 berganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada tahun 2004 menjadi Kewarganegaraan dan pada tahun 2006 hingga kini berganti lagi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (Narmoatmojo, 2010: 4-5). Perubahan Pendidikan Pancasila dalam lintasan sejarah tersebut sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup dan pergeseran sistem politik di Indonesia (Rahardjo, 2011).

Dalam rentang sepanjang itu, Pendidikan Pancasila nyatanya kerap dijadikan alat penguasa untuk melanggengkan *status quo*. Fakta ini berlangsung terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam praktik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2004. Azis Wahab dan Sapriya (2007: 298) menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga kelemahan yang terdapat pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2004. *Pertama*, kurikulumnya banyak diwarnai oleh perspektif atau kepentingan pemerintah dengan mengatasmakan kepentingan negara. *Kedua*, topik-topik yang diangkat lebih mengedepankan penguatan kedudukan pemerintah yang berkuasa. *Ketiga*, mata pelajaran/kuliah ini sering dijadikan sarana pendidikan politik yang cenderung “sepihak” dan “monolog” untuk mendukung rezim yang berkuasa.

Senada dengan Azis Wahab dan Sapriya, Purwadi (dalam Kalidjernih, 2005: 1) menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan acap kali digunakan oleh penguasa sebagai alat indoktrinasi politik. Pendapat yang hampir sama juga dilontarkan oleh Muchson, AR (2003: 1) yang menuturkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kritikan yang tidak kalah pedas juga dilontarkan oleh Listiyono Santoso (2003: 21-22) yang mengemukakan bahwa Pendidikan Pancasila yang berjalan selama ini terlalu idealis, utopis, indoktrinatif, statis, monoton, penuh pengulangan, dan sarat dengan kepentingan penguasa. Lebih lanjut

menurutnya, Pendidikan Pancasila hanya menghasilkan orang-orang yang pintar menghafal, namun tidak mengimplementasikan.

Rekayasa yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru terhadap (Pendidikan) Pancasila melahirkan dampak yang tidak terbayangkan. Selain gagal memaksa rakyat Indonesia melupakan Soekarno, pemerintahan Soeharto melahirkan trauma kolektif atas politisasi Pancasila. “Kapok massal” tersebut melahirkan gugatan depolitisasi. Pancasila dipersoalkan secara formal kendati pun secara substantif merupakan konstruksi ideal filosofis sebagai ideologi negara (*Kompas*, 9 Mei 2011).

Trauma kolektif atas politisasi (Pendidikan) Pancasila ini berlanjut hingga era reformasi. Banyak pihak takut dan alergi dengan (Pendidikan) Pancasila. Akibatnya, alih-alih merekonstruksinya, Pendidikan Pancasila justru ditendang dari Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Pendidikan Pancasila tidak lagi menjadi mata pelajaran/kuliah tersendiri. Pendidikan Pancasila terintegrasi dalam mata pelajaran/kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila hanya mendapatkan porsi yang sedikit. Materi Pendidikan Kewarganegaraan dalam praktiknya pun lebih banyak menekankan hal-hal yang menyangkut kewarganegaraan dibanding pengajaran dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Akibatnya, Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai adiluhung tidak banyak tersentuh oleh Pendidikan Kewarganegaraan (Zulaihah, 2011: 211-212). Pendidikan Kewarganegaraan lebih banyak berbicara tentang hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan, sistem hukum dan peradilan nasional, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, serta kedudukan warga negara (Rahardjo, 2011).

Menurut Mudjia Rahardjo (2011), dihapuskannya Pendidikan Pancasila dari Sistem Pendidikan Nasional berimplikasi pada merosotnya karakter bangsa sehingga menimbulkan anomali dan anarkisme. Lebih lanjut menurutnya, dihapuskannya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi hanya Pendidikan Kewarganegaraan di semua jenjang pendidikan membawa konsekuensi ditinggalkannya nilai-nilai luhur yang selama ini melekat pada bangsa ini seperti toleransi beragama, gotong royong, dan musyawarah. Padahal, nilai-nilai itu sangat dibutuhkan sebagai fondasi bangsa. Akibat kebijakan tersebut, kini para pendidik mengeluh karena sulitnya menanamkan nilai-nilai tersebut dan dianggap sesuatu yang basi. Penanaman nilai-nilai ternyata tidak dapat diperoleh dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebab, ternyata pelajaran/mata kuliah tersebut lebih banyak hafalan dan sekadar menambah pengetahuan. Di mata guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ini, perubahan Pendidikan Pancasila menjadi Pendidikan Kewarganegaraansangat mereduksi muatan-muatan utama Pancasila yang sarat nilai.

Munculnya beragam problematika moral dan kian melunturnya nilai-nilai Pancasila, belakangan ini, pemerintah lantas menghidupkan mata kuliah Pendidikan Pancasila kembali dan terpisah dari Pendidikan Kewarganegaraan. Fakta ini tentu saja merupakan hal yang bagus dan patut diapresiasi. Pengadaan kembali mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan langkah baik untuk penanaman dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila terutama di kalangan anak muda (baca: peserta didik) sekaligus membendung upaya-upaya deideologisasi Pancasila yang marak dilakukan oleh kelompok-kelompok anti-Pancasila dewasa ini.

### **Rekonstruksi Pendidikan Pancasila**

Pendidikan Pancasila berperan penting dan strategis dalam mendiseminasikan nilai-nilai kebhinnekaan dan nasionalisme kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melalui Pendidikan Pancasila, nilai-nilai kebhinnekaan dan nasionalisme dapat diajarkan secara dini, sistematis, dan berkelanjutan. Bila dapat dirumuskan dengan baik, Pendidikan Pancasila dapat menjadi instrumen yang efektif guna mereduksi radikalisme agama.



Oleh karena itu, kehadiran kembali Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran/kuliah tersendiri harus dalam paradigma baru. Praktik pembelajaran Pendidikan Pancasila tidak boleh mengulangi masa lalu (baca: Orde Baru) yang sarat dengan kepentingan penguasa, utopis, dan indoktrinatif. Untuk itu, kurikulum dan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila harus senantiasa dikontekstualisasikan dengan dinamika kehidupan masyarakat dan isu-isu aktual. Pengajaran Pendidikan Pancasila harus dapat membumi (*down to earth*), sehingga mampu menjawab segenap problematika bangsa. Dalam konteks inilah, Kementerian Pendidikan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya harus dapat merumuskan kurikulum dan sumber/materi pembelajaran Pendidikan Pancasila yang tepat, aktual, mencerdaskan, dan mencerahkan. Materi/sumber pembelajaran Pendidikan Pancasila harus dapat membuat peserta didik berpikir kritis, logis, dan multikulturalis (Zulaihah, 2011: 212).

Pengajaran Pendidikan Pancasila pun harus dikemas semenarik mungkin, sehingga tidak membosankan peserta didik. Harus diakui, pembelajaran Pendidikan Pancasila yang pernah ada terkesan membosankan. Kesan membosankan tersebut antara lain disebabkan oleh cara para pengampu mata pelajaran/kuliah Pendidikan Pancasila dalam menyampaikan materi yang umumnya hanya menggunakan metode ceramah saja. Hal ini bukan berarti bahwa metode ceramah tidak baik, namun penggunaan metode ceramah terus-terusan hanya akan membuat anak didik menjadi jemu.

Dengan menggunakan metode ceramah, pendidik akan menjadi satu-satunya pusat perhatian, sehingga proses belajar-mengajar lebih banyak didominasi oleh pendidik. Model pembelajaran semacam ini meminjam terminologi Paulo Freire (1995: xii) dinamakan sebagai pembelajaran sistem bank (*banking system*). Dalam *banking system*, anak didik hanya diperlakukan tak ubahnya seperti wadah yang menampung sejumlah pengetahuan. Kian banyak pendidik menjejali pengetahuan ke anak didiknya, maka pendidik tersebut kian baik. Dengan kata lain, pendidik menjejali anak didik dengan sekian banyak pengetahuan. Anak didik hanya diposisikan sebatas objek pengetahuan *an sich*. Tidak ada ruang bagi mereka untuk berkreasi dan bersikap kritis. Evaluasi atau penilaian model pembelajaran semacam ini hanya didasarkan pada aspek kognitif belaka, sedangkan aspek afektif dan psikomotorik banyak diabaikan.

Pengampu Pendidikan Pancasila dituntut mampu membuat terobosan-terobosan akademik-metodologis supaya peserta didik merasa senang dengan mata pelajaran/kuliah Pendidikan Pancasila. Dalam konteks ini, pendidik dapat mendesain dan mengelaborasi berbagai metode pembelajaran semisal diskusi, *game*, kuis, *field trip* atau studi banding, dan lain sebagainya. Pendidik misalnya dapat mengajak anak didiknya untuk berdiskusi dengan berbagai kelompok agama, suku, ras, dan budaya. Dengan demikian, anak didik dapat menghargai dan apresiatif terhadap segenap perbedaan dan keragaman yang ada dalam masyarakat (Zulaihah, 2011: 212-213).

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila adalah media pembelajaran. Pengampu mata pelajaran/kuliah Pendidikan Pancasila mesti mampu mendesain dan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Ada beragam media pembelajaran yang menarik yang dapat digunakan pendidik dalam mengajarkan Pendidikan Pancasila. Sekedar contoh, pendidik dapat memutar film-film yang sarat dengan nilai-nilai Pancasila kepada anak didiknya (Zulaihah, 2011: 213). Menurut hemat penulis, di era teknologi informasi sekarang ini, tidak sulit untuk mendapatkan film-film yang kaya akan nilai-nilai moral Pancasila, baik berupa film fiksi maupun film dokumenter. Manakala pengampu Pendidikan Pancasila mampu mendesain media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, maka upaya internalisasi dan kulturalisasi nilai-nilai Pancasila akan mudah dilakukan. Hal ini tentunya akan memudahkan seorang pendidik untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri anak didiknya.

Di samping media pembelajaran, evaluasi merupakan aspek penting lainnya yang harus diperhatikan oleh pengampu Pendidikan Pancasila. Pengampu Pendidikan Pancasila tidak boleh hanya menggunakan standar kognitif semata untuk mengevaluasi (hasil belajar) anak didiknya. Seorang pengampu Pendidikan Pancasila dalam melakukan penilaian (*assessment*) terhadap anak didiknya harus mencakup seluruh aspek, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dengan kata lain, standar kelulusan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif anak didik semata, namun juga ditentukan oleh sikap dan prilakunya. Hasil yang lebih penting dalam Pendidikan Pancasila adalah terinternalisasikannya nilai-nilai Pancasila sebagai faktor integrasi dalam pembentukan pribadi anak didik.

## Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma baru pengajaran Pendidikan Pancasila merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu diperlukan rekonstruksi. Rekonstruksi Pendidikan Pancasila ini mencakup rekonstruksi kurikulum, sumber/materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran.

Apabila semua itu dapat dilakukan, upaya penanaman, pelembagaan, dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui jalur pendidikan niscaya dapat direalisasikan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila –termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai toleransi dan pluralisme beragama— dapat diinternalisasikan dengan mudah ke dalam diri setiap peserta didik, sehingga kehadiran Pendidikan Pancasila ke depannya mampu mereduksi radikalisme agama yang kerap terjadi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Freire, Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas*, terj. tim redaksi LP3ES, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Kalidjernih, FK. 2005. "Postcolonial Citizenship Education: A Critical Analysis of the Production and Reproduction of Indonesians Civic Ideal. *Thesis*, Tasmania: University of Tasmania.
- Kompas*, 9 Mei 2011, "Politik (Pendidikan) Pancasila".
- Media Indonesia*, 14 Maret 2011, "Paradoks Kebangsaan Siswa Kita".
- Muchson, AR. 2003. "Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk "Paradigma Baru Kewarganegaraan Indonesia", yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 22 Maret 2003.
- Narmoatmojo, Winarno. "Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*). Makalah disampaikan dalam Seminar bertajuk "Pengalaman Indonesia dan Malaysia dalam Hal Pembinaan Warga Negara yang Baik dan Cerdas", di Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), 13 April 2010. (<http://winarno.staff.fkip.uns.ac.id>). Diunduh pada 30 Mei 2016.
- Rahardjo, Mudjia. 2011. "Runtuhnya Karakter Bangsa dan Urgensi Pendidikan Pancasila", (<http://mudjiarahardjo.com/artikel/337-runtuhnya-karakter-bangsa-dan-urgensi-pendidikan-pancasila.html>). Diunduh pada 25 Mei 2016.
- Santoso, Listiyono, *et.al.* 2003. *(De)Konstruksi Ideologi Negara: Suatu Upaya Membaca Ulang Pancasila*. Yogyakarta: Ning Rat.
- Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: UPI Press.

Zulaihah, Gustin. “Mahalnya Harga Sebuah Keragaman”, dalam Sidiq Maulana Muda, *et.al.* 2011. *Tentang Indonesia: Mozaik Pemikiran Mahasiswa 2009-2011*. Jakarta: Tempo Institute.

## **Pendidikan Multikultural dalam Pemahaman Demokrasi untuk Menumbuhkan Sikap Toleransi**

**Lena Selvia, S.Pd.**

Program Studi PPKn Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: veeselvia6@gmail.com

### **Abstrak**

Pendidikan multikultural melalui nilai-nilai demokratis mampu menumbuhkan sikap toleransi bagi warganegara. Konflik horizontal terjadi di Ambon dan Poso akibat dari perbedaan agama menimbulkan banyak korban jiwa dan mengoyahkan kestabilan negara, negara dan seluruh negara berperan penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendidikan. Keberhasilan pendidikan dari suatu negara dapat dilihat dari kualitas pendidikannya, setiap negara memiliki ciri khas yang menggambarkan negaranya masing-masing. Keberagaman menghasilkan budaya, suku, etnis, dan bahasa yang berbeda. Pemerintahan demokratis yang dianut oleh beberapa negara sebagai kunci untuk mempersatukan perbedaan yang ada di negaranya. Pendidikan multikultural dalam memahami demokrasi dapat menciptakan sikap toleransi antar warga negara, manusia lahir tidak ada yang sama, manusia sejak lahir telah memiliki keunikannya masing-masing, pentingnya pendidikan multikultural untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera dengan melihat tingkat toleransi dan rendahnya tingkat konflik yang ada di masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka dari penelitian, jurnal dan buku yang relevan, setiap negara tidak dapat terbebas dari konflik, baik konflik antar agama, kelompok, komunitas, ras, suku, etnis, dan pekerja. Tujuan kajian ini untuk memberikan pengetahuan, pandangan, solusi dan memberikan informasi bahwa pendidikan seharusnya mampu menciptakan warganegara yang memiliki jiwa sosial tinggi, tanpa membedakan suku, ras, etnis, kelas sosial dan budaya, semua warganegara baik mayoritas maupun minoritas memiliki kesetaraan dan kebebasan dari segala aspek kehidupan tanpa mengganggu hak warganegara lainnya. Pendidikan multikultural dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi mampu menumbuhkan sikap dan perilaku toleransi warganegara.

**Kata kunci:** Pendidikan, multikultural, demokrasi, dan toleransi.

### **Pendahuluan**

Seringnya terjadi konflik antar suku, etnis, kelompok dan agama baik di dalam negeri maupun luar negeri dikarenakan beberapa faktor dapat mengganggu stabilitas negara. Konflik yang sering terjadi karena perbedaan pemahaman ataupun pandangan yang tidak diiringi sikap saling menghormati dan memahami pemikiran orang lain. Sikap saling menghormati penting diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural merupakan kegiatan masyarakat yang bertujuan membentuk perilaku dan karakter berdasar saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan melalui konsep pembudayaan. Tilaar (2004: 27). pendidikan berdasar pada multikulturalisme, pendidikan yang membentuk karakter dengan proses pembudayaan keberagaman. Tobroni

(2007: 225). Indonesia sebagai negara yang beragam budaya terkosep sebagai bangsa multikultural dan majemuk, keberagaman dan keanekaragaman mengandung kesetaraan. pentingnya kesetaraan memberikan pandangan untuk saling menghargai perbedaan antar warga negara.

Pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menjelaskan sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan berfungsi sebagai meningkatkan kemampuan, perilaku, peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman dan berakhlak mulia, berilmu, cakap, mandiri, inovatif dan sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya, dalam mewujudkan cita-cita bangsa dengan saling gotong royong, mengutamakan kepentingan umum, dan saling menghormati antar warga negara, karena itu pendidikan multikultural perlu direalisasikan tuntutan pendidikan nasional dalam membentuk watak dan kepribadian warga negara berdasar pada kerukunan antar umat beragama, budaya, suku dan etnis.

Menurut Jeansen terdapat tiga strategi dalam pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan berfikir siswa, berikut beberapa tahap untuk meningkatkan pemikiran siswa yaitu:

1. Pendidik menciptakan lingkungan dan suasana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berfikir.
2. Pendidik menciptakan suasana dalam pembelajaran yang nyaman sehingga mendorong siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. kegiatan pembelajaran yang bervariasi, seperti belajar di alam, diskusi kelompok, permainan dan penelitian lapangan. Pembelajaran multikultural dengan penugasan observasi penelitian terhadap keberagaman suku di daerahnya, dan mengkaji bersama suku-suku lainnya.
3. Pendidik membentuk suasana yang aktif dan bermakna bagi siswa, contohnya pendidik mengadakan aktifitas untuk siswa berkaitan dengan kegiatan siswa agar seluruh indra, siswa membaca, memahami, mengamati, menulis, berdiskusi yang berkaitan dengan keberagaman budaya, agama dan pandangan. Masing-masing anggota kelompok mewakili berbagai keragaman budaya dan agama, tujuan pembelajaran ini agar siswa terlatih dengan kondisi perbedaan.

Dimensi pendidikan multikultural menurut Banks terdiri dari lima dimensi yang saling berkaitan, diantaranya yaitu:

1. *Content integration*, mengintegrasikan beberapa budaya, kelompok, suku dan adat yang diilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori-teori pelajaran ataupun disiplin ilmu.
2. *The Knowledge construction process*, menghimbau peserta didik kepada pemahaman implikasi budaya melalui materi pembelajaran.
3. *An equity pedagogy*, penyesuaian metode pembelajaran dengan karakter belajar siswa, memberikan fasilitas prestasi akademik siswa yang beragam, seperti dari segi kebudayaan, ras, etnis dan sosial.
4. *Prejudice reduction*, dengan mengidentifikasi karakter, suku, ras dan agama peserta didik dengan tujuan menciptakan budaya dalam akademis yang toleran.
5. *An empowering school culture and social culture*, membangun susunan kelompok budaya yang toleran dan sesuai kebutuhan peserta didik sehingga kelompok suku, ras, dan budaya yang lain memiliki rasa kesetaraan dalam memperoleh pendidikan dan status yang sama, dengan konstruksi tradisi, budaya, kurikulum, lingkungan dan suasana pendidikan melalui sikap, keyakinan, tindakan, penilaian, perilaku, metode dan model pembelajaran.

Dimensi diatas mampu membimbing siswa untuk berproses dalam kegiatan belajar mengajar terkait multikultural di sekolah, dengan memberikan kesempatan siswa untuk

memilih dan mendukung berbagai kebudayaan, sistem sosial, suku dan bahasa.pendidikan multikultural yang mampu menguatkan persatuan antar suku, budaya, dan agama, meskipun warga negara sudah dikuatkan oleh bangsa dan sistem politik.

Manusia terlahir dengan berbeda, berbeda sikap, perilaku dan pemikiran sehingga membentuk perbedaan antar suku, ras, budaya dan agama, perlunya kesatuan dan kesetaraan dalam struktus sosial untuk mencegah konflik. pemahaman kesetaraan dengan saling menghormati dan saling menghargai antar sesama tanpa membedakan etnis, agama, dan budaya perlu dibentuk sejak awal dalam membentuk pemikiran peserta didik sehingga membentuk pemahaman yang sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural. Persatuan dan kesetaraan dari masing- masing individu bertanggung jawab dan saling mengutamakan kepentingan umum.

## **Pembahasan**

### **Nilai- nilai demokrasi dalam multikultural**

Sistem demokrasi yang dianut oleh beberapa negara di dunia dengan penerapan yang berbeda- beda disesuaikan dengan sistem, budaya dan geografis masing- masing negara, sistem demokrasi yang ada pada masing- masing negara menyatu dan menyesuaikan kondisi dan situasi negara, sehingga sbudaya demokrasi beberapa negara berbeda, dengan kriteria masing- masing.

ilai- nilai demokrasi menurut Henry Mayo dalam Subadi (2009), terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Penyelesaian masalah ataupun konflik dengan perdamaian, secara damai oleh lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Adanya jaminan dan perlindungan terhadap penyelenggaraan perubahan dengan damai pada suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan.
3. Penyelenggaraan pergantian pemimpin secara teratur.
4. pembatasan terhadap kekerasan sampai pada tahap seminimal mungkin.
5. Adanya pengakuan secara wajar terhadap keanekaragaman dalam masyarakat, saling menghargai perbedaan pendapat.
6. Selalu menjamin tegaknya keadilan.

Nilai-nilai demokrasi menurut Mayo sangat terbuka dan toleran, selalu mengutamakan perdamaian dalam mengatasi setiap persoalan, pastinya berdasar pada keadilan, adanya jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat untuk melakukan perubahan, artinya menghormati dan menghargai hak masyarakat, adanya pengakuan terhadap keberagaman dalam masyarakat dan menjamin tegaknya keadilan merupakan perwujudan masyarakat multikultural.

Pemahaman masyarakat terkait multikultural sebenarnya sudah terealisasikan dalam kehidupan sehari- hari, mewujudkan nilai- nilai demokrasi dalam kesetaraan dan keadilan untuk hidup masyarakat yang beranekaragaman. Sistem demokrasi mampu menyatukan keragaman yang ada dalam masyarakat, pendidikan multikultural diwujudkan dan didukung dengan nilai- nilai demokrasi untuk menciptakan kehidupan yang adil dan beradab.

Budaya demokrasi di Indonesia sesuai dengan kaedah dan nilai- nilai Pancasila, yang mempengaruhi sistem politik dan sistem pemerintahan, berikut nilai- nilai demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Pelaksanaan demokrasi berasar asas Ketuhan Yang Maha Esa, wakil rakyat yang terpilih menjadi pemimpin bertanggung jawab kepada seluruh rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Pelaksanaan demokrasi berdasar pada nilai- nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi menjamin dan kebebasan hak asasi manusia, kebebasan untuk memilih

pemimpin sesuai hati nurani, dan tidak memaksakan pilihan pribadi terhadap pihak lainnya.

3. demokrasi diwujudkan berdasar pada persatuan dan kesatuan Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam segala perilaku dan perbuatan untuk kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan demo dengan tertib dan damai, menjaga lingkungan sekitar demo dan tidak merusaknya.
4. Pelaksanaan demokrasi dilaksanakan dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Setiap permasalahan diputuskan dengan musyawarah mufakat, melalui perwakilan rakyat yang penuh kebijaksanaan, memutuskan hasil keputusan bersama.
5. demokrasi berdasar pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai budaya baik dalam politik, pendidikan dan hidup bersosial harus selalu mengutamakan norma kebaikan, jujur, mengutamakan keadilan dan kebenaran agar terwujud keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Keberagaman suku, budaya, dan agama pada suatu negara dapat memicu konflik, Indonesia sebagai negara multikultural dengan keanekaragaman budaya sangat besar kemungkinan timbulnya konflik, melalui sistem demokrasi terdapat kesetaraan dan kesamaan hak untuk setiap warganegara, baik minoritas maupun mayoritas. Sistem demokrasi Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pendidikan multikultural berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai karakteristik bangsa Indonesia mewujudkan hidup masyarakat yang adil, makmur dan beradab.

Demokrasi Pancasila memiliki nilai moral yang dapat digunakan untuk mewujudkan pendidikan multikultural, rasa tanggung jawab sebagai umat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan harkat dan martabat manusia, saling toleransi dan saling menghormati antar makhluk, demokrasi Pancasila mampu menjamin persatuan bangsa, dan sebagai pegangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, baik minoritas dan mayoritas.

### **Pemahaman demokrasi menumbuhkan toleransi**

Indonesia terdiri dari berbagai agama, ada islam, kristen, katolik, hindu, budha, dan konghucu, semua ini dipersatukan dalam naungan Pancasila. Keberagaman yang tercipta dilindungi dan didukung oleh kebijakan pemerintah, sistem pemerintahan Indonesia berdasar pada demokrasi Pancasila. Menciptakan hidup masyarakat yang toleran dengan memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai persatuan tanpa membedakan perbedaan agama, suku, dan budaya melalui pendidikan formal maupun informal, nilai-nilai persatuan dalam pendidikan multikultural diberikan sejak dini, dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan bermain, tempat kerja dan sepanjang hayat.

Toleransi menurut Rainer Forst (2007) yaitu pandangan *permission conception* dan *respect conception*, *permission conception* yaitu konsep berdasar pada otoritas perizinan yang dilakukan oleh negara, sedangkan *respect conception* yaitu konsep berdasar pada penghormatan terhadap sesama, artinya membangun sikap saling menghormati keberagaman suku, agama dan budaya. Demokrasi dan toleransi tidak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi pada aktor politik dan masyarakat sipil.

toleransi menurut Margaret Sutton (2006: 55) yaitu kemauan dan kemampuan individu dengan sikap hati-hati dalam menyikapi hak orang lain, terutama hak-hak minoritas, dalam demokrasi kelompok minoritas juga dilindungi, mereka hidup saling melengkapi dengan peraturan-peraturan dari kelompok mayoritas.

Toleransi menciptakan kerukunan dalam hidup bernegara, melalui kekuasaan dalam demokrasi Pancasila dengan peraturan yang diundang-undangkan mampu mengubah intoleransi berubah menjadi toleransi.

Faktor- faktor yang mempengaruhi toleransi menurut Nathanael yaitu:

1. Kultral teologis, dalam setiap agama mengajarkan toleransi antar sesama, saling menghormati pemeluk agama lain.
2. Institusional, pertentangan dalam smasyarakat demokratis menumbuhkan toleransi, karena muncul pembelajaran demokratis, perkembangan politik untuk para tokoh politik saat ini menghindari radikal karena agar masyarakat memberikan dukungan penuh.
3. Psikologis masyarakat terkait kecerdasan politik dan pendidikan yang sangat mempengaruhi keputusan individu dalam bersikap toleransi, semakin tinggi pendidikan dan kecerdasan politik seseorang maka semakin tinggi pula tingkat toleransi orang tersebut.

Margeret Sutton (2006: 57) demokrasi dalam toleransi diajarkan dengan cara- cara sebagai berikut, yaitu:

1. Mengajarkan pemahaman terkait bentuk keragaman, toleransi dengan rasa empati pada sasyarakat yang multikultural dengan memahami dan menghormati berbagai kebudayaan, multikulturalisme menumbuhkan pemahaman terhadap perkembangan toleransi dengan menghormati pemeluk agama lain, etnik lain dan kebudayaan lain.
2. Mampu membandingkan dan menelaah pendapat- pendapat pihak lain, membandingkan pendapat dan pemikiran pihak lain, memberikan kesempatan pihak lain untuk mengutarakan pendapat.
3. Perkembangan kebiasaan sikap kulit tebal, maksudnya membiasakan diri untuk tidak mudah sakit hati dengan perkataan orang lain, nilai toleransi dengan mengutamakan pemikiran yang sehat sebelum emosi dan marah.
4. Membiasakan untuk menuntut dan melakukan protes atas ketidak adilan, toleransi dibentuk kepribadian pada diri manusia, selalu terbuka dengan hal- hal intoleran, mengembangkan nilai kuat toleransi dalam kebudayaan. Nilai- nilai demokrasi memuat kekuaan kebudayaan hidup sehari- hari.

Nilai- nilai demokrasi mampu menumbuhkan toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan atar agama, suku, dan budaya mampu menjaga kelangsungan demokrasi. realisasi nilai- nilai demokrasi untuk menubuhkan toleransi dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada dengan memahami perbedaan sebagai persatuan, menerima dan memahami perbedaan pendapat, membiasakan sikap tidak mudah sakit hati, dan membiasakan menuntut ketidak adilan tanya melukai hak- hak orang lain.

### Penutup

Nilai- nilai demokrasi sebagai dasar pendidikan multikultural, sikap saling menghormati, menghargai dan kesadaran akan kesatuan dalam setiap perbedaan menumbuhkan toleransi terhadap individu. Kodarat manusia terlahir di dunia dengan kemampuan yang berbeda- beda dan saling melengkapi. sikap toleransi dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, perilaku, dan kepedulian terhadap keadilan. Rasa kemanusiaan dijungjung tinggi untuk saling menghormati dan menghargai pendapat, pandangan, dan pemikiran pihak lain.

### Daftar Pustaka

- Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Banks, A J. (1993). *MulticulturalEducationsfor Development, Dimensions,andChallenges*. Phi Delta Kappa International.



- Margeret Sutton (2006). *Kebebasan, Toleransi, dan Terorisme*. Jakarta. Pusat Studi Agama dan Demokrasi. Yayasan Paramandina.
- Nathanael R Sumaktoyo. *Penelitian Empiris Mengenai Toleransi di Indonesia: Menuju Praktik Terbaik*. Jakarta. Pusat Studi Agama dan Demokrasi. Yayasan Paramadina
- Rainer Forst. (2007). *Democracy and Toleration*. Sosial Philososhy. Wilay Periodicals, Inc.
- Subakdi. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Solo: Sekawan Cipta Karya.
- Tilaar. (2004). *Multikulturalisme, Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta. Tera Indonesia.
- Tobroni. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM, Civil Society, and Multikultural*. Malang: PuSAPom.

## Politik Pendidikan Kewargaan Multikultural Indonesia

**Anatoli Kasparov Putu Abdullah, S.Pd.**

Program Studi PPKn, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta  
 anatolyabdullah@yahoo.com

**Arif Wahyudi, S. H.**

arifwahyudi12.aw@gmail.com

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji terkait politik pendidikan guna membentuk kewargaan multikultural di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena konteks kewargaan di Indonesia adalah hidup dalam bingkai pluralitas. Secara teoritis, adanya keberagaman memiliki potensi kecenderungan yang mengarah pada disintegrasi. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu hadirnya kewargaan multikultural yang didalamnya ada sikap toleransi terhadap perbedaan. Salah satu rute dalam menghadirkan kewargaan multikultural yaitu melalui pendidikan. Oleh karena itu artikel ini ingin melacak politik pendidikan kewargaan multikultural di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menggali informasi yaitu studi pustaka/ kajian literatur. Hasilnya diketahui bahwa di Indonesia konten pendidikan kewargaan multikultural sudah diajarkan kepada siswa-siswa disekolah. Artinya politik pendidikan sudah mengarah kepada penguatan terhadap terbentuknya kewargaan multikultural di Indonesia.

**Kata Kunci:** pendidikan, multikultural, kewarganegaraan

### Pendahuluan

Artikel ini berpretensi ingin mengkaji politik pendidikan guna membentuk kewargaan multikultural Indonesia. Studi ini penting karena kewargaan yang ada hidup dalam bingkai pluralitas dengan wadah negara bangsa bernama Indonesia. Jika dilihat kebelakang terkait terbentuknya negara bangsa Indonesia maka nampak jelas bahwa berdirinya negara bangsa bersifat dari bawah. Artinya negara bangsa dibentuk oleh kumpulan suku bangsa yang sudah lebih dulu ada dibanding negara bangsa itu sendiri. Sehingga keanekaragaman merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut tentunya memunculkan beraneka kepentingan didalamnya, jika tidak dikelola dengan baik bisa membuat runtuhnya suatu negara bangsa. Teorisi seperti ini sejalan dengan apa yang disampaikan Kymlicka (2008) terkait adanya dilema dari sebuah negara bangsa. Menurutnya ciri utama negara bangsa adalah adanya keragaman secara budaya, suku, ras dan kepercayaan yang dianut. Namun, Keragaman tersebut memunculkan tantangan tersendiri yaitu ancaman terhadap kohesivitas bagi negara bangsa yang mengarah pada disintegrasi berupa kekerasan komunal, konflik, dan *eksklusi* terhadap warganegara tertentu.

Menurut Kymlicka (2008), ancaman kohesivitas negara bangsa muncul setidaknya dari dua kategori, yaitu ancaman yang berasal dari kelompok radikal atau ekstrimis, terkait perbedaan nilai yang dianut oleh negara bangsa berhadapan dengan nilai yang dimiliki oleh kelompok ekstrimis radikal. Kelompok tersebut menolak nilai atau ideologi yang dibawa oleh negara bangsa. Sedangkan ancaman kedua muncul dari kelompok sub nasional yang merasa memiliki hak istimewa, dikarenakan secara kehadiran, mereka mengklaim keberadaannya lebih lama daripada negara bangsa. Hampir diseluruh negara- negara bangsa mengalami tantangan

dari perkembangan historis, politik, sosial, budaya terkait imigrasi, globalisasi, dan nasionalisme yang memicu lahirnya pemikiran baru mengenai wacana kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan (James Bank, 2008). Secara faktual kondisi keanekaragaman yang dimiliki oleh negara bangsa masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan sekaligus menjadi perbincangan yang hangat dalam wacana kewarganegaraan.

Kondisi tersebut juga tercermin dalam negara bangsa Indonesia, kajian yang dilakukan oleh Cornelis Lay (2009) memperlihatkan gambaran bahwa kekerasan komunal bisa berlangsung secara horisontal antara warganegara atau kelompok warganegara dengan warganegara atau kelompok warganegara yang lainnya, tetapi bisa juga berlangsung secara vertikal antara warga negara dengan pemerintah ataupun kombinasi dari keduanya. Kekerasan dapat juga terjadi secara terbuka maupun tertutup. Bentuk- bentuk kekerasannya juga sangat bervariasi mulai dari kekerasan simbolik, kekerasan fisik, kekerasan verbal, perang antar agama dan perang antar suku. Senada dengan Cornelis Lay, penelitian *case study* yang dilakukan oleh Johan Wahyudi (2015) terkait komunitas muslim syiah di Sampang Madura terdapat beberapa gambaran terkait adanya peminggiran atau eksklusi kaum minoritas warganegara yang beridentitas Ahmadiyah oleh masyarakat dan negara. Penelitian tersebut menganggap negara gagal dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada multikulturalisme. Konflik lebih besar lagi pernah terjadi antar pemeluk agama diambon, dimana korban ditimbulkan dari konflik tersebut mencapai ribuan orang (Garry Van Klinken, 2007).

Selain pada aras perbedaan agama warga negara, konflik juga terjadi antara warga negara dengan negara dalam hal menuntut kemerdekaan bagi kelompok sub-sub nasional. Hal itu tercermin secara faktual dari konflik pemerintah dengan gerakan aceh merdeka (GAM) di provinsi Aceh, konflik antara negara dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Beragam konflik tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pluralitas di Indonesia masih menjadi problem yang perlu di selesaikan . Belum lagi konflik- terkait akses terhadap sumber daya juga menjadi catatan kapita selekta konflik di Indonesia (Syafuan Rozi, 2006). Berbagai bentuk konflik yang terjadi, baik dari permasalahan agama, tuntutan kemerdekaan oleh kelompok sparatis, dan juga konflik- konflik terkait sumberdaya tidak terlepas dari adanya proses eksklusi atau peminggiran terhadap hak- hak kelompok minoritas (Will Kymlicka, 2008) .

Deretan kapita selekta kasus terkait ancaman kohesivitas diatas menguatkan tesis dari Kymlicka, mengenai ancaman kohesivitas negara bangsa yang muncul karena adanya kewargaan multikultural suatu negara bangsa. Menguatnya politik identitas mendorong munculnya berbagai gerakan berbasis identitas untuk tampil kepermukaan, yang pada akhirnya menimbulkan klaim-klaim kebenaran antar kelompok yang berbeda secara identitas. Problem tersebut diperparah dengan tidak dibarenginya kesadaran toleransi kewargaan. Padahal toleransi merupakan bagian penting dari nalar kewargaan multikultural. Untuk itu solusi yang dihadirkan adalah dengan menyemai kewargaan multikultural. Menyemai kewargaan multikultural diartikan sebagai upaya yang bisa dikerjakan guna menghadirkan ekspresi- ekspresi kewargaan multikultural. Dimana ekspresi- ekspresi kewargaan multikultural tersebut perlahan di hadirkan melalui rute pendidikan.

## **Pembahasan**

### **Memahami Pendidikan Kewargaan Multikultural**

Kewargaan multikultural merupakan pengakuan terhadap hak minoritas atau penghormatan terhadap ekspresi perbedaan identitas yang dimunculkan oleh warga negara yang lain (Will Kymlicka, 2011). Pendidikan kewargaan multikultural merupakan upaya transformasi pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa dari beragam etnis, ras dan budaya dalam mengembangkan kompetensi multikulturalnya. Salah satu jalan yang utama dalam melakukan propaganda sekaligus penanaman gagasan kewargaan multikultural adalah

melalui jalur pendidikan (Will Kimlicka, 2008). Oleh karena itu, konsepsi pendidikan mesti diperluas mencakup eksistensi berbagai macam identitas seperti hak budaya kewarganegaraan dari berbagai kelompok ras, budaya, etnis dan bahasa. Pendidikan kewargaan harus memuat materi terkait pengakuan atas berbagai identitas yang berbeda, untuk itu sekolah mesti memodifikasi pengajaran agar lebih responsif terhadap siswa dari kelompok ras, etnis, budaya dan bahasa yang berbeda (James bank, 2008). Sekolah adalah tempat yang paling strategis untuk menebarkan ajaran kewargaan multikultural. Melalui pelajaran disekolah gagasan-gagasan kewargaan multikultural disemai dan diinternalisasikan kepada siswa.

Sebagaimana pandangan Giroux (1980), bahwa pendidikan semestinya tidaklah bebas nilai namun merupakan pencerahan dari ketertindasan oleh penguasa. Dalam arti yang lain, bahwa pendidikan tidaklah sekedar mentransfer pengetahuan namun memiliki tujuan dari ideologi yang ada didalam pengetahuan tersebut. Untuk itu pendidikan kewargaan multikulturalisme mestinya berpretensi mengubah cara pandangan siswa- siswa terkait adanya perbedaan identitas diantara warga negara, secara spesifik sesama siswa yang ada didalam kelas. Oleh karenanya, pendidikan kewargaan multikultural hendaknya menjadi salah satu unsur dari struktur kurikulum sebuah negara.

Dalam studi yang dilakukan oleh Kerry J. Kennedy (2008) dengan membaca kontem atau isi kurikulum pendidikan kewarganegaraan diberbagai negara menjelaskan bahwa materi *diversity* (keanekaragaman) atau multikulturalisme menjadi salah satu tema wajib yang mesti diajarkan kepada siswa- siswa disekolah. Selain aspek konten kurikulum, Kerry J. Kennedy juga mengkaji aspek ideologi dan organsisasi struktur kurikulum diberbagai negara. Dalam aspek struktur ditemukan bahwa materi pendidikan kewarganegaraan yang didalamnya juga berisi terkait multikulturalisme diajarkan melalui berbagai cara, seperti dalam bentuk mata pelajaran sendiri, terintegrasi dengan mata peajaran tertentu, diintegtasikan keseluruhan mata pelajaran atau diajarkan melalui kegiatan ekstra kurikuler.

James Bank (1995) memandang antara multikultural dan pendidikan multikultural mempunyai makna yang berbeda. Secara garis besar diskusi mengenai pendidikan kewarganegaraan adalah berkisar mengenai bagaimana membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang sesuai dikehidupan negara bangsa yang semakin beragam. Konsep pendidikan kewargaan multikultural setidaknya tersusun dari tiga konten utama yaitu, *pertama* sebagai ide atau konsep, *kedua* sebagai gerakan reformasi pendidikan dan *ketiga* sebagai proses. Sebagai ide atau konsep, pendidikan multikultural menganggap bahwa semua siswa harus memiliki persamaan kesempatan untuk belajar, tidak memandang adanya perbedaan kelompok ras, etnis, kelas sosial atau gender yang mereka miliki. Sebagai gerakan reformasi pendidikan yaitu mencoba mereformasi sekolah dengan jalan memberi kesempatan kepada siswa kesempatan yang sama untuk belajar. Dalam hal proses memandang pendidikan kewarganegaraan multikultural adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir.

Selain tiga kompenen yang menjadi ciri dari pendidikan multikultural untuk warganegara khususnya disekolah. James Bank (1995) juga memberikan identifikasi lima dimensi pendidikan kewargaan multikultural untuk warga negara. Dimensi- dimensi tersebut yaitu, (1), dimensi integrasi konten yaitu menggambarkan dimana para guru memberikan contoh konten materi pelajaran dari berbagai budaya dan kelompok yang berbeda dalam mata pelajaran, (2) dimensi konstruksi pengetahuan yang terdiri dari metode, aktivits dan metode yang digunakan oleh guru guna membantu siswa memahami bagaimana budaya tersirat, (3) dimensi pengurangan prasangka berkaitan dengan karakteristik dari sikap rasial yang digunakan untuk membantu siswa lebih demokratis, (4) dimensi pendagogi kesetaraan yaitu guru dituntut untuk kreatif memodifikasi pengajaran yang dapat memfasilitasi siswa dengan keragaman identitas, (5) dimensi memberdayakan budaya sekolah dan struktur sekolah bertujuan untuk memberdayakan siswa dari berbagaim macam ras, etnis dan budaya.

Studi Will Kymlicka (2008) mengenai pendidikan kewargaan multikultural lebih menyoroti pada aspek konten, pedagogi dan iklim atau suasana kelas. Konten dalam pendidikan kewarganegaraan multikultural berbicara mengenai kompetensi apa yang mesti siswa capai terkait kompetensi kewargaan multikultural. Materi tersebut membekali siswa untuk mampu berkomunikasi dalam masyarakat yang memiliki beragam latar belakang historis, sosial, budaya dan politik serta siswa dapat mengakui sekaligus menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat. Aspek pedagogi mendiskusikan tentang bagaimana guru memiliki keterampilan dalam mengajar agar siswa mampu mencapai beragam kompetensi yang dipersyaratkan meskipun siswa-siswa tersebut berasal dari latar belakang etnis, budaya, ras, suku dan bahasa yang berbeda-beda. Selain itu guru dituntut tidak hanya mampu mengajar mengenai gagasan kewarganegaraan, namun juga mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai multikulturalisme. Oleh karena hal tersebut guru memiliki kemampuan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan siswa yang memiliki beragam latar belakang identitas. Aspek iklim atau suasana kelas adalah suasana kelas yang terbuka dimungkinkan lebih kondusif untuk mendorong siswa mampu mengembangkan sikap kewargaan multikulturalnya.

Dari berbagai kajian tersebut, mengenai pendidikan kewargaan multikultural, dapat diambil benang merah bahwa pendidikan kewargaan multikultural melampaui pengertian mengenai tema kewarganegaraan klasik yang hanya mendiskusikan mengenai pemungutan suara, membayar pajak dan mematuhi hukum. Lebih jauh dari itu wacana pendidikan kewarganegaraan juga terkait mengenai mendorong tercapainya kompetensi kewargaan multikultural siswa, seperti kemampuan untuk berdialog dan bermusyawarah dengan warganegara yang memiliki latar belakang identitas yang berbeda dalam segi ras, suku, agama, dan bahasa. Selain itu, dari aspek pedagogi dan suasana kelas yang dibangun tidak lagi “*bergaya bank*” namun memberikan sebuah kondisi untuk siswa dapat berkembang walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Pendidikan kewargaan multikultural bertujuan untuk menyiapkan generasi muda untuk toleran terhadap adanya identitas yang berbeda dari identitas yang dimilikinya. Selain itu pendidikan kewargaan multikultural juga bertujuan untuk menciptakan ruang dan kondisi yang kondusif guna mendorong munculnya ekspresi- ekspresi gagasan kewargaan multikultural.

### **Politik Pendidikan Kewargaan Multikultural Indonesia**

Politik pendidikan merupakan upaya-upaya sadar dan terorganisasi guna mempengaruhi input, proses dan output pendidikan baik melalui legislasi, kelompok penekan atau aksi kelompok, eksperimentasi, investasi pribadi, inovasi internal, atau propaganda (Sirozi, 2005). Pengertian yang lebih sempit mengenai politik pendidikan sebagai strategi pendidikan yang dirancang oleh negara untuk menciptakan kualitas manusia yang dicita-citakan (Ahmad Zain, 2012). Secara garis besar politik pendidikan merupakan strategi atau kebijakan yang dilakukan untuk membentuk kualitas manusia melalui pendidikan. Dalam ranah multikultural berarti strategi atau kebijakan yang diterapkan untuk membentuk kewargaan multikultural baik melalui pendidikan disekolah atau perguruan tinggi.

Dalam politik kenegaraan ekspresi multikultural di Indonesia sebenarnya nampak dari semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Semangat untuk menghargai perbedaan dan mampu hidup bersama dalam perbedaan sudah di tanamkan oleh para pendiri negara melalui semboyan tersebut. Sehingga jika semangat multikultural diterjemahkan kedalam politik pendidikan menjadi satu nafas dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Politik pendidikan kewarganegaraan multikultural di Indonesia sudah diterjemahkan melalui implementasi pendidikan multikultural disekolah dan perguruan tinggi. Meskipun pendidikan multikultural tidak menjadi mata pelajaran sendiri disekolah-sekolah namun terintegrasi kedalam mata pelajaran yang lain. Sebagai contoh konten pendidikan multikultural terintegrasi kedalam

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sedangkan dalam perkuliahan di perguruan tinggi konten multikultural di ajarkan menjadi mata kuliah tersendiri.

Dalam undang- undang pendidikan nasional saat ini nampak telah memberikan apresiasi terhadap adanya pluralitas. Hal ini terlihat dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional yang secara tersurat mewajibkan penyelenggaraan pendidikan harus mempertimbangkan prinsip multikulturalisme. Pesan tersebut nampak jelas pada pasal 4 butir ke- 1 yang berbunyi “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Penyelenggaraan pendidikan jika mengacu pada pasal tersebut mengandung makna bahwa pendidikan tidak boleh dilepaskan dari kerangka multikulturalisme. Selain itu dalam pasal 36 butir 3 secara tersirat memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis multikultural (Wihardit, 2010). Jika diamati lebih jauh, kedua pasal tersebut memberikan makna bahwa politik pendidikan di Indonesia telah memberi ruang untuk pendidikan multikultural lebih berkembang dibanding masa orde baru yang cenderung monokultural dan kurang mengadopsi kemajemukan serta keanekaragaman budaya (Azumardi Azra, 2006). Lebih jauh beliau mengatakan bahwa dalam suasana politik Orde Baru, yang dijalankan bukanlah penghormatan terhadap keragaman (kebhinnekaan, atau multikulturalisme), tetapi sebaliknya adalah keseragaman (monokulturalisme) atas nama stabilitas untuk pembangunan negara.

Politik pendidikan saat ini yang cenderung mengakomodir kemajemukan dan keanekaragaman diilhami oleh kesadaran mengenai pentingnya penguatan kewargan multikultural Indonesia. Berakhirnya sentralisasi Orde Baru yang mengharuskan monokulturalisme, pada gilirannya telah memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya multikulturalisme Indonesia (Saifuddin, 2006). Lebih jauh Saifuddin menjelaskan kondisi penyebab menguatnya wacana multikultural di Indonesia: *pertama*, desentralisasi mendorong menebalnya batas-batas identitas kebudayaan di Indonesia, baik identitas etnik, agama maupun golongan. *Kedua*, desentralisasi politik masa kini sangat kurang memperhatikan dimensi kebudayaan. Keputusan untuk melaksanakan desentralisasi lebih pada keputusan politik oleh para penguasa elit politik partai ketimbang mempertimbangkan dimensi keberagaman kebudayaan yang sesungguhnya sangat mendasar dan penting. *Ketiga*, ketika batas-batas kebudayaan itu semakin nyata dan mencolok, dan orientasi primordialisme mulai memicu perbedaan sehingga mengakibatkan konflik yang tajam antar etnik, agama, dan golongan, dan gejala ini dikuatirkan mengancam kesatuan integrasi bangsa, sehingga perlu dirumuskan strategi untuk membangun kembali integrasi bangsa. Salah satu wacana yang sering di diskusikan dalam ruang-ruang pertemuan gagasan di Indonesia setidaknya sejak runtuhnya rezim politik Orde Baru pada 1998 yaitu adanya ide tentang multikulturalisme. Secara simplistik, multikulturalisme dapat dipandang sebagai penghormatan atas keanekaragaman. Hal tersebut bukanlah suatu yang “*given*” tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu masyarakat tertentu melalui pendidikan multikultural (Tilaar, 1999).

Secara faktual, praktek politik pendidikan kewargan multikultural disekolah dapat dilihat dari kajian yang dilakukan oleh Samsuri (2016), Thalib (2014), Fatimah, dkk. (2014), Susanti (2013), Arifin (2012), dan Rukiyati (2012). Dari beberapa kajian diatas memperlihatkan bahwa nilai- nilai multikultural diatankan kepada warga negara melalui pendidikan disekolah. Muatan multikultural tidak diajarkan melalui mata pelajaran tersendiri namun terintegrasi kedalam proses pembelajaran, baik yang sifatnya kurikuler, maupun ekstra kurikuler. Penanaman muatan multikultural melalui kurikuler disekolah secara tersurat terintegrasi didalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan baik pada Kurikulum 2006 maupun di kurikulum 2013. Sedangkan secara tersirat diwujudkan kedalam karakter yang dikembangkan disetiap mata pelajaran yang diajarkan. Penguatan kewargan multikultural tidak hanya dilakukan di sekolah formal , namun juga sekolah berbasis agama dan pesantren

meskipun dengan metode yang berbeda beda. Penanaman nilai- nilai multikultural di pesantren cenderung bersifat eksperimental, yaitu dipraktekan kedalam kehidupan sehari- hari di lingkungan pesantren.

### Kesimpulan

Politik pendidikan kewargaan multikultural di Indonesia mengalami penguatan pasca Orde Baru. Hal tersebut dapat dibuktikan dari lahirnya Undang- Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional yang memberi ruang bagi keanekaragaman untuk berkembang. Secara faktual penanaman nilai- nilai multikultural bagi warga negara sudah dilakukan disekolah -sekolah baik yang forma maupun berbasis pesantren.

### Daftar Pustaka

- Arifin, A.H. 2012. Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Praksis Pendidikan di Indonesia. *Dalam Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 1, No.1, Juni 2012.*
- Zain, A. 2012. *Konsepsi Politik Pendidikan.* Dalam Jurnal Educhild, Vol.1, No. 1.
- Azra, Azyumardi. 2006. “Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme”. Dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press.
- Banks, J. A. (1995). Multicultural Education and Curriculum Transformation. *The Jurnal of Negro Education, Vol. 64. No. 4*
- Fajrin, N. dkk. 2014. Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Di Smp Negeri 6 Banjarmasin. *Dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7, Mei 2014*
- Giroux, H. A. (1980). Critical Theory and Rationallity in Citizenship Education. *Curriculum Inquiry, Vol. 10, No. 4*
- H.A.R. Tilaar. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation
- Kennedy, K. J. (2008). *The Citizenship Curriculum: Ideology, Content and Organization.* Dalam Bryan S. Turner & Engin F. Isin (eds). Handbook of Citizenship Studies. London, Thousand Oaks, dan New Delhi: Sage Publications.
- Klinken, G. V. (2007). *Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal, dan Demokratisasi Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kymlicka, W. (2011). *Kewargaan Multikultural* (Terjemahan Edlina H. Eddin). Jakarta: LP3ES. (Edisi asli diterbitkan tahun 1995 oleh Oxford University Press Inc. New York).
- Kymlicka, W. (2008). *Multicultural Citizenship Education.* Dalam Bryan S. Turner & Engin F. Isin (eds). Handbook of Citizenship Studies. London, Thousand Oaks, dan New Delhi: Sage Publications
- Kymlicka, W. (2008). *Two Dilemmas of Citizenship Education in Pluralistic Societies.* dalam James Arthur & Ian Davis (eds.). Citizenship Education. . London, Thousand Oaks, dan New Delhi: Sage Publications
- Lay, C. (2009). Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 13, No.1, Juli 2009.*
- Rukiyati. 2012. Landasan Implementasi Pendidikan Multikultural Indonesia. *Jurnal Humanika, Vol. 12, No. 1, September 2012*

- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2006. *Reposisi Pandangan mengenai Pancasila: Dari Pluralisme ke Multikulturalisme*. Dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Bogor: Brighten Press.
- Samsuri, & Marzuki. 2016. Pembentukan Karakter Kewargaan Multikultural Dalam Program Kurikuler Di Madrasah Aliyah Se-Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dalam Jurnal Cakrawala Pendidikan, Th.XXXV, No. 1*.
- Sirozi, M. 2005. *Politik Pendidikan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Susanti, R. D. 2013. Menguak Multikulturalisme di Pesantren: Telaah atas Pengembangan Kurikulum. *Dalam Jurnal Addin, Vol. 7, No. 1, Februari 2013*.
- Thalib, & Bahrin. 2014. Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Menciptakan Suasana Kondusif di SMAN 3 Palu. *Dalam Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 2, No 1, Januari 2014*.
- Wahyudi, J., & Wahid, M. (2015). Peminggiran Minoritas Dan Absennya Multikulturalisme Di Ranah Lokal, Studi kasus Komunitas Muslim Syiah Di Sampang. *Jurnal Politik proetik, Vol. 5, No. 1*.
- Wihardit, Z. 2010. Pendidikan Multikultural: Konsep, Pendekatan, dan Solusi. *Jurnal Pendidikan, Vol. 11, No. 2 September 2010*.



## Nilai-Nilai Budaya Lokal Rasulan dari Gunung Kidul sebagai Pendidikan Karakter Anak

Wellyana, S.Pd

Program Studi PPKn, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta  
Wyana13@gmail.com

### Abstrak

Pendidikan karakter saat ini adalah pendidikan yang dipandang penting oleh pemerintah, hingga diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang pendidikan karakter itu sendiri. Melihat hal tersebut maka pendidikan karakter tidak hanya menjadi kewajiban orang tua ataupun guru saja tetapi kewajiban bersama antara orang tua, guru atau lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat. Mengingat hal tersebut maka nilai-nilai budaya lokal atau kearifan lokal perlu dilirik untuk dijadikan sebagai salah satu strategi dalam melakukan pendidikan karakter kepada anak. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi tentang kajian pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya lokal rasulan dari Gunung Kidul. Dalam tulisan ini bertujuan untuk memaparkan strategi pendidikan karakter kepada anak melalui nilai-nilai budaya lokal rasulan dari Gunung Kidul. Hasil dari berbagai literatur menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal rasulan dari Gunung Kidul banyak memuat proses pembentukan karakter bagi anak.

**Kata kunci:** Pendidikan karakter, budaya lokal Rasulan.

### Pendahuluan

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi pendidikan karakter dan budi pekerti. Hal ini bisa dilihat dari konsep-konsep pendidikan karakter untuk anak baik di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Selain itu dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan karakter bagi anak-anak Indonesia. Dan penguatan pendidikan karakter ini adalah sebuah gerakan yang melibatkan kerja sama dan tanggung jawab dari lembaga pendidikan, keluarga atau orang tua, dan lingkungan masyarakat. Dilihat dari hal tersebut pendidikan karakter berarti tidak hanya meliputi pendidikan formal yang anak dapatkan di sekolah tetapi juga pendidikan non formal yang anak dapatkan di keluarga dan lingkungan masyarakat.

Konsep dari pendidikan karakter sendiri menurut Thomas Lickona (1991: 51) bahwa karakter mulia (*good character*) meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Jadi dapat dikatakan bahwa karakter itu, meliputi beberapa tahapan mulai dari pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), motivasi (*motivations*), perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*) seseorang. Oleh karena itu pendidikan karakter tidak hanya pendidikan yang sekedar memberikan pengetahuan secara teoretik mengenai karakter, tapi bagaimana kita mampu mendidik dengan memberikan pemahaman langsung kepada anak tentang karakter sehingga anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat bahwa pendidikan karakter tidak hanya menuntut anak untuk memiliki pengetahuan tentang karakter saja, dan pendidikan karakter tidak hanya pendidikan yang didapatkan di sekolah secara formal maka kita harus mampu memberikan pendidikan karakter

kepada anak secara non formal. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan budaya lokal atau kearifan lokal yang ada sebagai sarana atau strategi dalam memberikan pendidikan karakter kepada anak. Dan tentunya hal tersebut melibatkan kerja sama serta tanggung jawab antara guru atau lembaga pendidikan, orang tua dan lingkungan masyarakat. Kebudayaan sendiri menurut Purwadi (2005: 1) adalah warisan sosial yang dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan cara mempelajarinya.

Salah satu budaya lokal atau kearifan lokal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta adalah budaya lokal rasulan dari Gunung Kidul. Budaya lokal tersebut adalah budaya yang merupakan kegiatan atau tradisi yang dilakukan turun menurun oleh masyarakat Gunung Kidul. Menurut Atmi Satwati (2013) bahwa Rasulan/bersih desa merupakan tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan upacara kesuburan tanah diadakan secara masal adalah upacara selamatan rasul/rasulan/bersih desa/metri desa. Upacara itu diadakan setahun sekali sehabis panen.

Maka dari itu makalah ini ditulis untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter di dalam kebudayaan lokal atau kearifan lokal rasulan sebagai strategi pendidikan karakter bagi anak, dengan menggunakan metode studi literatur.

## Pembahasan

### Pendidikan Karakter

Konsep dari pendidikan karakter sendiri menurut Thomas Lickona (1991: 51) bahwa karakter mulia (*good character*) meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Jadi dapat dikatakan bahwa karakter itu, meliputi beberapa tahapan mulai dari pengetahuan (*cognitives*), sikap (*attitudes*), motivasi (*motivations*), perilaku (*behaviors*) dan keterampilan (*skills*) seseorang.

Selain itu menurut Zubaidi (2011: 17) Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya menanamkan kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya. Sedangkan Menurut David Elkind & Freddy Sweet Ph.D. (2004), pendidikan karakter dimaknai sebagai berikut: “pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita inginkan untuk anak-anak kita, jelas bahwa kita ingin mereka dapat menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini benar, bahkan dalam menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam”.

Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter sendiri memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya.

Jadi dapat dipahami dari berbagai konsep dan pengertian pendidikan karakter bahwa pendidikan karakter adalah sebuah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seseorang atau anak yang esensinya hampir sama dengan pendidikan akhlak dan moral. Dan tujuannya adalah untuk mengembangkan dan membentuk sikap serta perilaku yang baik dan benar sehingga nantinya dapat berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Ratna megawangi (2009; 21) sendiri ada beberapa poin-poin penting dijadikan sebagai “tolok ukur” bagi materi-materi yang dapat diidentifikasi sebagai bagian dari proses pembelajaran karakter siswa yang dapat dimasukkan ke dalam berbagai materi pelajaran di sekolah Poin-poin tersebut antara lain; (1) cinta pada Tuhan dan alam semesta, (2) tanggung

jawab, kedisiplinan, dan kemandirian, (3) toleransi dan cinta damai terhadap sesama, (4) baik dan rendah hati, (5) kepemimpinan dan keadilan, (6) kepercayaan terhadap diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, (7) kasih sayang, kepedulian dan kerja sama, (8) hormat dan santun, dan (9) kejujuran.

Sedangkan ada 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Diknas adalah :

**1. Religius**

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

**2. Jujur**

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

**3. Toleransi**

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

**4. Disiplin**

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

**5. Kerja Keras**

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

**6. Kreatif**

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

**7. Mandiri**

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

**8. Demokratis**

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

**9. Rasa Ingin Tahu**

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

**10. Semangat Kebangsaan**

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

**11. Cinta Tanah Air**

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

**12. Menghargai Prestasi**

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

**13. Bersahabat/Komunikatif**

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

**14. Cinta Damai**

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

**15. Gemar Membaca**

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

**16. Peduli Lingkungan**

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

**17. Peduli Sosial**

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

**18. Tanggung Jawab**

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi dalam pendidikan karakter terdapat beberapa aspek sikap dan perilaku yang diharapkan bisa dicapai oleh anak setelah memperoleh pendidikan karakter itu sendiri, dan beberapa aspek perilaku yang diharapkan tersebut sifatnya adalah berkelanjutan yang artinya dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat nantinya walaupun proses dari pendidikan karakter selesai.

**Nilai-Nilai Budaya Lokal Rasulan**

Istilah “budaya” menurut Erlangga Brahmanto (2014) bukan saja merujuk pada sastra dan seni, tetapi juga pada keseluruhan cara hidup yang dipraktikkan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta mencakup pengertian yang lebih luas dari *lifestyle* dan *folk heritage*. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1984: 5) kebudayaan adalah suatu cerminan kehidupan manusia yang diwujudkan dalam suatu karya, baik itu dalam wujud benda maupun aktivitas suatu tindakan.

Budaya lokal rasulan dari Gunung Kidul adalah budaya yang merupakan kegiatan atau tradisi yang dilakukan turun menurun oleh masyarakat Gunung Kidul. Rasulan sendiri menurut Erlangga Brahmanto (2014) adalah kegiatan yang ada hubungannya dengan peringatan terhadap suatu momen hidup para rasul setelah mendengar kata rasulan. Sebenarnya Tradisi rasulan merupakan tradisi dari jaman dahulu yang masih dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat kabupaten Gunungkidul dari ujung barat yaitu Kecamatan Panggang dan sampai yang paling timur yakni Kecamatan Girisobo serta daerah sekitarnya.

Sedangkan menurut Candra Bagus Sultan Mixdam dan Nur Hidayah, M. Si (2015) rasulan itu sendiri yaitu merupakan bentuk rasa syukur kepada tuhan atas rezeki yang telah dilimpahkan pada masyarakat desa. Selanjutnya Menurut Atmi Satwati (2013) bahwa Rasulan/bersih desa merupakan tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan upacara kesuburan tanah diadakan secara masal adalah upacara selamatan rasul/rasulan/bersih desa/metri desa. Upacara itu diadakan setahun sekali sehabis panen.

Menurut Erlangga Brahmanto (2014), saat melakukan penelitian mengenai rasulan, rasulan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam waktu tiga hari, pada hari pertama berisikan kegiatan bersih desa yang dilakukan seluruh masyarakat desa, dan hari kedua pertunjukan dan kirab budaya, dan silaturahmi antar tetangga.

Selain itu juga menurut Candra Bagus Sultan Mixdam dan Nur Hidayah, M. Si (2015) yang melakukan studi penelitian rasulan mengungkapkan bahwa di daerah playen, Gunungkidul khususnya Dusun Dengok IV sosialisasi tentang rasulan terus diberikan kepada anak-anak sebagai penerus yang akan melestarikan rasulan, berbagai bentuk sosialisasi diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak akan tertarik untuk mengikuti kegiatan rasulan

dan juga diharapkan dapat mengerti arti dari rasulan yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang akan sangat membantu anak-anak tersebut dalam menjalani hidup mereka di dalam masyarakat. Selanjutnya dia juga menambahkan bahwa “Dalam rasulan terdapat beberapa nilai yang bisa dipelajari oleh anak-anak saat mereka mendapatkan sosialisasi, anak-anak serta masyarakat yang ikut dalam rangkaian rasulan diharapkan untuk menerima beberapa nilai seperti tanggung jawab, gotong royong, kesabaran serta keikhlasan yang akan mereka gunakan untuk menjalani kebutuhan hidup, nilai-nilai tersebut juga akan sangat membantu individu yang mempelajarinya untuk beradaptasi dengan masyarakat pada umumnya”.

Jadi kegiatan rasulan yang merupakan salah satu budaya atau kearifan lokal yang ada di Gunung Kidul banyak sekali mengandung nilai-nilai karakter, sehingga mampu memberikan pembelajaran atau pelatihan bagi anak, agar mampu berlaku sosial dan komunikatif di masyarakat, mandiri, tanggung jawab. Selain itu anak-anak juga diharapkan nantinya bisa menjadi penerus yang mampu memahami nilai-nilai rasulan dan mampu melestarikannya.

### **Hasil Pemikiran**

Dari penjelasan mengenai konsep pendidikan karakter, serta budaya lokal atau kearifan lokal rasulan yang ada di Gunung Kidul. Sebaiknya lembaga pendidikan (guru, atau sekolah), keluarga, dan lingkungan masyarakat bisa bersinergi untuk berkerjasama memanfaatkan momen kegiatan rasulan sebagai sarana atau strategi pendidikan karakter bagi anak di luar sekolah.

Karena seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kegiatan rasulan banyak sekali mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, seperti melatih sikap tanggung jawab, sikap sosial, cinta akan kekayaan budaya, mandiri, kerjasama. Jadi sikap-sikap seperti ini kedepannya akan membantu anak dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Jadi langkah lebih baik jika lembaga pendidikan membuat sebuah buku kegiatan rasulan yang diberikan kepada anak, sehingga anak saat kegiatan rasulan berlangsung bisa mengisi buku kegiatan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya selama rasulan berlangsung. Selain itu lembaga pendidikan bisa bekerja sama dengan orang tua, lingkungan masyarakat untuk memberikan penilaian, jadi lembaga pendidikan bisa memberikan form penilaian kepada pihak orang tua dan lingkungan masyarakat (kepala dukuh, RT, RW). Karena sesuai dengan konsep penguatan pendidikan karakter bahwa pendidikan karakter tidak hanya melibatkan lembaga pendidikan (guru, sekolah) saja, tetapi orang tua, dan lingkungan masyarakat. Selain itu konsep pendidikan karakter tidak hanya memberikan pengetahuan atau kognitif saja kepada anak, tetapi bagaimana memotivasi anak agar anak memiliki sikap, perilaku, dan keterampilan yang baik. Salah satunya dengan mengikuti kegiatan rasulan.

### **Kesimpulan**

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang fungsinya berkelanjutan, oleh karena itu peran dari lembaga pendidikan, orang tua, lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan. Karena memang pada prinsipnya pendidikan karakter tidak bisa hanya memberikan konten atau muatan secara kognitif saja tapi harus mampu memberikan konten atau muatan yang melatih sikap, perilaku, dan keterampilan anak. Jadi pendidikan karakter tidak bisa hanya dilakukan di sekolah tetapi juga harus dilakukan di luar sekolah sebagai sarana praktik anak secara langsung. Maka dari itu dalam memberikan atau melakukan pendidikan karakter kepada anak perlu dilakukan strategi baru misalnya dengan memanfaatkan budaya lokal atau kearifan lokal yang ada.

### Daftar Pustaka

- Thomas, Lickona. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam books.
- Atmi Satwati. (2013). *Paket Informasi Bersih Desa Daerah Istimewa Yogyakarta*. BPAD YOGYAKARTA.
- Purwadi. (2005). *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaidi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Megawangi, Ratna. (2009). *Pengembangan Program Pendidikan Karakter Di Sekolah: Pengalaman Sekolah Karakter*. Depok: Indonesia Heritage Foundation.
- Ramli. T. (2003). *Pendidikan Karakter*. Bandung : Angkasa.
- David Elkind & Freddy Sweet (2004). *How to do character education*. ([http://www.goodcharacter.com/Article\\_4.html](http://www.goodcharacter.com/Article_4.html)) diakses 4/8/2018 15:00 WIB.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta : PN. Balai Pustaka
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter . Kemendiknas ( 2010:9-10) Tentang 18 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter
- Erlangga, Brahmanto.(2014).*Tradisi Rasulan Menjadi Andalan Etnik Tourism Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta*. BSI Yogyakarta.
- Candra Bagus Sultan Mixdam dan Nur Hidayah, M. Si. (2015). *Sosialisasi Adat Rasulan Di Kalangan Anak-Anak Pada EraModerenisasi Di Daerah Playen Gunung Kidul*

## Peran Guru dalam Implementasi Pendidikan Sepanjang Hayat di Abad 21

**R. Samidi**

Program Studi PPKn, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta  
Email: rsamidi90@gmail.com

**Verbena Ayuningsih Purbasari**

Program Studi PPKn, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta  
Email: verbena.ayu29@gmail.com

### Abstrak

Di dalam dunia pendidikan, guru merupakan komponen yang sangat penting yang memiliki peran sebagai penentu keberhasilan dari tujuan pendidikan. Sebagai salah satu pendidik profesional, guru bertugas untuk membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Tugas dan peran guru dalam lingkup di ruang formal, lebih kepada suatu proses pemebntukan karakter peserta didik yang diimplementasikan secara terus menerus dalam kehidupan. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah mendeskripsikan peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan sepanjang hayat di abad 21. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka dengan mengkaji sumber-sumber yang relevan terkait peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan sepanjang hayat di abad 21. Dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa guru memiliki peranan penting sebagai media dalam menyalurkan dan menanamkan pendidikan sepanjang hayat kepada peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan karena sadar atau tidak sadar pendidikan akan berjalan secara terus menerus.

**Kata kunci:** guru, pendidikan sepanjang hayat, abad 21.

### Pendahuluan

Secara harfiah, manusia merupakan makhluk yang memiliki akal dan budi. Penciptaan manusia merupakan penciptaan yang sempurna, karena dengan akal, manusia mampu berpikir dan berusaha dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Berbagai cara dilakukan untuk mendukung upaya tersebut, salah satunya adalah melalui pendidikan. Pendidikan hadir dan menjadi jiwa di tengah-tengah masyarakat, membangun manusia mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak akan terhenti saat pendidikan di sekolah berhenti, melainkan dapat berlangsung secara terus menerus sepanjang hayat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan tidak hanya diselenggarakan lewat jalur pendidikan formal, melainkan juga jalur pendidikan informal dan pendidikan non formal. Ketiganya saling terhubung dan membentuk satu kesatuan dalam mendukung pendidikan agar dapat berlangsung sepanjang hayat, artinya proses pendidikan tidak akan berhenti walaupun individu sudah dewasa. Dalam hal ini, tujuan pendidikan merupakan faktor kunci untuk arah pembangunan sumber daya manusia. Namun, gurulah yang pada akhirnya menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Sesuai

dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa tugas guru ialah membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas tersebut tidak hanya terbatas pada ruang pendidikan formal, tetapi lebih kepada suatu proses yang terjadi secara terus menerus dalam kehidupan. Selain itu, tugas dan peran guru akan seimbang jika diimbangi dengan keterbukaan dalam menghadapi perkembangan dan inovasi dalam pendidikan. Mengingat bahwa pada abad 21 ini merupakan abad pengetahuan dimana informasi banyak tersebar di berbagai media dan teknologi mengalami perkembangan. Oleh karena itu, peran guru sebagai implementator pendidikan sepanjang hayat harus selaras dengan konsep pendidikan abad 21.

### Metode

*Paper* ini disusun dengan menggunakan metode kajian pustaka. Metode kajian pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan. Metode ini menyajikan data-data dari sumber yang relevan yang sesuai dengan peran guru dalam mengimplementasikan pendidikan sepanjang hayat di abad 21.

### Hasil Pemikiran

#### Konsep Pendidikan di Abad 21

##### 1. Esensi Pendidikan

Menurut Peters (2010: 6) pendidikan merupakan sebuah proses yang terkait dengan berbagai kegiatan, cara berpikir dan melakukan karakterisasi “manusia terpelajar”. Hal ini dikarenakan tugas yang dibawa oleh pendidikan selalu terkait dengan prestasi. Namun, jika dilihat dari kerangka konseptual yang lebih luas, pendidikan tidak hanya terbatas pada pemenuhan prestasi (kognitif). Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menyumbangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya ditujukan pada upaya pemenuhan prestasi, namun juga untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan diawali dengan sebuah gejala pendidikan sebagai fenomena mendidik dan terdidik secara empirik. Gejala tersebut timbul sebagai gejala perilaku dan upaya manusia sebagai bagian dari kegiatan untuk meningkatkan kehidupan agar lebih bermakna dan bernilai. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku individual-sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar primer agar dapat bertahan hidup. Kegiatan dan gejala pendidikan secara khusus timbul ketika sekumpulan individu ingin memenuhi kebutuhan makna (*meaning*) yang lebih tinggi atau abstrak seperti pengetahuan, nilai keadilan, kemakmuran dan keterampilan agar terbebas dari kondisi berkekurangan seperti kemiskinan, atau kurangnya pengertian dalam interaksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007: 35-36).

##### 2. Karakteristik Pendidikan Abad 21

Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang lebih bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat setara dengan bangsa lain dalam dunia global melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita



bangsanya. Dengan kata “sejahtera” dalam tujuan tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan dua hal, yakni kesejahteraan spiritual dan kesejahteraan fisik. Kesejahteraan spiritual mengacu pada kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat yang tercermin dalam bentuk kehidupan bermasyarakat yang nyaman, mulai dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan antara bangsa dengan adanya sikap saling menghormati. Sedangkan kesejahteraan fisik lebih diartikan sebagai kesejahteraan material, yang memiliki pengertian akan hidup yang serba berkecukupan. Hal ini dapat terwujud apabila masing-masing individu memiliki dan menguasai kecakapan dan keilmuan yang disertai dengan kemauan dan kemampuan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Penguasaan ilmu bukan hanya menguasai materi ilmu semata, melainkan juga memiliki sikap keilmuan dan sikap terhadap ilmu (BSNP, 2010: 39-40).

Berbagai macam kegiatan dan gejala pendidikan yang muncul sebagai respon dari adanya keinginan manusia dalam upaya pemenuhan hidup, akan menciptakan suatu karakteristik tersendiri. Karakteristik yang terlihat pada umumnya dapat dibedakan menurut rentang waktu tertentu. Menurut BSNP (2010: 20), abad 21 yang tengah memasuki dekade kedua saat ini dihadapkan pada pergeseran dalam dunia pendidikan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah dan tujuannya. Abad ini ditandai dengan semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Ilmu pengetahuan akan semakin *converging*, berikut implikasinya, terutama terhadap: penelitian, filsafat ilmu, paradigma pendidikan dan kurikulum. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, telah terbukti dengan menyempitnya dan meleburnya faktor “ruang dan waktu” yang selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat manusia.

### **Pendidikan Sepanjang Hayat (*Lifelong Learning Education*)**

Belajar sepanjang hayat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sepanjang rentang hidupnya, karena adanya kebutuhan intrinsik untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kegiatan ini sangat bergantung kepada motivasi dan kemampuan belajar dair individu tersebut. Terdapat tiga terminologi utama yang mendasari konsep pendidikan sepanjang hayat, yaitu: “hidup adalah kehidupan”, “sepanjang hidup (sepanjang hayat)”, dan “pendidikan”. Terminologi ini secara luas menentukan cakupan dan pengertian pendidikan seumur hidup atau sepanjang hayat (Sudarsana, 2016: 50-51).

“Hidup dalam kehidupan” memberi pengertian bahwa manusia senantiasa menyadari ada berbagai pemahaman dan proses yang harus dilalui dan dilakukan dalam menjalani kehidupan. Proses yang dilakukan akan berlangsung terus menerus “sepanjang hayat” karena pada dasarnya proses yang dilalui oleh manusia merupakan bagian upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses tersebut manusia akan terus mengembangkan pengetahuan, karakter dan keterampilan sebagai suatu cara untuk memperlihatkan bahwa kodrat manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi dan selalu menunjukkan keeksistensennya. Namun dalam kehidupan, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari ketika dijumpai benturan-benturan antar sesama manusia. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan suatu proses perubahan sikap dan tata laku dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, yang disebut dengan “pendidikan”. Kesimpulannya adalah, pendidikan akan berlangsung terus menerus sepanjang hidup (sepanjang hayat) melalui upaya pengajaran dan pelatihan dalam rangka untuk mengusahakan sesuatu bagi kehidupannya.

Secara umum, pendidikan sepanjang hayat meliputi pendidikan sebagai proses dan pendidikan sebagai program. Kegiatan pendidikan sebagai proses ditandai dengan adanya seperangkat kegiatan pengorganisasian kegiatan belajar. Kegiatan ini dapat dilihat dari karakteristik pembelajaran yang digunakan, dimana secara teknis disusun dan diorganisasi.

Sedangkan sebagai program, maka bentuk kegiatannya meliputi pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal merupakan ruang utama dalam penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat yang dalam hal ini tugasnya didukung oleh pendidikan informal dan pendidikan non formal (Sudarsana, 2016: 50).

Sebagai bagian dari pendidikan, pembelajaran merupakan sebuah proses eksistensial yang mungkin dimulai saat individu dilahirkan dan mungkin akan berakhir ketika individu tersebut kehilangan kesadaran pada akhir hidupnya (Jarvis, 2008: 4). Pembelajaran merupakan kekuatan pendorong dalam kehidupan manusia, yang berarti bahwa pembelajaran merupakan salah satu sarana pokok dimana seorang individu dapat menjadi dirinya sendiri serta sebagai stimulus yang dapat memperkaya kehidupan manusia. Dalam pengertian pendidikan sepanjang hayat, ini merupakan hal baik. Sangat sulit untuk membuat suatu konsep yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak belajar (Jarvis, 2007: 132). Dengan demikian, pendidikan sepanjang hayat merupakan proses pembelajaran yang berlangsung secara terus menerus dan sebagai suatu dasar bagi manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

### **Peran Guru dalam Mengimplementasi Pendidikan Sepanjang Hayat Abad 21**

Pendidikan sepanjang hayat memiliki banyak makna. Bagi pendidik, terdapat kecenderungan yang sempit untuk melihat pendidikan sepanjang hayat hanya sebagai serangkaian prinsip transedental yang dirumuskan dan dihubungkan dengan serangkaian proses kognitif yang melekat pada semua peserta didik. Jika hanya memfokuskan pada makna ini, peserta didik akan gagal untuk menempatkan pendidikan sepanjang hayat dalam perkembangan sosial kontemporer (Edwards & Usher, 2006: 65). Pada dasarnya, kebutuhan manusia dalam kehidupan tidak terbatas pada pemenuhan pada proses kognitif. Mengacu pada tujuan pendidikan nasional pada abad 21 dalam konteks kesejahteraan material, penguasaan ilmu bukan hanya terbatas pada menguasai materi ilmu saja, melainkan juga sikap yang harus dimiliki dalam mengaktualisasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep pendidikan sepanjang hayat memandang pendidikan sebagai satu sistem yang menyeluruh, yang mengandung prinsip-prinsip pengorganisasian untuk perkembangan pendidikan. Di abad 21, pendidikan sudah beragam. Tugas-tugas dan bentuk-bentuknya melingkupi pengetahuan hidup tentang dunia, tentang manusia-manusia lain, dan tentang diri mereka sendiri (Sudarsana, 2016: 51). Terdapat empat pilar yang menjadi landasan dalam pendidikan, yakni: belajar mengetahui (*learning to know*), belajar berbuat (*learning to do*), belajar hidup bersama dengan orang lain (*learning to live together*), dan belajar menjadi seseorang (*learning to be*). Keempat pilar ini meletakkan kebutuhan dan tuntutan individu sebagai fokus dalam kegiatan pendidikan di abad 21 (Longworth, 2005: 7-8).

Pilar-pilar di atas apabila dijalankan secara terpadu dan sinergis tentu akan memperkuat proses pendidikan sepanjang hayat. Dimulai dari seorang individu atau peserta didik yang belajar untuk mengetahui, kemudian ia akan berbuat dan berperilaku seperti yang ia ketahui. Selanjutnya, peserta didik akan belajar mengenai cara yang digunakan untuk dapat menyesuaikan diri dan *survive* di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, lebih sering berinteraksi dengan individu lain dan membuka diri untuk menirukan *figure* teladan dari orang-orang yang ia temui. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana ruang-ruang pendidikan memberi penguatan kepada pilar-pilar sebagai landasan pendidikan tersebut.

Pada dasarnya ruang pendidikan memiliki tiga jalur yakni pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal. Ketiga jalur tersebut seharusnya dapat saling bersinergi dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan formal merupakan ruang utama dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan sepanjang hayat. Kemudian jalur pendidikan informal dan nonformal pada dasarnya hanya sebagai pelengkap dan penambah apabila pendidikan formal tidak memadai dalam menjalankan tugasnya dalam membentuk dan menanamkan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai karakter kepada peserta didik.

Walaupun demikian, kedua jalur pendidikan tersebut tidak dapat dianggap remeh karena justru dari ruang itulah pendidikan dapat berlangsung sepanjang hayat bahkan saat peserta didik telah menyelesaikan pendidikan di lembaga formal (sekolah).

Sebagai ruang utama dalam penanaman nilai-nilai pendidikan, sekolah harus didukung oleh sumber daya yang mumpuni dalam bidangnya. Dalam lingkup pendidikan formal, sekolah memiliki peran dalam mewujudkan belajar sepanjang hayat yang dilakukan dengan mengembangkan kerjasama antara sekolah dengan lembaga keluarga, lembaga lain dalam masyarakat dan dengan masyarakat sendiri. Di samping itu, sekolah juga memiliki peranan sendiri. Dalam kaitannya dengan belajar sepanjang hayat, wajib belajar harus ditujukan pada provisi berbasis pengetahuan dan pengembangan *meta skill* untuk belajar (Sudarsana, 2016: 45).

Pendidikan sepanjang hayat memberikan tuntutan yang cukup besar pada guru karena mereka harus memperbarui keterampilan khusus di bidang mereka dengan metode pengajaran dan pembelajaran (Scales, 2008: 4). Tuntutan ini merupakan penyesuaian terhadap tujuan pendidikan nasional abad 21, yakni dalam konteks kesejahteraan material penguasaan ilmu tidak hanya ditekankan pada penguasaan materi ilmu saja, melainkan juga pada penguasaan sikap keilmuan agar dapat mengaktualisasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik tidak hanya dibekali oleh pengetahuan mengenai materi pembelajaran, akan tetapi juga mereka diajarkan keterampilan dan nilai-nilai hidup yang mengacu pada sikap yang dapat dilakukan secara terus menerus sepanjang hayat.

Di sinilah peran guru diperlukan. Guru sebagai transmittor ilmu pengetahuan harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan sepanjang hayat di ruang pendidikan formal (sekolah) agar peserta didik tidak hanya memahami pendidikan sebatas pada materi, tetapi juga memiliki nilai yang dapat mereka aktualisasikan dalam kehidupan di masa depan nanti. Dalam perkembangannya, tugas ini akan terbatas pada ruang pendidikan. Sekolah sebagai ruang pendidikan formal tidak dapat secara terus menerus memberikan. Guru disini diharapkan bisa membentuk pengetahuan baru (kemampuan baca dan menulis) dan menanamkan nilai-nilai luhur (pendidikan karakter) kepada peserta didik untuk dijadikan bekal bukan hanya di lingkungan formal, tetapi lebih kepada penerapan sikap dan perilaku diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan terus secara kontinyu dalam kehidupannya.

Guru sebagai fasilitator di dunia pendidikan formal harus memiliki peran besar dalam proses menanamkan nilai-nilai pendidikan sepanjang hayat kepada peserta didik dengan membentuk kemampuan pengetahuan dan nilai-nilai karakter, yang nantinya kemampuan pengetahuan dan nilai-nilai karakter yang di tanam dalam proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mengimplementasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat dan berkelanjutan. Karena tidak bisa dipungkiri pada dasarnya nilai-nilai karakter didapat dari sejak lahir di lingkungan informal dan tugas guru sebagai orang tua peserta didik di lingkungan formal dalam hal ini untuk mengarahkan dan menanamkan karakter positif serta membentuk pengetahuan baru yang harus dimiliki peserta didik untuk dijadikan sebagai pegangan hidup di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan guru dalam membentuk pengetahuan baru dan menanamkan nilai karakter kepada peserta didik merupakan pendidikan nyata yang dilakukan untuk jangka waktu sepanjang hayat, karena guru disini memposisikan dirinya merupakan bagian dari salah satu dari tiga pilar pendidikan yang berkaitan satu sama lain, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

## Kesimpulan

Konsep pendidikan sepanjang hayat merupakan sebuah proses pendidikan secara kontinyu yang berlangsung tanpa ada batas, waktu serta tempat yaitu mulai sejak lahir sampai akhir hayat manusia. Ada tiga pilar utama dalam pengimplementasian pendidikan sepanjang hayat, diantaranya, lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kontribusi guru

dalam pelaksanaan pendidikan sepanjang hayat dalam lingkungan formal disini bahwa guru sebagai fasilitator dalam hal ini memposisikan dirinya dalam membentuk dan menanamkan pendidikan yang memuat pengetahuan baru (baca tulis) dan nilai-nilai kehidupan serta sikap kepada peserta didik untuk dijadikan sebagai bekal dalam berinteraksi dan berhubungan dengan dunia luar dalam hal ini keluarga dan masyarakat. Jadi dapat dikatan peran guru dalam menanamkan pendidikan sepanjang hayat merupakan sebuah keharusan dan menjadi sebuah tanggung jawab tersendiri karena guru merupakan orang tua kedua peserta didik di dalam lingkungan pendidikan formal.

### Daftar Pustaka

- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2010). *Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI*.
- Edwards, Richard & Usher, Robin. (2006). A Trouble Space of Possinillities: Lifelong Learning and The Postmodern. Dalam Sutherland, Peter & Crowther, Jim.(eds.). *Lifelong Learning: Concepts and Contexts*. New York: Routledge.
- Jarvis, Peter. (2007). *Globalisation, Lifelong Learning and The Learning Society: Sociological Perspective*. New York: Routledge.
- . (2008). *Democracy, Lifelong Learning and The Learning Society: Active Citizenship in A Late Modern Age*. Routledge. New York, N.Y: Taylor & Francis e-Library.
- Longworth, Norman. (2005). *Lifelong Learning in Action: Transforming Education in the 21st Century*. Kogan Page. London: Taylor & Francis e-Library.
- Peters, R.S. (2010). What is An Educational Process?. Dalam Peters, R.S. (ed). *The Concept of Education*. Routledge. New York, N.Y: Taylor & Francis e-Library.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Scales, Peter. (2008). *Teaching in The Lifelong Learning Sector*. New York: Open University Press.
- Sudarsana, I Ketut. (2016). Pemikiran Tokoh Pendidikan Dalam Buku Lifelong Learning: Policies, Practices and programs: Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2 (2), hlm. 44-53.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. (2007). *Ilmu & Aplikasi Pendidikan: Bagian 1 Ilmu Pendidikan Teoretis*. Bandung: PT. Imperial Bhakti Utama.
- Undang-Undang R1 Nomor 20 Tahun 2003 tentan

## **AKSIPOB (Antikorupsi *Pop Up Book*) sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi Berbasis Kearifan Lokal di SD Negeri 1 Keputran Yogyakarta**

**Achmad Sidiq Asad<sup>1</sup>, Afrian Dwi Yunitasari<sup>2</sup>, Elly Nur Rahmawati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, <sup>2</sup>Program Studi Ilmu Sejarah,  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta  
achmadsidiqasad@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui rancangan AKSIPOB (Antikorupsi *Pop Up Book*) sebagai media pembelajaran antikorupsi di SDN 1 Keputran, Yogyakarta. 2) Untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal Tari Srimpi Padelori sebagai implementasi antikorupsi di SDN 1 Keputran, Yogyakarta melalui AKSIPOB (Antikorupsi *Pop Up Book*). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau *research and development*(R&D). Model pengembangan yang dijadikan dasar adalah model ADDIE. Adapun tahap-tahap dalam pengembangan ini yaitu 1) *Analysis*, 2) *Design*, 3) *Development*, 4) *Implementation*, 5) *Evaluation*. Namun dalam penelitian ini baru sampai tahap *analysis* dan rancangan *design*. Data yang diperoleh berasal dari ahli materi, ahli media, Guru Kelas V (lima), dan siswa sebagai responden sebanyak 20 siswa. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Karakteristik media yang dikembangkan yaitu: 1) media dalam bentuk cetak yang terdiri sebuah media pembelajaran AKSIPOB, 2) pokok materi yang disajikan yaitu Kompetensi Dasar 2.4 tentang Kejujuran, 3) dapat digunakan sebagai media pembelajaran antikorupsi. Nilai-nilai yang muncul dalam pembelajaran menggunakan media AKSIPOB adalah tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani dan peduli yang merupakan sembilan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang didapat dari makna filosofis kearifan lokal atau *local wisdom* yang terdapat pada ragam gerak Tari Srimpi Padelori yang diajarkan di sanggar tari Pujokusuman Kraton Yogyakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan AKSIPOB untuk Pendidikan Anti Korupsi pada siswa kelas V (lima) SD ini layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran.

**Kata Kunci:** AKSIPOB, Antikorupsi, Kearifan Lokal, Media Pembelajaran, *PopUp Book*

### **Pendahuluan**

Sudah 73 Tahun (2018) Indonesia merdeka, namun masalah korupsi masih menjadi polemik yang mengganjal Indonesia untuk merealisasikan janji kemerdekaanya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di usia yang hampir menginjak satu abad ini, permasalahan korupsi belum juga mampu diselesaikan oleh negara. Kecenderungan yang muncul adalah korupsi di Indonesia bukan lagi bersifat anomali melainkan sudah bersifat tradisi. Hal ini diakibatkan karena korupsi sudah menjadi bagian perilaku bagi para penguasa elit tidak bermoral yang memiliki posisi strategis dalam bidang pemerintahan.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017 sebagaimana dipublikasikan oleh Transparansi Internasional (TI) menduduki peringkat 96 dari 180 negara yang di survey. Hal ini sesuai dengan **hasil data rekapitulasi tindak pidana korupsi per-30 Juni 2017**, di tahun 2017

KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 48 perkara, penyidikan 51 perkara, penuntutan 41 perkara, *inkracht* 40 perkara, dan eksekusi 40 perkara. Dan total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2017 adalah penyelidikan 896 perkara, penyidikan 618 perkara, penuntutan 506 perkara, *inkracht* 428 perkara, dan eksekusi 454 perkara (<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses 06 Mei 2018)

Berdasarkan data tersebut, kasus korupsi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Banyak upaya telah dilakukan pemerintah bersama pihak terkait guna menekan perilaku korupsi yang menggejala ini. Tindakan meminimalisir telah diambil baik dengan cara preventif atau pencegahan melalui tindakan edukasi dan represif berupa penegakan hukum bagi siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dilihat dari dua cara pencegahan tersebut, langkah preventif dinilai paling tepat dilakukan.

Pendidikan sebagai upaya preventif pencegahan korupsi harus di optimalkan karena perannya yang sangat penting khususnya bagi anak-anak usia sekolah dasar. Selama ini pendidikan di Indonesia cenderung hanya berfokus pada ranah kognitif atau pengetahuan saja belum merambah kepada sikap dan perilaku melalui pembiasaan. Padahal fokus pendidikan di Indonesia merupakan pembentukan karakter. Tujuan pendidikan bukan saja untuk membentuk peserta didik untuk pintar, pandai, dan cerdas tetapi juga berorientasi pada pembentukan manusia yang kuat secara kultural-mental. Oleh karenanya pendidikan juga harus berakar kuat pada budaya sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karsa.

Usia sekolah dasar merupakan kategori usia yang efektif untuk menanamkan pendidikan anti korupsi. Hal ini apabila ditinjau menggunakan perspektif sosiologis, anak-anak sedang memasuki apa yang dinamakan sebagai tahap meniru dan bertindak (*play satge dan game stage*). Sehingga dengan asumsi ini penanaman nilai dalam pendidikan antikorupsi akan sangat efektif dilakukan pada anak-anak usia 5-12 tahun atau usia sekolah dasar karena disinilah fase pembentukan jati diri dimulai. Usia 5-12 tahun anak dalam proses pembentukan karakter, sehingga upaya pembiasaan yang intens sangat menentukan karakter anak.

Penanaman pendidikan antikorupsi dapat menggunakan berbagai cara salah satunya adalah melalui kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal merupakan segala bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, ataupun juga wawasan dan adat istiadat atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Keraf, 2002: 103). Oleh karena itu, Yogyakarta sebagai kota dengan warisan budaya yang luhur dan masih memegang teguh adat istiadatnya hingga kini menjadi modal dasar dalam pengembangan penanaman pendidikan antikorupsi. Salah satu dari bentuk kearifan lokal di Yogyakarta yaitu SDN 1 Keputran Yogyakarta.

SDN 1 Keputran Yogyakarta sebagai sekolah dasar yang sudah berdiri selama hampir seratus tahun menyimpan potensi kearifan lokal yang dapat digunakan untuk penanaman pendidikan antikorupsi. Pada awal pendirian sekolah dasar ini merupakan institusi pendidikan yang didirikan oleh Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan khusus bagi keluarga keraton serta pejabat keraton. Bahkan tercatat "*Ngarsa Dalem*" Sri Sultan Hamengku Buana X adalah salah satu lulusan SDN 1 Keputran (arsip alumni SDN 1 Kaputran Yogyakarta). Akan tetapi karena adanya tuntutan perkembangan zaman yang cepat, sekolah dasar ini kemudian dibuka untuk masyarakat umum.

Potensi kearifan lokal di Yogyakarta sangatlah melimpah. Salah satu adalah kesenian. Kesenian di kalangan kraton yang mengandung beberapa nilai tentang kejujuran adalah yaitu Tari Srimpi Pandelori. Sebagai sebuah kesenian, Tari Srimpi Pandelori tentu saja mengandung makna filosofis yang terkandung didalamnya. Melalui pengungkapan makna filosofis dari kesenian yang dikembangkan dan dilestarikan oleh SDN 1 Kaputran ini dapat dijadikan formulasi penanaman pendidikan karakter menggunakan media pembelajaran *Pop Up Book*. Makna filosofis akan dituangkan dengan buku bergambar timbul dengan materi tentang kejujuran yang merupakan bagian dari nilai-nilai antikorupsi.

Media pembelajaran AKSIPOB (Antikorupsi *Pop Up Book*) dirancang untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi berbasis kearifan lokal. Dalam penelitian ini dengan menerapkan AKSIPOB (Antikorupsi *Pop Up Book*) diharapkan para siswa dapat lebih memahami serta lebih mudah dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana perancangan desain media pembelajaran AKSIPOB (Antikorupsi *Pop Up Book*) sebagai media pembelajaran pendidikan antikorupsi berbasis kearifan lokal di SDN 1 Kaputran, Yogyakarta?, 2) Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal Tari Srimpi Pandelori sebagai implementasi antikorupsi di SDN 1 Keputran melalui AKSIPOB (Antikorupsi *Pop Up Book*)?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rancangan AKSIPOB (Antikorupsi *Pop Up Book*) sebagai media pembelajaran antikorupsi di SDN 1 Keputran, Yogyakarta. Selain itu untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal Tari Srimpi Pandelori sebagai implementasi antikorupsi di SDN 1 Keputran, Yogyakarta melalui AKSIPOB (Antikorupsi *Pop Up Book*).

## **Pembahasan**

### **AKSIPOB (Anti korupsi *Pop Up Book*)**

AKSIPOB merupakan sebuah media pembelajaran inovatif, berupa buku timbul (*Pop Up Book*). Media inovatif ini didesain untuk menumbuhkan minat belajar siswa sekolah dasar terutama kaitannya dengan penanaman budaya antikorupsi sejak dini. Buku inovatif ini dirancang tidak menggunakan kalimat perkalimat, namun menggunakan desain gambar yang menarik berisikan nilai-nilai sikap dan perilaku anti korupsi.

Keluaran dari media pembelajaran ini adalah siswa mampu mendefinisikan secara mandiri berkaitan dengan pemahaman siswa mengenai perilaku korupsi yang harus dihindari. Harapannya apabila siswa mampu merekonstruksi sendiri tentang makna korupsi, nilai-nilai anti korupsi tersebut akan terinternalisasikan kedalam diri siswa tersebut.

### **Media Pembelajaran**

Media yang baik juga akan mengaktifkan pembelajar dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong siswa untuk melakukan praktek-praktek dengan benar (Ena, 2014: 2). Sedangkan pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar dan bahan ajar. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Beberapa diantaranya media pembelajaran harus mampu meningkatkan motivasi pembelajar. Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada pembelajar. Selain itu media juga harus merangsang pembelajar mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan rangsangan belajar baru.

### ***Pop Up Book***

Buku *pop up book* merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Sekilas *pop up book* hampir sama dengan origami dimana kedua seni ini mempergunakan teknik melipat kertas (Nancy dan Rondha, 2012: 1) Sekilas *pop up book* hampir sama dengan origami dimana kedua seni ini mempergunakan teknik melipat kertas. Walau demikian origami lebih memfokuskan diri pada menciptakan objek atau benda. Sedangkan *pop up book* lebih cenderung pada pembuatan mekanis kertas yang dapat membuat gambar tampak secara lebih berbeda baik dari sisi perspektif atau dimensi, perubahan bentuk hingga dapat bergerak yang disusun sealami mungkin (Montanaro dalam Masna dkk, 2014:5).

Adapun beberapa teknik *pop up book* yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan *pop up book*. Menurut Dzuanda (2011: 23) jenis-jenis teknik *pop up book* sebagai berikut, 1) *transformations*, yaitu bentuk tampilan yang terdiri dari potongan-potongan pop-up

yang disusun secara *vertical*, 2) *volvelles*, yaitu bentuk tampilan yang menggunakan unsur lingkaran dalam pembuatannya, 3) *peepshow*, yaitu tampilan yang tersusun dari serangkaian tumpukan kertas yang disusun bertumpuk menjadi satu sehingga menciptakan ilusi kedalaman dan perspektif, 4) *pull-tabs*, yaitu sebuah tab kertas geser atau bentuk yang ditarik dan didorong untuk memperlihatkan gerakan gambaran baru, 5) *carousel*, teknik ini didukung dengan tali, pita atau kancing yang apabila dibuka dan dilipat kembali berbentuk benda yang kompleks, 6) *box and cylinder*, adalah gerakan sebuah kubus atau tabung yang bergerak naik dari tengah halaman ketika halaman dibuka.

Dalam penggunaannya, *pop up book* memberikan manfaat kepada si pembaca. Menurut Dzuanda (2011: 5) manfaat *pop up book* yaitu: 1) mengajarkan anak untuk lebih menghargai buku dan memperlakukannya dengan lebih baik, 2) mendekatkan anak dengan orang tua karena *pop up book* memiliki bagian yang halus sehingga memberikan kesempatan untuk orang tua untuk duduk bersama dengan putra-putri mereka dan menikmati cerita (mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak), 3) mengembangkan kreatifitas anak, 4) merangsang imajinasi anak, 5) menambah pengetahuan hingga memberikan penggambaran bentuk suatu benda (pengenalan benda), 6) dapat digunakan sebagai media untuk menanamkan kecintaan anak terhadap membaca.

### **Pendidikan Antikorupsi**

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi (Sumiarti, 2007:8).

Tujuan pendidikan antikorupsi tersebut dapat dipahami tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (Qodir, 2003:13).

Melalui pendidikan antikorupsi, diharapkan individu yang merupakan bagian dari masyarakat berupaya mendorong generasi masa depan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak praktik korupsi. Dengan adanya pendidikan antikorupsi juga diharapkan membentuk kesadaran akan bahaya korupsi bagi negara, kemudian bangkit melawannya dan menjadi pemenang dalam pemberantasan korupsi serta menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan public tersebut dan juga berguna mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi terwujudnya kebenaran hakiki.

Pada penerapannya pendidikan antikorupsi ini dapat dilaksanakan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013. Pada Permendibud No 24 Tahun 2016 telah mengatur mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Pada pelaksanaannya pendidikan antikorupsi dapat diterapkan di SD kelas V mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar berikut :



Tabel 1. KI dan KD Pendidikan Antikorupsi

<b>KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)</b>	<b>KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)</b>
1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta cinta tanah air
<b>KOMPETENSI DASAR</b>	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
1.4 Mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya

Dalam memaknai pendidikan antikorupsi, tentu tidak lepas dari sebuah nilai yang ada di dalamnya. Berikut merupakan nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri siswa.

Tabel 2. Nilai dan Indikator Pendidikan Antikorupsi

<b>No</b>	<b>Nilai</b>	<b>Indikator</b>
1	Jujur	Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten),  Tidak melakukan perbuatan curang,  Tidak berbohong,  Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya
2	Disiplin	Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan
3	Tanggung jawab	Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
4	Kerja keras	Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik,  Terhindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan
5	Sederhana	Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak

### Kearifan Lokal

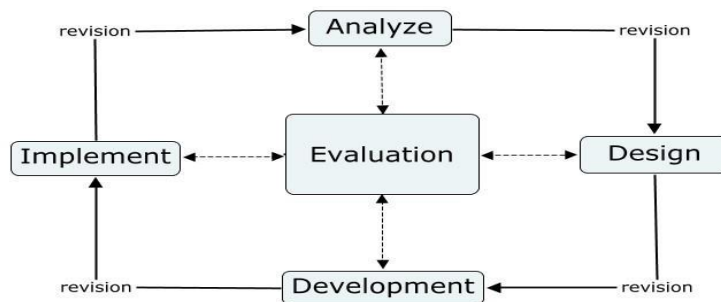
Kearifan lokal atau *local wisdom* merupakan bagian dari tradisi adat istiadat yang tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang masyarakat. Karakteristik daripada kearifan lokal adalah sifatnya yang diturun-temurunkan oleh generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya. Sifatnya yang turun temurun dan berkesinambungan kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai cipta, rasa, dan karsa atau jamak disebut budaya.

Kata *budaya* berasal dari kata *buddhaya* sebagai bentuk jamak dari *buddhi* (Sanskerta) yang berarti 'akal' (Koentjaraningrat, 1974: 80). Sedangkan menurut Tylor, kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan kebiasaankebiasaan lain (Nyoman Kutha Ratna, 2005: 5).

Menurut Koentjaraningrat, wujud kebudayaan ada tiga macam: 1) kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan; 2) kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat; dan 3) benda-benda sebagai karya manusia (Koentjaraningrat, 1974: 83). Kecuali itu adapula pengelompokan kebudayaan menjadi: 1) bahasa; 2) mata pencaharian; 3) organisasi; 4) ilmu pengetahuan; 5) kehidupan beragama; 6) kesenian; dan 7) teknologi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian *Research and Development* (R&D). Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji validitas, kepraktisan dan efektifitas produk. Model pengembangan yang digunakan adalah metode ADDIE terdiri dari 5 langkah 1) Analisis (*Analyze*), 2) Perancangan (*Design*), 3) Pengembangan (*Develop*), 4) Implementasi (*Implement*), dan 5) Evaluasi (*Evaluate*) (Tegeh, 2014: 42). Penelitian ini dimulai dari studi pustaka di mana peneliti mencari referensi terkait data ataupun masalah yang mendukung penelitian selanjutnya yaitu pembuatan media pembelajaran.



### Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui dua tahap. Tahap yang pertama yaitu observasi non-partisipatif, di mana kami sebagai peneliti melakukan studi pustaka dan wawancara dalam pengumpulan data yang mendukung dalam penelitian ini. Kedua, kami melakukan uji coba mengenai AKSIPOB (*Antikorupsi Pop Up Book*) dengan menggunakan instrumen validasi media oleh ahli media pembelajaran baik dari dosen maupun guru.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif. Jenis data yang diambil berupa data kualitatif yang diubah menjadi data kuantitatif dengan skala Likert. Data berupa skor tanggapan dari ahli media dan ahli materi yang diperoleh melalui skala dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

Tabel 3. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

No.	Tahap	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data
1.	Identifikasi nilai-nilai kearifan lokal	FGD, observasi	Deskriptif kualitatif
2.	Merancang isi <i>pop up book</i>	Eksplorasi, wawancara	Analisis isi, deskriptif kualitatif
3.	Pengembangan <i>pop up book</i>	Eksplorasi, wawancara	Analisis isi, deskriptif kualitatif
4.	Uji coba lapangan awal	observasi dan angket	Deskriptif kuantitatif dan kualitatif
5.	Revisi hasil uji coba	Dokumentasi rekaman pembelajaran dan wawancara	Deskriptif kualitatif, analisis isi

### Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan simpulan dan saran penulis menggunakan teknik induksi berdasarkan uraian pada pembahasan. Berdasarkan pembahasan pula, penulis merumuskan beberapa saran untuk menyempurnakan gagasan. Penarikan simpulan dan saran ini dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, sehingga diperoleh hasil kajian yang lengkap dan terstruktur.

### Hasil dan Pembahasan

#### Perancangan Desain AKSIPOB (Antikorupsi *Pop Up Book*)

AKSIPOB ini adalah suatu inovasi media pembelajaran yang memiliki beberapa keunggulan tersendiri. Media ini disusun berdasarkan Kompetensi Dasar Tematik SD Kurikulum 2013. Melalui media ini, peserta didik diharapkan mampu memahami tentang korupsi dan kearifan lokal. Agar nantinya pendidikan antikorupsi dapat terimplementasi dengan baik. Media pembelajaran ini dirancang seperti *pop up book* pada umumnya, namun ada modifikasi tertentu di dalam isi dengan beberapa informasi-informasi mengenai pencegahan korupsi berbasis kearifan lokal.

Startegi perancangan media *pop up book* meliputi ide, ilustrasi animasi, instruksi, dan teknik *pop up book*. Strategi perancangan dalam buku ini sebagai berikut:

### Ide/Konsep

Konsep yang diangkat dalam buku ini adalah “*simple, interest, and fun*”. Dalam perancangan ini menampilkan *simple* atau kesederhanaan dalam penggunaan buku, memberikan pemahaman yang mudah untuk memahami korupsi dan kearifan lokal. Konsep *interest* atau menarik menampilkan sebuah rancangan yang menarik dalam mengilustrasikan gambar dalam AKSIPOB. Sedangkan *fun* atau menyenangkan yaitu dengan menampilkan bahwa mempelajari pencegahan antikorupsi berbasis kearifan lokal sangat menyenangkan dengan adanya komunikasi yang informatif antara buku dengan pembaca.

### Ilustrasi Animasi

Animasi dalam buku ini dirancang dengan menggunakan gambar tokoh wayang Punakawan (Semar, Bagong, Gareng, Petruk), Yudi Latif, dan Pak Ogah. Tokoh tersebut dibuat berdialog mengenai korupsi dan pencegahannya. Ada juga ilustrasi Tari Srimpi Padelori yang menggambarkan kearifan lokal di SD N 1 Keputran, Yogyakarta.

### Instruksi

Instruksi yang terdapat dalam AKSIPOB (Antikorupsi *Pop Up Book*) bersifat persuasif dan komunikatif. Instruksi ini disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dan menggunakan dialog-dialog ringan yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai pencegahan korupsi.

- a. Topik yang dibahas dalam AKSIPOB diantaranya mengenai pengertian korupsi, pengertian kearifan lokal, kearifan lokal di SDN 1 Keputran, profil SDN 1 Keputran, kearifan lokal karawitan dan tari gagrak jogja, nilai kearifan lokal dan korupsi, implementasi nilai kearifan lokal dan korupsi, serta pencegahannya. Berikut contoh ilustrasi tokoh:



Gambar 1. Ilustrasi Tokoh Punakawan

Sumber: <http://punakawan-suroboyo.blogspot.co.id>

- b. Dialog singkat yang memuat tentang materi yang disampaikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang materi yang disampaikan dengan mudah dan ringan untuk dimengerti anak-anak. Contohnya sebagai berikut:

Pak Ogah : “Gong aku sudah membantumu mencari orang buat memilihmu jadi Bupati, Cepek dulu donk”  
 Bagong : “Tidak boleh seperti itu, aku kan hanya minta bantuan buat do’a restu. Itu salah satu perbuatan yang tidak baik”  
 Pak Ogah : “Perbuatan apa ?”  
 Bagong : “Salah satu perbuatan korupsi, nanti kamu di tangkap KPK hlo”  
 Pak Ogah : “Apa itu KPK ?”  
 Bagong : “Komisi Pemberantas Korupsi”

Gambar 3. Dialog Pak Ogah dan Bagong

- c. *Blog note*, berisi tentang catatan-catatan yang informatif untuk diperhatikan dalam memahami segala sesuatu yang ada dalam topik yang dibaca. Selain itu memberikan pesan singkat yang berisikan kesimpulan dari dialog yang berlangsung. Contohnya sebagaiberikut:



Gambar 5. *Blog note* tentang Korupsi

Sumber: <http://indonesiaone.org/>

### Teknik Pop Up Book

Perencanaan buku ini menggunakan *pop up book* sebagai salah satu keunikan serta ciri khas dari buku ini. teknik *pop up book* yang digunakan pada buku ini adalah *V-Folding*, *internal stand*, dan *lift the flap*. *V-Folding* adalah menambahkan panel lipat pada sisi gambar yang akan ditempelkan. Penel ini diletakkan disisi dalam kartu sehingga tidak tampak dari luar. *Internal stand* biasanya digunakan sebagai sandaran kecil, sehingga pada saat dibuka gambarnya akan berdiri. Sedangkan, *Lift the flap* merupakan teknologi yang diciptakan dari material kertas yang mampu menjadi sarana para medis untuk menjelaskan bagaimana susunan anatomi tubuh manusia, sebelum adanya teknologi yang lebih canggih seperti saat ini (Khoirutun dkk, 2014:6).

### Nilai-Nilai dalam Tari Srimpi Pandelori

Tari Srimpi Pandelori merupakan salah satu tari klasik gaya Yogyakarta. Tari ini masih sering diajarkan disanggar tari Pujokusuman Kraton Yogyakarta. Tari Srimpi Pandelorimemiliki 4 unsur penting yang tidak boleh dilupakan karena sangat berhubungan erat dengan identifikasi pribadi agar pada akhirnya mencapai “*keyakinan yang dalam, tingkat ilmu yang dalam, dan pengendalian diri yang dalam.*” Empat unsur penting tersebut yaitu: 1) *Sawiji* merupakan konsentrasi total, akan tetapi tanpa menimbulkan ketegangan jiwa. Konsentrassi total pada unsur *sawiji* bertujuan untuk memusatkan perhatian penari kepada tokoh yang sedang ia bawaikan, 2) *Greged* diartikan sebagai semangat yang membara, akan tetapi semangat yang membara ini tidak boleh dolontarkan begitu saja melainkan harus dikekang supaya nantinya dapat disalurkan dengan wajar, 3) *Sungguh* atau percaya diri bertujuan untuk menampilkan

sikap yang meyakinkan, pasti, dan tidak ragu-ragu atau dalam bahasa Jawanya adalah *mbedhedheg* yang artinya perasaan yang meluap-luap tetapi terkendali, 4) *Ora Mingkuh*, diartikan sebagai tidak gentar menghadapi kesulitan dalam menepati apa yang sudah menjadi kesanggupannya dengan tanggung jawab penuh.

Tahap berikut adalah menerapkan nilai-nilai filosofis *Joged Mataram* dalam membentuk karakter anak, dapat dijabarkan dari prinsip *sawiji*, *greget*, *sungguh* dan *ora mingkuh* yang secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Nilai-Nilai Filosofis *Joged Mataram*

No.	Aspek Joged Mataram	Deskripsi	Prinsip perilaku	Keterkaitan dengan karakter anak
1	<i>Sawiji</i>	Wujud untuk selalu konsentrasi dalam menghadapi segala kegiatan	Pemahaman, konsentrasi, kesungguhan, ketekunan	Orang dituntut untuk konsentrasi penuh dalam menghadapi segala hal agar tidak melakukan kesalahan.
2.	<i>Greget</i>	Ungkapan dinamika dalam kehidupan yang harus dilalui manusia	Kesungguhan, kemauan, ketekunan	Dinamika dalam kehidupan harus menjadi dasar untuk memahami sesuatu.
3.	<i>Sungguh</i>	Kepercayaan diri manusia dalam segala situasi tanpa harus menyombongkan diri	Pemahaman, kesungguhan, ketekunan	Sikap yang harus dikedepankan oleh setiap manusia dalam menghadapi segala situasi. Jangan cepat puas sebelum apa yang diperoleh itu jelas. Jangan merasan bias padahal tidak bias. Jangan merasa lebih baik dari pada teman lainnya.
4.	<i>Ora mingkuh</i>	Sikap pantang menyerah untuk menggapai sebuah cita cita	Kemauan, kesungguhan, ketekunan	Jangan menyerah sebelum dicoba. Mempelajari sesuatu tentu akan menghadapi cobaan.

Tari Srimpi Pandelori merupakan rangkaian gerak simbolik yang mencerminkan keselarasan hidup, antara sang pencipta (Tuhan) dan alam raya yang dikemas dalam rangkaian rekayasa gerak syarat akan makna filosofis. Tari Srimpi Pandelori ini adalah tarian yang diambil dari cerita menak, dalam bentuk peperangan simbolis yang sama-sama kuat dalam artian tidak ada yang menang ataupun kalah. Dalam tari ini berkisah tentang perang tanding antara Dewi Sirtupelaheli dan Dewi Sudarawerti. Keduanya memperebutkan pangeran dari negeri Arab. Dalam peperangan ini tidak ada kekalahan maupun kemenangan sehingga keduanya menjadi istri dari pangeran tersebut.

Nilai Budi Pekerti yang terdapat pada susunan tari Klasik Gaya Yogyakarta khususnya tari Srimpi Pandelori ini adalah mengajarkan manusia untuk selalu berusaha menselaraskan 4 unsur dalam kehidupan. Empat (4) unsur yang dimaksud antara lain adalah : 1) Agama, 2) Masyarakat, 3) Keluarga dan 4) Pendidikan serta Budi Pekerti. Penjabaran dari 4 unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Agama, dalam masyarakat Jawa diartikan sebagai bentuk akumulasi praktik religi masyarakat. Nilai moral yang termuat didalamnya meliputi: sikap hormat-menghormati, toleransi, kerukunan, dan tidak memaksakan kehendak.
2. Masyarakat, masyarakat Jawa menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia serta mengakuinya. Nilai moral yang termuat didalamnya antara lain: kemanusiaan, persamaan drajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, menghargai perbedaan, saling mencintai antar sesama manusia, menghargai sikap tenggang rasa, dan *tepa selira*, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, peduli, membela yang benar, serta bersikap terbuka.
3. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam sistem sosial masyarakat, keluarga memiliki muatan moral antara lain, sebagai berikut: mengembangkan perbuatan yang luhur, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
4. Pendidikan dan Budi Pekerti, pendidikan dan budi pekerti tidak dapat dipisahkan antar keduanya, pendidikan menghidupkan budi pekerti, sedangkan budi pekerti menghiasi pendidikan itu sendiri.

### Kesimpulan

1. AKSIPOB ini adalah suatu inovasi media pembelajaran yang disusun berdasarkan Kompetensi Dasar Tematik SD Kurikulum 2013. Melalui media ini, peserta didik diharapkan mampu memahami tentang korupsi dan kearifan lokal. Strategi perancangan media *pop up book* meliputi ide, ilustrasi animasi, instruksi, dan teknik *pop up book*.
2. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan pada susunan tari Klasik Gaya Yogyakarta khususnya tari Srimpi Pandelori ini adalah mengajarkan manusia untuk selalu berusaha menselaraskan 4 unsur dalam kehidupan. Empat unsur tersebut adalah : 1) Agama, 2) Masyarakat, 3) Keluarga dan 4) Pendidikan serta Budi Pekerti.

### Saran

Diharapkan dengan adanya media pembelajaran AKSIPOB (*Antikorupsi Pop Up Book*) ini, akan hadir media pembelajaran yang lain yang dapat membantu memberikan pemahaman tentang korupsi kepada anak usia dini. Dengan adanya AKSIPOB (*Antikorupsi Pop Up Book*), nantinya diharapkan pemerintah Indonesia, Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah, para guru dan orangtua dapat bersinergi dan saling berkoordinasi dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Dzuanda.2011. "Design Pop Up Child Book Puppet Figures Series Gatotkaca". *Jurnal Library ITS Undergraduate*. Diakses dari <http://library.its.undergraduate.ac.id>. Tanggal 03 Mei 2018
- Ena, Ouda Teda.2001.*Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan Piranti*
- Hubbard, Peter et al. 1983. *A Training Course for TEFL*. Oxford University Press: Oxford

- Khoirotun, Anisah, Achmad Yanu Alif Fianto, dan Abdullah Khoir Riqqoh. 2014. "Perancangan Buku Pop-Up Museum Sangiran sebagai Media Pembelajaran tentang Peninggalan Budaya". *Art Nouveau*. Vol.2, No.1
- Koentjaraningrat. 1974. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru
- Lunak Presentasi. Jurnal: Sanata Dharma
- Masna, Aulia Azmi, Nurrina Dyahpuspita, Roh Dinia Wati. 2014. *Fun Story Pop-Up: Media Mendongeng Berbasis Tematik Integratif Guna Membangun Karakter Generasi Emas 2045*. Diakses dari <http://nec.rema.upi.edu/wp-content/uploads/sites/27/2013/11/10.-FUN-STORY-POP-UP-MEDIA-MENDONGENG-BERBASIS-TEMATIK-INTEGRATIF-GUNA-MEMBANGUN-KARAKTER-GENERASI-EMAS-2045.pdf>. Tanggal 06 Mei 2018
- Nancy, Larson Bluemel. Rhonda, Harris Taylor. 2012. *Pop-Up Books: A Guide for Teachers and Librarians*. California: Santa Barbara
- Qodir, dkk. 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Media Wacana Press
- Ratna, Nyoman Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sonny, Keraf. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sumiarti. 2007. "Pendidikan Anti Korupsi". *Jurnal INSANIASTAIN Purwokerto*. Vol. 12, No. 2



## **Keteladanan Guru Dan Peranannya Dalam Penguatan Karakter Bangsa**

**Ayu Fitriana**

**Moh. Mul Akbar Eta Parera**

Program Studi PPKn, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: ayu.fitriana57@yahoo.com dan etaparera024@gmail.com

### **Abstrak**

Pendidikan merupakan proses dimana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan, dan memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Seorang guru teladan dituntut memiliki empat (4) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogic, kepribadian, social, dan professional (Permendiknas No. 16 Tahun 2007). Adalah suatu hal yang ideal apabila keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja seorang guru. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Keteladan guru dan peranannya dalam penguatan karakter bangsa. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka dengan cara mengkaji sumber-sumber yang relevan terkait dengan mendeskripsikan Keteladan guru dan peranannya dalam penguatan karakter bangsa. Dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa keteladan guru memiliki peran penting dalam penguatan karakter bangsa. Untuk menjadi bangsa yang bermartabat, maka yang harus di dahulukan adalah penguatan karakter bangsa. guru menjadi kunci utama dalam penguatan karakter bangsa, karena pada dasarnya guru adalah sosok yang jati diri yang menjadi panutan bagi para generasi muda.

**Kata kunci:** keteladanan guru, peranan, penguatan karakter bangsa.

### **Pendahuluan**

Pendidikan menjadi salah satu sektor penting dalam kehidupan manusia, untuk menjadikan manusia yang seutuhnya. Ketika seorang anak manusia lahir ke dunia, ia telah dibekali dengan berbagai potensi yang harus diaktualisasikan. Proses aktualisasi potensi secara sengaja inilah yang merupakan proses pendidikan. Proses ini berlangsung sampai seorang anak mencapai kedewasaan (Rukiyati, 2013: 196). Untuk mendidik seorang manusia agar menjadi lebih baik lagi, maka diperlukan seorang guru teladan.

Seorang guru teladan dituntut memiliki empat (4) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogic, kepribadian, social, dan professional (Permendiknas No. 16 Tahun 2007). Jadi adalah suatu hal yang ideal apabila keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja seorang guru.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia pendidikan, sosok seorang guru adalah jati diri yang menjadi panutan, terutama bagi peserta didik. Bahkan sejak dulu, guru dikenal sebagai sosok pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan ilmu, pahlawan kebaikan, pahlawan pendidikan, yang menjalankan amanatnya tanpa pamrih. Guru juga dikenal dengan banyak julukan: makhluk serbabisa, interpreter (penafsir) artis, kawan, warga Negara yang baik, pembangun manusia, pembawa kultur, pioneer, reformer terpercaya, soko guru, bhatar guru, ki ajar, ki guru, sang guru, sang ajar, tuan guru, dan sebagainya. Jika dicermati, keseluruhan gambaran tersebut menegaskan sosok guru sebagai representasi dari kedudukan yang sangat mulia, agung, dan

terhormat; atribut yang lengkap dengan kebaikan dan menjelma figure uswatun hasanah, walau tidak sesempurna rasul (Sagala 2009: 36).

Meskipun pendidikan menjadi wadah untuk memperbaiki generasi muda dan guru menjadi fasilitator dalam dunia pendidikan, namun masih banyak yang harus diperbaiki. Ada tujuh krisis moral di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu: 1) krisis kejujuran; 2) krisis tanggung jawab; 3) tidak berpikir jauh ke depan; 4) krisis disiplin; 5) krisis kebersamaan; 6) krisis keadilan; dan 7) krisis kepedulian. Sebenarnya, masalah-masalah tersebut bukan hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa lain di dunia, Ary Ginanjar Agustian (2008: 8-9). Hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pendidik untuk memperbaiki dan meminimalisir krisis-krisis tersebut melalui pendidikan formal di sekolah dengan cara menanamkan pendidikan karakter sejak dini.

Pendidikan karakter telah menjadi polemik di berbagai negara. Pandangan pro dan kontra mewarnai diskursus pendidikan karakter sejak lama. Sejatinya, pendidikan karakter merupakan bagian esensial yang menjadi tugas sekolah, tetapi selama ini kurang perhatian akibat minimnya perhatian terhadap pendidikan karakter dalam ranah persekolahan (Zubaedi, 2011 : 14)

Salah satu bapak pendiri bangsa, presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahkan menegaskan: “Bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (character building) karena character building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, jaya, serta bermartabat. Kalau pembangunan karakter tidak dilakukan maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli (Asmani, 2009 : 1-2).

## Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka dengan cara mengkaji sumber-sumber yang relevan terkait dengan mendeskripsikan Keteladanan guru dan peranannya dalam penguatan karakter bangsa.

## Hasil Penelitian/Pemikiran

Keteladanan memang menjadi salah satu hal klasik bagi berhasilnya sebuah tujuan pendidikan karakter. Guru sesungguhnya menjadi jiwa bagi pendidikan karakter itu sendiri. Ir. Soekarno di hadapan para guru Taman Siswa dalam sambutan yang berjudul “*Mendjadi Goeroe di Masanja Kebangoenan*” itu berbicara tentang sebuah bangsa yang mendidik dirinya sendiri. Guru yang sifat hakikatnya hijau akan “beranak hijau”, guru yang bersifat hakikatnya hitam akan “beranak hitam”. Saya tidak mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang mengatakan, bahwa guru bisa ‘main komedi’ kepada anak-anak: di muka anak-anak dengan muka yang angker hanya mengasih pelajaran, pengajaran yang termuat dalam *lessontes* saja, tetapi di belakang anak-anak itu berjiwa lain, berjiwa fasis atau anarkis atau anti nasionalis atau komunis, bertindak seperti orang yang tak berani membunuh nyamuk atau bertindak seperti bandit... tidak, guru tidak bisa ‘main komedi’, guru tidak bisa mendurhakai ia punya jiwa sendiri. Guru hanya bisa mengajarkan apa diaitu sebenarnya. Manusia tidak bisa mengajarkan sesuatu sekehendak hatinya, manusia hanya bisa mengajarkan apa yang ada padanya (Doni Koesoema A., 2010: 214).

Di sinilah konsistensi dalam mengajarkan pendidikan karakter tidak sekedar melalui apa yang dikatakan melalui pembelajaran di dalam kelas, melainkan nilai itu juga tampil dalam diri sang guru, dalam kehidupannya yang nyata di luar kelas. Karakter guru menentukan (meskipun tidak selalu) warna kepribadian anak didik. Indikasi adanya keteladanan dalam pendidikan karakter adalah apakah terdapat model peran dalam diri insan pendidik (guru, staf, karyawan, kepala sekolah, direktur, pengurus perpustakaan, dll). Demikian juga, apakah secara kelembagaan/korporat terdapat contoh-contoh dan kebijakan serta perilaku (*institutional policy and behaviour*) yang bisa diteladani oleh peserta didik sehingga apa yang peserta didik pahami tentang nilai-nilai itu memang bukan sesuatu yang jauh dari hidup mereka, melainkan ada dekat

dengan mereka dan mereka dapat menemukan peneguhan dan afirmasi dalam perilaku individu atau lembaga sebagai manifestasi nilai.

Keteladanan guru berupa pembiasaan dalam bentuk berperilaku sehari-hari. Keteladanan guru yang penulis maksud dalam hal ini adalah kepribadian, pembiasaan, dan contoh yang ditampilkan oleh guru dalam berpenampilan, bertutur kata, berperilaku yang baik, disiplin, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, kehidupan sosial, kehidupan keluarga, moral, sikap, kecerdasan intelektual, tampilan fisik, dan keteladanan beribadah. Keteladanan guru sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Keteladanan ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta menyejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya. Oleh karena itu, dalam mengefektifkan dan mensukseskan pendidikan karakter di sekolah, setiap guru diuntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan kompetensi ini akan melandasi atau menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi dan paling penting adalah bagaimana dia menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan karakter dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik.

Pendidikan karakter tidak hanya membutuhkan teori atau konsep semata. Selama ini sudah cukup banyak teori tentang kepribadian, akhlak, budi pekerti, karakter yang telah dirumuskan dan diurai jelas dalam berbagai artikel, buku dan banyak hasil penelitian. Menurut Suwandi yang dikutip oleh Wahid, A (2009) pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah lebih tepat melalui pendekatan modeling, keteladanan (*uswah*) yang dilakukan oleh guru. Karena karakter merupakan perilaku (*behaviour*), bukan pengetahuan sehingga untuk dapat diinternalisasi oleh peserta didik, maka harus diteladankan bukan diajarkan. Jadi dalam mendidik karakter sangat dibutuhkan sosok yang menjadi model. Model yang dapat ditemukan oleh peserta didik di lingkungan sekitarnya.

Semakin dekat model pada peserta didik akan semakin mudah dan efektiflah pendidikan karakter tersebut. Peserta didik butuh contoh nyata, bukan hanya contoh yang tertulis dalam buku apalagi contoh khayalan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Berk yang dikutip oleh Sit, M (2010) perilaku moral diperoleh dengan cara yang sama dengan respon-respon lainnya, yaitu melalui modeling dan penguatan. Lewat pembelajaran modeling akan terjadi internalisasi berbagai perilaku moral, prososial dan aturanaturan lainnya untuk tindakan yang baik. Demikian pula menurut *Social Learning Theory* dalam Bandura yang dikutip oleh Hadiwinarto, perilaku manusia diperoleh melalui cara pengamatan model, dari mengamati orang lain, membentuk ide dan perilaku-perilaku baru, dan akhirnya digunakan sebagai arahan untuk beraksi. Sebab seseorang dapat belajar dari contoh apa yang dikerjakan orang lain, sekurang-kurangnya mendekati bentuk perilaku orang lain, dan terhindar dari kesalahan yang dilakukan orang lain.

Siapakah model terdekat bagi peserta didik. Tentu saja selain orang tua yang dewasa ini semakin berjarak dengan anaknya dan masyarakat yang semakin acuh tak acuh dengan lingkungan sekitarnya serta media yang semakin merusak, gurulah yang akhirnya diharapkan mampu menjadi model bagi peserta didik. Keefektifan guru sebagai model sebenarnya sudah teruji sepanjang zaman. Sering kita temukan dalam kehidupan nyata seorang anak lebih memercayai omongan gurunya dari pada orang tuanya, terutama anak-anak yang baru mengenal dunia pendidikan di luar rumah. Sebagian besar anak sangat senang terhadap gurunya dan mau mendengarkan serta mematuhi pesan-pesan dan nasehat yang diberikan gurunya.

## Kesimpulan

Atas dasar uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Pendidikan karakter merupakan suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai pondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, Pendidikan karakter tidak hanya membutuhkan teori atau konsep semata. Ketiga, Karakter merupakan perilaku (*behaviour*), bukan pengetahuan sehingga untuk dapat diinternalisasi oleh peserta didik, maka harus diteladankan bukan hanya diajarkan; Keempat, Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah lebih tepat melalui pendekatan modeling, keteladanan (*uswah*) yang dilakukan oleh guru. Kelima, Keteladanan guru perlu diciptakan karena gurulah sebagai tokoh sentral yang setiap saat menjadi perhatian peserta didik di sekolah.

Guru harus benar-benar menjadi teladan bukan hanya sebatas penyampai informasi ilmu pengetahuan, melainkan lebih dari itu, meliputi kegiatan mentransfer kepribadian yang berbudi pekerti luhur guna membentuk siswa berkarakter. Keenam, Mendidik karakter bukan hanya menjadi tugas sebagian guru tertentu saja seperti guru PKn, guru Akidah Akhlak, guru Bimbingan Konseling ataupun guru Agama. Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab seluruh guru mata pelajaran. Ketujuh, Bekal atau modal tambahan (selain kompetensi utama sesuai UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005) yang harus dimiliki guru sebagai contoh teladan dalam mendidik karakter bagi peserta didiknya antara lain sebagai berikut: 1) Guru harus mengetahui karakter apa saja yang harus dimiliki peserta didik; 2) Guru harus meneladani teladan seluruh alam yaitu Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan meneladani Rasulullah, guru akan menjadi teladan sesungguhnya bagi peserta didik; 3) Guru harus benar-benar memahami prinsip-prinsip keteladanan. Mulailah dengan *ibda' binafsih*, yaitu dari diri sendiri. Ingat filosofi “jari menunjuk” dan filosofi “gayung mandi”; 4) Guru harus mengetahui tahapan perkembangan perilaku anak agar dapat memilih metode yang tepat untuk mendidik karakter peserta didiknya; 5) Guru harus mengetahui tahapan mendidik karakter. Sekurang-kurangnya dalam mendidik karakter peserta didik harus melalui dan mencapai tiga tahapan pembelajaran (3P) yaitu: pemikiran, perasaan dan perbuatan; 6) Guru harus mengetahui bagaimana mengajarkan pendidikan karakter kepada siswa.

## Daftar Pustaka

- Rukiyati. (2013). Urgensi pendidikan karakter holistik komprehensif di Indonesia. *Jurnal pendidikan karakter*, 3 (2), 196-203.
- Sagala, S. 2009. *Konsep Dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Ary Ginanjar Agustian. 2008. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosional dan Spiritual*. Jakarta: penerbit Arga
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2009. *Tips Menjadi Guru Yang Efektif, Kreatif, dan Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Wahid, A., 2009. *Budi Pekerti Harus Diteladankan, Bukan Diajarkan*. <http://www.tribunjabar.co.id>
- Sit, Masganti., 2010. *Optimalisasi Kompetensi Moral Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Vol.16 No. 1 Januari 2010. Jakarta: Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional.

## Peningkatan Keterampilan Sosial Siswa Kelas VIII-C dengan Menerapkan Penyuluhan Keliling Berbasis Proyek pada Pembelajaran IPS

**Gede Ardiantara, S.Pd. Gr.**

SMP Astra Makmur Jaya, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat,  
gedoardiantara10@gmail.com

### Abstrak

Tujuan dari penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas VIII-C SMP Astra Makmur Jaya, Sulawesi Barat. Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Pengumpulan data dilaksanakan dengan metode angket, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. PTK ini dikatakan berhasil apabila telah mencapai kategori baik, minimal 76%. Saat pratindakan, keterampilan sosial siswa Kelas VIII-C masuk kategori kurang (57%). Setelah dilakukan tindakan siklus I meningkat menjadi kategori cukup (74%). Pada Siklus I, siswa membuat *flipchart* terbaiknya. Siswa yang awalnya kesulitan dalam membangun hubungan dengan temannya, menjadi kompak. Setiap kelompok melakukan penyuluhan tiga (3) kali. Peserta tiap penyuluhan minimal sepuluh (10) orang. Siswa yang awalnya tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya menjadi peduli. Siswa yang pendiam, mulai berani bertanya atau berpendapat.

Pada tindakan siklus II, siswa membuat poster dengan bersemangat. Siswa menemukan trik-trik mengundang peserta. Siswa semakin berani tampil di hadapan pesertanya. Keterampilan sosial siswa Kelas VIII-C menjadi 86% dan itu berarti memasuki kategori sangat baik dan mencapai kriteria keberhasilan. Untuk itu, tindakan dihentikan sampai siklus II. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan penyuluhan keliling berbasis proyek pada pembelajaran IPS dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa Kelas VIII-C.

**Kata kunci:** keterampilan sosial, penyuluhan keliling, IPS Terpadu, model *Project Based Learning*

### Pendahuluan

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan, dan terampil mengatasi masalah yang ada. Itu tidak mudah dicapai mengingat pembelajaran selama ini terkesan berlangsung dengan cara yang kurang kreatif. Siswa jarang dilibatkan aktif dan tidak memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan sosialnya selama pembelajaran.

Keterampilan sosial yang tidak diasah menyebabkan siswa tidak memiliki keberanian mengungkapkan setiap permasalahan yang dihadapi, bahkan siswa kesulitan menemukan solusi dari persoalan yang ada. Di samping itu, kemampuan siswa untuk berkomunikasi efektif, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat, memberi dan menerima kritik/saran, dan sikap menghargai diri sendiri dan orang lain akan jauh dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Keberadaan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 menandakan betapa pentingnya peran pendidikan. Indonesia dapat terus berkembang apabila kualitas sumber daya manusia terus-menerus dikembangkan lewat pendidikan. Namun proses pembelajaran yang kurang memperhatikan keterampilan sosial siswa justru akan menghambat terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas unggul. *Gwendolyn Cartledge* dan *Milburn* (dalam Rahayuningtyas, 2013) mengatakan ada empat aspek yang terkait dengan keterampilan sosial anak, yaitu: 1) perilaku terhadap lingkungan, 2) perilaku interpersonal, 3) perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, dan 4) perilaku yang berhubungan dengan tugas.

Berdasarkan observasi pendahuluan, peneliti menemukan sebagian besar siswa belum berani berbicara di depan kelas. Pada laci meja dan lantai ditemukan sampah. Ketika menemui kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan rumah, siswa diam. Pernah terjadi keributan di kelas akibat ada siswa yang bermaksud meminjam barang tetapi tidak minta izin. Singkatnya, keterampilan sosial siswa kelas VIII-C masih kurang. Hasil pengamatan dari pratindakan dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Keterampilan Sosial Siswa Kelas VIII-C pada Pratindakan**

No.	Rata-rata	Kategori
1	57%	Kurang

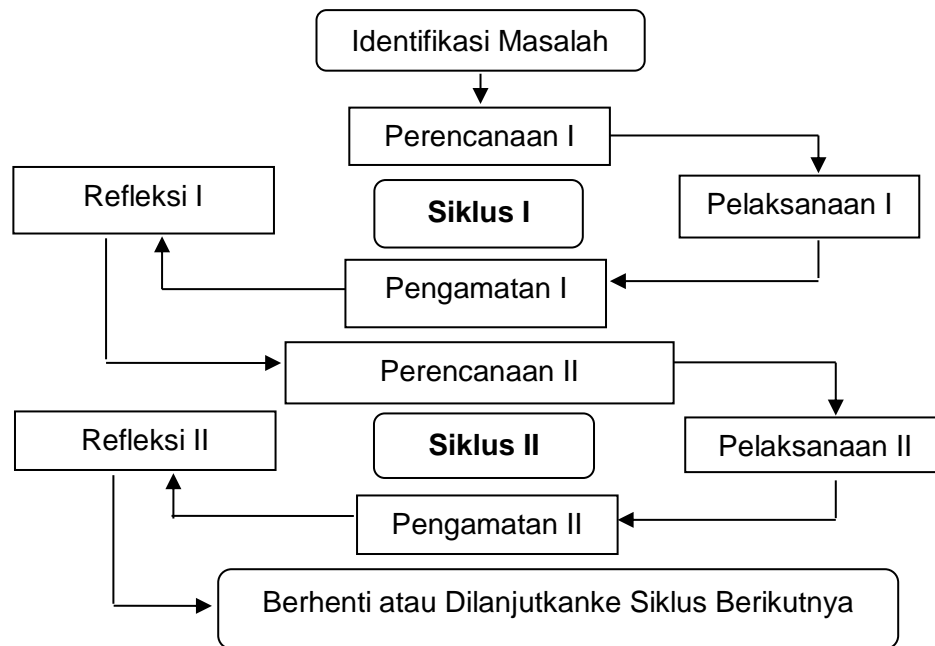
Sumber: Data primer yang sudah diolah

Dari tabel di atas diketahui keterampilan sosial siswa kelas VIII-C belum mencapai kategori baik. Untuk meningkatkan keterampilan sosial maka sangatlah tepat guru menerapkan penyuluhan keliling berbasis proyek (Model Pembelajaran *Project Based Learning*).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Keterampilan Sosial Siswa Kelas VIII-C dengan Menerapkan Penyuluhan Keliling Berbasis Proyek pada Pembelajaran IPS”. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peningkatan keterampilan sosial siswa Kelas VIII-C dengan menerapkan penyuluhan keliling berbasis proyek pada pembelajaran IPS. PTK bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan sosial siswa Kelas VIII-C dengan menerapkan penyuluhan keliling berbasis proyek pada pembelajaran IPS.

#### **Metode**

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan di Kelas VIII-C SMP Astra Makmur Jaya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas VIII-C dan obyek adalah keterampilan sosial. PTK memakai materi pengendalian sosial. Peneliti menggunakan siklus penelitian bertahap dengan jumlah siklus sesuai keperluan. Tahapan setiap siklus diadaptasi dari Model Kemmis dan Mc.Taggart (dalam Rahayuningtyas, 2013) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi terhadap tindakan. Alur pelaksanaan siklus penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1. Alur Pelaksanaan Siklus Penelitian Tindakan Kelas**  
(Diadaptasi dari Kemmis dan Taggart, dalam Rahayuningtyas, 2013)

Teknik pengumpulan data melalui metode angket, observasi, dan dokumentasi. Metode angket untuk mengukur keterampilan sosial siswa dengan menggunakan lembar angket. Metode observasi untuk mengamati perilaku guru dan siswa selama proses pembelajaran IPS berlangsung dengan mengisi lembar observasi. Data lain diperoleh melalui dokumentasi.

Analisis data kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis lembar observasi penerapan Model Pembelajaran *Project Based Learning*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif untuk mengukur angket keterampilan siswa melalui langkah-langkah berikut ini.

- 1) mencari skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan,
- 2) menjumlah skor mentah yang diperoleh siswa, dan
- 3) mencari persentase hasil skala keterampilan sosial siswa dengan rumus:

$$NP = R/SM \times 100$$

Data yang berwujud angka hasil perhitungan dan pengukuran diproses dengan cara dijumlah dan dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan sehingga diperoleh persentase. Berdasarkan pendapat tersebut, hasil dan perhitungan persentase penelitian ini, peneliti menafsirkan ke dalam kriteria sebagai berikut.

**Tabel 2. Kriteria Keberhasilan Tindakan**

No	Kriteria	Persentase
1	Sangat baik	86% - 100%
2	Baik	76% - 85%
3	Cukup	60% - 75%
4	Kurang	55% - 59%
5	Kurang sekali	≤ 54%

Sumber: Diadaptasi dari Purwanto (dalam Rahayuningtyas, 2013)

Keberhasilan PTK ini dilihat dari adanya peningkatan keterampilan sosial siswa dari setiap siklus tindakan. Tindakan dikatakan berhasil apabila telah mencapai kategori baik, yakni minimal 76%.

## Hasil Penelitian

Siklus I memiliki empat (4) tahapan. **Pertama**, perencanaan Siklus I. Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, instrumen penilaian, angket dan instrumen observasi. **Kedua**, pelaksanaan Siklus I. Berikut adalah penjelasan pelaksanaan tindakan tersebut.

### 1. Pertemuan Kesatu

Pertemuan kesatu terdiri dari tiga (3) kegiatan. (1) Kegiatan pendahuluan diisi dengan pengucapan salam pembuka, doa, presensi, *ice breaking*, apersepsi terkait materi, penyampaian materi pokok, tujuan pembelajaran, aspek penilaian, dan langkah pembelajaran dalam Model Pembelajaran *Project Based Learning*.

- a) Guru meminta siswa membuat proyek *flipchart* pengendalian sosial.
- b) Kelompok menyusun rancangan *flipchart* yang akan dibuat.
- c) Kelompok menyusun jadwal pembuatan proyek *flipchart* sampai pelaksanaan penyuluhan keliling.
- d) Kelompok membuat proyek *flipchart* pengendalian sosial.

(2) Kegiatan inti. Pada fase pertama (menentukan proyek), guru menunjukkan gambar terkait pengendalian sosial. Dari gambar tersebut kemudian menjadi topik bagi kelompok, seperti masalah perkelahian antar pelajar, penangkapan ikan dengan racun, dan pelanggaran berlalu lintas. Guru meminta siswa membuat *flipchart* berisikan topik tersebut. Pada fase kedua (merancang langkah penyelesaian proyek), guru mengorganisir siswa ke dalam enam (6) kelompok. Guru memfasilitasi kelompok untuk menentukan ketua dan sekretaris kelompok. Guru dan siswa menyepakati aturan main dalam proses penyelesaian proyek. Siswa mulai aktif berpendapat dan berdiskusi dalam kelompoknya.

Pada fase ketiga (menyusun jadwal pelaksanaan proyek), guru memfasilitasi dan mendatangi kelompok untuk membimbing menyusun jadwal. Setiap anggota kelompok harus berperan aktif dengan tugas yang telah dibagi. Pada fase keempat (menyelesaikan proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru), guru mengarahkan siswa bertanggung jawab atas rencana yang telah dibuat. Guru terus memompa semangat siswa. Saat mengerjakan *flipchart*, jika ada sampah, mereka langsung membuangnya ke tempat sampah. Ketika menemui kendala, siswa berani bertanya, guru pun membimbing dengan penuh empati hingga proyeknya selesai. Siswa yang awalnya pendiam sekarang sudah mulai ikut terlibat secara aktif.

(3) Penutup. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, guru memberikan motivasi agar mampu menyelesaikan proyek dengan baik. Siswa agar mengikuti jadwal yang telah dibuat juga menjadi pesan penutup guru dalam pertemuan kesatu Siklus I ini. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam penutup.

### 2. Pertemuan Kedua

Fase pertama pada pertemuan kedua adalah menyusun laporan dan presentasi/publikasi hasil proyek. Guru mengarahkan siswa untuk mengumpulkan *flipchart*. Sebelum presentasi *flipchart* dimulai, guru menghimbau siswa untuk selalu menghargai dan menghormati. Masih ada siswa yang malu-malu dan takut berbicara. Saat presentasi ada yang saling melempar tugas kepada teman. Sudah nampak siswa yang berani bertanya kepada kelompok penyaji. Ada juga siswa yang memberikan saran terhadap *flipchart* dan penampilan kelompok penyaji.



Fase kedua adalah mengevaluasi proses dan hasil proyek. Guru menyampaikan kritik dan saran untuk penyempurnaan *flipchart* dan penampilan siswa. Siswa diharapkan untuk tetap menjaga lingkungan. Guru menghimbau siswa untuk memperbanyak latihan. Guru terus memotivasi siswa untuk berani berbicara di depan umum. Guru dan siswa mengambil simpulan bersama-sama.

Setelah *flipchart* diberikan kritik dan saran, kelompok dipersilahkan melakukan penyuluhan keliling. Setiap kelompok minimal tiga (3) kali penyuluhan keliling. Peserta minimal setiap penyuluhan adalah sepuluh (10) orang. Setiap penyuluhan peserta mengisi daftar hadir. Penyuluhan keliling bisa dilakukan saat jam istirahat atau pada sore hari. Untuk tempat penyuluhan keliling, guru membebaskan pada kelompok. Kelompok diwajibkan untuk mendokumentasikan penyuluhan dalam bentuk foto dan video.

Setelah diperoleh kesimpulan dari materi yang telah dibahas, guru melakukan penilaian pengetahuan siswa. Evaluasi pengetahuan diberikan dalam bentuk soal tertulis. Kegiatan pembelajaran ditutup doa dan salam penutup.

Ketiga, Pengamatan Siklus I. Hasil pengamatan yang dilakukan untuk keterampilan sosial siswa dapat dilihat setiap pertemuan per siklus. Hasil pengamatan dari angket yang diisi siswa dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Keterampilan Sosial Siswa Kelas VIII-C pada Siklus I**

No.	Rata-rata	Kategori
1.	74%	Cukup

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Dari tabel 3 diketahui bahwa keterampilan sosial siswa Kelas VIII-C dengan menerapkan penyuluhan keliling berbasis proyek telah mencapai kategori cukup.

**Keempat**, hasil refleksi siklus I adalah sebagai 1) Ada beberapa kelompok yang tidak membersihkan tempat bekerja, 2) Ada siswa suka mengganggu temannya, 3) Masih ada yang belum berani berbicara atau bertanya, 4) Hasil tindakan pada Siklus I telah mencapai kategori cukup, 6) Siswa masih kesulitan dalam mengundang peserta penyuluhan, 7) Ada anggota kelompok yang sulit diajak melakukan penyuluhan keliling dengan berbagai alasan. Dari refleksi di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan tindakan Siklus II.

## Pelaksanaan Tindakan Siklus II

Dengan mempertimbangkan pengamatan dan hasil refleksi pada Siklus I maka tindakan Siklus II dilakukan. Tahapan dalam Siklus II ini sama dengan tahapan pada Siklus I. **Pertama**, perencanaan Siklus II. Dengan berpedoman pada refleksi Siklus I, peneliti melakukan perbaikan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. **Kedua**, Siklus II dilaksanakan dalam dua (2) kali pertemuan. Materi dalam Siklus II adalah pengendalian sosial dengan topik masalah penyalahgunaan narkoba, pencemaran lingkungan perairan, dan *Illegal Logging*.

. Pelaksanaan tindakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Pertemuan Kesatu

Pertemuan kesatu terdiri dari tiga (3) kegiatan. (1) Kegiatan pendahuluan diisi dengan pengucapan salam pembuka, doa, presensi, *ice breaking*, apersepsi terkait materi, penyampaian materi pokok, tujuan pembelajaran, aspek penilaian, dan langkah pembelajaran dalam Model Pembelajaran *Project Based Learning*.

- Guru meminta siswa membuat proyek poster pengendalian sosial.
- Kelompok menyusun rancangan poster yang akan dibuat.
- Kelompok menyusun jadwal pembuatan poster sampai pelaksanaan penyuluhan keliling.

d) Kelompok membuat proyek poster pengendalian sosial.

(2) Kegiatan inti. Pada fase pertama (menentukan proyek), guru menunjukkan gambar sebagai topik yaitu penyalahgunaan narkoba, pencemaran lingkungan perairan, dan *Illegal Logging*. Guru meminta siswa membuat poster yang berisikan topik tersebut. Pada fase kedua (merancang langkah penyelesaian proyek), Guru dan siswa menyepakati aturan main. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mengumpulkan informasi sehingga mempermudah perancangan proyek. Siswa mulai merancang poster.

Pada fase ketiga (menyusun jadwal pelaksanaan proyek), guru mendatangi kelompok untuk membimbing menyusun jadwal. Pada fase keempat (menyelesaikan proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru), guru mengarahkan siswa bertanggung jawab. Kepedulian siswa terhadap kebersihan sudah lebih baik.

Hampir seluruh siswa semakin berani bertanya dengan temannya atau kepada guru jika ada hal-hal yang belum dipahami Mereka sudah melibatkan diri dengan aktif. Siswa terlihat sudah semakin bertanggung jawab atas tugasnya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran, guru memberikan motivasi agar mampu menyelesaikan proyek dengan baik. Siswa agar mengikuti jadwal yang telah dibuat juga menjadi pesan penutup guru dalam pertemuan kesatu Siklus I ini. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam penutup.

## 2. Pertemuan Kedua

Fase pertama pada pertemuan kedua adalah menyusun laporan dan presentasi/publikasi hasil proyek. Guru mengarahkan siswa untuk mengumpulkan poster. Pada siklus II sudah lebih berani tampil. Siswa sudah mulai memberikan pujian terhadap karya temannya. Suasana diskusi saat presentasi semakin ramai oleh siswa yang bertanya ataupun yang memberikan saran. Kelompok yang presentasi pun sudah semakin mampu mengondisikan suasana kelas.

Fase kedua adalah mengevaluasi proses dan hasil proyek. Guru menyampaikan kritik dan saran untuk penyempurnaan poster dan penampilan siswa. Siswa disarankan berlatih berbicara di depan cermin dan memperbanyak latihan presentasi di depan teman-teman kelompoknya. Guru dan siswa mengambil simpulan bersama-sama. Setelah poster dievaluasi, kelompok dipersilahkan melakukan penyuluhan keliling dengan ketentuan sama seperti Siklus I.

(3) Setelah diperoleh kesimpulan dari materi yang telah dibahas, guru melakukan penilaian pengetahuan siswa. Evaluasi pengetahuan diberikan dalam bentuk soal tertulis. Guru menyampaikan topik untuk pertemuan selanjutnya, yaitu masalah penyalahgunaan narkoba, pencemaran lingkungan perairan, dan *Illegal Logging*. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa dan salam penutup.

Ketiga, Pengamatan Siklus II. Hasil pengamatan yang dilakukan untuk keterampilan sosial siswa dapat dilihat setiap pertemuan per siklus. Hasil pengamatan dari angket yang diisi siswa dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Keterampilan Sosial Siswa Kelas VIII-C pada Siklus II**

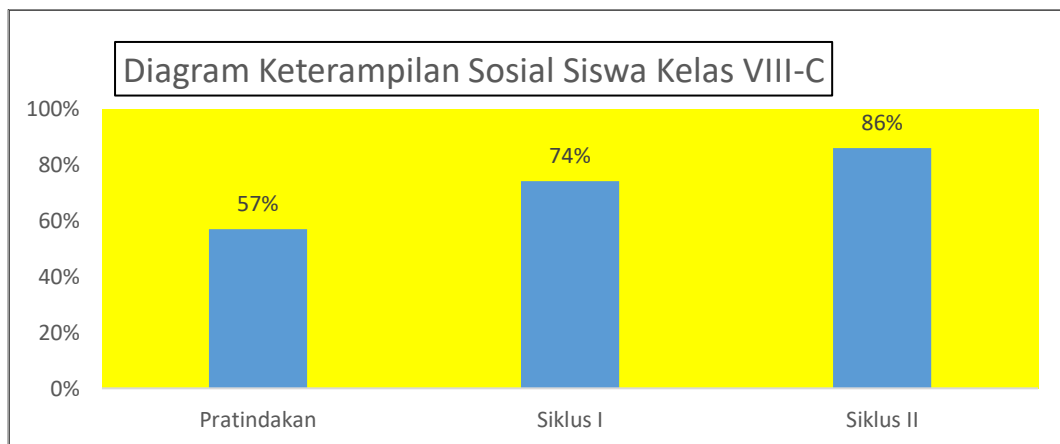
No.	Rata-rata	Kategori
1.	86%	Sangat Baik

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Dari tabel 4 diketahui bahwa keterampilan sosial siswa Kelas VIII-C dengan menerapkan penyuluhan keliling berbasis proyek pada Siklus II telah mencapai kategori sangat baik. **Keempat**, hasil refleksi siklus II adalah (1) Siswa semakin peduli terhadap

kebersihan lingkungan, (2) Siswa semakin berani berbicara di depan umum, (3) Hasil tindakan pada Siklus II telah mencapai kategori sangat baik, (4) Siswa telah menemukan cara yang efektif dalam mengundang dan mengajak peserta penyuluhan, (5) Siswa semakin terampil mengelola peserta penyuluhan, (6) Kelompok semakin kompak. Dengan melihat hasil refleksi Siklus II, peneliti mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi peningkatan keterampilan sosial siswa pada setiap siklus dan pada siklus II telah mencapai kriteria minimal yakni 76%. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk tidak melanjutkan ke Siklus III.

Secara utuh, hasil penerapan penyuluhan keliling berbasis proyek pada pembelajaran IPS untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas VIII-C dapat dilihat pada diagram dibawah ini.



**Gambar 2. Diagram Keterampilan Sosial Siswa Kelas VIII-C**

Dari gambar 2 diketahui bahwa telah terjadi peningkatan keterampilan sosial siswa kelas VIII-C dengan menerapkan penyuluhan keliling berbasis proyek pada pembelajaran IPS. Saat pratindakan keterampilan sosial siswa Kelas VIII-C berada pada kategori kurang (57%). Setelah dilakukan tindakan siklus I menjadi kategori cukup (74%). Ternyata pada tindakan siklus II, keterampilan sosial siswa Kelas VIII-C menjadi 86% dan itu berarti memasuki kategori sangat baik.

### Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial siswa kelas VIII-C dapat ditingkatkan dengan menerapkan penyuluhan keliling berbasis proyek pada pembelajaran IPS. Penyuluhan keliling ini sangat baik untuk terus diterapkan. Produk atau alat bantu yang digunakan untuk penyuluhan keliling bisa dibuat lebih menarik dan efektif.

### Daftar Pustaka

- Izzati, Nurma. 2014. "Pengaruh Keterampilan Sosial terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa. *Jurnal*. Jurnal Eduksos Vol III No 1, Januari-Juni 2014
- Nasution, Yusraini. 2013. Penerapan Model Pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dengan Media Berbasis Komputer untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kimia dan Karakter Rasa Ingin Tahu serta Karakter Menghargai Prestasi Peserta didik pada Materi Asam Basa. *Tesis*. Program Studi Pendidikan Kimia Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

- Rahayuningtyas, Dian Ikawati. 2013. "Peningkatan Keterampilan Sosial dengan menggunakan Metode Sosiodrama dalam Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas VB SD Negeri Panambangan Kecamatan Cilongok". *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta
- Rasmawan, Rahmat. 2013. "Keterampilan Proses Sains, Keterampilan Sosial, Keterampilan Psikomotorik, serta Penguasaan Konsep Siswa SMA melalui Pembelajaran Berbasis Inkuiri". *Jurnal*. Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA Vol. 4. No. 2. Januari 2013:11-21
- Sari, Dinarita Murtika. 2014. "Upaya Meningkatkan Keterampilan Sosial dan Hasil Belajar Siswa dengan Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Chips pada Mata Pelajaran IPA Kelas V SD Kristen 03 Eben Haezer Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014". *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Sulistiyarsi, Ani. 2012 Penerapan Strategi Pembelajaran Berbasis Projek dalam Membuat Alat Peraga IPA untuk Meningkatkan Prestasi Belajar dan Keaktifan Peserta didik Kelas IV SDN Cermo 01 Kare Madiun. *Jurnal*.

## **Profesionalisme Guru dan Tantangan Global sebagai Akselerasi Pendidikan Abad 21**

**Yeni Agus Tri Puryanti**

Universitas Negeri Yogyakarta

Email: yeniagustriquiryanti@yahoo.com

### **Abstrak**

Profesionalisme guru sebagai pendidik yang merupakan ukuran maju atau mundurnya peserta didik. Tantangan globalisasi saat ini Guru diharapkan dapat mengubah sumber daya manusia yang berkualitas. Guru dituntut mampu berkreasi dan berinovasi untuk menjawab tantangan pendidikan di abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 ini akan menjadi tantangan guru dalam meningkatkan keprofesionalisme untuk menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global. Guru hendaknya mampu berkomunikasi dan beradaptasi mengikuti tantangan global sebagai akselerasi dalam pendidikan abad ke-21. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan global guru berperan penting. Tantangan di era globalisasi abad ke-21, menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia. Guru diharapkan memiliki identitas keprofesionalan. Identitas profesionalisme guru sangat penting karena merupakan syarat untuk menghadapi tantangan global abad ke-21. Era Globalisasi mengubah sifat pekerjaan amatirisme menuju profesionalisme yang kinerjanya didasarkan pada Produktivitas, inovasi, penguasaan ilmu pengetahuan, kreativitas transformasi budaya menjadi budaya dinamis, dan kualitas kinerja dan kerja yang kompetitif serta berdaya saing global.

**Kata Kunci:** profesionalisme guru, tantangan global, akselerasi pendidikan abad ke-21

### **Pendahuluan**

Di era globalisasi saat ini, Indonesia harus mampu meningkatkan mutu pendidikan, sehingga tidak kalah bersaing dengan negara lain. Negara kita harus mencetak orang-orang yang berjiwa mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat dunia. Saat ini, Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat berfikir secara efektif, efisien dan juga produktif. Hal tersebut dapat diwujudkan jika kita mempunyai tenaga pendidik yang handal dan mampu mencetak generasi bangsa yang pintar dan bermoral.

Persoalan globalisasi tidak terlepas dari keberadaan lembaga pendidikan selaku pencetak Sumber Daya Manusia (SDM). Tantangan globalisasi yang harus diantisipasi pendidik dengan pentingnya mengedepankan profesionalisme. Munculnya kategori negara berkembang (developing countries) dan negara-negara maju (developed countries), pada dasarnya sebagai konsekuensi atas perbedaan tingkat kualitas SDM untuk keperluan modernisasi.

Pada abad ke-21 dibutuhkan persiapan yang matang dan mantap baik konsep maupun penerapan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul. Guru abad ke-21 dituntut tidak hanya mampu mengajar dan mengelola kegiatan kelas dengan efektif, namun juga dituntut

untuk mampu membangun hubungan yang efektif dengan siswa dan komunitas sekolah, menggunakan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu pengajaran, serta melakukan refleksi dan perbaikan praktek pembelajarannya secara terus menerus (Darling, 2006). Guru profesional abad ke-21 adalah guru yang terampil dalam pengajaran, mampu membangun dan mengembangkan hubungan antara guru dan sekolah dengan komunitas yang luas, dan seorang pembelajar sekaligus agen perubahan di sekolah (Hargreaves, 1997, 2000)

Guru adalah tokoh sentral dalam bidang pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Guru adalah fasilitator dan mediator bagi peserta didik untuk dapat belajar secara efektif dan efisien. Karena itu guru harus berperan mendorong peserta didik untuk belajar. Untuk dapat melakukan peran tersebut guru dituntut menjadi tenaga profesional yang mempunyai kemampuan pedagogis, kemampuan pribadi, dan kemampuan sosial sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-undang.

Guru sebagai tenaga profesional harus memenuhi berbagai persyaratan kompetensi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, sementara kondisi riil di lapangan masih sangat memprihatinkan, baik secara kuantitas, kualitas maupun profesionalitas guru. Persoalan ini masih ditambah adanya berbagai tantangan ke depan yang masih kompleks di era global ini. Dengan demikian profesionalisme guru sangat diperlukan dalam menghadapi tantang globalisasi untuk menciptakan akselerasi pendidikan di abad ke 21.

### **Kajian Pemikiran Profesionalisme Guru**

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu.

Guru dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada ketentuan umum pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah”. Dengan demikian tugas utama guru dalam melaksanakan profesinya terdiri dari mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan.

H.A.R Tilar mengungkapkan bahwa orang yang professional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang professional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang professional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya dapat mengikuti perkembangan zaman.

### **Tantangan Globalisasi**

Guru pada abad ini dan abad selanjutnya ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Pembelajaran di kelas dan pengelolaan kelas, pada abad ini harus disesuaikan dengan standar kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain kompetensi, integritas juga menjadi kunci bagi guru dalam memberikan teladan kepada peserta didik dan menjawab tantangan di era globalisasi. Guru profesional selain memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi juga harus mampu memperbaiki lingkungan sekolah, sekaligus menciptakan peserta didik yang berintegritas dan pemenang di masa depan.

Globalisasi menawarkan paradigma baru dalam pendidikan. Munculnya situasi global tersebut disamping menimbulkan dampak positif terutama bagi pengembangan profesionalitas guru, juga berdampak negatif yang sudah sangat sulit dikontrol. Berbagai peralatan teknologi kian membuka peluang atau menambah subur bagi terciptanya moral yang buruk. Hal yang demikian dirasakan lebih menarik lagi bagi kalangan generasi muda yang serba ingin tahu.

Bersadarkan ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan globalisasi erat kaitannya dengan keprofesionalisme guru dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi baru untuk pendidikan.

### **Tujuan Pendidikan Nasional Abad ke-21**

Pendidikan adalah kemandirian. maka, tujuan pendidikan nasional Abad ke-21 dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendidikan Nasional Abad ke-21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. (BSNP, 2010: 39).

Globalisasi akan menjadi tantangan tersendiri bagi para guru, terlebih yang telah memperoleh legalitas pengakuan akan profesionalitas keguruannya, yaitu sertifikat guru. Apabila guru tidak siap menghadapinya maka akan diterjang, dan jika tidak mampu menyesuaikan diri maka akan menjadi orang tidak berguna dan hanya akan menjadi penonton.

Bersadarkan penjelasan di atas dapat ditarik simpulan yaitu tantangan globalisasi bagi guru sangat berpengaruh kepada keprofesionalan dan guru di harapan dapat menghadapi tantangan globalisasi.

### **Akselerasi Pendidikan Abad ke-21**

Gambaran tentang tantangan guru yang profesional di masa depan, perlu melihat karakteristik masyarakat di era globalisasi dikaitkan dengan peran pendidikan. Menurut Tilaar (1999), setidaknya terdapat tiga karakteristik masyarakat di abad 21, yaitu: (1) masyarakat teknologi; (2) masyarakat terbuka; (3) masyarakat madani.

### **Profesionalisme Guru dan Tantangan Globalisasi Sebagai Akselerasi Pendidikan Abad ke-21**

Globalisasi yang telah membuat dunia seolah tanpa batas memicu perbandingan internasional antar sekolah, kurikulum, metode penilaian, dan prestasi siswa. Keberhasilan pembelajaran , baik secara langsung maupun tidak langsung banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru itu sendiri. Artinya, di pundak guru itulah keberhasilan pembelajaran dibebankan. Sementara itu realitas yang ada dan terjadi terjadi di lapangan, ada kesan bahwa kompetensi guru masih belum seperti yang diharapkan. Sebagian besar dari mereka masih berpredikat sebagai pelaksana kurikulum, bahkan di antara kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan lebih bersifat rutinitas.

Motivasi dan kesiapan belajar peserta didik terhadap mata pelajaran rendah. Kurangnya waktu belajar, lingkup materi yang sangat luas, serta laju/akselerasi perubahan (*change*) di bidang ilmu, teknologi dan seni berjalan begitu cepat.

Realitas di lapangan menunjukkan adanya berbagai keterbatasan terkait dengan sumberbelajar, media pembelajaran baik jenis maupun jumlahnya, serta kemampuan guru

memanfaatkan sumber-sumber dan media pembelajaran modern yang tersedia di dunia maya. Suasana kelas kurang memotivasi peserta didik melakukan kegiatan belajar. Demikian juga interaksi pembelajaran belum optimal.

Berdasarkan fenomena di atas, betapa kemampuan guru masih sangat perlu untuk senantiasa ditingkatkan kualitasnya, terutama jika dikaitkan dengan tuntutan tugas guru di era globalisasi saat ini yang ditandai oleh semakin meluasnya penggunaan teknologi pembelajaran. Beberapa upaya untuk meningkatkan kompetensi guru menyongsong pelaksanaan kurikulum 2013 dalam konteks pendidikan di Abad ke-21 dapat dilakukan melalui kegiatan- kegiatan berikut:

1. mengharuskan guru untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pengetahuan Memahami fenomena pendidikan Abad ke-21, meliputi: Globalisasi dan Pendidikan, Budaya dan Karakter Bangsa, serta Budaya Internet dan *Cyber Society*.
2. Memahami kondisi Pendidikan Nasional Abad ke-25, yang meliputi: Paradigma Pendidikan Nasional, Tujuan Pendidikan Nasional Abad ke-25, Kualifikasi SDM Abad ke-25, dan Pergeseran Paradigma Pendidikan
3. Memahami peran teknologi/media pembelajaran Abad ke-25.
4. Memahami makna pengembangan kurikulum 2013 sebagai upaya penyesuaian terhadap tantangan pendidikan Abad ke-25, meliputi: Urgensi Pengembangan Kurikulum 2013, serta Makna Pengembangan Kurikulum itu sendiri,
5. Memahami Kompetensi guru, meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan Kompetensi profesional.
6. Manfaatkan kesempatan guru untuk studi lanjut, di mana tugas guru bukan sekedar mengajar atau *transfer of knowledge*, melainkan sebagai motivator belajar peserta didik yang memiliki kedudukan strategis untuk memberikan bimbingan dan keteladanan. Perkembangan ilmu dan teknologi dan teknologi modern, sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi informasi (*information technology*) melalui studi lanjut.

Guru pada abad ke-21 ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan fleksibilitas dalam pemerolehan ilmu pengetahuan bagi setiap individu baik guru maupun peserta didik. Konsekuensinya, guru dituntut mampu mengembangkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan lingkungan.

Hal yang sama disyaratkan kepada guru-guru di Indonesia melalui Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permen Nomor 17 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan standar kompetensi guru. Guru profesional dituntut tidak hanya memiliki kemampuan mengajar sebagaimana disyaratkan dalam standar kompetensi pedagogik, namun guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitas secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Guru juga dituntut mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sebagaimana disyaratkan dalam kompetensi sosial serta memiliki kepribadian yang baik sebagaimana dideskripsikan pada kompetensi pribadi. Disamping itu, guru juga harus memiliki kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan yang memadai dan relevan dengan bidang ajarnya.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan yakni di abad ke-21 guru profesional diharapkan mampu dan menupdate informasi dan teknologi untuk menghadapi tantangan globalisasi sehingga terciptanya akselerasi dalam dunia pendidikan.



### Simpulan

Indonesia harus mampu meningkatkan mutu pendidikan, sehingga tidak kalah bersaing dengan negara lain. Pada abad ke-21 dibutuhkan persiapan yang matang dan mantap baik konsep maupun penerapan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul.

Guru mampu menjadi pengajar sekaligus pembelajar dan agen perubahan sekolah, dan juga mampu menjalin dan mengembangkan hubungan untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolahnya. Untuk itu, guru membutuhkan pengembangan profesional yang efektif yaitu pembimbingan. Seorang yang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. profesionalisme yang kinerjanya didasarkan pada Produktivitas, inovasi, penguasaan ilmu pengetahuan, kreativitas transformasi budaya menjadi budaya dinamis, dan kualitas kinerja dan kerja yang kompetitif serta berdaya saing global.

### Daftar Pustaka

- Badan Standar Nasional Pendidikan (2010). *Paradigma Pendidikan Nasional Abad-XXI*. Jakarta: BSNP
- Darling, Linda., H. (2006). *Constructing 21<sup>st</sup> century teacher education*. Journal of teacher education, 57. 300-314.
- Departemen Agama RI. 2007. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama RI.
- Hargreaves, A. & Fullan, M. (2000). *Mentoring in the new millennium*. ProQuest Education Journals, 39 (1), 50-56.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

## **Revitalisasi Peran Karang Taruna Sebagai Wahana Pendidikan Kewarganegaraan**

**Fahdian Rahmandani dan Anggoro Eko P**

Program Studi PPKn, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta  
Email: fahdianrahmandani@gmail.com

### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-4 di dunia, dan jumlah pemuda di Indonesia 61.57 juta jiwa. Akhir-akhir ini terjadi kemerosotan moral pemuda karena semakin pudarnya pendidikan agama dan pendidikan moral yang mereka peroleh khususnya di lingkup kemasyarakatan, minimnya program untuk mengasah kreativitas mereka, dan sempitnya ruang organisasi kepemudaan sebagai wahana kreasi generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk merevitalisasi pendidikan untuk generasi muda di lingkup kemasyarakatan sebagai kontrol berkelanjutan pendidikan persekolahan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kepustakaan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, secara umum, pendidikan untuk generasi muda di lingkup persekolahan yang saat ini semakin berat tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam menjawab persoalan kepemudaan. Sementara, secara khusus, pendidikan untuk warga negara muda di lingkup kemasyarakatan dapat dilakukan melalui organisasi kepemudaan “karang taruna”, sebagai wahana pendidikan untuk generasi muda. Hasil penelitian merekomendasikan, penting untuk mengembalikan marwah organisasi kepemudaan dengan memberikan ruang dan dukungan sebagai strategi preventif dengan revolusi moral secara bersama-sama dalam membentuk masyarakat sipil muda yang akan menjadi kekuatan moral dan agen perubahan bangsa.

**Kata kunci:** *Fungsi Karang Taruna, Karang Taruna sebagai Wahana Pendidikan Kewarganegaraan.*

### **Pendahuluan**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 jumlah pemuda di Indonesia sekitar 61,75 juta jiwa atau 24,79 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah pemuda yang cukup besar ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang cukup sebagai penggerak/motor pembangunan. Jumlah dan persentase pemuda lebih rendah dari jumlah dan persentase penduduk kelompok umur lainnya. Selisih antara jumlah penduduk pada kelompok umur kurang dari 16 tahun dan jumlah pemuda adalah 13,86 juta atau sebesar 5,56 persen penduduk Indonesia. Selisih jumlah pemuda dengan jumlah penduduk pada kelompok umur lebih dari 30 tahun adalah 49,97 juta atau sebesar 20,06 persen penduduk Indonesia. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase pemuda diantara penduduk Indonesia pada tahun 2013 mengalami penurunan. Persentase pemuda di Indonesia pada tahun 2009 hingga

tahun 2010 cenderung mengalami peningkatan, namun sejak tahun 2011 mengalami penurunan. Pada tahun 2009 persentase pemuda Indonesia tercatat sebesar 25,04 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 25,18 persen di tahun 2010. Pada tahun 2011 persentase pemuda mengalami penurunan menjadi sebesar 24,96 persen dan pada tahun 2013 menjadi sebesar 24,79 persen. Penurunan persentase pemuda sejak 2011 mungkin disebabkan oleh pergeseran umur pemuda. Jumlah pemuda yang masuk ke kelompok penduduk di atas usia 30 tahun lebih banyak dibanding jumlah penduduk yang masuk ke kelompok usia pemuda.

Berdasarkan Hasil Penelitian Gunanto Suryono dkk (2010: 71) terungkap bahwa kegiatan Karang Taruna selalu disalahartikan sebagai kegiatan ekonomi produktif generasi muda desa/kelurahan. Padahal kegiatan ekonomi produktif tersebut hanya berfungsi sebagai penunjang kegiatan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Disamping itu, juga karena keterbatasan waktu tenaga dan materi, sarana dan prasarana dari organisasi Karang Taruna, banyaknya para remaja yang sibuk dengan sekolah maupun kuliah, sehingga tidak ada waktu untuk aktif dalam kegiatan Karang Taruna, selain itu dari pribadi remaja yang saat ini mengalami masalah sosial, karena kemiskinan orang tua mereka, sehingga wadah Karang Taruna tidak mampu menjadi penopang nafkah atau sebagai sarana menyelesaikan masalah yang dihadapi remaja masa kini, baik di kota/ desa.

Winarno dkk (2011: 75) melaksanakan penelitian lanjutan yang, bahwasanya keberadaan Karang Taruna terkait dengan kapasitas pengurus beserta warga masyarakat di lingkungannya, terutama menyangkut kemampuan manajerial dan pengetahuan teknis di bidang usaha kesejahteraan sosial, disamping ketrampilan teknis bagi penunjang kegiatan ekonomis produktif, disertai dengan pemberian ruang bagi penumbuhan dan pengembangan yang berwujud pelibatan pemerintah desa kelurahan maupun warga masyarakat setempat juga pendamping dan pengurus Karang Taruna, dengan memobilisasi prakarsa kearifan, serta potensi sumber daya lokal, ternyata dapat memberikan output yang positif bagi pengembangan organisasi Karangtaruna, keterlibatan pemerintah desa/ kelurahan dan warga masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan Karang Taruna membawa dampak positif sangat menunjang keberadaan organisasi Karang Taruna, utamanya berkaitan dengan legalitas, akseptabilitas, serta aksesibilitas, juga kelengkapan sarana dan prasarana organisasi maupun program, yang sudah dicanangkan oleh para pengurus Karang Taruna di tingkat desa.

Selanjutnya permasalahan generasi muda yang dikemukakan oleh Suryadi dkk (2014: 45) yaitu menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme serta kurang pastian generasi muda tentang masa depan, belum seimbang jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, kurangnya kesempatan dan lapangan kerja, masalah gizi rendah menjadi hambatan bagi perkembangan kecerdasan dan pertumbuhan badan, banyaknya perkawinan dibawah umur, generasi muda yang menderita tuna fisik, mental dan sosial, dan pergaulan termasuk penyalahgunaan narkoba dan obatobatan terlarang. Selanjutnya, penulis melihat dari berbagai media televisi, bahwa yang terjadi di masyarakat adalah: Dalam bidang ekonomi khawatir dengan masalah lapangan pekerjaan dan masa depannya, dalam bidang sosial, pemuda saling bersaing untuk mendapat pengakuan orang lain, dalam bidang agama, tentunya sangat sedikit pemuda yang serius dan konsisten untuk berada di jalur yang benar sesuai tuntunan agama, dalam bidang budaya bisa dihitung berapa jumlah pemuda yang mau belajar tentang kebudayaan untuk melestarikannya. Adanya pernyataan yang mengatakan bahwa kebudayaan atau hasil karya jaman dulu itu kuno, sehingga masuklah budaya-budaya baru dari luar negeri yang dianggap modern.

Kaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa visi PKn ialah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*national and character building*) dan pemberdayaan warga negara. Pemuda menjadi aktor penting dalam memantapkan watak dan karakter Pancasila. Terlebih perannya di masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran di sekolah. Pemuda harus paham tentang hak dan

kewajibannya sebagai pelopor dan pemberi contoh kepada masyarakat lainnya dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut maka program dan kegiatan Karang Taruna diharapkan: (1) memberi manfaat besar bagi masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahan sosial kaum muda dan masyarakat; (2) program dan kegiatan Karang Taruna berkesinambungan, tidak sporadis; (3) memperkuat kesetiakawanan sosial kaum muda dan masyarakat dan semakin banyak kaum muda aktif dalam kegiatan Karang Taruna; (4) kredibilitas Karang Taruna tinggi, keberadaannya dibutuhkan dan dipercaya oleh kaum muda dan masyarakat; dan (5) program dan kegiatan Karang Taruna sebagai infrastruktur sosial yang profesional serta mitra pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial tingkat desa/kelurahan.

Pemuda memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Peran strategis pemuda memang tidak dapat diabaikan, paradigma pemuda sebagai kategori sosial (*social category*) mengindikasikan adanya pengakuan/penghargaan terhadap potensi pemuda baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Melihat dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti memilih untuk melakukan penelitian yang menekankan pada pembentukan jiwa kepemimpinan, yaitu dengan judul ini diharapkan mampu menjawab keraguan atas problematika sosial pemuda yang muncul di kehidupan bermasyarakat. Serta pentingnya berorganisasi mampu mengangkat peran Karang Taruna sebagai wadah pengembangan kepemimpinan pemuda.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan dengan mengolah data berasal dari berbagai sumber literatur. Setelah diolah, data kemudian dianalisis, dirangkum, dan digeneralisasikan dengan menggunakan kajian teori yang memiliki relevansi sehingga dapat dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Karang Taruna dan Fungsinya

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia, merupakan wadah pengembangan generasi muda non partisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan/komunitas sosial sederhana, yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi (dalam AD/ART diatur keanggotaannya mulai dari pemuda-pemudi berusia mulai dari 11 hingga 45 tahun) dan batasan sebagai pengurus adalah berusia 17 hingga 35 tahun.

Diharapkan dalam tubuh Karang Taruna lahir kader yang menjadi pionir penggerak usaha kesejahteraan sosial dan memiliki profesionalitas sebagai pekerja sosial, sesuai dengan pendapat Greenwood dalam Kidneigh (1966: 563-564) menyatakan profesi adalah sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang memiliki: (a) Serumpun teori yang sistematis, yaitu sejumlah pengetahuan yang telah diorganisasikan menjadi sebuah sistem, yang secara internal konsisten. Sistem ini menjadi dasar pelaksanaan dari profesi tersebut dalam situasi yang konkrit. Berbagai situasi kerja dalam profesi tersebut tidak mengubah-ubah tatanan penanganan pekerjaan yang harus diselesaikan menurut bidangnya; (b) Terdapat kewenangan profesional, yang diperoleh melalui pendidikan. Kewenangan tersebut akan membedakan seorang tenaga profesional ini memiliki kewenangan untuk menyampaikan gagasan dan pendapat profesional di mana diperlukan; (c) Persetujuan (sanctions) dari masyarakat yang berupa pengakuan terhadap profesi ini, baik dinyatakan secara resmi atau pun tidak resmi, yang memberikan kesempatan bagi tenaga profesional untuk melakukan tugasnya, serta memperoleh hak dan kewenangan

profesionalnya; (d) Kode etik yang mengatur perilaku etik dari warga profesi tersebut, serta pelaksanaan pekerjaannya, dan (e) Kebudayaan profesional yang menjadi ciri dari ikatan profesi tersebut. Kebudayaan profesi ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan lambang profesi tersebut.

Karang Taruna merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wahana mengembangkan kebutuhan psikologis para remaja. Sebagai syarat utama agar remaja dapat tumbuh dan berkembang secara normal atau wajar, adalah terpenuhinya kebutuhan dasar remaja, yang meliputi kebutuhan psikologis, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap segala diskriminasi dan perlakuan salah (abused), serta kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam berbagai keputusan yang menyangkut dirinya. Menurut pendapat Santrock (2007: 183).

Masa remaja (adolescence) sebagai periode masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Masa remaja ini dimulai pada masa remaja awal dan masa remaja akhir. Pada masa remaja awal terjadi perubahan biologis, kognitif serta sosio emosionalnya. Oleh sebab itu secara psikologis masa remaja awal ditandai berkembangnya kognitif remaja mengenai dirinya, substansi dari konsep diri remaja. Remaja cenderung lebih sadar diri (self conscious) dan berokupasi dalam dirinya. Remaja menciptakan konsep dirinya yang bersifat majemuk, tugas untuk mengintegrasikan berbagai konsep diri yang sangat bervariasi ini menjadikan suatu hal yang tidak mudah dilakukan oleh remaja. Di saat yang sama ketika seorang remaja dipaksa untuk mendiferensiasikan dirinya ke dalam berbagai peran. Situasi demikian sangat mempengaruhi kondisi psikologis remaja.

Remaja membutuhkan penghargaan untuk meningkatkan harga dirinya cara yang ditempuh yaitu: 1) mengidentifikasi penyebab rendahnya harga diri dan bidang-bidang kompetensi yang penting bagi dirinya, 2) menyediakan dukungan emosional dan persetujuan sosial, 3) meningkatkan prestasi, dan 4) meningkatkan ketrampilan remaja untuk meningkatkan harga dirinya dibutuhkan wahana dukungan emosional dan persetujuan sosial dalam bentuk konfirmasi dari orang lain serta memiliki pengaruh yang kuat terhadap harga diri remaja. Diharapkan melalui organisasi Karang Taruna sebagai wahana proses pembelajaran sosialisasi remaja dapat tumbuh kembang secara maksimal keceerdasannya baik secara intelektual, emosional, maupun spiritualnya.

Setiap karang taruna melaksanakan beberapa fungsi. Menurut Direktorat Bina karanag taruna (2005:4) fungsi karang taruna adalah: a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

### **Karang Taruna Sebagai Wahana Pendidikan Kewarganegaraan**

Sejatinya Pendidikan Kewarganegaraan "*Civic Education*" tidak hanya sebuah mata pelajaran di persekolahan, tetapi lebih dari pada itu dijelaskan Cogan (1999:4) bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan "*Citizenship Education*" merupakan suatu usaha sadar dalam menyiapkan dan membekali generasi muda sebagai generasi bangsa yang kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat, atau sering disebut sebagai PKn kemasyarakatan (*community civics*). Selaras dengan penjelasan Cogan, Kerr (2006:3) menyebutkan jika Pendidikan Kewarganegaraan ditafsirkan secara luas untuk mencakup persiapan anak muda untuk berperan dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Winarno (2013:19) menguraikan tiga fungsi pokok Pendidikan Kewarganegeraan, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Tiga ranah tersebut menjadi hal yang penting untuk mengembangkan karakter generasi muda. Terutama karakter gotong royong sebagai afiliasi kewarganegaraan yang baik (*good citizenship*) yang selanjutnya bermetamorfosa warga negara aktif (*active citizenship*) menjadi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di abad ke 21, serta turut serta dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Melalui keterlibatan warga (*civic engagement*), warga negara muda akan mampu mengembangkan pengetahuan, kecakapan, kebajikan, dan kebiasaan yang membuat demokrasi dapat bekerja secara proporsional (Patrick, 1999:4). Menurut Patrick (1999:41) asosiasi-asosiasi masyarakat kewargaan dapat menjadi kekuatan tanding (*countervailing*) dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat.

Karakter gotong royong warga yang menjadi simbol warga negara yang baik akan membawa warga negara menjadi aktif. Westheimer dan Kahne dalam Baratz (2013:72) coba memberikan penjelasannya tentang kewarganegaraan yang baik yang bermetamorfosa warga negara aktif. Menurut mereka warga negara yang baik adalah warga negara yang bertanggung jawab secara pribadi, warga partisipatif, dan warga yang bertanggung jawab secara pribadi bertindak secara bertanggung jawab di masyarakatnya dengan menyumbangkan waktu, uang, atau keduanya untuk amal. Selain itu dalam identifikasi Wahab dan Sapriya (2011:311) warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sebagai individu, peka terhadap masalah sosial, dan mampu memecahkan masalahnya sendiri dan masalah kemasyarakatan sesuai dengan peranannya. Jadi warga negara yang baik akan berperan secara aktif sebagai (*social sensitive, socially responsible, dan sosial intelligence*) untuk mencapai kualitas pribadi dan perilaku warga masyarakat yang baik.

Pemuda menjadi perhatian dari berbagai pihak, karena pemuda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan menjadi sumber pembangunan bangsa. Pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Seperti yang diuraikan oleh Mangunhardjana (1986:17) bahwa kaum muda di dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya akan berada pada situasi yang tidak selalu mudah. Oleh karena itu warga negara muda tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa.

Cogan dan Dericot (1998) memberikan penjelasan yang lebih luas tentang bentuk Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat dilakukan di luar sekolah, seperti dalam lingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan dan dalam media. Khususnya dalam lingkup kemasyarakatan, interaksi-interaksi dalam organisasi kemasyarakatan merupakan proses untuk menjadikan pemuda lebih berkualitas. Sesuai dengan pernyataan Soekanto (1990: 442) bahwa didalam proses interaksi yang melibatkan anak atau remaja dan pemuda, terjadi proses sosialisasi yang bertujuan agar pihak yang dididik mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Karena pemuda menurut Mangunhardjana (1986:29) mampu menciptakan dan membina kebersamaan dan kerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan diri dalam mencapai tugas pekerjaan bersama, dalam semangat setia kawan dan Bhineka Tunggal Ika.

Karang Taruna merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu memberi manfaat besar bagi masyarakat, membantu memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahan sosial kaum muda dan masyarakat dan semakin memperkuat kesetiakawanan sosial kaum muda dan masyarakat dan semakin banyak kaum muda aktif. Hal ini dipertegas sebagaimana Permensos No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna menyebutkan bahwa karang taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial diri, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda.

Menurut Direktorat Bina Karang taruna (2005:12) Karang Taruna memiliki tugas pokok untuk bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial secara preventif, pasca rehabilitatif maupun pendampingan dan pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. Beberapa tugas pokoknya Karang Taruna sebagai wahana Pendidikan Kewarganearaan seperti (1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan; (2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan; dan (3) Membangun sistem jaringan komunikasi, informasi, dan kemitraan strategis, yang mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat.

Dalam sejarah Kewarganegaraan aktif begitu penting bagi kehidupan kuno diperkotaan. Polis Yunani yang di Athena memuliakan gagasan warga aktif dan partisipatif. Dalam sistem pemerintahan mandiri tersebut, mereka yang ditugaskan menjadi pengatur, dan pada saat bersamaan juga sebagai yang diperintah (Held, 1987: 18). Kaho (2005:127) coba mengusulkan empat jenjang yang terdapat dalam partisipasi masyarakat, diantaranya: (1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; (2) Partisipasi dalam pelaksanaan; (3) Partisipasi dalam memanfaatkan hasil ; dan (4) Partisipasi dalam evaluasi.

Sedangkan dalam konsepsi yang lebih muda, Hoskins dan Mascherini (2008: 469-471) menitik beratkan model kewarganegaraan aktif di abad ke 21 pada empat dimensi, yaitu protes dan perubahan sosial, kehidupan masyarakat, demokrasi perwakilan, dan nilai-nilai demokrasi.

Selanjutnya Hoskins, Jesinghaus dkk (2006:14) dalam bukunya bertajuk *Measuring Active Citizenship in Europe. Ispra: European Commission Institute for the Protection and Security of the Citizen*. yang membahas tentang keterlibatan warga negara aktif dalam masyarakat. Salah satu dimensi penting dalam *active citizenship* yaitu partisipasi dalam kehidupan komunitas, mengacu pada kegiatan yang kurang terbuka secara politis dan lebih berorientasi pada aktivitas masyarakat. Dimensi ini juga dapat dipahami oleh masyarakat sipil namun telah dibedakan karena kegiatan ini lebih berorientasi pada mekanisme dukungan masyarakat dan kurang terhadap tindakan politik dan akuntabilitas pemerintah. Dimensi ini didasarkan pada 25 indikator dasar dan terbagi menjadi tujuh subdimensi, diantaranya: bantuan tidak terorganisir, organisasi keagamaan, organisasi bisnis, organisasi olahraga, organisasi budaya, organisasi sosial, organisasi induk-guru (organisasi yang dipilih di sini mencerminkan ketersediaan data). Setiap subdimensi yang mengacu pada organisasi kemudian terdiri dari pertanyaan tentang partisipasi, relawan, keanggotaan dan sumbangan.

Pemberdayaan melalui kewarganegaraan aktif menurut Cruikshank dalam Marinetto (2006:253) dapat diartikan sebagai teknologi kewarganegaraan. Karena pemberdayaan memupuk jenis subjektivitas tertentu yang mendorong keterlibatannya secara aktif. Mereka menjelaskan jika pada tahun 1960 ada sebuah program aksi di Amerika Serikat, di mana kewarganegaraan aktif dipromosikan sebagai kekuatan pemberdayaan bagi individu dan masyarakat di wilayah kota terdalam yang dirampas.

Dalam dokumen terkenal seperti *The Spirit of Community* (Etzioni, 1995) dan *New Golden Rule* (Etzioni, 1997) dalam Morinetto (2006:258), Etzioni membuat sebuah kasus untuk revitalisasi kehidupan masyarakat dan masyarakat melalui jaringan lokal, kewarganegaraan

aktif dan penekanan pada tanggung jawab individu. Kemitraan harus menunjukkan bukti nyata keterlibatan masyarakat dalam pemilihan lingkungan dan dalam penyampaian program.

Menurut Foley dan Martin (2000:484), otoritas di bawah rezim nilai terbaik harus melibatkan warga negara secara keseluruhan, sehingga antara warga negara dan masyarakat dalam mengkaji penyediaan layanan saat ini dapat menetapkan sasaran kinerja untuk masa depan. Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi warga negara aktif dalam masyarakat harus dianggap sebagai pembatasan dalam parameter tertentu yang dalam menghadapi perpindahan substantif atau pemindahan sumber daya dan kekuasaan pusat.

## Kesimpulan

Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial. Karang Taruna berfungsi sebagai wahana mengembangkan kebutuhan psikologis para remaja. Salah satu peran yang diemban oleh organisasi ini yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan. dalam mencapai tujuan tersebut maka penting untuk memberikan Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga melalui Pendidikan Kewarganegaraan ini dapat meningkatkan keterlibatan warganegara (*civic engagement*) dan mampu membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*).

## Daftar Pustaka

- BPS. 2013. Statistik Indonesia 2013. Jakarta: BPS.
- Cogan, J., J., 1999, *Developing the Civic Society : The Role Of Civic Education*, Bandung: CISED.
- Cogan, J.J. (1998). "*Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context*," dalam John J. Cogan dan Ray Derricott' *Citizenship for the 21st Century: An Introduction Perspectives on Education*. London: Kogan Page.
- Direktorat Bina Karang Taruna. 2005. *Buku Pedoman Dasar Karang Taruna*. Departemen Sosial R.I.
- Foley, P. and S. Martin. (2000). *A New Deal for the Community? Public Participation in Regeneration and Local Service Delivery, Policy and Politics*, 28 (4): 479-492.
- Gunanto Surjono. 2010. *Pemberdayaan Karang Taruna Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Held, D. 1987. *Models of Democracy*. Cambridge: Polity.
- Hoskins, B., Jesinghaus, J., Mascherini, M., et al. 2006. *Measuring Active Citizenship in Europe*. Ispra: European Commission Institute for the Protection and Security of the Citizen. EUR 22530 EN.
- Kaho, Josep R. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Factor-Factor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Daerah)*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education: An international comparison*. England: National foundation for Educational Research-NFER.
- Mangunhardjana. A. M, 1986, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Marinetti, M. (2003). *Who Wants to Be an Active Citizen? The Politics and Practice of Community Involvement*. Publied by Sage publication Ltd. Reprinted with Permission, 37 (1): 103-120.
- Mascherini, M. Manca, Ana R., & Hoskins, B. 2008. *The characterization of Active Citizenship in Europe*. European Commission.



- Patrick, John. J. (1999). Education for Constructive Engagement of Citizens in Democratic Civil Society and Government, dalam Charles F. Bahmueller dan John J. Patrick. Principles and Practices of Education for Democratic Citizenship: International Perspectives and Project, Bloomington, IN: *ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education and the ERIC Adjunct Clearinghouse for International Civic Education in association with Civitas*, pp. 41-60.
- Peraturan Menteri Sosial No. 77 Tahun 2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
- Santrock, John.W. 2007. Remaja, Edisi 11 Alih bahasa Benedictine Widyasinta. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soekanto, Soejono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Suryadi, K. dkk. (2014). Idrus Affandi Pendidik Pemimpin Mendidik Pemimpin Memimpin Pendidik. Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wahab, Abdul Azis. & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: CV Alfabeta.
- Winarno Endro dkk. 2011. Partisipatori Pemberdayaan Karang Taruna. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zamir, Baratz. (2013). "Good citizenship" through Bilingual Children Literature: Arabic and Hebrew. *Journal of Education and Learning*; 2 (3): 71-78.

## Kurikulum dan Pembelajaran Kebahagiaan: Menumbuhkan Kebiasaan Anak Bahagia dengan Mendongeng

**Dwi Rahmah Hidayati**

Gerakan Mendongeng (Gendong) Indonesia

Email: dwirahmah.h@gmail.com

### Abstrak

Kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan cita-cita pendidikan nasional, bahkan di seluruh dunia. Berbagai penelitian menyarankan, kebahagiaan perlu diberi tempat utama sebagai suatu konsep pembelajaran. Langkah tersebut terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan (Walker, 2017:190). Sekolah menjadi salah satu tempat paling dipercaya untuk menyelenggarakan pendidikan terbaik bagi anak. Sayangnya, sekolah justru menjadi tempat yang tidak aman. Menurut Survei International Center for Research on Women (ICRW), sebanyak 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017:1). Selain itu, metode pembelajaran yang monoton dan *teacher centered* seringkali membuat anak mengalami kebosanan. Data United Nations Children's Fund (UNICEF) (2012:5) menyebutkan hanya 27% guru Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi syarat. Padahal, hubungan yang positif antara siswa dengan guru dan teman-temannya di sekolah menjadi sumber kebahagiaan (Schiller dan Hinton, 2016:1). Untuk menggali alternatif cara mengimplementasikan kurikulum dan pembelajaran kebahagiaan pada anak, maka digunakan metode penelitian eksploratif. Sejak dulu, mendongeng diyakini menjadi cara paling baik dan seru untuk mendidik, menumbuhkan nilai moral, etika, dan kebenaran. Hipotesis dari penelitian ini menyatakan bahwa mendongeng 7 kebiasaan anak bahagia karya Sean Covey yang diintegrasikan dengan 12 nilai dasar perdamaian formulasi Irfan Amalee dan Erick Lincoln secara rutin kepada anak baik di rumah, sekolah, dan masyarakat dapat menumbuhkan kebahagiaan.

**Kata Kunci:** *Kurikulum dan pembelajaran, kebahagiaan, mendongeng*

### Pendahuluan

Kebahagiaan autentik merupakan tujuan akhir keberadaan manusia. Tentu saja, menjadi cita-cita pendidikan nasional dan di seluruh dunia. Namun, sejatinya kebahagiaan tidak bisa diberikan oleh orang lain, karena rahasianya tersimpan di dalam diri masing-masing. Diri sendirilah yang bisa mencari, melihat, dan menemukannya. Sayangnya, tidak setiap orang mampu melakukannya. Sebab, tidak atau belum mengenali keutamaan serta kekuatan dalam diri sendiri (*strengths blindness*). Kondisi tersebut sebagian terjadi karena kekuatan seseorang dikaburkan oleh pendapat guru, orangtua atau keluarganya yang berfokus pada kelemahan daripada mengemukakan kekuatan.

Sekolah menjadi salah satu tempat paling dipercaya untuk menyelenggarakan pendidikan terbaik bagi anak. Sayangnya, sekolah justru menjadi tempat yang tidak aman. Menurut Survei International Center for Research on Women (ICRW), sebanyak 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017:1). Selain itu, metode pembelajaran yang monoton dan *teacher centered* seringkali membuat anak mengalami kebosanan. Data United Nations Children's Fund (UNICEF) (2012:5) menyebutkan

hanya 27% guru Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi syarat. Proporsi ketidaksesuaian meningkat hingga 76% untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 84% untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Data Komisioner KPAI bidang pendidikan menyatakan bahwa 45% siswa dan 22% siswi mengungkapkan jika guru atau petugas sekolah turut menjadi pelaku kekerasan di sekolah (Yunanto, 2017:1 dalam [www.kriminologi.id](http://www.kriminologi.id)). Padahal, hubungan yang positif antara siswa dengan guru dan teman-temannya di sekolah menjadi sumber kebahagiaan (Schiller dan Hinton, 2016:1). Akhirnya, sulit bagi anak-anak untuk benar-benar merasa bahagia.

Keadaan tersebut dapat diubah dan kebahagiaan autentik dapat diwujudkan apabila tumbuh karakter yang kuat dalam diri setiap manusia. Karakter bahagia dapat terbentuk optimal apabila ditanamkan, ditumbuhkembangkan dan diperkuat sejak dini melalui pembelajaran yang holistik. Sebagaimana pendapat Park, Peterson, dan Seligman (2004:612) bahwa kebahagiaan dapat dihasilkan dengan melatih kekuatan karakter yang sesuai diri individu. Berbagai penelitian menyarankan, kebahagiaan perlu diberi tempat utama sebagai suatu konsep pembelajaran. Langkah tersebut terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan (Walker, 2017:190). Namun demikian, belum semua pihak menyadari dan menaruh perhatian utama dalam konsep pembelajarannya kepada anak.

Komponen dan lingkungan pembelajaran yang efektif dan integratif perlu dipersiapkan untuk membangun fondasi karakter anak yang kuat dan bahagia.

Menurut Bialik, dkk. (2015) dalam *“Character Education for 21st Century”: What should students learn?* fondasi karakter yang perlu ditumbuhkan secara umum ada 6 yaitu kesadaran diri (*mindfulness*), rasa ingin tahu (*curiosity*), keberanian (*courage*), ketahanan diri (*resilience*), etika (*ethics*) dan kepemimpinan (*leadership*) yang masing-masing diturunkan menjadi lebih banyak lagi sikap. Sikap tersebut relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 7 kebiasaan anak bahagia karya Sean Covey serta 12 nilai dasar perdamaian formulasi Irfan Amalee dan Erick Lincoln.

Sejak dulu, mendongeng diyakini menjadi salah satu metode pembelajaran paling baik dan seru untuk menumbuhkan nilai, etika, karakter dan kebenaran. Anak-anak seringkali menunjukkan emosi positif ketika mendengarkan cerita atau melihat pertunjukan mendongeng. Mendongeng simulasi 7 kebiasaan anak bahagia yang terintegrasi 12 nilai dasar perdamaian dapat menjadi alternatif pembelajaran kebahagiaan pada anak baik di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

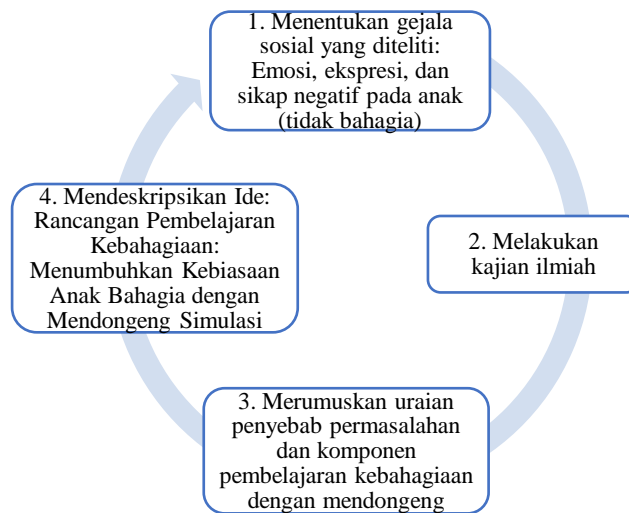
## Metode

Penelitian ini menggunakan metode eksploratori. Namun, Hamdi dan Ismaryati (Tanpa Tahun:15) menyebut penelitian semacam ini dengan istilah eksploratif. Sebuah penelitian yang bersifat menjelajah untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala sosial tertentu, mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala tersebut, merumuskan masalah lebih rinci dan mengembangkan hipotesis.

Peneliti dalam hal ini ingin mengetahui lebih mendalam penyebab anak-anak yang terlihat tidak bahagia (menunjukkan emosi negatif) dalam proses pembelajaran dan interaksi sosialnya baik di sekolah, rumah, atau lingkungan sekitarnya (masyarakat). Mengeksplor berbagai komponen pembelajaran untuk merancang pembelajaran kebahagiaan untuk anak dengan mendongeng simulasi.

Peneliti melakukan kajian dengan membaca dan menganalisis hasil penelitian, pendapat para ahli, dan berita di media masa *online*. Subyek yang diteliti adalah anak-anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (termasuk yang masih di dalam kandungan).

### Alur penelitian eksploratori.



Gambar 1. Alur penelitian eksploratori

### Hasil Penelitian

#### Penyebab Anak Tidak Bahagia

Hasil kajian mengungkap bahwa anak-anak menunjukkan emosi, ekspresi dan sikap negatif (tidak bahagia) sebagian dikarenakan belum dan/atau tidak mengenal keutamaan serta kekuatan dalam dirinya (*blind strengths*). *Blind strengths* seringkali terjadi karena adanya pola pendidikan dan pengasuhan yang tidak tepat oleh orangtua, pendidik, atau masyarakat tempat anak tumbuh dan berkembang. Misalnya, fokus melihat kekurangan dibanding potensi dan kekuatan yang dimiliki anak. Selain itu, pendidikan karakter bahagia belum banyak dipersiapkan dan dilatihkan sejak dini, meskipun pada hakikatnya setiap orangtua dan pendidik ingin membahagiakan anak dan peserta didiknya.

Mirisnya, sebagian orangtua dan pendidik tak luput menjadi pelaku kekerasan pada anak. Ditambah, metode pembelajaran di sekolah monoton dan lebih banyak berpusat pada guru. Anak menjadi terbiasa didikte. Dampaknya, beberapa anak seringkali merasa bingung dan kurang memiliki inisiatif dalam memanfaatkan waktu yang dimiliki ketika sendiri. Sejatinya, dengan memberi kesempatan menerapkan kekuatan individu anak, dapat menjadi jalan mencapai kebahagiaan untuk dirinya.

#### Rancangan Pembelajaran Kebahagiaan

Pembelajaran merupakan proses interaksi belajar yang bermakna antar pembelajar terhadap suatu materi untuk mencapai tujuan tertentu. Masa kini, pembelajaran dapat terjadi secara lebih multidimensi; apa saja, dengan siapa saja, lewat apa saja dan di mana saja. Konsekuensinya, semua pihak harus terbuka untuk saling belajar dan bertukar informasi. Peran dan tanggungjawab pembelajaran menjadi lebih luas dan terintegrasi. Tri pusat pendidikan yaitu rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat dengan pelakunya perlu lebih harmoni, salah satunya dalam melakukan pembelajaran kebahagiaan.

Menurut Seligman (2002) dalam Schiffrin dan Nelson (2008:34), kebahagiaan diartikan ke dalam 3 elemen yaitu perasaan positif (*positive emotion*), terlibat dalam kegiatan positif (*engagement*), dan hidup bermakna (*meaningful life*). Perasaan positif terdiri dari 2 bentuk yaitu emosi terhadap masa lalu dan emosi masa depan. Emosi masa lalu berupa kepuasan hidup, kelegaan, dan kebanggaan. Sedangkan emosi terhadap masa depan berupa keyakinan,

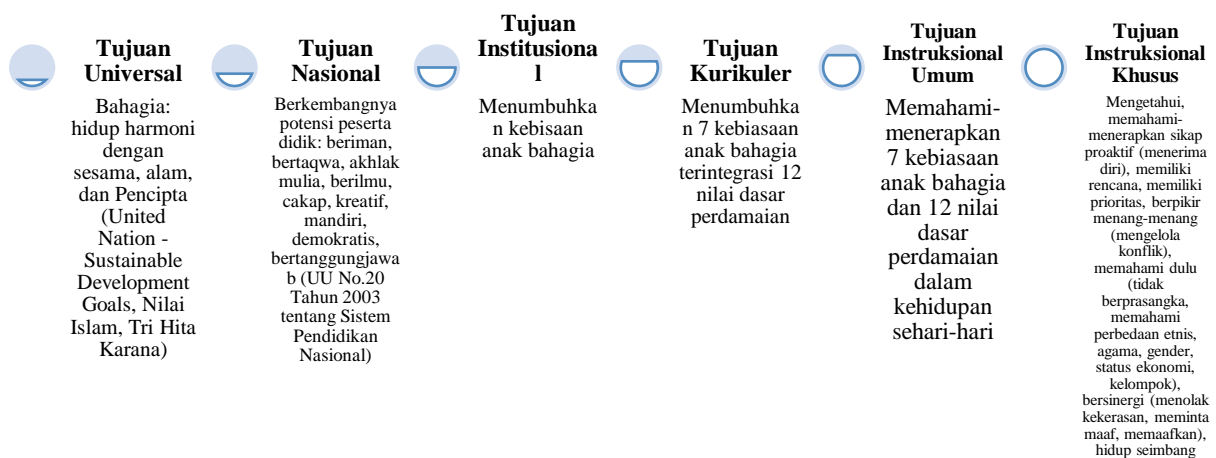
optimisme, dan harapan. Kegiatan positif berupa kesenangan dan keterlibatan dalam beraktivitas pada masa kini. Lebih lanjut, hidup bermakna ditandai dengan memiliki tujuan dan peran tertentu di lingkungan sekitarnya. Pembelajaran kebahagiaan dilakukan untuk fokus menumbuhkan perasaan positif dan melakukan kegiatan positif bersama anak sehingga anak memahami cara kerja kebahagiaan.

Riyana (Tanpa Tahun:3) menguraikan 5 komponen pembelajaran yaitu: (1) tujuan, (2) materi, (3) metode, (4) media, dan (5) evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, berikut rumusan komponen pembelajaran kebahagiaan.

## 1. Tujuan

Membahas mengenai hirarki tujuan pembelajaran meliputi: (a) tujuan pendidikan nasional, (b) tujuan institusional, (c) kurikuler, (d) instruksional umum, dan (e) instruksional khusus.

Tujuan pembelajaran kebahagiaan digambarkan sebagai berikut.



## 2. Materi

Berkaitan dengan isi kurikulum, kategori bahan pembelajaran dan teknik pemilihan bahan ajar. Isi kurikulum pembelajaran kebahagiaan adalah 7 kebiasaan anak bahagia dan 12 nilai dasar perdamaian. Bahan pembelajaran berupa sikap yang dimuat dalam cerita dan permainan edukatif. Berikut uraian 7 Kebiasaan Anak Bahagia oleh Sean Covey yang diintegrasikan dengan 12 Nilai Dasar Perdamaian.

Tabel 1. Uraian 7 Kebiasaan Anak Bahagia terintegrasi 12 Nilai Dasar Perdamaian

No.	Kebiasaan	Deskripsi
1.	Proaktif; (a) menerima diri	Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): lebih aktif.  Covey (2015:2) bertanggung jawab atas pembelajaran dan arahan hidup melalui pilihan dan inisiatif pribadi.
		(a) Menerima diri: sikap menerima kelemahan dan mengoptimalkan kekuatan (potensi) diri.
2.	Memiliki Rencana	Covey (2015:3) memikirkan hasil akhir dan mampu memvisualisasikan apa diinginkan dan melakukannya dengan mengembangkan pernyataan misi pribadi.

3.	Memiliki prioritas	Covey (2015:4) mampu mengatur dan melaksanakan prioritas. Kebiasaan ini tentang mengelola tujuan, nilai, peran, dan prioritas.
4.	Berpikir menang-menang  (b)mengelola konflik	Covey (2015:5) keterampilan dalam hubungan interpersonal dan interaksi manusia. Memiliki gagasan bahwa keberhasilan seseorang tidak tercapai dengan mengorbankan atau mengesampingkan kesuksesan orang lain. Kebiasaan ini tentang menemukan perjanjian dan solusi yang saling menguntungkan dan memuaskan. (b) Mengelola konflik: menghadapi konflik dengan berpikir menang-menang; berkompromi dan berkomunikasi sehingga dapat mencapai tujuan masing-masing tanpa saling menyakiti.
5.	Memahami terlebih dahulu; (c) tidak berprasangka, (d) memahami perbedaan etnis, (e) agama, (f) gender, (g) status ekonomi, (h) kelompok, (i) keberagaman	Covey (2015:6) mendengarkan empatik agar dapat benar-benar memahami perspektif orang lain.  (c) Tidak berprasangka: mampu melihat dan menilai setiap orang sebagai individu, mencari bukti dan mengkonfirmasi terlebih dahulu dalam menilai suatu keadaan atau seseorang. (d) Memahami perbedaan etnis: mengenali dan menikmati perbedaan etnis (keunikan). (e) Memahami perbedaan agama: saling menghormati, berbagi ide, dan teladan yang nyata. (f) Memahami perbedaan gender: menghormati dan menghargai orang yang berbeda jenis kelamin, membangun hubungan pertemanan yang sehat dan pantas. (g) Memahami perbedaan status ekonomi: mampu memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat yang sama.
		(h) Memahami perbedaan kelompok: terbuka berteman secara bijaksana, bergaul secara sehat dan produktif. (i) Memahami keberagaman: mampu mensyukuri keanekaragaman yang ada, memiliki kemampuan untuk saling melengkapi.
6.	Bersinergi  (j) menolak kekerasan, (k) meminta maaf dan (l) memaafkan)	Covey (2015:7) keterampilan untuk bekerja dengan baik dalam kelompok. Bersikap rendah hati, menghormati dan mau mencari pendapat orang lain. (j) Menolak kekerasan: kemampuan menahan diri untuk tidak bertindak keras terhadap orang lain. (k) Meminta maaf: kemampuan mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang lain jika melakukan kesalahan (l) Memaafkan: kemampuan berpikir positif dan bersedia melakukan proses memaafkan.
7.	Hidup seimbang	Covey (2015:8) kemampuan untuk menjalankan secara seimbang empat dimensi dari sifat kita: fisik, sosial/emosional, spiritual, dan mental.

### 3. Metode

Berkaitan dengan cara teratur yang digunakan dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran kebahagiaan adalah mendongeng simulasi. Seorang guru bernama Sharon Gibson (1990) dalam Hamilton dan Weiss (2005:2) menyatakan bahwa mendongeng adalah bagian dari pelajaran, bahkan membuat pelajaran menjadi lebih berpengaruh kuat. Mendongeng merupakan sebuah seni berkomunikasi lewat cerita. Simulasi menurut KBBI adalah metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya. Mendongeng simulasi merupakan metode pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai dan karakter pada anak lewat cerita dengan meragakannya. Teknik mendongeng yang diterapkan dalam pembelajaran kebahagiaan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak sebagai berikut.

Tabel 2. Teknik mendongeng berdasarkan tingkat perkembangan anak

No.	Tingkat Perkembangan	Teknik Mendongeng
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	Pertunjukan, simulasi sederhana
2.	Sekolah Dasar (SD)	Bermain peran, simulasi sederhana
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Simulasi, pertunjukan bersama
4.	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)	Simulasi, pertunjukan bersama

Perlu diperhatikan pula waktu mendongeng berdasarkan tempat pembelajaran sebagai berikut.

Tabel 3. Waktu mendongeng berdasarkan tempat pembelajaran.

Rumah	Sekolah	Lingkungan Masyarakat
Pagi setelah doa bersama keluarga	Ketika amanat pembina apel pagi di sekolah	Pagi, sore atau malam pada hari libur sekolah di pos ronda desa atau pusat belajar masyarakat
Perjalanan ketika mengantar anak ke sekolah	Program literasi misal cerita pagi (15 menit sebelum siswa masuk ke kelas masing-masing)	Setiap hari libur di ruang publik seperti taman kota, alun-alun, <i>car free day</i> , dan pusat wisata daerah
Waktu bersantai bersama keluarga	Proses pembelajaran di dalam kelas (awal, tengah, akhir).	
Malam menjelang tidur		

#### 4. Media

Membahas alat dan bahan untuk proses pembelajaran. Media yang digunakan dalam pembelajaran kebahagiaan adalah cerita yang dipilih dari Koleksi Cerita 7 Kebiasaan Anak Bahagia karya Sean Covey dan Peace Generation: 12 Nilai Dasar Perdamaian (Cetakan 1: Mei 2017), bahkan mengembangkannya untuk dibuat sedemikian rupa agar anak-anak dapat memeragakan nilainya. Cerita dikombinasikan dengan media pendukung seperti buku cerita bergambar, permainan edukatif, dinamika kelompok, objek asli, alat peraga, nyanyian, dan buku tulis. Klasifikasi tema cerita dan media pendukung disesuaikan tingkat perkembangan anak sebagai berikut.

Tabel 4. Tema Cerita dan media pendukung berdasarkan tingkat perkembangan

No.	Tingkat Perkembangan	Tema Cerita	Media yang Dapat Digunakan
1.	TK	Kasih sayang orangtua, mainan, persahabatan, flora fauna, imajinatif	Objek asli, buku cerita bergambar,

			alat peraga, nyanyian
2.	SD	Persahabatan, petualangan, permainan, lingkungan alam, detektif, manusia super	Alat peraga, nyanyian, permainan edukatif, buku tulis (untuk jurnal)
No.	Tingkat Perkembangan	Tema Cerita	Media yang Dapat Digunakan
3.	SMP	Persahabatan, petualangan, kasih sayang	Dinamika kelompok, buku tulis (untuk jurnal)
4.	SMA/SMK	Persahabatan, kasih sayang (keluarga), dunia kerja, ekonomi, politik, tokoh inspiratif	Dinamika kelompok, buku tulis (untuk jurnal)

## 5. Evaluasi Pembelajaran

Mengenai proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran kebahagiaan dilakukan dengan menganalisis dan interpretasi dokumentasi video, suara, dan foto setiap proses mendongeng simulasi yang dilakukan kepada anak-anak. Kemudian, diamati respon yang muncul dari anak-anak yaitu: (1) emosi (ekspresi wajah), (2) jawaban anak (kata-kalimat), dan (3) kegiatan anak (perilaku). Disamping itu, setiap anak akan diberi buku tulis sebagai jurnal kebahagiaannya untuk menuliskan ceritanya tentang 7 poin pengalaman yaitu: (1) pengalaman yang paling mengesankan, (2) pengalaman yang tidak terlupakan, (3) pengalaman yang ingin diulangi kembali, (4) pengalaman yang menjadi motivasi, (5) pengalaman yang menyenangkan, (6) pengalaman yang membanggakan, (7) pengalaman yang lucu, dan 1 *self report* tentang “perasaanku saat ini”, yang diisi dalam jangka waktu bertahap. Hal tersebut dapat menjadi bahan bagi orangtua atau pendidik untuk menganalisis pandangan anak terhadap diri dan pengalamannya, meliputi emosi, pola pikir, dan sikapnya.

## Kesimpulan

Kebahagiaan perlu menjadi prioritas dalam proses pembelajaran dan kehidupan anak. Hal tersebut dapat diupayakan salah satunya dengan mendongeng simulasi 7 kebiasaan anak bahagia dan 12 nilai dasar perdamaian secara rutin dan terencana di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tujuannya, menumbuhkan kebiasaan anak bahagia. Materi berupa sikap proaktif (menerima diri), memiliki rencana, memiliki prioritas, berpikir menang-menang (mengelola konflik), memahami dulu (tidak berprasangka, memahami perbedaan etnis, agama, gender, status ekonomi, kelompok), bersinergi (menolak kekerasan, meminta maaf, memaafkan), dan hidup seimbang. Ditumbuhkan dengan metode mendongeng simulasi sesuai kebutuhan tingkat perkembangan anak. Media yang digunakan berupa cerita dikombinasikan dengan media pendukung seperti buku cerita bergambar, permainan edukatif, dinamika kelompok, objek asli, alat peraga, nyanyian, dan buku tulis. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui analisis dan interpretasi video, suara, dan foto proses mendongeng simulasi berdasarkan emosi, jawaban berupa kata-kalimat, dan perilaku anak.



### Daftar Pustaka

- Bialik, Maya., dkk. 2015. *Character Education for the 21st Century : What Should Students Learn?*. Boston: Center for Curriculum Redesign.
- Covey, Franklin. 2015. *Using Stephen R. Covey's The 7 Habits of Highly Effective People in Education: A review of academic literature on the principles taught in The 7 Habits of Highly Effective People and how these principles apply in the education setting.*
- Hamdi, Muchlis., dan Ismaryati, Siti. Tanpa Tahun. *Metodologi Penelitian Administrasi.*
- Hamilton, Martha., Weiss, Mitch. 2005. *The Power of Storytelling in the Classroom.*
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2017. *Indonesia Peringkat Tertinggi Kasus Kekerasan di Sekolah*, (Online), (<http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-peringkat-tertinggi-kasus-kekerasan-di-sekolah/>), diakses 20 Maret 2018.
- Kosasih. 2015. *Strategi Belajar dan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Yrama Widya.
- Park, Nansook., Peterson, Christoper., Seligman, Martin. 2004. *Strengths of Character and Well-Being*. Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 23, No. 5, pp. 603-619.
- Riyana, Cepi. Tanpa Tahun. *Komponen-Komponen Pembelajaran.*
- Schiffrin, Holly., Nelson, Katherine. 2008. *Stressed and Happy? Investigating the Relationship Between Happiness and Perceived Stress*. Journal of Happiness Studies.
- Schiller, Lauren., dan Hinton, Christina. 2016. *Benarkah Siswa yang Lebih Bahagia di Sekolah Memiliki Nilai Akademis Lebih Tinggi?*, (Online), ([http://www.penerbitduta.com/read\\_article/2016/8/benarkah-siswa-yang-lebih-bahagia-di-sekolah-memiliki-nilai-akademis-yang-lebih-tinggi#.WuVf0UxuLmQ](http://www.penerbitduta.com/read_article/2016/8/benarkah-siswa-yang-lebih-bahagia-di-sekolah-memiliki-nilai-akademis-yang-lebih-tinggi#.WuVf0UxuLmQ)), diakses 20 Maret 2018.
- Sustainable for Development Goals (SDGs). 2017. *Sustainable Development Goals with Happiness / a linkage to cultures and traditions*, (Online), (<http://www.sdgyramid.org/sustainable-development-goals-with-happiness-a-linkage-to-cultures-and-traditions/>), diakses Mei 2018.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terbit 22 Oktober 2002.
- United Nations Children's Fund (UNICEF) INDONESIA. 2012. *Ringkasan Kajian: Pendidikan dan Perkembangan Anak Usia Dini.*
- Walker, D. Timothy. 2017. *Teach Like Finland: Mengajar Seperti Finland*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yunanto, Reza. 2017. *Miris, 84 Persen Pelajar Mengalami Kekerasan di Sekolah*, (Online), (<https://kriminologi.id/renata/anak/miris-84-persen-pelajar-mengalami-kekerasan-di-sekolah>)

## Warisan Pendidikan dan Kebudayaan yang Terlupakan: Metode Sariswara Karya Ki Hadjar Dewantara

**Ria Putri Palupijati**

Duta Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa

Email: ria.palupijati@gmail.com

### Abstrak

Tujuan dari makalah ini untuk mendeskripsikan kembali pentingnya pengembangan metode sariswara. Metode sariswara saat ini mengalami tantangan atas perubahan zaman. Modernisasi memaksa pemangku kebijakan untuk mengubah arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan zaman. Reformasi pendidikan dan kebudayaan bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada, kenyataan melupakan salah satu pemikiran pendidikan dan kebudayaan yang telah digagas oleh Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hadjar Dewantara.

Metode penulisan yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil kajian didapat melalui sumber data tertulis dan tidak tertulis. Sumber data tertulis diperoleh dari referensi buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lain-lain. Sumber data tidak tertulis diperoleh dari artefak yang ada di Museum Dewantara Kirti Griya dan pihak-pihak yang berkompeten dalam penerapan metode sariswara.

Metode ini penting untuk dikembangkan salah satu cara yang tepat untuk membentuk karakter anak melalui lagu, sastra dan cerita. Dengan sariswara, anak tidak hanya mendapat pengetahuan kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik. Penerapan metode sariswara memudahkan anak mengenal lingkungan budaya sesuai kodrat alamnya.

**Kata Kunci:** Sariswara, Pemikiran Ki Hadjar Dewantara, Konsep Pendidikan dan Kebudayaan

### Pendahuluan

Sistem kebudayaan yang memuat nilai-nilai luhur suatu bangsa akan terwariskan kepada generasi selanjutnya jika negara mempunyai sistem pendidikan yang mendukung pelestarian kebudayaan tersebut. Dengan pendidikan akan tercipta *transfer of knowledge* dan *transfer of values*. Masalahnya, pelestarian sistem kebudayaan bukan menjadi masalah serius menurut pembuat kebijakan pendidikan. Pendidikan dan kebudayaan sering dijauhkan dalam implementasinya. Padahal jika dilihat dari pemikiran para pendiri negara, hal tersebut merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika membangun fondasi sistem pendidikan yang meninggalkan fondasi sistem kebudayaan, identitas bangsa akan semakin melemah.

Salah satu penyebab utama identitas bangsa yang melemah ini dikarenakan adanya arus globalisasi dan modernisasi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di tingkat internasional yang terus diintervensi oleh Barat untuk mengikuti sistem mereka. Identitas bangsa yang lemah ini membuat Indonesia tidak mempunyai landasan untuk merencanakan sistem pendidikan dimasa depan. Perencanaan sistem pendidikan seharusnya sesuai dengan

budaya masyarakat Indonesia bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Barat. Hadisukatno, pencipta lagu dolanan anak yang juga pamong di Tamansiswa mengatakan bahwa mendekatkan anak kepada kebudayaan sendiri, yang berarti juga mendidik anak itu menurut kodratnya dengan keadaan alam yang melingkunginya, adalah dasar didikan Tamansiswa, untuk menghindari salah kejadian sesat, jalan menjadi orang yang separuh matang, karena banyak meniru-niru kebudayaan bangsa lain (Hadisukatno, 1980: 155).

Reformasi sistem pendidikan mengalami penyempitan makna, dari hakikat tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan seharusnya memerdekakan jiwa raganya menjadi pendidikan yang hanya mengejar ranking (bersifat material). Pendidikan dipersempit pula artinya menjadi sekolah yang penuh aturan dan memasung kreatifitas atau kemerdekaan anak. Kondisi ini semakin memperparah Indonesia menjadi budak bangsa lain. Pengukuran keberhasilan juga ditentukan oleh indikator yang telah ditetapkan oleh Barat. Padahal sampai kapanpun Indonesia tidak akan mencapai indikator yang telah ditentukan tersebut karena perbedaan kondisi sosial dan budaya.

Fokus terhadap apa yang diinginkan oleh Barat menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kurang percaya diri akan potensi bangsanya. Potensi dari kebudayaan dan kearifan lokalnya yang majemuk. Pada akhirnya, potensi tersebut akan hilang ditengah ketidakpercayaan diri bangsa Indonesia yang memaksakan diri mengikuti Barat. Indonesia menjadi bangsa yang mudah dipengaruhi oleh ideologi bangsa lain sehingga menyebabkan mudah terjadinya konflik vertical maupun horizontal yang akan merusak persatuan dan kesatuan NKRI.

Sebenarnya, metode pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kebudayaan bangsa Indonesia yang majemuk telah digagas oleh Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara yang selama ini hanya dikenal dengan metode among dan slogan Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani ternyata masih mempunyai warisan yang belum digali secara maksimal oleh bangsa Indonesia. Warisan yang dimaksud yaitu metode sariswara. Metode ini sebenarnya berawal dari masa pengasingan Soewardi Soerjaningrat di negeri Belanda. Sariswara merupakan cara mengkonversikan not *pentatonic* (gamelan) ke nada *diatonic* (piano).

Selanjutnya cara ini banyak dikembangkan untuk mengkreasikan tembang-tembang khas daerah masing-masing wilayah di Indonesia. Daerah yang mengembangkan metode itu paling banyak di Jawa. Dengan metode ini Ki Hadjar Dewantara sebenarnya mempunyai cita-cita untuk menciptakan pucuk kebudayaan lokal yang nantinya dirumuskan dalam satu puncak kebudayaan nasional atau dengan metode sariswara ini diharapkan dapat menyatukan kebudayaan Indonesia. Hubungan kesenian dengan pendidikan dan kebudayaan di Tamansiswa memang istimewa (Dewantara, 1954)<sup>15</sup>. Di Pendhapa Agung Tamansiswa terdapat tulisan di tangga pendhapa, "*Ambuka laras angesti wiji*", *ambuka laras* artinya membuka suara (menembang, menyanyi, melakukan kesenian) sebagai puncak dari *angesti wiji* yang artinya mendidik. Dikatakan lebih lanjut oleh Ki Hadjar Dewantara sejak berdirinya Perguruan Tamansiwa tahun 1922, perguruan ini sudah memberikan pendidikan kesenian dengan cara pemberian pengajaran permainan anak-anak dengan tembang (lagu) kepada anak-anak yang dinamakan dengan metode sariswara (Dewantara, 1954). Namun metode sariswara ini sering dilupakan bahkan tidak banyak dipahami oleh generasi saat ini. Oleh karena itu makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode sariswara yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara.

## Metode Penulisan

Metode penulisan yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil kajian didapat melalui sumber data tertulis dan tidak tertulis. Sumber data tertulis diperoleh dari referensi

<sup>15</sup>Pidato pada Permusyawaratan Pendidikan Kesenian Tamansiswa di Yogyakarta pada tanggal 14 Mei 1954

buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan arsip tertulis yang ada di Perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya. Sumber data tidak tertulis diperoleh dari artefak yang ada di Museum Dewantara Kirti Griya, pihak-pihak yang berkompeten dalam penerapan metode sariswara dan kegiatan yang terkait dengan metode sariswara di Tamansiswa. Setelah semua sumber diperoleh penulis melakukan pengecekan data dengan triangulasi data satu dengan yang lain. Selanjutnya, penulis melakukan analisis data yang telah diperoleh. Berikut merupakan penjabaran dari metode penulisan yang dilakukan;

1. Pengumpulan data: Artikel Sariswara di Majalah Pusara (Persatuan Tamansiswa), Buku Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan, Buku Sariswara, Artefak di Museum Dewantara Kirti Griya, dan kegiatan-kegiatan di Tamansiswa yang berkaitan dengan sariswara.
2. Triangulasi data : Selanjutnya, dilakukan triangulasi data untuk mendapatkan data yang valid. Kesesuaian antara dokumen, wawancara maupun observasi di lapangan.
3. Analisis data : Data dianalisis untuk mendeskripsikan metode sariswara, pentingnya metode sariswara tersebut dan posisi metode sariswara saat ini.

Setelah dilakukan analisis kemudian ditarik kesimpulan deskripsi dari metode sariswara untuk memudahkan pembaca memahami warisan yang terlupakan dari Ki Hadjar Dewantara ini.

### Hasil Pemikiran

Sariswara awalnya diciptakan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) untuk mengkonversikan notasi gamelan (*pentatonic*) ke notasi not balok (*diatonic*). Tembang pertama yang dikonversikan olehnya yaitu tembang Kinanti Sandung (*Kinantie Sandoong*) karya KGPA Mangkunagoro IV diubah dari nada gamelan ke nada piano. Kinanti sandung ini dikonversikan ke nada *diatonic* karena kerinduan tanah air yang pada saat itu di tanah pengasingan (Belanda).

Kinanti Sandung (Kinantie Sandoong) Karya KGPA Mangkunagoro IV	
Milder ing rat angelangut	Aku mengembara di dunia nan luas
Lelana njajah nigari	
Mubeng tepining samodra	Berkelana menyaksikan keindahan tanah air
Sumengka hagranning wukir	Kukira tepi samodra
Analasak wana wasa	
Tumurun ing jurang trebis	Kudaki puncak gunung-gunung
Sayekti kalamun suwung	Kujelajah rimba raya

Tangeh mriba kang warni	Kuturuni jurang-jurang dalam
Lan sira pujaning wang	
Manawa dasaring bumi	Namun segalanya terasa kosong belaka
Miwah                    luhuring ngangkasa	Karena tiada yang dapat menyamai keindahanmu
Tuwin jroning jalanidi	Hai jantung hatiku!
	Baik di dalam bumi,
Iku sapa ta kang weruh	Di angkasa nan luas,
Nanging kiraning tyas mami	Maupun di dasar samodra
Sanadyan ing tribawana	
Anaa kang mada warni	Siapakah gerangan yang tahu!
Maksih sumeh semu sira	Tetapi menurut keyakinanku
Lurus larasing respati	Sekalipun di ketiga buwana tadi
	Ada yang menyerupai wajahmu
	Namun tak akan mungkin menyamaimu
	Karena kesempurnaan perpaduan keindahanmu

Sumber: Dewantara, 1961: 151

Sariswara ini menunjukkan musikalisasi yang tinggi seorang Soewardi Soerjaningrat. Seiring berjalannya waktu kemudian Ki Hadjar Dewantara membukukan sariswara ini. Buku berjudul Sariswara pada saat itu sangat laku dipasaran bahkan *royalty* dari penjualan buku itu digunakan Ki Hadjar Dewantara untuk membeli sebidang tanah beserta rumah yang sekarang menjadi Museum Dewantara Kirti Griya di Jalan Tamansiswa No. 31. Buku ini berisi gubahan tembang-tembang macapat dari notasi gamelan (pentatonis) ke notasi diatonis.

Sariswara inilah yang selanjutnya menginspirasi Ki Hadjar Dewantara untuk menciptakan suatu metode pendidikan di Tamansiswa berbasis kebudayaan – seni local. Salah satu karakteristik pendidikan yang ada di Tamansiswa pada waktu itu adalah pendidikan berbasis kebudayaan – kesenian lokal untuk membentuk karakter siswa. Kesenian lokal mencakup banyak hal diantaranya seni musik, seni tari, seni pertunjukan, seni teater (sandiwara) dan lain-lain. Seni yang menjadi salah satu hal yang pokok di Tamansiswa yaitu seni musik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan “*gending*” diartikan sebagai seni suara dan musik Jawa akan menghaluskan budi. Alat untuk mendapatkan kehalusan budi ialah halusnya pendengaran. Kesenian menurut Ki Hadjar Dewantara dapat meluhurkan budi manusia, dalam hal ini Ki Hadjar Dewantara bukanlah bermaksud mendorong semua siswanya menjadi seorang seniman namun dengan seni dapat mengolah jiwa dan raga anak, seni juga dapat memerdekakan jiwa anak.

Metode sariswara sangat berguna karena menggabungkan pelajaran bahasa, cerita dan lagu (Dewantara, 1936). Dengan metode ini akan memudahkan penerimaan jiwa mengenai segala yang diberikan secara asosiatif. Dalam metode ini siswa juga akan mendapatkan esensi dari wirama, wiraga dan wirasa. Dr. Rudolf Steiner (dalam Dewantara, 1937: 312-313) menyebutkan wirama dapat memudahkan pekerjaan jasmani, wirama dapat menyokong gerak pikiran, wirama dapat mencerdaskan budi pekerti dan wirama menghidupkan kekuatan dalam jiwa manusia.

Pencatatan lagu dolanan anak di Tamansiswa dinamakan sariswara (Sindoesawarno, 1980: 141). Dalam perkembangan selanjutnya metode sariswara ini dipraktekan dengan cara mengajarkan tembang dolanan anak yang sesuai dengan daerah masing-masing untuk anak usia TK-SD (Taman Indria-Taman Muda), sedangkan langen cerita (semacam *drama musical*) untuk anak SMP-SMA (Taman Dewasa-Taman Madya). Lagu dolanan anak menurut Ki Hadjar Dewantara sangatlah penting berikut merupakan masam-macam lagu anak-anak di Jawa pada khususnya, (Dewantara, 1961: 155), 1) dinyanyikan pada permainan keolahragaan, 2) nyanyian tidak untuk permainan olahraga, 3) nyanyian yang dinyanyikan tidak bersamaan dengan permainan, 4) nyanyian yang bersifat mendidik.

Permainan kanak-kanak Jawa yang banyak diulas di Tamansiswa bukan berarti menganjurkan permainan Jawa untuk dipraktekan di semua daerah namun harus ada pengembangan sesuai dengan ciri khas kebudayaan daerah. Banyak diulas di Jawa karena kebetulan Ki Hadjar dan teman-teman seperjuangannya pada saat itu tinggal di Jawa. Selain itu, permainan kanak-kanak bermanfaat untuk mengajarkan keberanian dalam bertindak, membesarkan inisiatif, disiplin, berwatak kesatria, dan kegembiraan hidup yang tak ternilai (Hadisukatno, 1980: 165).

Sedangkan untuk langen cerita akan banyak pelajaran yang dapat dipetik diantaranya, mengolah rasa sesuai peran yang dijalankan, sebagai alat pendidikan dan kebudayaan, memberikan pelajaran yang diberikan perlambang-perlambang tertentu, kebajikan, keindahan, nilai kemasyarakatan dan nilai keagamaan masuk didalamnya. Jika selama ini pemerintah kebingungan menerapkan pembelajaran yang holistik sebenarnya Ki Hadjar Dewantara telah merumuskannya dalam metode sariswara ini.

Tantangan yang terjadi saat ini, metode sariswara ini banyak tidak dipahami oleh pemangku kebijakan saat ini sehingga generasi muda tidak mengenal dengan metode pendidikan ini. Sebenarnya, pengembangan metode sariswara dapat dilakukan dengan menggunakan asas Tri-kon. Kontinuitet berarti kehidupan budaya merupakan lanjutan dari kehidupan kebudayaan sebelumnya. Jangan ulangan ataupun tiruan dari hidup bangsa lain. Konvergensi berarti menghindari hidup menyendiri (terisolasi) dan untuk menghindarinya diperlukan pertemuan kebudayaan dengan bangsa lain. Konsentrisitet berarti bahwa sesudah bersatu dengan bangsa lain, jangan sampai kehilangan jati diri bangsa kita.

Janganlah puas dengan peninggalan nenek moyang. Ingatlah bahwa seni, semua seni, tidak lepas dari jiwa manusia di masing-masing zamannya (Dewantara, 1954). Harus ada pengembangan dari metode sariswara ini sesuai zamannya. Dibutuhkan pengkajian khusus untuk dapat mengembangkan metode ini di seluruh daerah di Indonesia. Metode ini penting untuk dikembangkan salah satu cara yang tepat untuk membentuk karakter anak melalui lagu, sastra dan cerita. Dengan sariswara, anak tidak hanya mendapat pengetahuan kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik. Penerapan metode sariswara memudahkan anak mengenal lingkungan budaya sesuai kodrat alamnya.

## Kesimpulan

Di tanah pengasingan, Soewardi Soeryaningrat menciptakan sariswara. Sariswara adalah cara untuk mengkonversikan not pada gamelan (*pentatonic*) ke not pada piano (*diatonic*). Tembang yang pertama kali dikonversikan yaitu tembang Kinantie Sandung karya KGPA Mangkunagoro IV. Dalam perkembangannya, Ki Hadjar Dewantara menginisiasi Perguruan Tamansiswa sebagai ruh pendidikannya digunakan metode sariswara. Dengan seni dapat meluhurkan budi siswa. Dapat dilihat pula di Pendhapa Tamansiswa tertulis ambuka laras angesti wiji, dengan kesenian untuk mendidik siswa. Selanjutnya, metode sariswara ini dikembangkan di tingkatan pendidikan di Tamansiswa. Untuk TK-SD menggunakan tembang dolanan anak untuk mendidik siswa sedangkan untuk SMP-SMA menggunakan langen cerita untuk mencapai keluhuran budi siswa.

Diperlukan pengembangan metode ini yang sesuai dengan zamannya. Namun sayangnya banyak generasi saat ini yang tidak mengenal metode ini sehingga sering dianggap tidak penting dan tidak menjadi keharusan untuk mengembangkannya. Padahal ini adalah upaya untuk mendidik anak bahkan mencapai puncak kebudayaan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan generasi muda saat ini dapat sadar dan mengembangkan metode sariswara ini untuk persatuan kebudayaan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Dewantara, Ki Hadjar. 1936. *Sandiwara sebagai Alat Pendidikan*. Majalah Wasita Tahun ke II No.6 Juni 1936.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1941. *Mempersatukan Notenschrift Gending: Ki Hadjar Dewantara Mempertahankan Systeem Sariswara*. Majalah Pusara hlm 4-5
- Dewantara, Ki Hadjar. 1941. *Metode Sariswara dan Bedanya dengan Kapatihanschrift*. Majalah Pusara April 1941 XI No,4.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1961. *Ki Hadjar Dewantara Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka Bagian II Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1964. *Serat Sariswara: Djilid I Sekaran Lare, Sekar Macapat, Sekar Gending*, Bawa Tuwin Lagon. Jakarta: Pradnjaparamita.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1977. *Ki Hadjar Dewantara Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka Bagian I Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa
- Hadisukatno. 1980. *Permainan Kanak-kanak sebagai Alat Pendidikan dalam 30 Tahun Tamansiswa*. Yogyakarta: Madjelis Luhur Tamansiswa.
- Sindoesawarno. 1980. *Sariswara dalam Tamansiswa dalam 30 Tahun Tamansiswa*. Yogyakarta: Madjelis Luhur Tamansiswa.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KONGRES IVPENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN

**Dengan Tema**  
**Refleksi 20 Tahun Reformasi Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan**  
**Diselenggarakan atas Kerjasama Universitas Negeri Yogyakarta**  
**dan PTN-PTS se-DIY**

**Di Universitas Negeri Yogyakarta, 14 Mei 2018**

Setelah menyimak sambutan dari Ketua Panitia, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan arahan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X (yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah DIY), presentasi dan diskusi dari para narasumber dalam sidang pleno dan sidang-sidang komisi paralel, maka dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Refleksi 20 Tahun Reformasi Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan memiliki arti strategis dalam rangka mengevaluasi secara kritis sekaligus memproyeksi masa depan filosofi, ideologi, kebijakan, sistem, kelembagaan, kurikulum, sumber daya dan lingkungan strategis Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan agar sejalan dengan cita-cita, tujuan dan dasar negara.
2. Reformasi telah berlangsung 20 tahun, tetapi sesungguhnya belum pernah terjadi reformasi pendidikan yang sistemik-fundamental apalagi bila disalingkaitkan dengan pengajaran dan kebudayaan. Kenyataan yang terjadi barulah pergantian kurikulum yang bersifat tambal sulam.
3. Reformasi 1998 sesungguhnya hanya merupakan kelanjutan periode sebelumnya sejak tahun 1967 yang dipengaruhi oleh UU Penanaman Modal Asing dan Liberalisasi. Pada tahun 1998, yang terjadi hanyalah reformasi pada pimpinan di atas, tidak sampai menjangkau ke bawah. Reformasi juga tidak sampai pada tataran filosofi, nilai, dan kebijakan yang sekedar melanjutkan tahun sebelumnya (liberalisasi). Puncak intervensi asing adalah Amandemen UUD 1945 pada tahun 2002 dan UU Sistem Pendidikan Nasional 2003. Contoh dampak reformasi ini adalah hilangnya kemampuan ilmu sejarah dan ilmu bumi pada anak didik yang berujung pada pemahaman Pancasila yang semakin melemah.
4. Filosofi Pendidikan Indonesia yang dicanangkan oleh para pendiri negara adalah untuk membangun karakter bangsa (*national and character building*), sementara itu gerakan reformasi cenderung menekankan pendidikan untuk mendidik individu, bukan mendidik bangsa. Akibatnya, pendidikan dewasa ini dipersempit terlalu mengarah pada pendidikan pikiran (intelektual), kurang memajukan budi pekerti, kekuatan batin (karakter) dan tubuh anak.
5. Pemahaman kebudayaan di era reformasi juga dipersempit pemaknaannya oleh para pengambil kebijakan, bukan konsep kebudayaan sebagaimana yang dimaksud Ki Hadjar Dewantara. Contoh dari kebijakan ini antara lain: upaya pemisahan Kementerian Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan. Kebudayaan dipersempit maknanya menjadi kesenian yang dapat dijadikan komoditas ekonomi dan mendukung sektor pariwisata. Untunglah pada akhir-akhir ini kebudayaan dijadikan satu kembali dengan pendidikan.



6. Sistem Pendidikan Nasional di era reformasi diawali dengan amandemen UUD 1945 Pasal 31 (yang mengatur alokasi anggaran pendidikan diamanatkan minimal 20% dari APBN) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dan Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, dan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Agenda utama reformasi pendidikan adalah demokratisasi dan desentralisasi.
7. Pada era reformasi telah dilahirkan beberapa kebijakan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah antara lain Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dirintis sejak 2004 dan dimantapkan dalam kebijakan Kurikulum 2006, dan Kurikulum 2013 beserta revisinya tahun 2016. Kebijakan kurikulum 2013 dengan revisinya ini masih menyisakan sejumlah masalah, karena terlalu sentralistik dan dominasi birokrasi.
8. Kurikulum pada pendidikan tinggi yang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 diapresiasi sudah selangkah lebih maju karena pemerintah pusat hanya mengatur prinsip dasar secara nasional dan memberi kebebasan pada masing-masing perguruan tinggi untuk mengembangkan potensi dan kearifan lokalnya.
9. Sehebat apapun sistem dan kurikulum, guru tetap menjadi faktor yang paling menentukan, untuk itu perlu adanya kesadaran kritis, bahwa kita menghadapi persoalan yang serius terkait dengan kualitas maupun kuantitas guru, sebagai contoh ada beberapa sekolah yang guru tidak tetap lebih banyak dibandingkan guru tetap.
10. Metode pembudayaan dan pelebagaan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda dapat ditawarkan beberapa tahapan metode, yaitu: (1) *syariat* (untuk TK dan sederajat), (2) *hakikat* (untuk SD dan sederajat), (3) *tarikat* (untuk SMP dan sederajat), dan (4) *makrifat* (untuk SMA/K dan sederajat).
11. Wahana pembudayaan dan pelebagaan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda dapat melalui: (a) pembentukan keluarga Pancasila, (b) mem-Pancasila-kan Pendidikan Nasional; dan (c) Mem-Pancasila-kan masyarakat.

## B. Rekomendasi

1. Reformasi hendaknya dipahami bukan sekedar perubahan untuk perubahan, namun perubahan yang berorientasi masa depan berdasarkan cita-cita, tujuan dan dasar negara. Untuk itu perlu diusulkan adanya "*national assessment*" untuk memetakan kondisi dan permasalahan pendidikan atas dasar ukuran kemajuan yang akuntabel. Selain itu, program-program reformasi pendidikan seharusnya diderivasi dari sistem pendidikan yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945, dan menguatkan kembali konsep Tri Sakti yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam kebudayaan.
2. Perlu segera melakukan revisi atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam rangka mengembalikan sistem pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan agar selaras dengan cita-cita, tujuan dan dasar negara serta mampu mengantisipasi perkembangan jaman.
3. Kebijakan Pendidikan Nasional tentang Kurikulum 2013 dengan revisinya diharapkan tidak terlalu sentralistik dan mematikan kreativitas potensi daerah, artinya pemerintah pusat seharusnya hanya mengatur prinsip-prinsip dasar saja, sementara pengembangannya diserahkan kepada kearifan dan potensi daerah, serta perlu mempertimbangkan perubahan dunia yang ekstensif dan cepat, ketidakpastian, dan dinamika masyarakat yang tinggi.
4. Perlu ada upaya terobosan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas guru secara sistemik, fundamental, dan berkelanjutan.

5. Optimalisasi pengembangan lingkungan strategis pendidikan di keluarga dan di masyarakat perlu didukung oleh pemerintah dan segenap pihak terkait, sebagai pendukung pendidikan di sekolah.

Demikian kesimpulan dan rekomendasi Kongres IV Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tahun 2018. Hasil diskusi dalam sidang panel menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen ini.

Yogyakarta, 14 Mei 2018  
**An. Tim Perumus**